PRAKTEK PENELITIAN KUALITATIF:

Pengalaman dari UGM

editor:

Bayu Dardias Kurniadi

PRAKTEK PENELITIAN KUALITATIF:

Pengalaman dari UGM

PRAKTEK PENELITIAN KUALITATIF:
Pengalaman dari UGM

Editor: Bayu Dardias Kurniadi

Research Centre for Politics and Government (PolGov)
Jurusan Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada

Praktek Penelitian Kualitatif:
Pengalaman dari UGM

xxii + 310 halaman; 145 x 207 cm
ISBN 978-602-96762-4-2

Editor: Bayu Dardias Kurniadi

Sampul dan Perwajahan: Oryza Irwanto

Research Centre for Politics and Government (PolGov)
Jurusan Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada

Jl. Socio Justicia 2 Bulaksumur Yogyakarta 55281
Telp: +62 274 563365 ext 212
email <polgov@ugm.ac.id> <polgov.ugm@gmail.com>
“tersedia versi online yang dapat didownload gratis di www.jpp.fisipol.ugm.ac.id

Introduction

Bayu Dardias Kurniadi, M.A, M.Pub.Pol

Buku yang ada di hadapan anda ini adalah kumpulan tugas mahasiswa Jurusan Politik dan Pemerintahan (JPP) Fisipol UGM pada pada semester lima proses kuliah mereka. Tugas-tugas tersebut dipakai sebagai salah satu penilaian akhir dalam matakuliah Metode Analisa Kualitatif yang saya ampu bersama Arie Ruhyanto, M.Sc. Dalam matakuliah yang ditempuh dalam 4 bulan ini, mahasiswa dituntut untuk mampu melakukan dua hal, pertama memahami prinsip dan konsep dasar metode penelitian kualitatif dan kedua mampu mengaplikasikan konsep-konsep tersebut ke dalam penelitian yang sebenarnya. Pada tengah semester, mahasiswa diuji untuk memahami secara konseptual metode penelitian kualitatif dan pada akhir semester, mahasiswa secara berkelompok melakukan dan mempresentasikan hasil penelitian sederhana yang menggunakan metode penelitian kualitatif.

Dalam keseluruhan desain matakuliah metodologi yang ada di JPP yang diberlakukan sejak 2006, matakuliah Metode Penelitian Kualitatif diberikan setelah mahasiswa memperoleh beberapa matakuliah metodologi sebelumnya. JPP berkomitmen untuk memberikan basis metodologi yang kuat bagi lulusan JPP agar memiliki kemampuan akademik yang mumpuni. Pada semester pertama, mahasiswa memperoleh matakuliah Ilmu Sosial Dasar yang memberikan pemahaman filosofis tentang hakikat ilmu. Mahasiswa diajak untuk mampu mengidentifikasi keterkaitan tiga hal yaitu basis ontologis, epistemologis

dan aksiologis ilmu. Pada semester kedua, mahasiswa juga dikenalkan dengan Metode Penelitian Sosial yang memberikan pemetaan dasar tentang (setidaknya) dua basis besar dalam penelitian yaitu Kualitatif dan Kuantitatif. Pada semester berikutnya, mahasiswa mendapatkan matakuliah Metodologi Ilmu Politik dan Pemerintahan yang mengidentifikasi penelitian dengan karakter politik dan pemerintahan termasuk pendekatan-pendekatan dominan. Pendalaman lebih lanjut akan dilakukan dalam matakuliah Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kuantitatif. Pada bagian akhir, mahasiswa akan difasilitasi untuk membuat proposal skripsi dalam matakuliah Perencanaan Penelitian. Seluruh proses metodologi tersebut memberikan pemahaman politik yang berkerja dalam tiga kluster: negara, intermediary, society. Harapannya, dengan adanya fasilitasi proposal skripsi pada akhir semester keenam, mahasiswa dapat lulus lebih cepat kurang dari empat tahun atau di akhir semester kedelapan.

Dalam proses perkuliahan di Metode Analisa Kualitatif, mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih topik penelitian yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Topik tersebut, waluapun nampak sederhana, sesungguhnya menyimpan isu yang menarik apabila dikaji secara serius dalam sebuah penelitian. Namun demikian, penelitian ini diarahkan untuk dapat menyingkap sisi politik dari setiap topik yang diteliti yang setidaknya menyajikan bagaimana kuasa diciptakan, direproduksi, diperebutkan dan didistribusikan. Aktor yang ada dalam setiap topik tersebut dibayangkan sebagai “political animal” yang selalu bersaing untuk mempertahankan atau memperluas kuasa yang dimiliki.

Topik-topik yang dipilih mahasiswa tersebut dapat diklasifikasi dalam beberapa tema besar untuk memudahkan pembacaan. Seluruh topik ini juga berada di Yogyakarta yang memudahkan proses penelitian berlangsung. Tema yang paling dominan adalah tema politik yang berkaitan dengan masyarakat urban yang disajikan dalam lima bab pertama. Topik yang diangkat dalam kategori pertama ini adalah parkir, sampah, mural, PKL dan supporter sebakbola. Tema berikutnya yang diteliti berhubungan dengan mahasiswa, yaitu kantin Fisipol UGM dan BlackBerry yang

menunjukkan kebutuhan dasar mahasiswa untuk mendaptkan makanan murah dan berkomunikasi. Dua tema terakhir yang juga dekat dengan mahasiswa, mengangkat isu tentang Warung Bubur Kacang Ijo (Hijau) yang tersebar di seluruh Yogyakarta. Dua hal yang diteliti dalam warung Burjo ini adalah jaringan kekerabatan dan politik identitas.

Pada bab tentang parkir di Malioboro, para penulis menunjukkan bagaimana negara gagal dalam mengelola kepentingan publik yaitu parkir. Parkir di Malioboro merupakan kantung parkir paling ramai di Yogyakarta yang sebenarnya dapat memberikan pendapatan yang signifikan bagi daerah. Sayangnya, parkir lebih dikuasai oleh informal aktor yang menjadikan ruang publik tersebut sebagai arena untuk mendapatkan keuntungan material. Aktor informal ini membentuk paguyuban yang memiliki kekuatan signifikan dalam pengelolaan parkir. Pembagian pendapatan parkir yang hanya seperempatnya diberikan kepada pemerintah Kota Yogyakarta menunjukkan adanya orang kuat yang menjadikan urusan publik menjadi urusan privat. Milyaran rupiah uang parkir didapatkan oleh juru parkir tiap tahunnya. Dengan lemahnya pengawasan dan kontrol pemerintah terhadap parkir, lahan yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh orang banyak melalui peningkatan PAD, justru menjadi ladang subur bagi berlangsungnya politik premanisme.

Berangkat dari topik yang mirip dengan bab pertama tentang hadirnya informal aktor dalam pengelolaan urusan publik, bab kedua ingin melihat relasi kuasa yang terjadi antara pengelola TPA Piyungan dengan pemulung yang jumlahnya sekitar 400 orang. TPA Piyungan merupakan tempat akhir pembuangan sampah bagi Kota Yogyakarta, Kab. Sleman dan Kab. Bantul yang dikelola bersama dengan membentuk UPTD TPA Piyungan. Menariknya, berbeda dengan bab pertama, hadirnya pemulung justru membantu pemerintah dalam mengelola sampah dengan memanfaatkan barang yang masih dapat dipergunakan. Pengelolaan sampah yang hampir tanpa teknologi mutakhir menjadikan TPA Piyungan sebagai timbunan akhir sampah tanpa usaha untuk me-re-use dan me-re-cycle sampah-sampah yang masih dapat dimanfaatkan. Tiap hari, sekitar

8 ton sampah berhasil dikurangi oleh pemulung untuk menurunkan tingkat kepadatan TPA Piyungan yang hampir mendekati kapasitas maksimalnya. Jumlah itu belum termasuk sampah yang berkurang akibat dimakan ribuan sapi yang digembalakan di tumpukan sampah tersebut.

Bab ketiga membahas tentang mural yang berkembang menjadi ruang untuk menyalurkan kepentingan publik. Mural tidak hanya dilihat sebagai upaya untuk menjadikan kota lebih nyaman dipandang tetapi sudah bergeser menjadi arena bagi sosialisasi berbagai kepentingan. Selain itu mural juga dibuat untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat. Mulai dari pesan umum untuk berhati-hati dalam berlalu lintas, sampai upaya untuk menarik simpati politik orang-orang yang memperhatikannya. Seandainya toh seluruh keinginan untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut gagal, mural tetap nyaman untuk dinikmati dan menciptakan senyum bagi siapapun yang melihatnya. Bisa jadi, kualitas kenyamanan sebuah kota bisa dilihat dari mural yang ada di kota tersebut, karena mural menunjukkan tingkat kebudayaan para penghuni kota.

Bab keempat meneliti peranan paguyuban dalam komunitas PKL (Pedagang Kaki Lima/*Street Traders*) di Jalan Kaliurang KM 4,5 yang membagi UGM menjadi Barat dan Timur. Setiap malam, kawasan sepanjang satu kilometer mulai dari Selokan Mataram ini menjadi ajang mencari rejeki bagi puluhan PKL yang menjajakan makanan yang dibutuhkan lebih dari 43 ribu mahasiswa UGM. Paguyuban PKL diciptakan untuk mengelola dan membuat aturan main yang harus dipatuhi oleh masing-masing PKL, misalnya dengan tidak menyisakan sampah begitu lapak-lapak dibawa pulang. Paguyuban juga penting sebagai ruang untuk bersosialisasi, mencari tambahan modal dan menjadi kekuatan kelompok ketika berhadapan dengan pihak luar. Berbagai masalah PKL yang berjualan di Jalan Kaliurang ini didiskusikan dalam forum rutin yang diselenggarakan oleh paguyuban. Paguyuban menjadi ruang solusi masalah khas masyarakat Jawa yang menekankan pada konsep *Rukun* yang mengedepankan harmoni dan tolong menolong.

Bab lima akan membahas gerakan politik yang dilakukan oleh dua kandidat DPRD Kota Yogyakarta dengan memanfaatkan jaringan supporter sepakbola Brajamusti. Pengaruh kekuatan politik yang menggunakan supporter sebakbola pendukung PSIM Yogyakarta ini ditengarai menjadi salah satu sebab pecahnya supporter PSIM menjadi dua: Brajamusti dan Maident (Mataram Independent) pasca pemilihan Presiden Brajamusti. Bab ini melihat bagaimana kandidat yang berlaga dalam pemilu legislatif yang sistemnya menekankan pada usaha individual dan bukan kelembagaan kepartaian, tidak cukup percaya diri dengan jaringan yang dimiliki oleh partainya masing-masing, tetapi berusaha mencari dukungan diluar mesin partai yang mencalonkannya.

Bab enam mendiskripsikan secara detail pengelolaan kantin di Fisipol UGM, mulai dari bagaimana awal mula pendirian kantin sampai dengan pengelolaan dan perkembangan kantin hingga saat ini. Penelitian ini ingin melihat pola relasi kuasa yang terjadi dalam pengelolaan kantin. Kantin yang dikelola oleh Dharma Wanita Fisipol UGM yang terdiri dari istri dan dosen perempuan Fisipol UGM, mensyaratkan beberapa indikator kesehatan dan kebersihan yang ketat yang diterapkan untuk setiap pedagang yang menyewa tempat. Kantin Fisipol UGM yang merupakan salah satu kantin terbaik dan menjadi rujukan bagi mahasiswa di fakultas lain di UGM digunakan tidak hanya semata-mata untuk menyediakan makanan sehat bagi mahasiswa tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga besar Fisipol UGM.

Bab tujuh membahas tentang penggunaan BlackBerry di kalangan mahasiswa Fisipol UGM yang difokuskan pada fungsi penggunaan dan gaya hidup. Peneliti menemukan bahwa gaya hidup mahasiswa tidak terlepas dari kuatnya pengaruh trend yang menggiring mahasiswa untuk menjadi konsumtif. Langganan BlackBerry yang mahal tidak diikuti oleh penggunaan yang maksimal terhadap fitur-fitur yang menjadi daya tarik. Bab ini juga akan menguraikan bagaimana kuatnya pengaruh pertemanan dalam menentukan gaya hidup mahasiswa yang memiliki belanja pulsa yang cukup besar.

Bab delapan melihat bagaimana sebuah usaha Warung Burjo mampu berkembang dan menggurita di Yogyakarta dengan mahasiswa sebagai pangsa pasar utama. Penelitian ini melihat kuatnya jaringan kekeluargaan dalam proses pengembangan usaha Burjo. Artinya, mekanisme bisnis yang ada dalam Warung Burjo dikembangkan dengan memanfaatkan kuatnya komunitas kekeluargaan yang didominasi oleh pengusaha asal Provinsi Jawa Barat, terutama daerah Kuningan. Keberhasilan salah seorang kerabat dalam berbisnis Warung Borjo, dapat menjadi *multiple effects* bagi anggota keluarga yang lain.

Bab terakhir mengungkapkan bagaimana budaya Sunda disosialisasikan dalam arena Warung Burjo dalam bentuk etika, estetika dan semiotika. Para penjual Burjo yang tetap menggunakan bahasa Sunda ditengarai sebagai salah satu upaya untuk mensosialisasikan budaya Sunda menghilangkan segregrasi budaya akibat warisan sejarah pada jaman Majapahit. Selain bahasa, pilihan warna dan penamaan Warung Burjo memberikan kesan tegas bagaimana politik identitas dipertahankan oleh pengusaha dan karyawan.

Salah satu hal penting yang harus dicatat dalam pembacaan terhadap buku ini adalah kesadaran bahwa metode penelitian kualitatif tidak hanya dilihat dari bagian di bagian awal tentang metodologi penelitian, tetapi dapat dilacak dari pembacaan terhadap seluruh hasil penelitian. Artinya bagaimana peneliti bertanya, menganalisis dan menuliskan hasil penelitiannya merupakan wujud penelitian kualitatif yang sebenarnya. Hasil pembelajaran penelitian kualitatif itu nampak dalam cara mengorganisasi dan penyusunan bagian-bagian dalam laporan penelitian. Walaupun dosen memberikan presentasi, bahan bacaan dan materi kuliah yang sama untuk seluruh mahasiswa peserta matakuliah ini, hasil pembelajaran masing-masing kelompok dalam meneliti dan menuliskan hasil penelitian menunjukkan variasi yang beragam. Pada akhirnya, metode penelitian memang tidak dimaksudkan untuk menciptakan sebuah pola yang seragam, tetapi justru memberikan ruang bagi setiap penelitian yang berbeda-beda karakternya.

Jika anda menemukan kekurangan dalam proses penelitian mahasiswa, hal itu bisa jadi karena terbatasnya waktu untuk melakukan penelitian. Setiap kelompok seharusnya memiliki waktu sekitar delapan minggu untuk melakukan seluruh proses penelitian. Tetapi dasyatnya bencana letusan Merapi yang terbesar sejak 1822 menyebabkan seluruh proses kuliah tatap muka ditiadakan selama empat minggu. Banyak mahasiswa yang melakukan diskusi online untuk tetap dapat bertukar fikiran tentang penelitian mereka. Ditambah dengan dua minggu waktu tambahan, setiap kelompok memiliki waktu sekitar enam minggu untuk menyelesaikan laporan mereka.

Terakhir, besar harapan saya agar buku ini bisa menjadi ajang pembelajaran bagi kita semua dan untuk mulai memperhatikan hal yang remeh temeh di dekat kita semua.

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Diagram

1

Politik Perparkiran di Malioboro:
Dominasi Aktor Informal dalam Pengelolaan Parkir

Adlan Cahyadi, Ahmad Zacky Fadlur R., Nailatalmuna N. A., Nuku N. S., Rani Rustiana, Yenny Retno Mallany, Yuliana Puspitasari

Yogyakarta merupakan salah satu kota yang menjadi tujuan pariwisata. Salah satu tempat yang dijadikan *land-mark* Kota Yogyakarta akan hal tersebut adalah Malioboro. Malioboro merupakan tempat yang dijadikan sebagai pusat pariwisata dan pemerintahan. Sebagai pusat pariwisata, Malioboro merupakan tempat berbelanja oleh-oleh khas Yogyakarta. Bisa berupa batik, makanan, kerajinan tangan dan lainya. Sebagai pusat pemerintahan karena di Malioboro terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) maupun Kota Yogyakarta serta terdapat gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan kantor Gubernur.

Dijadikanya Malioboro sebagai pusat ekonomi sekaligus pusat pemerintahan, akan membawa dampak tersendiri. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah masalah penataan lahan karena terjadi sentralisasi disatu tempat. Karena itu penataan lahan di Malioboro ini harus dikelola dengan baik. Jika tidak dikelola dengan baik akan menurunkan jumlah pengunjung dan akan berdampak secara langsung kepada pendapatan daerah.

Termasuk didalamnya masalah perparkiran. Tingginya intensitas aktivitas di kawasan pusat kota memberikan pengaruh terhadap tarikan lalu lintas kendaraan bermotor yang besar dari wilayah-wilayah sekitarnya. Akibatnya, banyak pengunjung yang menggunakan kendaraan dengan berbagai kepentingan berkonsentrasi dengan menggunakan tempat parkir di dalamnya, terutama parkir di sisi jalan (*on street parking*).

Dahulu semua lahan parkir ditangani oleh satu SKPD yaitu Dinas Perhubungan. Luasnya cakupan wilayah pengelolaan menyebabkan tidak terjalinya ke*efektivan* dan tidak adanya pemuasan terhadap pelayanan. Untuk memperbaiki masalah tersebut, Walikota Yogyakarta merombak pengelolaan. Dari satu SKPD yang menangani perparkiran menjadi tiga SKPD yang menangani perparkiran. SKPD yang terkait adalah Dinas Pasar untuk mengelola parkir dikawasan pasar, Dinas Pariwisata melalui sub bagianya yaitu Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Malioboro yang mengelola parkir dikawasan Malioboro dan Jalan Ahmad Yani, serta Dinas Perhubungan yang mengelola parkir diluar ketiga kawasan diatas. Disebarnya pengelolaan diatas diharapkan lebih memaksimalkan pelayanan sehingga dapat menarik perhatian dan minat pengunjung didaerah tersebut. Alasan lainya adalah karena konsumen disetiap tempat itu berbeda sehingga dalam penanganannya harus berbeda juga. Untuk parkir yang ada dipasar, tidak begitu mengandalkan pengelolaan yang rumit karena konsumen dipasar mayoritas adalah orang yang sama sehingga tukang parkir sudah hapal. Sedangkan parkir dikawasan Malioboro butuh pengelolaan ekstra karena Malioboro memiliki daya tarik yang lebih sehingga apabila pengelolaan tidak dikelola dengan baik akan mengurangi jumlah pengunjung.

Sebagai pengelola parkir di Malioboro, UPT Malioboro bertindak sebagai penyalur antara juru parkir dengan pemerintah. Dalam pengelolaan parkir di Malioboro juga melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan parkir tepi jalan (PERDA 2009). Pihak ketiga di sini adalah paguyuban. Peran paguyuban sebagai suatu organisasi informal yang mewadahi seluruh juru parkir yang ada di Malioboro dan Jalan Ahmad Yani.

Jika dilihat potensi *resources* yang dimiliki Malioboro dalam masalah parkir besar. Sebagai "lahan basah" dalam satu tahun di UPT Malioboro dapat menerima kurang lebih Rp 700 juta (KR Jogja 2010) juta. Dengan pembagian 25% untuk Pemda 75% untuk juru parkir. Dengan pekerjaan yang sederhana yaitu hanya mengawasi dan merapihkan barisan parkir, para juru parkir mendapat keuntungan berjuta-juta tiap harinya. Itulah yang menyebabkan lahan ini diperebutkan oleh banyak aktor. Hal inilah yang kami dalami dalam penelitian kali ini. Bagaimana banyak aktor yang terlibat dalam pengelola parkir baik aktor formal yaitu negara dan aktor informal atau aktor non negara. Disertai dengan bagaimana kontestasi politik para aktor dalam perebutan *resources* didalamnya.

Rumusan Masalah

Bagaimana politik perparkiran di Malioboro Kota Yogyakarta ?

Kerangka Konseptual

Rumusan masalah yang telah dijabarkan yaitu bagaimana politik perparkiran di Malioboro ini yang secara konseptual dijabarkan dalam alur pemikiran seperti ini. *Pertama*, pengelolaan perparkiran yang terjadi di Malioboro dengan melibatkan aktor formal dan aktor informal. *Kedua,* aktor informal yang mendominasi pengelolaan parkir dengan kontestasi perebutan *resources* yang ada. *Ketiga* peran negara sebagai aktor formal dalam pengelolaan parkir Malioboro yang lemah.

1. Pengelolaan Perparkiran

Parkir, sebagai sebuah kata yang disadur dari bahasa inggris, yakni *parking* atau *park-ing* (kata kerja) adalah kondisi atau kejadian dimana sebuah benda bergerak atau kendaraan berhenti di suatu tempat untuk waktu yang sementara. Aktifitas parkir hanya bisa dilakukan di tempat tertentu dan erat kaitannya dengan regulasi pemerintah daerah. Tempat untuk parkir, disebut juga tempat parkir atau area parkir. Tempat atau area parkir adalah sebuah area persinggahan kendaraan, baik itu kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Tempat atau area parkir merupakan sebuah area

milik pemerintah ataupun swasta, tergantung dari status kepemilikan lahan. Area parkir, khususnya di wilayah umum atau publik menjadi hak milik pemerintah dalam pengelolaannya, sedangkan di area milik swasta, menjadi kewenangan pihak non-pemerintah dalam pengaturannya. Suatu kegiatan disebut parkir ketika Ia memiliki karakteristik, karakteristik parkir meliputi beberapa hal, yakni akumulasi parkir, durasi parkir, pergantian parkir, pergantian parkir, indeks parkir, dan kebutuhan ruang parkir (Hobbs 1979). Pengelolaan parkir, adalah sebuah sistem atau cara dalam memanfaatkan lahan parkir dengan tujuan tertentu. Tujuan ini dapat ditinjau dari berbagai macam aspek, diantaranya adalah aspek keindahan dan ketertiban, serta aspek ekonomi. Sistem parkir memiliki fasilitasi area, di area publik milik pemerintah dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni fasilitas parkir di badan jalan, dan fasilitas parkir di bahu jalan. Atas pemberian fasilitas ini, pemerintah berhak menarik retribusi dari setiap kendaraan yang mendapatkan fasilitas dalam area parkir di lahan publik tersebut. Pengelolaan parkir di lokasi publik menjadi bagian dari pendapatan daerah untuk setiap kawasan parkir di tanah milik negara. Pengelolaan parkir biasanya menggunakan sebuah sistem retribusi, atau sistem setoran sesuai yang tercantum dalam undang-undang maupun peraturan daerah. Setoran ini dilakukan oleh para juru parkir, yang mendapatkan pendapatan melalui proses bagi hasil dengan pemerintah. Pandapatan inilah yang kemudian digolongkan juga sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus sebagai sarana membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal untuk menjadi pemungut retribusi parkir, atau juru parkir. Di Yogyakarta, sistem yang digunakan dengan cara retribusi. Pengelolaan parkir melibatkan pihak ketiga, dan terdapat bagi hasil yang pembagiannya diatur dalam undang – undang.

Sedangkan di beberapa kota di Indonesia lainnya, regulasi parkir memiliki aturan dan yang berbeda-beda mengenai parkir. Seperti di Surabaya, Jawa Timur misalnya, yang memiliki potensi parkir per tahun sebesar Rp 29,8 Miliar. Pengelolaan parkir di Surabaya di fokuskan pada kewenangan pemerintah melalui sistem

retribusi dan setoran. Namun, seringkali sistem ini dicurangi oleh para juru parkir untuk meraup keuntungan pribadi dengan menggunakan karcis bekas bagi kendaraan yang akan parkir. Hal ini membuat setoran parkir untuk periode 2010 justru berkurang drastis dari potensi parkir yang dimiliki oleh Kota Surabaya. Oleh karena itu, Kota Surabaya berusaha menerapkan sistem parkir pra-bayar untuk mengurangi kecurangan-kecurangan yang slama ini terjadi dan merugikan pemerintah (Surabaya Pos 2010). Berbeda lagi dengan Kota Cilegon, Propinsi Banten. Pemerintah daerah Cilegon mengatur parkir dan memberlakukan retibusi dengan mendapatkan penghasilan parkir sebesar 20% dari total penghasilan parkir. Pemerintah Daerah Cilegon justru turut mengajak pihak asuransi swasta untuk ikut turut berinvestasi dalam parkir dalam klaim kehilangan kendaraan bermotor. Sistem penyetoran retribusi Pemda Kota Cilegon pun agak sedikit berbeda, dimana hasil pajak parkir di jalan umum langsung disetorkan ke kas daerah melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah atau DPPKD (Rachman 2010)

Berbeda dengan di Indonesia, pengelolaan parkir di negara-negara barat sangat ketat, bahkan mahal. Di London misalnya dimana tarif parkir dihitung per hari, dan tarif parkir di London bisa mencapai 68,07 dollar AS per hari. Hal ini menjadikan London sebagai kota dengan tarif parkir termahal dalam survey yang diselenggarakan yayasan Colliers International (Kompas 2008). Ketatnya pengelolaan parkir disana dapat dilihat melalui pemberlakuan surat tilang yang diberikan kepada kendaraan yang parkir terlalu lama dan / atau melebihi batas yang telah ditentukan.

2. Aktor Informal

Aktor informal, atau penguasa non-formal atau non-legal. Aktor informal dikenal juga sebagai seorang tokoh lokal, atau orang yang dihormati oleh masyarakat setempat. Aktor informal ini bisa muncul dalam berbagai bentuk jabatan, seperti tokoh pemuka agama,

tokoh adat masyarakat lokal, penguasa lokal lewat pembuktian kekuatan fisik, kekuatan politik kelas mikro, seperti kepala desa, lurah, atau karena sumber *resources* yang besar, dan beberapa bentuk lainnya. Aktor informal memiliki kuasa dalam pengambilan keputusan bagi suatu daerah atau wilayah kekuasaannya, tetapi Ia juga bisa bertindak sebagai penengah antara kaum yang di*ayomi*-nya, dengan pemerintah. Hal ini sering terjadi jika terdapat suatu komunitas atau kelompok yang mengalami persinggungan dengan pemerintah, dan para aktor informal ini biasanya menjadi penengah antara kedua belah pihak, meski tendensi politisnya sudah jelas, yakni membela kepentingan golongannya. Penguasaan dominan atas *resources* yang dilakukan oleh informal aktor terkadang mejadikan adanya bos-bos baru atau yang disebut dengan *bossism. Bossism* diperkenalkan oleh Sidel yang didefinisikan sebagai calo kekuasaan yang memiliki monopoli atas kontrol terhadap sumberdaya kekerasan dan ekonomi dalam suatu wilayah yang berada di bawah yurisdiksinya (Karim 2010). Ada transisi yang membuat kelompok-kelompok informal yang menguasai seckor politik dan ekonomi kemudian menjadi aktor baru yang menguasai atau *local bossism.* Hal tersebut karena ketika negara kedudukannya tidak terlalu kuat. Negara akan membutuhkan sokongan dari kelompok – kelompok ini. Elit penyelenggara formal mengalami ketidakberdayaan dalam berhadapan dengan kekuatan sosial, ekonomi dan politik yang dominan di luar struktur meraka (Reno, 1999, cited in Hidayat (ed) 2006, p.269). Perebutan *resources* yang besar membuat aktor informal kemudian berkontestasi yang melahirkan *local bossism.* Termasuk masalah parkir di Malioboro terdapat *bossism* yang dilakukan aktor informal dalam pengelolaan parkir Malioboro.

3. Weak State

Sebuah ungkapan untuk negara yang gagal memberikan pengaruhnya di masyarakat. Kegagalan ini terjadi bukan dalam bentuk yang luas, namun lebih pada bentuk yg sederhana dan membumi. Secara umum, kegagalan pemerintah, atau negara dibagi kedalam 3 kategori dan memiliki julukan, yakni *weak state, failed*

state dan *collapsed state*. Sebenarnya tidak ada tolak ukur yang pasti dari ketiga kategori ini, karena kategori tersebut hanya berupa sebutan untuk negara yang dianggap gagal dalam mengakomodasi tugasnya dalam mempertahankan kedaulatannya, baik dari dalam, maupun dari luar. Hal ini bisa dikondisikan oleh beberapa faktor, dari dalam misalnya terjadi perpecahan dari dalam, dan hal ini bisa terjadi jika terjadi penolakan atas negara dari dalam negara oleh sebuah komunitas atau kelompok. Seperti yang dikatakan oleh Joel S. Migdal, bahwa:

> *in addition, a full view of relations between a people and its state requires looking beyond domestic society. The calculus of state-society relations has changed dramatically...All states have had limited capabilities at some time, or with some groups, or on some issues.* (Migdal 1988).

Dari kalimat tersebut, dapat dipahami bahwa terjadi penurunan "martabat" pemerintah di mata rakyatnya sendiri, dan hal ini bisa jadi timbul oleh beberapa hal. Akibatnya, penguasaan pemerintah atas suatu hal ataupun isu bisa berkurang dan tejadi "pengambilalihan kuasa" disini. Seperti misalnya masalah perparkiran yang diurus oleh aktor informal, ketimbang dikelola langsung oleh negara. Negara gagal memberikan pengaruh yang kuat dalam menjalanknan fungsinya sebagai pelayanan publik di masyarakat. Dalam konteks parkir Malioboro negara terlambat datang dan cenderung lemah dibandingkan aktor lain dalam masalah pengelolaan.

Metodologi Penelitian

Dalam sebuah penelitian diperluakan metode sebagai alatnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi kualitatif. Menurut Sarantakos, metode merupakan alat pegangan untuk peneliti sosial dalam memilih elemen dasar dalam metodologinya, seperti persepsi terhadap realiti, definisi tentang ilmu, persepsi tentang perilaku manusia,

tujuan penelitian (Sarantakos 1993, p.34). Sedangkan metodologi kualitatif bertujuan untuk lebih menggali lebih dalam sebuah fenomena yang ada.

Penelitian dengan menggunkan metodologi kualitatif bukan hanya menggambarkan apa yang tampak melainkan meneliti yang melatarbelakangi fenomena itu bisa terjadi. Metode yang digunakan kali ini dengan studi kasus. Baik dalam proses pengumpulan data maupun analisis data. Metode ini mengarah ke peristiwa kontemporer, peneliti tidak memiliki kontrol terhadap peristiwa tersebut dan menekankan pada pertanyaan "bagaimana" atau "mengapa". Karena itu studi kasus bersifat naturalistik atau alamiah. Menurut Yin, suatu inkuri empiris yang menyelediki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas – batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas, dan dimana menggunakan multisumber bukti dimanfatkan.(Yin 1996, p.18). Tujuan dari studi kasus sendiri mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (given) (Nurcahyo 2008). Penelitian ini menggunakan studi kasus jenis deskriptif, yakni jenis penelitian yang berusaha mendeskripsian suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang (masalah aktual). Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memotret peristiwa yang menjadi pusat perhatiannya kemudian dilukiskan sebagaimana adanya. Masalah yang diteliti adalah masalah yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan, sehingga pemanfaatan temuan penelitian ini berlaku pada saat itu dan belum tentu relevan jika digunakan dimasa yang akan datang. Karena itu peneltian deskriptif tidak selamanya menuntut hipotesis.

Unit Analisis

Salah satu komponen dasar studi kasus merupakan unit analisis. Unit analisis berkaitan dengan masalah penentuan apa yang dimaksud dengan "kasus" dalam penelitian yang bersangkutan-suatu problem yang telah mengganngu banyak peneliti di awal studi kasusnya (Yin 1996, p.30). Unit analisis penelitian ini adalah melihat bagaimana politik perparkiran dalam pengelolaan masalah perparkiran di Malioboro Kota Yogyakarta.

Seiring perkembangan perkotaan yang semakin meningkat, masalah perkotaanpun semakin kompleks. Salah satunya masalah penataan lahan parkir. Sebagai upaya penataan kota, adanya lahan parkir perlu diorganisir karena terkadang keberadaannya menimbulkan kemacetan. Selain itu lahan parkir termasuk pemasukan daerah yang realtif besar. Salah satunya kota seperti Yogyakarta. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan tingkat mingrasi orang yang masuk tinggi. Yogyakarta memiliki jumlah penduduk yang semakin meningkat, hal tersebut juga diiringi dengan peningkatan kendaraan yang ada di kota Yogyakarta. Hal ini berdampak terhadap makin luasnya lahan parkir yang dibutuhkan di kota Yogyakarta. Semakin banyaknya lahan parkir membuat semakin bertambahan pendapatan dari hasil parkir tersebut. Menguntungkannya usaha perparkiran ini membuat banyak aktor yang ingin ikut terlibat dalam mengelola perparkiran di Kota Yogyakarta. Tidak hanya aktor formal seperti pemerintah yang ingin mengelola parkir di Kota Yogyakarta, aktor informal lainpun terlibat dalam pengelolaan perparkiran.

Dengan mengambil fokus politik perparkiran yang mengelola lahan perparkiran di kawasan Malioboro. Dalam hal ini mencakup perparkiran di tepi Jalan Malioboro dan Jalan Ahmad Yani. Kawasan Malioboro merupakan *icon* pariwisata Kota Yogyakarta yang setiap hari ramai dikunjungin orang. Banyaknya orang yang datang semakin banyak orang yang menggunakan lahan parkir di kawasan Malioboro, semakin tinggi juga pendapatan hasil parkirnya. Lahan parkir merupakan salah satu instrumen penting dalam perebutan *resources* yang menguntungkan. Karena itu banyak aktor yang mengelola parkir, seperti aktor informal yang juga berkuasa. Pengelola lahan parkir di kawasan Malioboro merupakan salah representasi pengelolaan lahan parkir yang didalamnnya melibatkan informal aktor selain pemerintah sebagai aktor resmi dalam pengelolaan. Penelitian ini, ingin menggali lebih dalam bagaimana politik pengelolaan perparkiran di kawasan Malioboro Yogyakarta.

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua data berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan hasil temuan lapangan berupa hasil intervew dengan responsden dan hasil pengamatan di lapangan. Dalam melakukan input data primer, terlebih dahulu kami akan membuat identifikasi terhadap sumber pengumpulan data. Kategorisasi sumber pengumpulan data dibagi atas aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan perparkiran di kawasan Malioboro. Kategorisasi tersebut menghasil dua kelompok besar data primer. (1) Formal aktor yaitu UPT Malioboro bagian pemerintah daerah Kota Yogyakartayang mengurus masalah parkir di Malioboro serta DPRD Kota Yogyakarta , (2) Informal aktor yaitu paguyuban parkir, pemilik lahan parkir, serta juru parkir. Dengan adanya kategoriasasi kedua sumber data primer tersebut diharapkan preferensi subyektivitas dan intersubyektivitas data dapat diakomodasi secara menyuluruh.

Dalam kategorisasi pertama, pengelolaan parkir secara resmi yang seharusnya terjadi di kawasan Malioboro dapat diketahui secara detail. Aktor negara tentunya memiliki otoritas yang mengikat atas pengelolaan parkir di kawasan Malioboro berdasarkan legitimasi Perda dan Perwal. Dalam melakukan regulasi atas pengelolaan retribusi parkir, UPT Malioboro tidak secara langsung bergerak ke lapangan sehingga aktor informal juga berperan yang juga diakui oleh pemda keberadaannya sebagai pengelola parkir. Dengan hadirnya pengelola parkir informal seperti paguyuban parkir, juru parkir, pemilik lahan menjadi menarik untuk dikaji bagaimana peran UPT dalam pengelolaan parkir di kawasan Malioboro. Serta peran DPRD Kota Yogyakarta dalam pengaturan Perda mengenai masalah parkir. Dalam melakukan tugas lapangan, UPT Malioboro memiliki sumber data yang cukup karena mereka yang secara resmi mengelola parkir. Serta DPRD Kota Yogyakarta yang mengatur bagaimana Perda tentang masalah parkir. Jadi, preferansi atas kategorisasi sumber data berupa Kepala UPT Malioboro Yogyakarta dan anggota DPRD Kota Yogyakarta yang jelas tentang pengelolaan parkir secara formal.

Kategorisasi kedua, yakni informal aktor yaitu paguyuban parkir, pemilik lahan parkir, serta juru parkir. Secara idealisnya memang pengelolaan parkir telah diatur oleh undang-undang meliputi besaran harga retribusi parkir hingga pembagian hasil retribusi parkir untuk menggaji para petugas parkir. Namun, dalam realitanya informal aktor mempunyai peran yang besar dalam pengelolaan perparkiran. Aktor – aktor informal memiliki peran *bossim* karena mereka memiliki otoritas tersendiri dalam mendapatkan *resources* pengelolan parkir secara teknisnya. Selain itu dalam rekrutmen petugas parkir, tentunya otoritas pemilik lahan yang masuk dalam paguyuban sangat mendominasi dalam melakukan seleksi siapa yang layak untuk masuk menjadi anggotanya. Dalam wawancara disini, melihat bagaimana peran aktor informal dalam pengelolaan parkir yang lebih mendominasi daripada pemerintah. Dalam melakukan tugas lapangan, pemilik lahan dan juru parkir memiliki sumber data yang cukup banyak karena selain mereka yang melakukan langsung dalam mengelola parkir Bagaimana hubungan antar aktor informal satu sama lain. Serta hubungan dengan aktor formal untuk mengetahui bagaimana peran aktor informal dalam pengelolaan parkir yang cenderung lebih mendominasi. Kepala paguyuban parkir, pemilik lahan dan juru parkir diharapkan mampu memberikan eksplanasi yang jelas tentang pengelolaan parkir oleh aktor informal.

Sedangkan data sekunder merupakan data tambahan sebagai elaborasi atas data primer dan sebagai acuan dalam melihat setting yang terjadi dalam permasalahan pengelolaan parkir di wilayah Malioboro Data sekunder diambil dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 dan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2009 yang mengurusi masalah parkir, skripsi mengenai relasi tiga aktor dalam pengelolaan parkir di Malioboro, buku – buku, artikel di internet, dan surat kabar. Dalam peraturan Kota Yogyakarta tentang retribusi, pengelolaan parkir dibawah kendali langsung Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Akan tetapi menjadi menarik ketika melihat realitas pengelolaan parkir yang lebih dikendalikan oleh aktor infromal parkir di kawasan Malioboro. Dengan adanya data sekunder tersebut, penjelasan real politik perparkiran di Malioboro terlihat.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam studi kasus dapat diambil dari berbagai sumber informasi, karena studi kasus melibatkan pengumpulan data yang "kaya" untuk membangun gambaran yang mendalam dari suatu kasus. Asmussen & Creswell menampilkan pengumpulan data melalui matriks sumber informasi untuk pembacanya. Matriks ini mengandung empat tipe data yaitu: wawancara, observasi, dokumen dan materi audio-visual untuk kolom dan bentuk spesifik dari informasi seperti siswa, administrasi untuk baris. Penyampaian data melalui matriks ini ditujukan untuk melihat kedalaman dan banyaknya bentuk dari pengumpulan data, sehingga menunjukkan kekompleksan dari kasus tersebut. Penggunaan suatu matriks akan bermanfaat apabila diterapkan dalam suatu studi kasus yang kaya informasi. Lebih lanjut Creswell mengungkapkan bahwa *wawancara dan observasi* merupakan alat pengumpul data yang banyak digunakan oleh berbagai penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa kedua alat itu merupakan pusat dari semua tradisi penelitian kualitatif sehingga memerlukan perhatian tambahan dari peneliti(Creswell 1998, pp.119-128).. Sedangkan Yin mengungkapkan bahwa terdapat enam bentuk pengumpulan data dalam studi kasus yaitu (Yin 1996: 103-118): (1) dokumentasi yang terdiri dari surat, memorandum, agenda, laporan-laporan suatu peristiwa, proposal, hasil penelitian, hasil evaluasi, kliping, artikel; (2) rekaman arsip yang terdiri dari rekaman layanan, peta, data survei, daftar nama, rekaman-rekaman pribadi seperti buku harian, kalender dsb; (3) wawancara (*interview*), yakni ada berbagai macam bentuk dari *interview*. *Interview* terstruktur, butir – butir pertanyaan harus lengkap dan spesifik, pewawancara perpedoman pada lembar pertanyaan yang telah dibuat. Sedangkan *interview* tidak terstruktur hanya berisi topik – topik yang hendak ditanyakan pada responsden.

Dalam penelitian ini mencari dokumen berupa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Peraturan Walikota No. 112 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2009

Tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Serta skripsi mengenai relasi tiga aktor dalam pengelolaan parkir Malioboro.

Data lainnya diambil dari *interview* oleh beberapa responsden. Menggunakan bentuk *interview* kurang terstruktur, dengan membuat *interview guide* berisikan topik- topik yang ditanyakan kemudian dielaborasi. *Interview guide* diturunkan dari logika berfikir yang dibangun dalam penelitian ini. Pemilihan responsden dengan menggunakan teknik *snowball effect*. Mewawancarai responsden pertama kemudian melakukan *interview* dengan responsden lain yang berkaitan dengan responsden pertama, dan seterusnya. Responsden dalam penelitian ini mencakup (1) Kepala UPT Malioboro sebagai kepala yang mengurusi masalah parkir di Malioboro. (2) Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang mengurusi masalah parkir sebelum UPT Malioboro. (3) Anggota DPRD Kota Yogyakarta dalam mengetahui bagaimana pembuatan Perda mengenai parkir serta hubungannya dengan informal aktor. (4) Ketua PPMAY, sebagai ketua paguyuban yang menangui para pengelola parkir. (5) Pemilik lahan, sebagai aktor informal yang termasuk dalam pengelola parkir. (6) Juru Parkir yang mengelola parkir di Malioboro.

Teknik analisa data

Teknik menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengumpulkan data–data hasil temuan lapangan dan literatur yang ada berupa data primer dan data sekunder.

2. Menafsirkan data –data baik data primer maupun sekunder yang kemudian dikaitkan dengan landasan teori.

3. Menarik kesimpulan dari pemaknaan atas data –data yang ada.

Sistematika Penulisan

Makalah ini secara keseluruhan menjelaskan politik perparkiran yang terjadi di Malioboro. Kata kunci yang ditemukan dalam penelitian

akan penulis bagi dalam beberapa subbab. *Subbab satu* menjelaskan tentang latar belakang pemilihan topik penelitian, rumusan masalah, kerangka konseptual dan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. *Subbab dua* menjelaskan mekanisme pengelolaan parkir secara formal yang diatur dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dan diimplementasikan oleh pejabat berwenang yaitu UPT Malioboro dan DPRD Kota Yogyakarta serta aktor informal. Terlebih dahulu dalam bab dua ini akan penulis sajikan sejarah Malioboro yang secara tidak langsung mempengaruhi terjadinya penggabungan pusat ekonomi, pemerintahan dan pariwisata di malioboro sehingga menjadikan kawasan ini padat kendaraan.

Sementara *subbab tiga* menjelaskan tentang peran aktor informal yang mendominasi pengelolaan parkir Malioboro di banding peran negara. Aktor infromal meliputi paguyuban juru parkir dan pemilik lahan parkir. *Subbab empat* menjelaskan tentang lemahnya peran negara dalam pengelolaan parkir. Mekanisme pengelolaan parkir lebih dikuasai oleh aktor informal dan negara sebagai pemilik lahan parkir yang sah secara hukum legal-formal justru lemah kedudukannya terhadap aktor informal dalam masalah pengelolaan parkir. Terakhir, *subbab lima* akan menarik kesimpulan bagaimana wujud politik perparkiran yang terjadi di Malioboro, berupaya melihat kontestasi perebutan *resources* antaraktor yang terlibat.

Mekanisme Pengelolaan Parkir Di Malioboro

Malioboro merupakan kawasan pariwisata andalan di Kota Yogyakarta. Di Kota Yogyakarta tidak ada kawasan wisata lain yang seramai dan sekompleks Malioboro. Dikatakan kompleks lantaran berbagai macam unsur pendukung pariwisata saling bertumpah ruah di kawasan sepanjang kurang lebih 800 meter ini. Tidak hanya unsur dan sarana pendukung pariwisata, melainkan juga kantor-kantor pemerintahan ikut berdomisili di kawasan Malioboro. Berbagai macam kepentingan antara pariwisata, bisnis dan pemerintahan terkonsentrasi di kawasan ini.

Kompleksitas kepentingan di kawasan Malioboro mengakibatkan tingginya angka kendaraan bermotor yang berlalu lalang di kawasan ini. Sehingga dibutuhkan metode pengelolaan kepadatan kendaraan bermotor, salah satunya pula pengelolaan parkir. Pengelolaan parkir dibutuhkan lantaran kendaraan bermotor yang ada di Malioboro hampir seluruhnya berakhir di tempat parkir. Dalam sehari rata-rata terhitung enam ribu kendaraan bermotor singgah dan menempati tempat-tempat parkir di Malioboro.

Pada tahun 2009, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2009 mengenai penyelenggaraan perparkiran. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa penyelenggara perparkiran yang sah adalah Pemda Yogyakarta dan swasta. Pemda Kota Yogyakarta mengelola Tempat parkir tepi jalan umum, tempat parkir khusus dan tempat parkir tidak tetap. Sedangkan pihak swasta mengelola tempat parkir khusus yang memang sudah dimiliki oleh swasta dengan izin dari Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pemerintah daerah Kota Yogyakarta menyelenggarakan perparkiran dengan menunjuk 3 SKPD yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Pengelolaan Pasar dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pembagian dalam 3 SKPD ini baru dimulai pada tahun 2009 dengan Perwal Nomor 112 tahun 2009. Sebelum Perwal ini berlaku, penyelenggaraan perparkiran terpusat pada Dinas Perhubungan. Pembagian ini bertujuan untuk mengefektifkan penyelenggaraan parkir di Kota Yogyakarta yang memang ditujukan untuk kenyaman masyarakat.

Dinas Perhubungan menyelenggaran dan mengelola perparkiran di luar wilayah pasar dan kawasan Malioboro. Wilayah pasar dikelola oleh Dinas Pasar. Pengelolaan parkir di wilayah pasar berbeda dengan wilayah lain. Konsumen parkir di pasar sebagian besar adalah para pedagang dan yang berkepentingan berada di pasar sehingga waktu parkirnya sangat panjang dari pagi hingga sore. Sehingga diperlukan penetapan tarif yang berbeda dengan para pengunjung pasar yang hanya satu atau dua jam memarkirkan kendaraannya. Selain itu, parkir di pasar cenderung lebih sepi dengan mobilitas kendaraan keluar masuk tempat

parkir tidak terlalu tinggi, sehingga satu juru parkir untuk satu titik parkir sudah cukup. Berbeda dengan parkir di wilayah Malioboro yang mobilitasnya tinggi. Kendaraan keluar masuk tempat parkir dalam waktu bersamaan membutuhkan juru parkir yang lebih dari satu. Selain itu, karena Malioboro merupakan kawasan wisata, dibutuhkan pula teknik khusus melayani para wisatawan yang memarkirkan kendaraannya. Oleh karena itu, penyelenggaraan parkir di Malioboro secara khusus di tangani oleh UPT Malioboro yang berdiri di bawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.

Juru Parkir

UPT Malioboro sebagai pengelola yang sah terhadap parkir di Malioboro membagi lahan parkir di Malioboro dalam 60 titik. Tidak diketahui secara pasti sejak kapan pembagian dalam 60 titik ini diberlakukan. Sejak parkir di Malioboro masih dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, pembagian dalam 60 titik ini sudah dilakukan. Masing-masing titik memiliki satu juru parkir resmi yang dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan UPT Malioboro sebagai perwakilan Walikota. Juru parkir resmi ini untuk mendapatkan surat tugas harus melalui proses pengajuan permohonan kepada kepala UPT Malioboro. Setelah persyaratan terpenuhi, surat tugas akan dikeluarkan oleh UPT Malioboro dan berlaku selama 6 bulan saja, sehingga bagi juru parkir yang ingin memperpanjang kontrak kerjanya harus kembali mengajukan persyaratan permohonan kepada UPT Malioboro.

Satu juru parkir untuk satu titik parkir dengan mobilitas kendaraan keluar masuk tempat parkir yang tinggi dirasa tidak cukup. Sehingga Kepala UPT Malioboro mengeluarkan Surat keterangan pembantu juru parkir atas permintaan juru parkir utama dengan rekomendasi Forum Komunikasi Pekerja Parkir Yogyakarta (FKPPY). Juru parkir pembantu ini bertanggungjawab kepada juru parkir utama.

Juru parkir sewaktu bertugas wajib mengenakan seragam yang sudah disediakan pemerintah daerah sebagai bagian dari penertiban identitas juru parkir. Juru parkir juga dilengkapi karcis resmi dari

pemerintah daerah. Juru parkir wajib memberikan satu lembar karcis parkir resmi kepada satu kendaraan bermotor yang parkir di wilayah tugasnya. Dalam karcis resmi tersebut tertera tarif parkir resmi yang harus dibayar konsumen parkir. Juru parkir tidak boleh memungut lebih dari yang tertera pada karcis tersebut. Juru parkir juga harus mematuhi peraturan penggunaan karcis yang hanya dipergunakan sekali

Sistem penyetoran retribusi parkir

Juru parkir setiap harinya harus menyetor retribusi parkir kepada UPT Malioboro sesuai dengan jumlah karcis yang terjual. Dalam bendel karcis, masing-masing lembar memiliki nomor untuk memudahkan perhitungan retribusi yang harus disetorkan. Jumlah yang harus disetorkan sesuai dengan nomor terakhir karcis terjual hari tersebut dikurangi nomor karcis terakhir yang dilaporkan pada UPT dihari sebelumnya. Juru parkir utama yang melakukan penyetoran ke UPT Malioboro, maupun saat tim pengawas berkeliling di kawasan Malioboro. Setelah juru parkir menyetor ke UPT Malioboro, pihak UPT akan langsung menyetorkannya ke Bank Daerah/Bank Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY.

Juru parkir tidak digaji secara khusus, gaji juru parkir adalah dari pembagian retribusi dengan UPT Malioboro. Jumlah pembagiannya sesuai dengan yang tertera pada pasal 13 Perwal nomor 112 tahun 2009, yaitu 25%:75% atau Rp 250 untuk UPT Malioboro dan Rp 750 untuk juru parkir, yang nantinya akan dibagi dengan juru parkir pembantu. Prosentase yang jauh lebih besar untuk juru parkir ini oleh pemerintah daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan juru parkir Kota Yogyakarta.

Target pendapatan dari retribusi parkir di Kota Yogyakarta selama setahun adalah Rp1,9 M. Dan dari parkir di kawasan Malioboro, dari kendaraan roda dua saja sudah menyumbang Rp 500-600 juta/tahun. Bisa dibayangkan betapa besarnya uang parkir yang berputar di tangan juru parkir bila setiap harinya juru parkir mendapat 3x lipat dari yang diperoleh UPT Malioboro.

Pengawasan lapangan

Kawasan Malioboro memang tidak terlalu luas, dan bisa dijangkau hanya dengan berjalan kaki dari satu ujung ke ujung jalan satunya. Namun, jumlah kendaraan parkir yang mencapai 10.000 kendaraan setiap harinya tidak menutup kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh juru parkir. Oleh karena itu, UPT Malioboro menerjunkan 4 personil pengawas untuk berkeliling kawasan Malioboro setiap harinya sebanyak lebih dari 4 kali berkeliling. Tujuan pengawasan adalah menanggulangi penggunaan lembar karcis lebih dari sekali dan penarikan tarif parkir diluar ketentuan. Juru parkir yang terbukti melakukan kecurangan seperti disebut diatas akan dicabut surat tugasnya. UPT Malioboro juga menghimbau kepada masyarakat yang merasa dirugikan oleh juru parkir agar melaporkannya kepada UPT Malioboro secara resmi. Karena selama ini ada banyak kabar tidak menyenangkan mengenai kinerja juru parkir namun semuanya tidak dilaporkan secara resmi sehingga pihak UPT Malioboro tidak mengetahui secara pasti juru parkir mana yang melakukan kecurangan.

Isu kecurangan ini tidak hanya dijadikan isu bagi UPT Malioboro untuk menindak tegas juru parkir nakalnya. Namun juga menjadi isu bagi Paguyuban Parkir Malioboro Ahmad Yani (PPMAY) akan menyerahkan daftar nama juru parkir yang terbukti melakukan kecurangan untuk ditindak tegas oleh UPT Malioboro.

Peran Informal Aktor Dalam Pengelolaan Parkir Malioboro

Lahan parkir di kawasan Malioboro merupakan salah satu tempat parkir yang memiliki potensi sumber daya tinggi dari pada tempat parkir lainnya di Kota Yogyakarta. Sebagai tempat yang potensial untuk dieksploitasi, wilayah parkir Malioboro menjadi lahan "rebutan" bagi negara dan aktor lainnya. Dalam hal ini, aktor negara di wakili oleh UPT Malioboro sebagai pengelola formal parkir di Malioboro sebagaimana yang termaktub dalam Perwal No. 112 Tahun 2009 tentang petunjuk

pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran. Meskipun sebenarnya lahan parkir Malioboro merupakan salah satu sumber PAD lewat retribusi parkir, tetapi peran kelompok-kelompok luar (non negara) tidak bisa dilepaskan dalam melakukan *sharing profit* dari lahan parkir di daerah tersebut. Ada *power* yang lebih dimiliki kelompok – kelompok ini dibandingkan negara. Kelompok inilah yang selanjutnya disebut dengan *aktor informal.*

Fenomena yang terjadi adanya dominasi aktor informal ini melahirkan *local bossism* dalam pengelolaan parkir di Malioboro. Bagimana kuatnya aktor informal seperti paguyuban dan pemilik lahan dibandingkan negara. Seperti yang dikatakan oleh Sidel *boss- boss* ini memiliki monopoli atas kontrol terhadap sumberdaya kekerasan dan ekonomi dalam suatu wilayah yang berada di bawah yurisdiksinya (Karim 2010). Lemahnya negara dalam legitimasi menjadi faktor dominasi oleh *local bossism.* Elit penyelenggara formal mengalami ketidakberdayaan dalam berhadapan dengan kekuatan sosial, ekonomi dan politik yang dominan di luar struktur meraka (Reno, 1999, cited in Hidayat (ed) 2006, p.269).

Sebelum dibawah UPT, pengelolaan parkir berada di bawah Dinas Perhubungan. Namun, relasi dengan aktor informal keduanya tetap sama. Dalam hal ini pengelolaan parkir dikelola oleh PPMAY yang dibawahnya menangungi para juru parkir. Kedudukan UPT dengan paguyuban sama, bukan kedudukan paguyuban dibawah UPT. Paguyuban tidak dibawah UPT, melainkan sejajar dengan UPT. Paguyuban ini berdiri pada tahun 2003 dengan tujuan mensolidkan antar juru parkir. Sebelum berdiri paguyuban, pengelolaan parkir dikelola secara kolektif oleh beberapa orang atau kominitas. Sekarang terdapat 200 juru parkir yang berada dalam naungan paguyuban ini. Dengan diketuai oleh Sigit Karsono, SH.

Paguyuban ini menaungi juru parkir yang mengelola parkir di Jalan Malioboro serta Jalan Ahmad Yani. Selain untuk mensolidkan hubungan antar juru parkir, paguyuban juga berfungsi mengatur para juru parkir agar tidak terjadi konflik. Salah satu upayanya dengan pertemuan

setiap tanggal 10 setiap bulannya. Paguyuban perannya sama seperti halnya sebuah organisasi yang didalamnya terdapat susunan terstruktur dan fungsi yang terstruktur. Di dalam paguyuban ada tunjangan untuk para anggota. Seperti tunjangan kelahiran anak dan kematian yang didapat dari iuran dari para juru parkir. Iuran paguyuban menyetor Rp 2500,00 perkotak di setiap shift diluar setoran karcis.

Seperti awal terbentuknya, paguyuban untuk menentang hasil Perda pada tahun 2002 yang memberatkan para tukang parkir. Fungsi paguyuban menjadi penting dalam melihat pengelolaan parkir di Malioboro. Paguyuban memerankan fungsi layaknya negara untuk menyediakan pelayanan publik dalam hal ini masalah parkir.

Dominasi peran paguyuban lebih kuat dibandingkan UPT yang secara formal mengelola masalah parkir. Misalnya dalam penunjukan para juru parkir. Secara legal formal UPT yang menunjuk juru parkir. Namun, yang terjadi di lapangan paguyubanlah yang menunjuk juru parkir. UPT tidak menunjuk juru parkir, setiap juru parkir dipilih oleh paguyuban dan ada surat tugasnya. Hal ini dikuatkan oleh perkataan salah satu juru parkir. Setiap juru parkir harus ikut dalam paguyuban untuk mendapatkan surat tugas.

Paguyuban juga memiliki *bargaining* kuat dengan negara dalam hal perumusan Perda tentang penyelenggaraan perparkiran. Dalam perumusan Perda, paguyuban dilibatkan dalam menentukan isi perda yang dibuat. Ada *sharing* dengan legislatif untuk *sharing* Perda. Seperti contohnya dalam *sharing profit*. Ada perubahan 60 % untuk negara, 40% untuk pengelola kemudian berganti menjadi 25% untuk negara, 75% untuk pengelola. Proses pembuatan kebijakan *sharing profit* yang termaktub dalam Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2009. *Sharing profit* yang menguntungkan pihak pengelola juru parkir dengan pembagian 25 % untuk pemerintah kota dan 75% untuk juru parkir menjadi bukti faktual bahwa kebijakan tentang pengelolaan parkir lebih memihak kepada juru parkir. Bisa dibayangkan berapa dana yang bisa diperoleh oleh juru parkir jika pendapat pemerintah sebesar 25% dari seluruh pendapat retirubusi parkir yang terdata mencapai 600 juta pertahun. Artinya dalam setahun, pendapatan juru parkir yang dapat diidentifikasi dalam setahun mencapai 1,8 Milyar dengan rata-rata

pendapatan perbulan mencapai 200 juta. Angka ini masih angka minimal yang mampu diidentifikasi sebagaimana pemasukan ke pemerintah kota sebesar 25% yang mencapai 600 juta pertahun. Karena sering kali ditemukan kasus juru parkir yang "nakal" dengan memakai berkali-kali satu karcis untuk beberapa unit kendaraan sehingga masih sangat mungkin jika pendapatan itu lebih besar lagi.

Perolehan pendapatan hasil parkir di kawasan Malioboro ternyata tidak berbanding lurus dengan keadaan gaji yang diterima oleh juru parkir. Tentunya dengan pemasukan hasil retribusi yang mencapai 150 juta perbulannya, setidaknya setiap titik lahan parkir dari 60 titik parkir dengan juru parkir satu sampai dua orang mendapatkan bagian 2,5 juta. Namun, dalam fakta yang ada justru bertolak belakang dengan "cerita manis" pendapatan juru parkir yang sedemikian besar. Dalam satu kapling lahan parkir yang mencapai 60 sampai 90 meter persegi dengan satu sampai dua juru parkir, mereka hanya mendapatkan gaji rata-rata 25.000 perhari hari dengan asumsi 750.000 perbulan. Dengan demikian masih ada sisa puluhan juta dana retiribusi setiap bulannya yang masuk ke kantong-kantong kelompok informal yang bisa jadi mereka justru mendapatkan hasil yang lebih besar lagi.

Selain paguyuban, aktor informal lain yang berperan dalam mengelola parkir di Malioboro adalah para pemilik lahan parkir. Ada sistem *kaplinganisasi* yang dilakukan oleh aktor informal dalam penguasaan lahan parkir di kawasan Malioboro setiap beberapa meter. Penguasaan sumber daya yang sebenarnya bukanlah para juru parkir yang ada ditempat setiap hari, tetapi para *local bossism* yang menguasai lahan parkir di Malioboro. Bahkan, menurut salah seorang sumber, banyak orang yang berani membayar perkapling lahan parkir dengan ratusan juta untuk dapat menguasai sumber daya di salah satu titik lahan parkir tersebut. Dengan demikian, penguasaan sumber daya lahan parkir menjadi milik aktor informal sehingga juru parkir seakan-akan hanyalah pegawai aktor informal yang menguasai lahan parkir dimana juru parkir tersebut bekerja.Terdapat sekitar 60 titik parkir, dengan pemilikan lahan yang berbeda-beda. Pemilikan lahan bersifat turun temurun dan kepemilikannya dengan jual beli atau kekerasan.

> *"Awalnya dulu saya juru parkir pembantu, setelah mempunyai cukup uang, dana juru parkir utama mempunyai utang kepada saya, kemudian saya membeli lahan di depan Hotel Mutiara lama ini,"*

Pemilik lahan di setiap kotak atau lahan memperkerjakan delapan orang dengan dua kali shift. Mereka yang disebut juru parkir pembantu. Pemilik lahan atau yang sering disebut dengan "juru parkir berdasi" (Puspitasari 2007, p.144). Hal ini karena rata – rata lahan dikuasai oleh orang – orang "berduit" tidak harus datang tetapi setiap bulan mendapat setoran dari hasil parkir. Para pemilik lahan adalah orang yang mempunyai uang untuk membeli lahan atau biasanya anggota partai atau yang memiliki ikatan dengan partai (Puspitasari 2007, p.144). Setiap bulannya para pemilik lahan ini membayar kepada jasa keamanaan untuk menjaga lahan mereka. Para pemilik lahan berkerjasama dengan para preman yang menguasai daerah Malioboro (Puspitasari 2007, p.144). Para juru parkir pembantu memberikan setoran kepada pemilik lahan setiap bulannya. Kemudian para pemilik lahan yang membayar ke UPT. Setiap lahan mempunyai setoran yang berbeda dengan "tuan" yang berbeda pula. Bila dilihat dari pola yang terjadi, pemilik lahan seakan menjadi *boss* untuk para juru parkir. Dominasi pemilik lahan juga terlihat dengan peran *bossism* yang ada. Menerima setoran dan kemudian membayar jasa keamanan untuk melindungi lahan yang dimiliki. Jalan Malioboro merupakan jalan umum, yang kepemilikannya berada di bawah negara. Namun, yang menarik "kepemilikan lahan" bisa dikuasi dan dijual belikan oleh publik. Hal ini menunjukan dalam pengelolaan parkir malioboro, negara lemah, dan pemilik lahan mempunyai posisi kuat sebagai *boss* yang menerima "pajak" dari kepemilikan lahan.

Peran aktor informal dalam hal ini juga memperjuangkan kebijakan pemerintah untuk menekan besaran target pendapatan asli daerah lewat retribusi parkir menjadi seminimial mungkin agar mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dapat dilacak dari hubungan yang mereka jalin dengan anggota legislatif dalam proses pembuatan kebijakan. Besaran target PAD Kota Yogyakarta dari retribusi

parkir menjadi "garapan" komisi B masalah pendapatan dan keuangan daerah. Dalam proses pembuatan kebijakan tentang target pendapatan retribusi inilah proses negoisasi terjalin antara anggota dewan dengan aktor informal parkir di kawasan Malioboro. Para anggota dewan tersebut menurunkan target pendapatan daerah dari retribusi yang dulu pada 2008 mencapai 1,5 Milyar pertahun sekarang menjadi 1,3 Milyar pertahun. Dengan adanya penurunan target pendapat tersebut, jatah yang diperoleh anggota dewan dari aktor informal pengelola parkir di Malioboro bisa lebih maksimal.

Peran Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Pengelolaan Parkir Malioboro

Keberadaan Malioboro yang penting untuk Yogyakarta mengharuskan adanya pengaturan yang khusus dan tidak biasa. Salah satu pengelolaan parkir di kawasan Malioboro. Sebelum tahun 2009, pengelolaan parkir di Malioboro dikelola di bawah Dinas Perhubungan dengan sistem pembagian hasil parkir 60% untuk negara dan 40% hasil parkir untuk juru parkirnya. Namun, kemudian terjadi reformasi perpakiran di Malioboro dengan berubahnya pengelola yang membawahi parkir, yakni Dinas Pariwisata melalui UPT Malioboro. Perparkiran di Yogyakarta di atur dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 dan Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2009. Perparkiran secara khusus menjadi fokus kerja 3 SKPD yaitu UPT Malioboro, Dinas Pasar dan Dinas Perhubungan. UPT Malioboro secara khusus mengurusi perparkiran di sepanjang Jalan Malioboro dan Jalan Ahmad Yani. Dinas Pasar mengelola perparkiran di wilayah pasar. Dinas Perhubungan mengelola perparkiran di luar Malioboro, Ahmad Yani dan pasar.

Minimnya peran dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam masalah perparkiran khususnya di kawasan Malioboro memunculkan paguyuban parkir untuk pengelolaannya, yaitu PPMAY. Negara dalam hal ini tentunya UPT Malioboro tidak dapat mengelola lahan parkir yang ada di kawasan Malioboro. Aktor di luar negara seperti paguyuban telah lama ada untuk mengelola juru parkir di kawasan itu. Secara tidak langsung paguyuban

hadir lebih lama daripada negara dalam mengelola parkir yang ada di kawasan tersebut. Pemerintah sendiri dalam mengelola parkir menempatkan Dinas Pasar, Dinas Perhubungan, dan UPT Malioboro dalam mengelola parkir di kawasan Malioboro. Hal ini kemudian yang menghasilkan negosiasi kepentingan antara negara dengan paguyuban. Parkir juga memiliki andil besar dalam PAD seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran.

Dalam pengelolaan malioboro, terdapat 60 titik parkir yang dikelola oleh satu juru parkir di tiap titik, dan juru parkir ditunjuk oleh UPT Malioboro karena otoritas dan legitimasi penunjukkan secara legal formal ada di tangan UPT Malioboro. UPT Malioboro bukan hanya mempunyai legitimasi untuk menunjuk juru parkir disetiap titik, tetapi juga memberhentikan juru parkir ketika kinerja tidak baik. Namun, realitanya tidak ditemukan bahwa UPT Malioboro tidak memiliki batasan tegas dan jelas mengenai bagaimana kinerja yang tidak baik, apakah dengan tidak tercapainya budget untuk periode tertentu atau apa servis yang dilakukan dengan pelanggan parkir. Termasuk dalam hal pengawasan. Ada sistem patroli untuk melihat bagaimana parkir tiap harinya. Namun, dari 60 titik hanya terdapat 4 pengawas yang dinilai tidak efektif.

Hadirnya paguyuban yang lebih dulu dan kurangnya legitimasi UPT Malioboro merupakan gejala politik dimana negara sebagai institusi terpenting di dalam masyarakat dinilai gagal dalam menjalankan tugas dan perannya (Fukuyama 2005). Pada kenyataannya yang terjadi di Indonesia dan parkir di Malioboro khususnya merupakan realitas global yang cenderung "mengurangi" peran negara. Dalam perkembangannya konsep negara lunak sering dipakai untuk menjelaskan pemerintahan yang lemah dimana negara tidak mampu membuat dan menjalankan mekanisme penyelenggaraan negara dalam kehidupan masyarakat dalam hal ini masalah parkir. Penguasaan pemerintah atas suatu hal ataupun isu bisa berkurang dan tejadi "pengambilalihan kuasa" disini.

Dalam pengelolaan wilayah Maliboro yang secara formal dilakukan di bawah legitimasi UPT Malioboro, Paguyuban yang telah

hadir terlebih dahulu pun menjadi aktor kunci penting yang tidak bisa kita kesampingkan perannya. UPT Malioboro_mengakui bahwa peran paguyuban juga sangat besar dalam pengelolaan parkir di Malioboro. Meskipun secara legal formal UPT Malioboro menjadi pihak yang memiliki legitimasi, dan membawahi UPT Malioboro, tetapi realita lapangannya, UPT Malioboro dan paguyuban tidak memiliki struktur hierarkis. Secara informal, UPT Malioboro dan paguyuban sejajar karena dalam prakteknya di lapangan UPT Malioboro tidak bisa melepaskan diri dari paguyuban. Anggota paguyuban yang dinilai solid juga menjadi *bargaining position* mereka sebagai pengelola parkir malioboro.

Dampaknya negara menjadi lemah dalam artian dia tidak bisa secara serta merta bertindak hanya satu pihak saja akan tetapi dia sangat akan mempertimbangkan peran dan posisi paguyuban. Bahkan sekali lihat kita akan menganggap bahwa pengelola perpakiran yang sebenarnya adalah paguyuban, sedangkan negara yang diwakili kehadirannya oleh UPT Malioboro hanya berupa fasilitator untuk menyetor uang kepada pemerintah. Maka dari itu jalan keluar yang dipilih oleh negara berupa *win win solution.* Dimana kedua belah pihak mendapatkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam menjalankan pengelolaan parkir di lapangan dilakukan oleh paguyuban, sedangkan negara memfasilitasi karcis, memberikan pengawasan, dan lain sebagainya yang legitimasinya tidak dimiliki oleh paguyuban.

Di lain sisi, paguyuban sangat membantu untuk mengkoordinasi antara juru parkir dengan UPT Malioboro. Juru parkir yang ada diberi surat tugas dalam jangka waktu 6 bulan masa kerja. Jika dalam 6 bulan kinerja yang di dapat tidak memuaskan, maka UPT Malioboro berhak mengganti juru parkir. Hal ini, tidak terjadi di lapangan dimana lahan parkir bersifat selayaknya tanah ulayat yang sudah dimiliki dan tidak mudah berpindah tangan kekuasaannya. Sekali lagi hal ini dikarenakan lahan parkir sangat "basah" dan menguntungkan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sigit selaku ketua UPT Malioboro dalam wawancara kami;

> *"..itu juru parkir di depan hotel Mutiara pak Sigit juga namanya, Pak Sigit Karsono, dia sekaligus ketua paguyuban. Jangan kira, dia juru parkir tetapi lulusan S2 dia itu, kalah kalian (peneliti). Dia pengacara juga. Tapi juga juru parkir, tiap hari disana. Ya nggak tau itu saking kurang kerjaannya di Jogja atau sanking makmurnya jadi juru parkir.. "*

Kesimpulan

Pengelolaan parkir merupakan salah satu fungsi negara dalam pelayanan publik. Disamping itu potensi yang dimiliki parkir juga besar. Sehingga dalam pengelolaan parkir juga bisa sebagai lahan kontestasi politik antar aktor, baik formal maupun informal. Dalam kasus parkir Malioboro pengelolaan parkir melibatkan banyak aktor. Aktor formal yang terlibat adalah UPT Malioboro yang memiliki legitimasi hukum dalam pengelolaan dan DPRD Kota Yogyakarta yang merumuskan Perda untuk mengaturnya. Sedangkan aktor informal yang terlibat meliputi Paguyuban Parkir Malioboro Ahmad Yani dan para pemilik lahan.

Mekanisme kerjasama antar aktor ini yang terjadi dalam pengelolaan parkir Malioboro. UPT berkerjasama dengan PPMAY mengelola parkir dengan *sharing profit* 25 % UPT, 75% pengelola parkir. Serta ketentuan lain dalam mekanisme pengelolaan parkir. Ada mekanisme *win – win solution* antara UPT sebagai representasi negara dengan paguyuban yang didalamnya terdapat pemilik lahan dan juru parkir.

Namun, fungsi pelayanan publik dalam menyediakan jasa parkir tidak berjalan maksimal. Keterlambatan datangnya negara dalam pengelolaan parkir Malioboro dan kurangnya legitimasi dengan aktor lain menjadi faktor. Negara yang tidak representatif secara politik, sosial, ekonomi dan tidak dapat menjamin kesejahteraan masyarakatnya serta tidak dapat menjamin ketersediaan area publik tersebut menunjukkan bahwa karakter negara dalam dikatakan lemah. Dalam konteks parkir Malioboro negara bisa dikatakan lemah.

Lemahnya negara membuat aktor lain non negara atau aktor informal menguat perannya. Fenomena *local bossism* dimana ada paguyuban dan pemilik lahan yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan parkir Malioboro. Kepemilikan atas *resources* oleh aktor informal ini membuat dominasi perann dalam pengelolaan parkir Malioboro.

Pengelolaan parkir Malioboro bukan hanya masalah penyediaan jasa parkir untuk masyarakat. Namun, terdapat kontestasi politik antara aktor formal dan aktor informal dalam perebutan *resources* parkir Malioboro. Dalam kasus ini menunjukan lemahnya peran negara dan dominasi peran aktor informal. Politik perparkiran yang ada adalah munculnya *local bossism* oleh aktor informal yang mendominasi pengelolaan parkir Malioboro.

Referensi

Creswell , John W. 1998, *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five tradition,* SAGE Publications, London.

Fukuyama , Francis 2005, *Memperkuat negara,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hidayat, Syarif (ed.) 2006, *Bisnis dan politik di tingkat lokal:Pengusaha, penguasa, dan penyelenggara pemerintah daerah pasca pilkada,* LIPI, Jakarta.

Hobbs, F.D 1979, *Traffic planning and engineering second edition edisi indonesia.,* diterjemahan oleh Suprapto T.M. dan Waldiyono 1995. *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas Edisi Kedua,* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Karim , Abdul 2010, *Politik kartel dan politik bossism dalam pilkada*, diakses 14 May, 2010, <http://scriptintermedia.com/view.php?id=4845&jenis=Umum>

Kedaulatan Rakyat Jogja 2010, *Target pendapatan parkir Dishub Yogyakarta 2010 Menurun*, diakses 11 Januari, 2011, <http://

www.krjogja.com/krjogja/news/detail/22921/Target.Pendapatan.Parkir.Dishub.Yogyakarta.2010>

Kompas 2010, *Parkir di London Rp 625.000, Jakarta termurah,* diakses 11 Januari, 2011, <http://nasional.kompas.com/read/2008/07/24/10392125/parkir.di.london.rp.625.000.jakarta.termurah>

Migdal, Joel S 1988, *Strong societies and weak states,* Princeton Unversity Press, Princeton NJ.

Nurcahyo, Andik 2008, *Metode studi kasus (case study) dalam penelitian*, diakses 26 Februari, 2009, <http://islamkuno.com/2008/01/27/metode-studi-kasus-case-study-dalam-penelitian/>

Pemerintah Kota Yogyakarta 2009, *Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran*, Pemerintah Kota Yogyakarta, Yogyakarta.

_____________, *Peraturan Walikota Kota Yogyakarta No.112 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran*, Pemerintah Kota Yogyakarta, Yogyakarta.

Puspitasari, Chandra 2007, *Relasi tiga aktor dalam pengelolaan parkir di Malioboro: Studi tentang relasi kepentingan antara Pemerintah Swasta, dan Masyarakat dalam Pengelolaan Parkir di Malioboro,* skripsi S.IP., Universitas Gadjah Mada.

Rachman, Taufik 2010, *Pengelola parkir diminta gandeng asuransi,* diakses 11 Januari, 2011, <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/10/08/01/127788-pengelola-parkir-diminta-gandeng-asuransi>

Sarantakos, S 1993, *Social research*, Macmillan Education Australia PTY LTD, South Melbourne.

Surabaya Pos 2010, *Dishub Surabaya siapkan sistem portal di parkir pinggir jalan*, diakses 11 Januari, 2011, <http://

www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=a312469341e1cc12840401298ca22f9d&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c>

Yin, Robert K 1996, *Studi kasus, desain dan metode,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wawancara

Wawancara dengan Sigit Kusuma Atmaja, SS, MBA, Kepala UPT Malioboro, Desember 2010

Wawancara dengan Sigit Karsono, SH, Ketua Paguyuban Parkir Malioboro Ahmad Yani, Desember 2010

Wawancara dengan Mujiharjo, juru parkir depan Mall Malioboro, Desember 2010

Wawancara dengan AN, mantan anggota DPRD KotaYogyakarta, Desember 2010

Wawancara dengan NN, warga sekitar kawasan Malioboro, Desember 2010

Lampiran

Lampiran I : Interview guide

Interview Guide dengan Sigit Kusuma Atmaja, SS, MBA, Kepala UPT Malioboro

1. Bagaimana pengelolaan parkir di Malioboro?
2. Siapa yang berwenang mengelolanya?
3. Seperti apa wewenang UPT Malioboro?
4. Secara umum, bagaimana alur pertanggungjawaban pengelolaan perparkiran?
5. Mengenai retribusi, seperti apa?
6. Siapa yang berhak menarik retribusi?
7. Bagaimana retribusi tersebut sampai ke kas daerah?
8. Bagaimana menjaga transparansi dan akuntabilitasnya?
9. Bagaimana pengawasan lapangan terhadap pengelolaan parkir?

Interview Guide dengan Sigit Karsono, SH, Kepala PPAMY (Paguyuban Parkir Malioboro Ahmad Yani)

1. Bagaimana sejarah paguyuban ini?
2. Fungsi paguyuban dari mulai didirikan hingga sekarang? Ada pergeserankah?
3. Bagaimana sistem kerja yang dipakai dalam pengelolaan parkir di lapangan?
4. Untuk pembagian kerjanya bagaimana?
5. Yang melakukan pengawasan di lapangan siapa saja? bagaimana sistemnya?

6. Bagaimana sistem pembagian hasil penjualan tiket parkir? Jangka waktunya?
7. Posisi paguyuban dan negara dalam pengelolaan parkir?

Lampiran II: Transkrip hasil wawancara

Hasil Wawancara dengan Mujiraharjo, Juru Parkir depan Mall Malioboro

Peneliti (P) : Pak, paguyuban yang di Malioboro itu apa to namanya?

Mujiraharjo (M) : PPMAY, paguyuban parkir Malioboro Ahmad Yani (sambil menunjukan jaket seragamnya)

P : Trus kenapa jadi tukang parkir, ga kerja yang lain?

M : Ya nyarik kerja kan sekarang sempit to mbak, disamping itu hobi saya kan mancing, biar bisa buat sambilan kerja yang ga harus dateng terus, ya markir jadinya.

P : Biasanya jaga jam berapa?

M : Kan ada tiga *shift*, dari jam 10-5 sore, jam 5 – 9 malam, 9 – 12 malam, aku jaga depan Mall Malioboro jam 5 sore

P : Jumlah oarang yang ikut paguyuban berapa to pak?

M : Ada 220 tukang parking, kalo mau jadi tukang parkir di Malioboro ya harus ikut paguuban. Kalo mau tanya – tanya paguyuban tanya Pak Sigit depan Hotel Mutiara aja.

P : Emang sehari dapet berapa pak?

M : Rp 2.000.000, 00 /kotak/ bulan. 1 kotak ada 4 anak setiap shiiftnya. Ya tiap tukang parkir sehari bisa dapet sekitar Rp 25.000,00

P : Kalo tukang parkir itu ditunjuk paguyuban ya pak?

M : Ya kalo yang mau jadi tukang parkir ya masuk paguyuban dulu. Dapet surat tugas dan foto.

P : Trus dari paguyuban dapet apa?

M : Biasanya tunjungan kelhairan, kematian. Tiap hari iuran Rp 2500,00/anak/ kotak.

Hasil Wawancara dengan Sigit Karsono, SH, Kepala PPAMY (Paguyuban Parkir Malioboro Ahmad Yani)

Peneliti (P) : Pak paguyuban itu fungsinya apa to?

Sigit Karsono (S) : Ya paguyuban itu dibentuk biar juru parkir pada solid. Misalnya waktu perda. Kami untuk *sharing* aja masalah Perda, soalnya kami termarginalkan gara- gara Perda.

P : Emang kalo bagi hasil ma pemerintah berapa pak?

S : 75 % buat pengelola, 25 % buat negara. Yang pengelola nanti dibagi lagi buat juru parkir pembantu

P : Emang wilayah atau kotak parkir itu yang bagi siapa pak? UPT ?

S : Pembagiannya sesuia tradisi wilayah parkirnya. Ya udah dari dulu kaya turun temurun gitu mbak. Kaya dulu saya ini. Awalnya dulu saya juru parkir pembantu, setelah mempunyai cukup uang, dana juru parkir utama mempunyai utang kepada saya, kemudian saya membeli lahan di depan Hotel Mutiara lama ini.

P : Trus kalo yang nunjuk juru parkir itu siapa?UPT?

S : UPT ga menunjuk juru parkir, paguyuban yang memilih, lalu dapet surat tugasnya.

P : Kalo hubungan paguyuban sama legislatif apa pak?

S : *Sharing* buat ngerancang Raperda. Jadi kami diikutkan gitu mbak.

P : Ooo..Kalau setoran ke UPT nya caranya gimana?

S : Ya pake perhitungan karcis. Misal tiap hari kita dikasih karcis 1 bonggol harganya 60ribu.

P : Ada target ga si pak dari UPT buat setoran?

S : *Win – win solution*. Bargaining antara negara dengan juru parkir. Kalo tiap daerah jumlahnya berbeda.

P : Paguyuban dibawah UPT atau bagaimana pak posisinya?

S : Paguyuban itu tidak dibawah UPT, kedudukannya sejajar.

P : Ada ga pak acara buat kumpul – kumpul juru parking?

S : Setiap tanggal 10 pasti ada kumpul semua juru parkir di Malioboro.

Hasil Wawancara dengan Sigit Kusuma Atmaja, SS, MBA, Kepala UPT Malioboro

Wawancara 1

Peneliti (P) : Siapa sih yang menjadi juru parkir ?

Sigit Kusuma Atmaja (S) : Siapa yang menjadi juru parkir di malioboro itu dari kami, jadi kita yang menunjuk pada siapa saja orang untuk menjadi juru parkir. Lalu kemudian mereka mendirikan paguyuban Malioboro PPMAY (Paguyuban Parkir Malioboro Ahmad Yani) jadi seperti itu, jadi untuk kedepan kita selalu berkoordinasi dengan paguyuban ini karena kan paguyuban ini kan

salah satu fungsinya untuk pembinaan juru parkir yang ada. Karena yang ada di malioboro itu begini, kita menetapkan di malioboro ini ada 60 titik parkir tetapi dalam prakteknya seorang juru parkir membutuhkan pembantu untuk membantu dia. Masa dalam satu titik pas rame dilayani satu orang kecuali pas sepi. Terutama pengawasan juga, kecuali pas sepi cuma satu pun cukup. Dalam pembinaan juru parkir kami banyak melibatkan teman-teman asosiasi parkir

P : Jadi proses penunjukanya itu berdasarkan bapak kenal dengan orang nya atau dibuka pendaftaran ?

S : Ehh jadi gini mbak, jadi kita menerima kewenangan juru parkir ini baru 2010 perda no 18 th 2009 itu kita jadi kita ga asal comot aja, eh ini selama ini kinerjanya bagus ya kita pertahankan tapi kalo ada juru parkir yang kinerjanya kurang bagus yah kita ganti. Loh pertama2 masuk sini th 2009 saya belom kenal padahal januari 2010 harus udah menunjuk siapa yang disini siapa yang disini

P : Jadi semua terdata yah pak ?

S : Iyah terdata- terdata semua , sampai mereka hari ini laku karcisnya berapa saja ada

P : Jadi begini yah pak, paguyuban parkir itu terbentuk setelah…

S : Paguyuban ini ada sudah lama, kantor ini baru berdiri tahun 2009 khusus untuk Malioboro. Paguyuban parkir itu ada sudah lama sebelum kami disini, karena mreka sudah lama ada disini. Ehh,, kita juga kalo mau nunjuk juru parkir bukan hanya menilai setoranya lancar, ga . tapi kita minta pendapat paguyuban juga

P : Ada batasan tahunya ga pak ?

S : Kita batasin surat tugas tuh per enam bulan , yak alai kinerjanya bagus kami lanjut kalo gay ya kita ganti

P : Satu juru parkir itu kan butuh pendamping, kalo yang bantuin itu ada kaderisasi atau gimana pak ?

S : Kita juga untuk pembinaan turun kelapangan menggerakan tiga personel kelapangan ya untuk mengingatkan kalo ada sesuatu, laku karcis berapa . misalnya sseratus lembar berarti ya tulis seratus lembar. Ya setornya hanya 25 rb. Disamping itu kalo ada juru parkir yang bandel ya kita kasih bimbingan

P : Juru parkir itu secara langsung berada di UPT yah pa ?walaupun mempunyai paguyuban sendiri

S : Iyah, gini aja gampenganya jadi UPT itu perusahaan terus kemudian mereka itu karyawan terus paguyuban itu asosiasi tenaga kerja kan perusahaan itu apabila mau mengambil kebijakan harus mempertimbangakan keinginan asosiasi. Ya kita juga sama dalam menyusun Perda parkir kita juga melibatkan mereka. Kalo dilihat Perdanya , kita pengen mensejahterakan juru parkir. Kalo dulu itu dengan parkir yang harganya 500 rupiah 300 pemkot 200 juru parkir kalo sekarang ga, harganya dinaikkan jadi 1000 yang masuk kepemerintah 250 sedangkan juru parkir 750 sehingga walaupun harga karcis dinaikan tapi pendapatan kita malah menurun. Jadi seperti itu tujuan kita untuk mensejahterakan juru parkir

P : Setornya setiap hari pak ?

S : Iyah, jadi kita tiap hari kelapangan laku berapa kita cattet kita punya datanya

P : Mereka tidak digaji lagi yah oleh UPT.

S : Ya gal ah ,kan hitungan kita di jogja itu tidak ada juru parkir yang digaji dibawah UMR.

P : Awalnya sempet ada dilema ga, soalnya peguyuban sudah dibentuk lama sedangkan upt masuk begitu saja langsung menunjuk juru parkir ?

S : Gag, jogja itu laein dari pada yang lain, jogja itu ga pernah ada masalah. Itukan bedanya jogja , kita manajemen pemerintanya manajeman hati. Kalo orang keuangan pasti marah2 yang kemaren 500 rupiah kita dapet 300 rupiah sekarang 1000 rp tapi kita dapernya 250 rupiah. Kita mendahulukan kesejahteraan jru parkir.

P : Bagaimana membedakan parkir resmi dan tidak ?

S : Dari tiketnya ka nada nomer, juru parkir juga menggunakan seragam

P : Paguyuban memberikan kontribusi apa ?

S : Kalo kita mau mengkoordinasi dari pada ngumpulin 60 orang lebih kan susah makanya lwat paguyuban yang mewakili kalo ada pembuatan kebijakan baru. Nanti paguyuban yang menyebarkan info kebawah. Yang jelas mereka butuh kita, kita butuh mereka. Mereka butuh surat dari kita, kita uga butuh mereka untuk mengawasi parkir.

P : Hubungan Dishub dan UPT ?

S : Perwal 112 , untuk kewenangan parkir di jogja ada 3 skpd , dinas perhubungan, pariwisata dan pengelolaan pasar. Pasar itu untuk kawasan pasar, pariwisata itu upt malioboro disini ngurusin malioboro dan ahmad yani sedangkan dihub diluar kedua daerah lain. penunjukan jurkir paguyuban tidak memainkan peran disaat penunjukan jukir berdasarkan kinerja.dengan surat resmi menjadi juru parkir dari jam sigini sampai jam segini dikawasan sini. Ada batas-bbatasnya mba.

P : Kalo ada yang baru kaderisasinya gimana pa?

S : Malioboro sudah penuh mba, jadi ga mungkin.

P : Kalo boleh tau pak omset per hari berapa yah ?

S : Kalo sepeda bermotor yang ditepi jalan per tahun tu 600 juta itu pendapatan yang di kita, untuk mereka ya tiga kali lipat. 1,5m bagi 60 berapa 40 juta to , 40 juta bagi 12 ya 2 juta lebih. Nah diatas UMR to ? Lumayan to untungnya. Karena itu banyak mbak yang mau jadi juru parkir. Itu juru parkir di depan hotel mutiara pak Sigit juga namanya, Pak Sigit Karsono, dia sekaligus ketua paguyuban. Jangan kira, dia juru parkir tetapi lulusan S2 dia itu, kalah kalian (peneliti). Dia pengacara juga. Tapi juga juru parkir, tiap hari disana. Ya nggak tau itu saking kurang kerjaannya di Jogja atau *saking* makmurnya jadi juru parkir, hee..

P : Sejauh ini pemkot ga masalah yah pak dengan pembagian 250?

S : Ya masalah, ya sama sekali ga masalah . kita itu kalo sudah memilih baju kaya begini ya harus melayani.

Wawancara 2

P : Kenapa parkir itu sekarang dikelola oleh UPT malioboro dibawah dinas pariwisata.

S : Agar lebih fokus, semua hal yang mengenai malioboro ditangani oleh UPT. Untuk pasar ya dinas pasar, biar tentunya berbeda konsumen. Malioboro sebagai tempat wisata penanganan parkirnya ya berbeda. dinas pasar biasanya menangani konsumen parkir mulai jam 5 pagi. Sedangkan malioboro konsumennya berbeda. tingkat keluar masuknya kendaraan tinggi. Sehingga cara penanganannya berbeda-beda, ya karena konsumennya berbeda. biar lebih efektif

P : Apakah tingkat efektivitas yang dicanangkan sudah tercapai ?

S : Jadi kita bisa lihat dari tinggkat keluhan konsumen, juru parkir kita berikan materi pelayanan parkir dikawasan wisata. Bagaimana melayani mereka itu berbeda. kalo yang pasar sudah apal ini motor siapa,jadi beda-beda.

P : Sistematika penyetoranya gimana pak ?

S : Tiap hari kita kelapangan, laki karcis berapa kita catat ka nada nomor karcisnya lalu uangnya kami setorkan ke kas daerah bank BPD.

P : Cara UPT mengawasi gimana pak ?

S : Ya setiap hari kita turun ke lapangan, kita jalan kaki.

P : Dulu awalnya muncul siapa dulu pak ?

S : Dulu ya mereka dulu yang muncul, kita kan baru baru. Prinsip kita tuh jogja tertib. Segala keputusan tentunya sudah kita analisa, kita selalu mengedepankan dialog bersama mereka. Contohnya waktu perpindahan dari dishub ke upt. Ya ga ada masalah, karena sebelumnya sudah didiskusikan.

A. <u>Hasil Wawancara dengan AN, Mantan Anggota DPRD Kota Yogyakarta</u>

Peneliti (P) : Kami dari jurusan Ilmu Pemerintahan dan Politik Fisipol UGM ingin minta data dari Bapak selaku Anggota DPR Provinsi Yogyakarta untuk proses penugasan penelitian kami dalam Mata Kuliah Metode Kualitatif dengan judul Politik Perparkiran di Malioboro...

Mantan Anggota DPRD Kota Yogyakarta (AN) : Yang akan ditanyakan tentang apa?

P : Jadi setelah Kami mendapatkan data di lapangan mengenai pengelolaan parkir di Malioboro, ternyata ada data yang cukup

menarik dalam proses *sharing profit* antara pengelola dan juru parkir yang lebih menguntungkan mereka, sedangkan gaji juru parkir sendiri tidak terlalu banyak seperti pembagian yang ada lalu ada, dan ada informasi tentang aktor dibelakang layar yang memiliki akses ke DPR dan memberikan jatah hasil parkir pada mereka, untuk itu kami minta klarifikasinya tentang data ini,,,,

AN : Jadi begini, sebenarnya saya tidak tahu secara langsung nama-nama yang mendapatkan setoran dari luar berhubungan dengan pengelolaan parkir di Malioboro, namun jika ditaya apakah ini ada, ya saya jawab ada praktek semacam ini, karena kalo saya jwawab tidak, berarti saya berbohong, karena saya juga mendapatkan informasi dari kolega yang saya kira kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan. Memang ada salah seorang anggota dewan yang takut ketika ada rencana menaikan pendapatan daerah dari lahan parkir. Karena mungkin jatah setorannya jadi berkurang atau bagaimana, saya kurang tahu, yang jelas system *kaplingisasi* sudah terjadi sejak lama di Malioboro bahkan sebelum pemerintah ikut mengelola parkir disana.

P : Terkait pemisahan pengelolaan parkir di Kota Yogyakarta yang khusus di tangani oleh UPT Malioboro itu prosesnya bagaimana?

AN : Wah kalo itu saya tidak ikut dalam proses pengaturan itu, tapi kalo ingin lebih jelas silahkan langsung diklarifikasi ke UPT Malioboro saja, disana lebh tahu mengenai proses *sharing profit* nya bagaimana, masalahnya saya juga tidak telalu banyak tahu masalah parkir di Malioboro, itu di bawah DPRD Kota, sayakan di Provinsinya.

Lampiran III

Catatan Proses Peneliti

Peneliti kali ini terdiri dari Nailatalmuna N. A., Yuliana Puspitasari, Rani Rustiana, Yenny Retno M, Ahmad Zaki, Adlan Cahyadi, dan Nuku N. S. Penelitian ini yang dilakukan peneliti diawali dengan diskusi mengenai topik yang akan diteliti pada waktu kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif (MPK). Setelah tentang mau membahas apa, akhirnya topik parkir di Maliboro dipilih. Kemudian proses pembuatan proposal penelitian dengan rumusan masalah relasi pengelolaan parkir Malioboro berdasarkan komunitas. Berbekal pengetahuan yang minimal, akhirnya proposal selesai dibuat, walaupun sempat lupa menambahkan judul pada waktu di kirim ke dosen, Mas Bayu.

Kemudian untuk laporan awal, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Mujiraharjo, juru parkir depan Mall Malioboro yang kebetulan bila siang menjadi juru parkir di sebelah salah satu kost peneliti. Selanjutnya di kuliah MPK, Mas Bayu memberikan komentar terhadap makalah kami. Diantara semua proposal makalah yang dikirim, kelompok kami yang rumusan masalahnya paling tidak jelas.Sempat merasa *down* perasaan peneliti waktu itu. Namun, akhirnya dibantu oleh Mas Bayu kami merancang rumusan masalah baru tentang politik perparkiran di Maliboro, dengan kemungkinan bahwa ada aktor informal yang bermain. Selanjutnya ada pembagian tugas untuk wawancara masing – masing responsden. Kelompok kami membagi diri dalam 3 bidang untuk efektivitas kinerja. Tim pertama disebut sebagai tim negara yang bertugas mencari data dari institusi pemerintah mengenai pengelolaan parkir di Malioboro. Tim pertama ini diisi oleh Rani Rustiana, Yuliana Puspitasari dan Achmad Zaki. Tim kedua merupakan tim yang bergerak untuk meneliti keberadaan institusi informal dalam pengelolaan parkir di Malioboro. Tim kedua ini dimotori oleh Nailatalmuna N A, Yenny Retno dan Nuku Nugraha Salam. Tim ketiga merupakan tim yang bergerak diranah data sekunder alias searching data dari internet maupun sumber lain yang relevan, tim ini dilaksanakan oleh Adlan Cahyadi.

Catatan proses kali merupakan catatan proses dari tim negara. Secara rinci akan kami ceritakan bagaimana menariknya mencari data lewat institusi formal negara. Berawal dari *common sense* bahwa parkir adalah kebijakan *public* sehingga pasti dikelola negara, tim kami mengkroscek hal tersebut lewat mesin pencarian di internet. Dari sana kami mendapatkan informasi awal bahwa parkir di Malioboro memang benar dikelola oleh pemerintah daerah Kota Yogyakarta. Lebih fokusnya, parkir Malioboro dikelola oleh Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Malioboro yang berada dibawah garis komandi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.

Pertama kali kami langsung menemui Pak Sardjono selaku tata usaha jurusan untuk meminta surat pengantar wawancara ke UPT Malioboro. Lalu kami menelepon ke UPT Malioboro untuk meminta jadwal yang memungkinkan kami wawancara. Ternyata, prosedurnya sangat mudah sekali, bahkan kami hanya diminta datang langsung ke kantor UPT Malioboro di belakang gedung DInas Pariwisata dan Kebudayaan Propinsi DIY. Senin, 13 Desember 2010 kami menuju UPT Malioboro sekitar pukul 13.00. Suasana begitu ramai di Malioboro sampai jalan Malioboro ditutup. Ternyata ada demo yang katanya dari seluruh masyarakat Yogyakarta menuntut Yogyakarta sebagai daerah Istimewa dan setuju Penetapan. Banyak sekali polisi berjaga di sekitar gedung DPRD dan sepanjang Jalan Malioboro. Tak kalah banyaknya pula polisi yang duduk-duduk di dalam gedung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Propinsi (Dinpar). Kami yang sebelumnya tidak pernah berkunjung ke UPT Malioboro salah ruang dan justru memasuki ruang Kepala Dinpar Propinsi. Setelah diperjelas oleh Kepala Dinpar, kami undur diri dan segera menuju UPT Malioboro. Kesan pertama begitu melihat wujud kantor UPT Malioboro adalah bersahaja. Namun ada sisi garang dan seakan dunia laki-laki sekali karena sebagian besar yang duduk duduk di kantor UPT Malioboro adalah pegawai laki-laki. Hanya menemui sekitar dua sampai tiga pegawai perempuan di kantor tersebut.

Setelah berhasil dengan tetap percaya diri berjalan di depan polisi angkatan muda yang sedang beristirahat di sekitar gedung Dinpar dan

UPT Malioboro, kami bertemu Sigit Kusuma Atmaja selaku kepala UPT Malioboro. Kami segera memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud tujuan kami. Tanpa melihat surat pengantar dari jurusan, wawancara segera dimulai dengan *sersan* (serius tapi santai).

Wawancara pertama berlangsung sekitar 45 menit, setelah kami rasa cukup, kami undur diri. Selama 45 menit tersebut tidak ada hal-hal yang cenderung ditutup-tutupi atau tidak ingin dijawab oleh Sigit Kusuma Atmaja. Bahkan dari wawancara ini kami menemukan banyak realita baru yang tidak disebutkan dalam teori pengelolaan lahan parkir maupun dalam UU yang mendasari pengelolaan parkir di Malioboro. Salah satunya adalah nama ketua paguyuban juru parkir Malioboro, yaitu bapak Sigit Karsono. Dari informasi tersebut ditambah informasi dari juru parkir di sekitar kos-kosan Naila, tim kedua bergerak untuk menemui Sigit Karsono tersebut. Kemudian perihal legislatif yang ternyata tidak banyak menentukan aturan pengelolaan parkir. Kami selanjutnya membuat janji dengan salah satu anggota DPRD Propinsi DIY yang cukup dekat secara emosional dengan mahasiswa Jurusan Politik Pemerintahan, mantan almamaternya. Janjian cukup via sms dan telepon.

Hasil wawancara pertama dirasa belum cukup, kami kembali melakukan wawancara dengan Kepala UPT Malioboro. Sama seperti di awal, prosedur sangat mudah dan hanya via sms kami bisa menentukan jadwal wawancara. Kamis 23 Desember 2010 kami kembali melakukan wawancara yang kedua untuk melengkapi kekurangan data. Tidak banyak yang berubah, ekspresi wajah Kepala UPT terlihat sangat meyakinkan setiap menjawab pertanyaan. Hanya saja kami tidak mendapat data resmi apakah paguyuban itu memberi uang kepada UPT sehingga mereka bisa memiliki lahan parkir yang seharusnya tidak boleh dimiliki perorangan.

Pasca presentasi di kelas dan kelompok kami mendapat banyak masukan, kami segera membuat janji dengan UPT Malioboro untuk melakukan wawancara. Lagi-lagi cukup via sms. Senin, 3 Januari 2011 kami kembali melakukan wawancara.

Sejauh kami melakukan wawancara dengan pihak UPT Malioboro selaku pengelola formal parkir di Malioboro, kami merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak bisa disampaikan kepala UPT namun hal tersebut bisa jadi terjadi.

Sedangkan tim kedua, setelah mendapatkan informasi tentang nama ketua paguyuban. Pada tanggal 14 Desember 2010, kami langsung ke lapangan untuk menemui bapak Sigit. Pertama kali ke lapangan, di parkiran malioboro kami menemui salah seorang tukang parkir yang bernama Benny dan mencoba untuk menggali data untuk mencoba menemui bapak Sigit. Darinya, kami berhasil mendapatkan satu nomer *handphone* yang menurut bapak Benny memiliki nomer bapak Sigit yang kami tuju. Setelah pada akhirnya kami mendapatkan nomer bapak Sigit Karsono, kami membuat janji di lain hari karena hari itu sudah terlalu larut.

Setelah bertemu dengan Bapak Sigit Karsono kami langsung melakukan *interview* dan pada saat yang sama datang bapak sigit yang lain, yakni ketua UPT malioboro. Akhirnya, kami bisa langsung megonfirmasi mengenai bagaimana sistem yang dibuat negara dengan perantara UPT, dan bagaimana implementasinya di lapangan. Yang menarik menurut kami ialah, saat dengan bapak sigit karsono saja, pembicaraan lebih blak-blakkan dan sangat bebas serta nyaman, tetapi setelah bapak sigit ketua UPT datang, pembicaraan menjadi lebih formal dan tampak berhati-hati. Setelah kira-kira 1,5 jam-an kami berbicara banyak akhirnya kami menyudahi pembicaraan kami.

Ketika tim dua menemui Sigit Karsono, Ketua Paguyuban PPMAY (Paguyuban Parkir Malioboro Ahmad Yani), dan disaat yang bersamaan Kepala UPT sedang melakukan pengawasan di lapangan, suasana menjadi sangat tertutup. Atmosfer wawancara yang tadinya lepas menjadi seperti ada penghalang. Ketika Kepala UPT pergi dari lokasi parkir Sigit Karsono, suasana kembali nyaman. Entah apa yang terjadi namun tidak berhasil kami lacak, yang jelas, interaksi kepala UPT dengan Ketua PPAMY bukan sekedar interaksi professional kerja, namun bisa jadi seperti patron dan klien.

Kemudian yang kami lakukan, kami berkumpul untuk menyatukan data-data yang kami dapat dan kami menemukan hal menarik mengenai 'politik' dalam penyelenggaraan perpakiran di malioboro.Setelah berpusing –pusing pada akhirnya hasil penelitain kami selesai dikerjakan. ^_^

Lampiran IV

Foto Perparkiran Di Malioboro

2

Pola Relasi Pemulung dan UPTD Piyungan dalam Pengelolaan Sampah

Mario Sebastian P., Primi Suharmadhi Putri,
Dian Noviawati, Zulkifli, Muhammad Dwiki P., M. Ade Irfan Nugratama,
Harry Fadriansyah, Danang Prayogo

Latar Belakang: Memahami Urgensi TPA Piyungan dan Permasalahan Sampah

Tulisan ini ingin meneliti tentang masalah pengelolaan sampah antara UPTD Piyungan, sebagai tim teknis pemerintah dalam mengolah sampah, dengan komunitas pemulung di area TPA Piyungan yang perlahan datang untuk mencari lahan pekerjaan. Sebagai pelaku yang bersama-sama mengolah sampah dan memanfaatkan sampah sebagai komoditas utama mata pencaharian antar aktor tersebut. Maka pengangkatan tema pengelolaan sampah di TPA Piyungan ini menjadi menarik untuk diteliti untuk melihat pola relasi hubungan antara kedua aktor tersebut, yang sama-sama berperan dalam membantu mengurangi sampah dari hasil peleburan tiga kota: Yogyakarta, Sleman, dan Bantul (Kartamantul). Masalah utama bertambahnya penduduk

dunia adalah bertambah pula produksi sampah, baik sampah rumah tangga ataupun limbah pabrik. Sampah adalah realitas objektif yang akan selalu ada dan mengikuti kehidupan manusia. Saat ini sampah diklaim sebagai penyumbang polusi udara di berbagai penjuru dunia, yang kemudian berdampak pada pemanasan global. Namun, sejumlah negara maju sudah mengadopsi beberapa bentuk pengelolaan sampah mutakhir, sehingga limbah/ sampah dapat di gunakan kembali (*re-use)* dari proses daur ulang (*recycle*) limbah/ sampah tersebut. Teknologi yang canggih memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, apalagi untuk negara berkembang seperti Indonesia. Terlebih, kesadaran penduduk akan bahaya dan pentingnya mengolah sampah juga masih jauh dari harapan. Ditambah lagi, di sejumlah daerah di Indonesia juga masih belum dilengkapi dengan fasilitas TPA dan alat angkut atau truk sampah yang memadai. Contoh yang terjadi kota Ambon pada tahun 90-an. Kota Ambon pernah dinobatkan sebagai Kota Adipura atas kotanya yang bersih. Namun sepuluh tahun kemudian seiring dengan bertambahnya volume transmigrasi, Ambon berubah menjadi kota yang kotor, sampah berserakan di pinggir-pinggir trotoar, namun petugas kebersihan juga urung mengurusi sampah yang terlantar tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa adanya ketidakharmonisan antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sampah, dan menjadi masalah serius terhadap kelangsungan lingkungan sekitarnya.

Langsung menuju ke titik masalah, kota Yogyakarta yang hingga saat ini merupakan kota yang penduduknya sebagian besar berasal dari pendatang. Mayoritas penduduknya adalah mereka yang berstatus pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Ini juga didukung oleh banyaknya lembaga pendidikan dan objek wisata yang tersebar di kota Yogyakarta. Namun, seiring dengan bertambahnya pendatang dan jumlah penduduk asli, Yogyakarta juga dipermasalahkan dengan sampah, baik itu rumah tangga ataupun limbah pabrik. Sehingga sampah sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan kota Jogja bersih dari sampah. Padahal, jumlah penduduk yang terhitung di tahun 2010 adalah 388.088 jiwa. Hal ini menurun dibandingkan pada sensus 2000 yang mencapai 396.711 jiwa, walaupun terjadi penurunan 8.623

jiwa (2,17 persen), namun tetap saja tingkat kepadatan penduduk Jogja masih relatif tinggi, yakni mencapai rata-rata 11.941 penduduk setiap satu kilo meter persegi (Daeng 2010). Terlebih masalah volume sampah yang tidak berhenti, sampah tidak datang dari kota Yogyakarta sendiri, namun terdapat pula kabupaten lain yang juga menyumbangkan sampah, yaitu Bantul dan Sleman. Sehingga sebagai sumber perpadatan penduduk tertinggi, Pemerintah Kota Yogyakarta wajib dalam memberikan solusi konkrit masalah pembuangan limbah sampah. Salah satu programnya adalah YUDP (*Yogya Urban Development Program*). YUDP menerapkan sistem TPA terintegrasi yang dikelola secara bersama-sama oleh kota Yogyakarta, kabupaten Sleman, dan kabupaten Bantul (Terra 2007). Sehingga kemudian di buatlah TPA Piyungan, sebagai alokasi pembuangan limbah sampah dari 3 daerah tersebut. Lokasi TPA tersebut lengkapnya terletak di Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan TPA ini dilakukan pada tahun 1992 dan mulai dioperasikan tahun 1995 di atas tanah seluas 12 hektar dengan kapasitas 2,7 juta meter kubik sampah, masa pakai diperkirakan mencapai sepuluh tahun (Joko & Sri 2007).

TPA Piyungan pada tahun 1995, memiliki luas lahan 12,5 ha dengan pembagian 10 ha yang digunakan untuk badan sampah dan 2.5 ha digunakan untuk area perkantoran. Pengembangan TPA Piyungan ini menerapkan metode *sanitary landfill* dengan penerapan instalasi pengumpulan *leachate* (air limbah) yang menggunakan pipa dengan diameter 3-6 inchi. Selain itu dibangun pula instalasi pengolahan *leachate* dengan menggunakan kolam stabilisasi dan lahan sanitasi (Terra 2007). Adapun truk pengangkut sampah yang datang setiap harinya, menghasilkan 350-400 ton sehari, dari hasil dari peleburan sampah dari tiga tempat tersebut.

Sementara itu, faktor lain penunjang banyaknya produksi sampah adalah faktor aglomerasi mperkotaan (kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, dan faktor ekonomi). Yang dapat dipetakan dalam tabel berikut:

Tabel.2.1.

Korelasi aglomerasi penduduk dengan peningkatan jumlah sampah

Faktor	Sebab	Akibat
Kepadatan penduduk	Padat penduduk	Sampah yang dihasilkan banyak
	Sedikit penduduk	Sampah yang dihasilkan sedikit
Mobilitas penduduk	Mobilitas tinggi	Sampah yang dihasilkan banyak
	Mobilitas rendah	Sampah yang dihasilkan lebih sedikit
Tingkat ekonomi	Tingkat ekonomi tinggi	Sampah yang dihasilkan banyak
	Tingkat ekonomi rendah	Sampah yang dihasilkan lebih sedikit

Sumber : diolah dari observasi lapangan, KPALH Setrajana Fisipol UGM

Awalnya TPA Piyungan dibangun di lokasi yang sepi penduduk, sehingga efek dari sampah tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat. Namun lambat laun, sampah menjadi sumber penghasilan baru bagi warga pemulung sampah. Antara sampah dan pemulung sudah menjadi kesatuan yang saling bergantung satu sama lain. Disatu sisi sampah yang menumpuk harus segera di daur ulang agar mengurangi gunungan sampah untuk menampung sampah lainnya, namun di sisi lain para pemulung juga mengharapkan imbalan jasa berupa upah untuk biaya kehidupan sehari-hari. Belum lagi warga yang mempunyai sapi yang banyak ditemui antara pemulung dan tumpukan sampah-sampah. Sapi juga berperan penting dalam mengurangi tumpukan sampah (pasar), sehingga pemerintah juga dibebankan dengan pembayaran bagi sapi-sapi yang setiap harinya memakan sampah kepada pemilik sapi.

Ironisnya hal tersebut tidak dibarengi dengan fasilitas dinas pengelolaan sampah yang lengkap. Berdasarkan keterangan salah satu pegawai dinas, bahwa kondisi alat berat masih jauh dari yang diharapkan, sehingga proses penataan tumpukan sampah menempuh waktu yang cukup lama. Sementara kondisi alat berat yang rusak masih belum ada anggaran untuk memperbaikinya. Menurut Pak Fery, *Office Manager* Sekber Kartamantul, bahwa anggaran yang dipakai saat ini adalah untuk proses pembiayaan pemeliharaan alat berat yang masih berfungsi dan gaji pegawai. Padahal sampah tersebut didatangkan oleh tiga daerah yang berbeda.

Terlebih lagi, kapasitas TPA Piyungan dalam menampung sampah hampir mencapai batasnya. Diprediksikan sesuai Masterplan Sekber Kartamantul dalam forum P3KT, TPA Piyungan hanya dapat bertahan hingga 2012, dengan adanya penambahan 5 ha maka kemungkinan akan bertahan hingga 2014. *"Ya, berdasarkan Masterlan P3KT Sekber Kartamantul tentang pendirian TPA Piyungan, prediksi kami TPA ini hanya akan bisa digunakan sampai tahun 2012".*(Firha 2010). Banyak pihak menilai, sikap dan jawaban pemerintah dalam memberikan solusi mengenai akan habisnya masa fungsi TPA Piyungan dengan jalan menambah lahan TPA adalah jawaban yang reaksioner, jawaban jangka pendek yang belum tuntas. Hal inilah yang membuat kami merasa penting dan perlu untuk mengulas permasalahan lingkungan di TPA Piyungan, dalam hal ini adalah hubungan/ interaksi pemerintah dengan komunitas pemulung.

Signifikansi masalah sampah ini semakin kuat dengan adanya pencitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Yogyakarta yang menjadikan wajahnya sebagai kota destinasi wisata di Indonesia. Tentunya kebersihan lingkungan menjadi salah satu hal pokok untuk Mendongkrak dan mendukung program-program pariwisata di Yogyakarta.

Rumusan Masalah

Bagaimana hubungan antara UPTD Piyungan dengan komunitas pemulung di TPA Piyungan dalam pengelolaan sampah ?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui hubungan antara UPTD TPA Piyungan dengan komunitas pemulung di TPA Piyungan dalam pengelolaan sampah.
2. Membantu memberikan solusi/ masukan kebijakan atas permasalahan sampah di tiga wilayah Yogyakarta, Sleman, dan Bantul.

Kerangka Konseptual

Masalah pengelolaan sampah di TPA Piyungan yang tidak maksimal, hanya sebesar ± 20% dari sampah tersebut yang dapat didaur ulang sehingga mengakibatkan semakin sempitnya area TPA. Bertambahnya penduduk di tiga daerah yang menjadi asal sampah ini pun semakin tak terelakkan, hal ini tentunya akan berbanding lurus dengan bertambahnya volume dan ragam sampah yang dibuang di TPA Piyungan ini. Selain proses daur ulang tadi, TPA Piyungan ini menggunakan sistem *sanitary landfill* dalam pengelolaan sampahnya mengubur sampah di cekungan tanah untuk kemudian ditimbun dan diratakan dengan tanah kembali. Namun logikanya, seharusnya penimbunan ini hanya dilakukan pada sampah-sampah organik yang dapat diurai oleh tanah. Tidak demikian yang terjadi dengan sampah di TPA Piyungan ini, pemilahan sampah tidak dilakukan secara maksimal oleh pengelola TPA, bahkan bisa dikatakan sebagian besar dari sampah yang dipilah tersebut dilakukan oleh pemulung yang berada di sekitar TPA.

Keberadaan komunitas pemulung di TPA Piyungan ini tidak bisa dipungkiri telah menjadi bagian dalam proses pengelolaan sampah, walau hal ini hanya berlaku untuk sampah yang memiliki nilai ekonomis. Komunitas pemulung yang hadir dengan sendirinya ini tentunya memiliki sistem pengelolaan sampah yang tentu berbeda dengan pengelola resmi TPA Piyungan yang berada di bawah Sekber Kartamantul. Pemulung-pemulung ini memiliki juragan yang nantinya akan membeli hasil sampah yang telah mereka pilah untuk kemudian dibersihkan dan dijual kembali oleh para juragan ke pabrik yang membutuhkan bahan daur ulang. Selain itu, para pemulung ini memiliki hewan ternak sapi dan kambing yang mencari makan di tumpukan sampah (organik). Keberadaan komunitas pemulung dan hewan ternaknya ini tentunya memiliki efek yang positif dalam hal pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah di TPA Piyungan. Oleh karena itu penelitian ini ingin melihat pengaruh keberadaan komunitas pemulung dalam rangka pengelolaan sampah di TPA Piyungan, dan tentu saja hal ini berkaitan dengan masalah perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh Sekber Kartamantul.

Untuk melihat pengaruh yang dilakukan oleh komunitas Pemulung TPA Piyungan terhadap pemerintah, kita mengkajinya dengan meihat pola relasi yang terjadi antara komunitas dengan Negara. Meminjam teori Levitsky tentang tipologi relasi komunitas terhadap Negara (Levitsky & Helmke 2004), berdasarkan tulisan Levitsky dan Helmke yang berjudul *Informal Institutions and Comparative Politics* ini terdapat empat tipologi yang dapat menjelaskan hubungan antara sebuah komunitas dengan Negara.

Tipologi yang pertama menurut Levitsky adalah **Complementary,** pola relasi ini terjadi apabila relasi komunitas terhadap Negara mendekat sedangkan institusi formal (Negara) berjalan efektif, maka yang terjadi adalah institusi komunitas melengkapi institusi formal Negara (mengisi lubang yang belum diisi Negara). Ciri lain dari tipologi ini adalah institusi komunitas dalam pola relasi ini menciptakan atau memperkuat insentif dalam masyarakat lokal, yang memiliki fungsi pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga secara tidak langsung muncul kesepakatan etis antara komunitas dengan Negara.

Tipologi yang kedua dalam kategorisasi Levitsky adalah **Subtitusion.** Tipologi ini terjadi apabila pola relasi antara komunitas terhadap Negara saling mendekat. Namun Institusi formal Negara tidak berjalan efektif, yang akhirnya menyebabkan institusi komunitas menggantikan institusi formal Negara. Adapun yang dimaksud dengan ketidak*efektivan* Negara (*formal rules*) menurut Levitsky adalah melemahnya kepatuhan terhadap peraturan formal dan ketidakmampuan institusi Negara menciptakan kepentingan komunitas dimana hal tersebut diikuti pula dengan menguatnya kepatuhan pada nilai, tradisi, norma yang berkembang dalam komunitas (*informal rules*). Dalam tipologi ini berperannya institusi komunitas yang menggantikan institusi formal negara diasumsikan dan diharapkan mampu merespons dan mengarahkan kepentingan bersama.

Tipologi yang ketiga dalam relasi antara kominitas terhadap Negara adalah pola relasi yang disebut **Accomodating,** tipologi ini terjadi apabila kapasitas Negara berjalan efektif, namun pola relasi antara

komunitas terhadap negara bersifat menjauh sehingga muncul akomodasi institusi komunitas terhadap institusi Negara. Hal ini berarti institusi komunitas dapat menciptakan peraturan yang bersumber dari norma/ nilai komunitas untuk mengatur perilaku anggota atau warganya, dengan secara tidak langsung merubah nilai substantif dari peraturan formal. Sehingga yang terjadi adalah peraturan komunitas itu menegakkan aturan formal Negara.

Tipologi terakhir dalam tipologi Levitsky adalah apa yang disebut dengan *Competiting*. Hal ini terjadi bilamana kapasitas Negara tidak efektif, tetapi pola relasi antara komunitas terhadap Negara bersifat menjauh yang akhirnya memnyebabkan institusi komunitas berkompetisi dengan institusi Negara. Selain itu pola relasi ini muncul dikarenakan institusi formal (Negara) tidak berdaya menjalankan fungsinya sehingga muncul perlawanan dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan formal.(Levitsky & Helmke 2004)

Dengan menggunakan pola relasi Levitsky tersebut, dapat dilihat bagaimana hubungan yang terbangun antara komunitas pemulung Piyungan dengan pihak pengelola TPA Piyungan (negara), khususnya pengaruh yang dibawa oleh komunitas pemulung dalam pengelolaan sampah di TPA Piyungan yang diperkirakan akan penuh pada tahun 2014.

Diagram 2.1. : Kerangka Pikir tentang Pola relasi Levitsky antara Negara (UPTD Piyungan) dengan Komunitas Informal (Komunitas Pemulung TPA Piyungan)
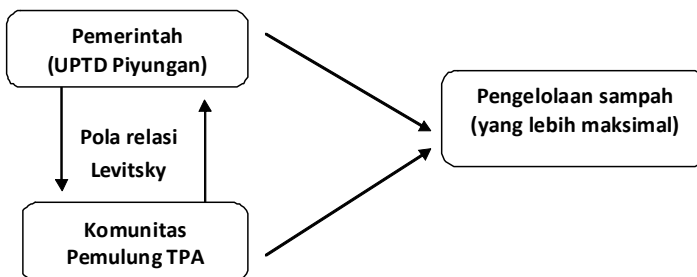
Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode *Case Study*. *Case study* atau studi kasus menurut Bogdan dan Bikien (1982, cited in Scribd n.d) merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Surachmad (1982 cited in Scribd n.d) membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Sementara Yin (1987 cited in Scribd n.d) memberikan batasan yang lebih bersifat teknis dengan penekanan pada ciri-cirinya. Ary, Jacobs, dan Razavieh (1985 cited in Scribd n.d) menjelaskan bahwa dalam studi kasus hendaknya peneliti berusaha menguji unit atau individu secara mendalam. Para peneliti berusaha menernukan sernua variabel yang penting. Berdasarkan batasan tersebut dapat dipahami bahwa batasan studi kasus meliputi: (1) sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar, dan dokumen; (2) sasaran-sasaran tersebut ditelaah secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteksnya masing-masing dengan maksud untuk mernahami berbagai kaitan yang ada di antara variabel-variabelnya.

Untuk meneliti bagaimana TPA Piyungan dalam rangka mengelola sampah, peneliti menganggap bahwa metode studi kasus (*Case Study*) ini merupakan metode yang paling relevan dan sesuai. Metode ini dianggap yang paling tepat lantaran dalam kasus yang diambil, penelitian yang mendalam rinci dan intensif adalah hal yang harus dilakukan seperti yang dilakukan pada studi kasus. Alasan tiga daerah, kota Yogyakarta, kabupaten Sleman, dan kabupaten Bantul memusatkan pembuangan sampah ke daerah Piyungan yang akhirnya bagaikan peribahasa ada gula ada semut, begitulah TPA Piyungan saat ini. Meskipun dianggap tempat yang tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal, TPA Piyungan merupakan suatu daya tarik tersendiri bagi para pemulung untuk mendapatkan pemasukan. Dari sejak pertama dibangunnya TPA ini hingga kini jumlah penduduk yang bertempat tinggal dan mendirikan rumah untuk didiami semakin banyak. Hal tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan apakah dengan

bertambahnya jumlah penduduk yang bertempat tinggal disana dan aktivitas mereka dalam mencari barang-barang yang dapat dijual kembali di gunungan sampah membantu atau kemudian malah mengganggu aktivitas pemerintah di TPA Piyungan, yang notabenenya hanya dapat digunakan hingga tahun 2012 setelah diperluas lima hektar.

Dengan menggunakan Studi Kasus (*Case Study*) kita dapat mencari variabel-variabel yang berkaitan dengan kasus tersebut dan dapat menggabungkan variabel-variabel tersebut, sehingga jawaban atas suatu pertanyaan yang diajukan dalam kasus tersebut dapat dijawab secara lebih mendalam dan rinci, dalam hal ini "Bagaimana hubungan Pemerintah dan komunitas Pemulung dai TPA Piyungan dalam upaya pengelolaan sampah? Apakah dengan hadirnya para pemulung di TPA Piyungan membantu atau menghambat kinerja Pemerintah di dalam mengelola sampah?", yang dapat dibantu dengan variabel-variabel yang berkaitan seperti alasan penambahan luas TPA yang mencapai lima hektar, kehadiran penduduk yang bertambah seiring waktu tidak hanya untuk mencari barang bekas, tapi juga tinggal dan mendirikan rumah disana.

Sistematika Bab

Untuk memudahkan menjawab dan menjelaskan rumusan masalah yang kami angkat, kami membagi tulisan ini dalam beberapa subbab yaitu *subbab pertama* akan terdiri dari lima sub-subbab. Sub-subbab pertama adalah latar belakang yang akan menceritakan mengapa kami mengambil tema ini untuk dibahas serta signifikansi kajian ini. Kemudian sub-subbab kedua akan dituliskan rumusan masalah penelitian ini yang nantinya akan menuntun kami dalam mencari data dalam penelitian ini. Sub-subbab ketiga berisi mengenai tujuan dari penelitian ini, begitu pula dengan manfaat yang kami dapat. Sub-subbab keempat, kami akan menuliskan kerangka konseptual/ teoritikal yang kami gunakan dalam penelitian ini, yaitu teori relasi komunitas dengan negara oleh Steven Levitsky. Pada sub-subbab kelima dituliskan metode penelitian yang kami lakukan, yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan *case study.* Dan yang terakhir dari Bab pertama ini adalah sub-subbab keenam

yang berisi dari sistematika penulisan yang akan mengekerangkai tulisan inimenjadi satu kesatuan yang berkesinambungan, rigid dan runut.

Kemudian *subbab kedua* berisi sekilas informasi Sekber Kartamantul, UPTD TPA Piyungan, terbentuknya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan dan kemunculan (datangnya) komunitas pemulung atau "*Wong Gresek*" di TPA. Penjelasan ini perlu kami tuangkan sebagai prolog/pengantar sebelum kita menjawab rumusan masalah yang kami ajukan. Selain itu, isi dalam bab ini kami maksudkan agar pembaca dapat lebih memahami lebih mendalam tentang topik yang kami angkat. Selanjutnya *subbab ketiga* berisi aktivitas-aktivitas secara terpisah yang dilakukan oleh kedua pihak dalam upaya pengelolaan sampah di TPA Piyungan. *Subbab keempat* akan berisi tentang titik temu hubungan antara pemerintah dalam pengelolaan sampah di TPA Piyungan. Bab ini juga berisi jawaban analisis atas pertanyaan penelitian yang kami angkat. Dan terakhir Bab V berisi hasil kesimpulan dan saran yang kami rangkai dari kerangka tulisan awal sampai akhir berdasar data-data dan teori yang telah kami himpun.

Sekilas Tentang Sekber Kartamantul, TPA Piyungan dan Kehadiran Komunitas Pemulung

Terbentuknya Tempat Pembuangan Akhir Piyungan

Perkembangan elemen perkotaan yang merupakan sebuah sistem yang bersifat lintas batas sangat sering, bahkan selalu ada dan menjadi salah satu ciri utama pengelolaan perkotaan. Daerah istimewa Yogyakarta merupakan sebuah provinsi yang nyatanya memiliki pembangunan yang sangat cepat, terutama di kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Perkembangan elemen perkotaan yang merupakan sistem yang bersifat lintas batas sangat sering bahkan selalu ada dan menjadi salah satu ciri utama pengelolaan perkotaan, khususnya di wilayah metropolitan. Proses pengelolaan isu-isu yang berkembang dalam dinamika perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini salah satunya diakomodasi oleh Sekber Kartamantul. Sekber Kartamantul sendiri adalah

sebuah inisiasi kerjasama antar pemerintahan daerah yang terbangun di era baru desentralisasi, dimana terbentuk berdasarkan komitmen tiga daerah didalam melakukan pembangunan bersama di wilayahnya, terutama pada sektor yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik (Sanctyeka 2009). Salah satu isu penting pengelolaan perkotaan adalah infrastruktur, dimana persampahan menjadi salah satu isu yang sangatr penting di dalamnya, sehingga pengawasan terhadap prasarana perkotaan dengan cara yang kompetitif, adil, dan tepat untuk membantu masyarakat kota dalam menyelesaikan masalah mereka (Kartamantul 2010).

Sayangnya, kebanyakan daerah masih cenderung berorientasi pada wilayah sendiri dibandingkan berorientasi ke wilayah yang lebih luas. Setiap kota/ kabupaten mengembangkan pembangunan masing masing secara tidak terintegrasi dengan kota/ kabupaten di sekitarnya. Akan tetapi, apa yang terjadi di antara kota Yogyakarta, kabupaten Sleman dan kabupaten Bantul menunjukan indikasi yang sedikit berbeda. Tidak adanya sebuah wadah untuk mengintegrasikan pengelolaan sarana perkotaan membuat tiga pemerintah daerah di Yogyakarta menginisiasi pembentukan satu wadah koordinasi. Wadah ini terwujud dalam sebuah sekretariat bersama sebagai instrumen untuk memaksimalkan keterpaduan pengelolaan prasarana perkotaan wilayah perbatasan. Satu catatan penting disini adalah terbentuknya wadah ini didasari juga dari latar belakang kerjasama masa lalu, dan sebuah pemahaman yang sama mengenai pendekatan sistem dalam prasarana perkotaan.(Kementrian PU 1994)

Pada era 90-an, ketiga daerah tersebut yang memang memiliki wilayah yang berdampingan ini menghadapi permasalahan yang sama, yakni resiko pencemaran lingkungan akibat sistem pembuangan sampah dan pengelolaan air limbah yang buruk karena tidak memenuhi standar teknis dan lingkungan. Pada saat itu seluruh sampah sampah dari masyarakat dialirkan melalui sungai-sungai dan selokan selokan yang ada yang membuat adanya penumpukan sampah di mana-mana, sampah yang dikumpulkan dinas pengelola pada saat itu hanya dibuang begitu

saja *(open dumping)* pada lahan kosong yang tersedia di bantaran sungai atau tepi jalan. Bahkan pada wilayah wilayah perbatasan (*border area*) terlihat kurang dan bahkan tidak adanya prasarana yang memadai atau terdapat ketidakserasian dalam teknis dan desain jalan dan drainase yang seharusnya terintegrasi sebagai satu kesatuan sistem. Hal ini terjadi karena tanggung jawab pengelolaan pada wilayah perbatasan menjadi tidak jelas dan tidak adanya koordinasi antar dinas terkait dan antar daerah yang bertetangga untuk mengatasi persoalan di wilayah tersebut.(Kementerian PU 1994)

Mengatasi permasalahan sampah ini, kemudian dibangunlah sebuah tempat pembuangan akhir pada tahun 1992 yang bertempat di Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pengoperasian TPA ini mulai dilaksanakan sejak 1995 diatas tanah seluas 13 hektar dengan kapasitas 2,7 juta meter kubik tanah. TPA Piyungan ini merupakan pos terakhir dibuangnya sampah-sampah yang diproduksi oleh tiga wilayah di Yogyakarta, yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Sekber Kartamantul menjadi aktor yang berperan untuk memfasilitasi tiga wilayah tadi dalam berkoordinasi dan menentukan arah kebijakan yang terkait dengan persampahan. Dasar hukum terbentuknya TPA Piyungan ini adalah melalui Perjanjian Kerjasama Antar Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Dan Kabupaten Bantul, No.07/Perj/Bt/2001, 05/PK.KDH/2001, dan No. 02/PK/2001 Tentang Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Piyungan Kabupaten Bantul. TPA Piyungan dibangun dengan tujuan untuk menyediakan tempat pembuangan akhir yang aman dari perspektif lingkungan. Dalam ini, pembangunan TPA di Bantul didasarkan atas pertimbangan dari berbagai aspek, seperti estetika/ keindahan, geografis, hidrologi, kondisi sosiologi di sekitar tempat yang akan dibangun TPA. Piyungan menjadi pilihan paling rasional mengingat tempat tersebut jauh dari keramaian dan sedikitnya penduduk di sekitar sana. Apabila pilihan pembangunan TPA dijatuhkan pada dua wilayah yang lain yaitu Kota Yogyakarta dan Sleman, hal itu jelas tidak memungkinkan. Pertama, Sleman merupakan penyangga air bagi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, sehingga pembangunan TPA di wilayah ini berpotensi resiko

tinggi pencemaran air. Kedua, apabila pembangunan dilakukan di Kota Yogyakarta, hal itu tidak sesuai dengan kondisi demografis dan kondisi pemukiman yang begitu padat wilayah ini tentu mempunyai potensi resistensi yang tinggi.

Melihat TPA Piyungan tentu kurang menarik apabila kita tidak melihat satu elemen penting yang bermain disana, Hal tersebut adalah para pemulung tentunya. Pada dasarnya kehidupan para pemulung atau *"wong gresek"* tidak jauh berbeda dengan komunitas pemulung di TPA lainnya di Indonesia, mulai dari jam kerja yang tidak menentu, gangguan kesehatan hingga masalah kondisi lingkungan TPA. Di TPA Piyungan sendiri terdapat tidak kurang dari 250 orang pemulung yang berasal dari berbagai daerah, mulai dari daerah Bantul sendiri, Wonosari, Magelang, Gunungkidul dan beberapa daerah lainnya yang biasanya diajak oleh para tengkulak/ juragan/*"BOS"* untuk bekerja disana.

Menurut salah satu *wong gresek* disana, pria yang berasal dari Wonosari yang sudah tinggal di Piyungan ini sejak tahun 1995 bahwa sesungguhnya sudah ada perkumpulan pemulung yang berbasiskan asal mereka, seperti perkumpulan pemulung Wonosari/Gunungkidul. Sebelum tempat pembuangan akhir ini dibuat, tidak banyak penduduk yang ada di Piyungan ini, namun pascadibangunnya TPA jumlah penduduk disana mulai meningkat. Keberadaan TPA Piyungan seakan menjadi magnet yang menarik orang orang di luar daerah untuk datang mengais rezeki sekaligus tinggal disana. Dengan demikian , bahwa sesungguhnya terbentuknya TPA piyungan tersebut setidaknya dapat memberikan mata pencaharian baru bagi mereka yang tidak memiliki keahlian. Tidak hanya bagi penduduk sekitar namun juga bagi penduduk yang sengaja datang ke Bantul untuk menjadi *wong gresek.*

Mekanisme Pengolahan Sampah Oleh Pemerintah dan Komunitas Pemulung

Pemerintah (UPTD TPA Piyungan)

Hadirnya TPA Piyungan merupakan hasil peleburan diskusi tiga daerah yaitu Yogyakarta, Sleman, dan Bantul, yang disingkat Kartamantul. Hal ini diperjelas dengan Perjanjian Kerjasama Antar Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, No.07/Perj/Bt/2001, 05/PK.KDH/2001, dan 02/PK/2001 tentang Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Piyungan Kabupaten Bantul. Awalnya proses penggabungan ini merupakan bentuk kesadaran bersama akan meningkatnya volume sampah akibat tidak tersedianya lahan ataupun terjadinya penumpukan volume sampah di tiga daerah tersebut. TPA Piyungan difungsikan sebagai tempat penyatuan sampah dari tiga daerah, yang di kelelola oleh UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Piyungan sebagai wakil langsung pemerintah dan penyatuan program kerja Sekber Kartamantul yang telah disepakati bersama. Kemudian hasil rumusan program kerja tersebut menjadi acuan dalam menentukan sarana dan prasarana yang menjadi mekanisme kerja dalam mengelola sampah. Adapun bentuk kerjasama antar tiga daerah tersebut adalah:

a. *Sharing* pendanaan untuk operasional dan pemeliharaan TPA Piyungan

b. Penetapan teknologi pengolahan sampah

c. Pengelolaan lingkungan secara terpadu

d. Penetapan tarif retribusi secara terpadu (Kartamantul, 2010)

TPA Piyungan menjadi alokasi tempat pembuangan sampah dengan volume sampah mencapai 315 ton per hari, dengan Yogyakarta sebagai penyumbang volume sampah terbesar (1,375 m3/hari atau sebesar 87,75% dari volume sampah). Dengan volume sebesar itu pemaksimalan tempat dan pengelolaan tumpukan sampah menjadi hal penting kemampuan keberadaan TPA Piyungan untuk bertahan. Karenanya,

penentuan tempat akhir pembuangan (TPA) sampah harus mengikuti persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah melalui SNI No. 03-3241-1994 tentang tata cara pemilihan lokasi TPA sampah dan penentuan tata ruang yang digunakan untuk menentukan lokasi tempat pembuangan sampah, (lihat Peraturan Pemerintah No.102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional). Diantaranya mempertimbangkan aspek ketentuan umum dan kriteria dalam memilih TPA Piyungan sebagai lokasi pembuangan sampah.

Lokasi TPA Piyungan seluas 12,5 hektar dan dibagi atas zonasi sampah, diantaranya zonasi I yaitu zona yang paling dalam, kemudian zonasi II dan III sebagai badan sampah yang dibentuk secara bertingkat dan dengan kedalaman saat ini mencapai 20 meter. Juga terdapat dua alat berat (*backhoe*) dan beberapa truk pengangkut sampah dan tangki air. Kemudian dari sisi infastruktur terdapat satu rumah dinas PU dan satu pos yang masih di berfungsi dari dua pos tempat penimbangan dan pengecekan berat sampah dari masing-masing sampah yang setiap harinya datang ke TPA Piyungan. Namun kondisi jalan disana masih banyak yang rusak menuju badan sampah. Proses kerja dinas dalam mengelola sampah ialah, setiap kali sampah yang datang kemudian di timbang, lalu di tuangkan langsung ke badan sampah zonasi III, kemudian di kelola oleh alat berat, lalu dibarengi oleh para pemulung dalam memilah sampah-sampah. Pemerintah hanya menjalankan fungsi utamanya dalam mengelola sampah dan mengatur badan-badan sampah dalam masing-masing zonasi. Selain itu di TPA Piyungan terdapat juga proses pengaliran limbah (cair) sampah melalui pipa-pipa yang ditanamkan untuk menampung resapan air, dan kemudian ditampung di kolam penampungan air limbah. Seperti umumnya TPA, pada proses dekomposisi sampah organik akan menghasilkan gas-gas dan cairan yang disebut Lindian (*Leachate*). Metoda pengolahan sampah, menggunakan sistem "Sanitary Landfill", tumpukan sampah dilapisi dengan timbunan tanah, serta terdapat kolam pengolahan "leachate" pipa pengendali gas buang, sistem drainase dan lapisan kedap air (Kartamantul 2010)

Pemulung dan Tengkulak

Pengolahan sampah yang dilakukan oleh UPTD Piyungan ini terbukti tidak bisa bekerja secara maksimal, dengan sampah yang masuk sebanyak 200-300 ton setiap harinya, proses pengelolaan sampah menggunakan metode *sanitary landfill* ini tidak cukup mengurangi volume sampah yang semakin menggunung setiap harinya. Hadirnya pemulung baik secara individu maupun yang dibawa oleh para tengkulak (komunitas) ini menjadikan proses pengolahan sampah di TPA Piyungan ini menjadi lebih bervariasi. Pemerintah, pemulung, dan tengkulak merupakan entitas yang berada dalam lingkungan TPA Piyungan. Kehadiran TPA Piyungan di ikuti oleh datangnya para pendatang (pemulung) dalam mencari lahan pekerjaan demi menghasilkan uang. Hal ini berlaku semenjak tahun 1995 sejak mulai beroperasinya TPA Piyungan. Mereka yang datang kemudian mencari pekerjaan dengan ikatan kerja dengan para tengkulak. Masing-masing pemulung dan tengkulak terdiri atas basis komunitas yang berbeda-beda. Dengan kehadiran pemerintah di lokasi TPA Piyungan memfasilitasi pemulung dengan pengadaan program pengecekan kesehatan gratis, kemudian kerja bakti pada setiap hari jum'at dengan program Jumasih (Jumat Bersih). Namun pada dasarnya antara pemerintah dan pemulung tidak mempunyai ikatan formal. Sehingga tidak ada fasilitas yang memadai yang disediakan untuk para pemulung. Lebih jelasnya, apa mekanisme yang akan dijelaskan dari sudut pandang pemulung akan memberikan perbandingan dengan sudut pandang pemerintah.

Sebelum dibangunnya TPA Piyungan, daerah ini sudah didiami oleh penduduk lokal di tiga dusun yang memang memiliki tanah dan rumah di daerah tersebut, dengan hadirnya TPA Piyungan maka menjadi daya tarik bagi penduduk wilayah lain yang ingin memanfaatkan keberadaan sampah-sampah yang menumpuk ini. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa proses kehadiran para pemulung ini tidak hadir dengan sendirinya, melainkan melalui campur tangan para tengkulak. Mekanisme pertama adalah dengan tengkulak yang asli penduduk sekitar TPA Piyungan, tengkulak ini yang awalnya sebagian besar adalah pemulung juga, namun

seiring bertambahnya penghasilan, akhirnya tengkulak ini mulai mencari orang untuk bekerja pada dirinya untuk mencari sampah ditumpukan untuk kemudian dipilah antara yang bisa didaur ulang dan dijual dan sampah yang organik. Biasanya, tengkulak jenis ini membuat halaman rumahnya sebagai tempat pemilahan, pembersihan dan penimbangan sampah yang disetor oleh pemulung anggotanya. Tipe tengkulak kedua adalah tengkulak yang berasal dari daerah lain, yang kebanyakan dari sekitar Wonosari. Tengkulak ini mencari orang-orang yang ingin dan mau bekerja sebagai pemulung di TPA untuk mencari dan memilah sampah organik dan anorganik, dan memiliki sebuah daerah beserta bangunan sederhana sebagai tempat pemilahan, pembersihan dan penimbangan sampah yang bisa didaur ulang untuk kemudian dijual. Perbedaan antara tengkulak yang berasal dari wilayah sekitar TPA dan yang berasal dari luar daerah adalah keberadaan tengkulak di lokasi TPA, tengkulak yang berasal wilayah sekitar tentu saja akan tinggal dirumahnya yang sekaligus tempat pemilahan. Sedangkan untuk tengkulak yang berasal dari luar daerah, tengkulak ini tetap tinggal di daerah tempat dia berasal, mereka akan hadir di tempat pemilahan sampah hanya pada saat pabrik mitranya datang untuk membeli sampah plastic atau kertas yang sudah dibersihkan dan ditimbang.

> *"Ya Pak Sumarno rumahnya di Wonosari mbak, kesini kalo ada telpon dari Surabaya mau ambil plastik, Pak Sumarno kesini cuma pas nimbang plastik yang mau dijual sama orang Surabaya aja, habis itu ya pulang lagi ke Wonosari lagi"* (Edi, pegawai tengkulak 2010, wawancara, 17 Desember).

Dalam proses pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemulung ini memiliki mekanisme bertingkat. Pemulung yang biasa disebut dengan *wong gresek* ini diajak oleh para tengkulak untuk bekerja di TPA Piyungan untuk mencari sanpah-sampah plastik dan kertas yang masih bisa didaur ulang, setiap kilogram sampah ini biasanya dihargai sekitar Rp 400,00. Yang kemudian hasil dari *wong gresek* ini disetorkan ke tengkulak yang diterima oleh pegawai pemilah dan untuk kemudian

dibersihkan, baru kemudian hasil bersih dari sampah ini akan di jual ke pabrik yang membutuhkan sesuai permintaan tengkulak. Selain itu, dalam proses pengelolaan sampah oleh pemulung dan tengkulak ini, kehadiran sapi-sapi milik pemulung ini turut membantu dalam proses pengelolaan sampah organik yang ada di tumpukan sampah di TPA Piyungan. Pada awalnya sapi-sapi ini adalah bantuan pemerintah yang ditujukan ke pemulung dalam rangka peningkatan taraf ekonomi. Setiap 3-4 pemulung mendapat bantuan satu ekor sapi, namun karena tekanan ekonomi, akhirnya sapi-sapi milik pemulung tersebut dijual dan kebanyakan dari sapi yang dijual tersebut dibeli oleh para tengkulak, jadi saat ini jumlah sapi yang ada di TPA Piyungan ini berjumlah sekitar 800 ekor sapi yang dimiliki oleh hanya 55 orang saja yang sebagian besarnya adalah para tengkulak. Jadi dalam pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah ini terlihat lebih signifikan, melalui pemilahan sampah organik dan nonorganik yang data didaur oleh pemulung dan tengkulak hingga sampah organik yang menjadi makanan pokok bagi sapi-sapi yang setiap hari digembalakan di atas tumpukan sampah.

Hubungan Pemerintah dan Komunitas Pemulung dalam Penanganan Sampah

Dalam kasus TPA Piyungan, kinerja pemerintah (UPTD Piyungan) dalam menangani dan mengelola sampah belum terlaksana secara maksimal karena pemerintah hanya menggunakan cara pengelolaan yang masih standar dan konvensional, serta tidak bervisi panjang kaitanya dengan masalah pengelolaan dan ketersediaan lahan penimbunan sampah. Sistem inilah yang ditengarai mengakibatkan kapasitas/daya tampung TPA mendekati titik limitasinya, meski ada upaya penambahan lahan seluas 5 ha, namun itu bukan bentuk upaya penenggulangan sampah yang berarti. upaya tersebut sama sekali belum bisa menjawab dan menyelesaikan problema pengelolaan sampah di tiga kota/kabupaten. Kebijakan dan pemecahan masalah ini hanyalah bersifat sementara dan reaksioner.

Kinerja pemerintah,UPTD Piyungan, hanya bekerja menimbun sampah yang datang setiap hari. Sistem yang digunakan pada mulanya adalah *sanitary land fill* yang kemudian diganti menjadi sistem *control land fill.* Sistem *control land fill* merupakan sistem dimana sampah yang datang ditimbun menggunakan tanah dan biasanya dilakukan dalam kurun waktu sebulan sekali. Sistem *control land fill* dianggap lebih efektif dari sistem *sanitary land fill* yang penimbunanya dilakukan setiap hari,mengingat bahwa pada kenyataanya kemudian banyak orang yang bekerja mencari sampah, ditambah sapi-sapi yang memakan sampah dilokasi yang sama. Proses penimbunan sampah akan terganggu, juga kegiatan pemulung yang pada akhirnya diakui dapat mengurangi volume sampah juga ikut terganggu. Karena pertimbangan efektivitas tersebut, kemudian sistem pengelolaan sampah dirubah.meski belum menyentuh akar permasalahan sampah yang sebenarnya.

Meskipun demikian, dengan sistem ini pemerintah sudah merasa melakukan pengelolaan yang baik, Padahal jika dikaji lebih jauh tindakan pemerintah tersebut hanya sekedar menampung dan menimbun sampah. Belum ada upaya pemerintah untuk melakukan suatu tindakan pengelolaan sampah yang lebih mutakhir. misalnya, hal yang sederhana, belum ada pemilahan terhadap sampah yang organik dan non-organik.

Sebenarnya pemerintah telah memiliki wacana untuk melakukan pemilahan terhadap sampah dari rumah tangga, semua instansi, dan pabrik-pabrik, tetapi hal tersebut belum dapat terlaksana secara nyata. Sampah yang tidak melalui proses pemilahan ini membuat proses daur ulang dan pembusukan sampah menjadi lebih sulit. Jika sampah organik dan non-organik dipisahkan maka proses pendaurulangan dan pembusukan (komposing) akan lebih mudah. Sampah organik bisa ditimbun kemudian diproses menjadi pupuk ataupun dimanfaatkan menjadi makanan ternak yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan sampah non-organik dapat didaur ulang untuk kemudian diolah dan dapat dimanfaatkan kembali, seperti misalnya industri kerajinan.

Kehadiran para pemulung sendiri telah ada sejak TPA Piyungan didirikan. Pada awalnya kehadiran pemulung tersebut tidak didata secara resmi oleh pihak pengelola TPA. Namun seiring berjalannya waktu lama-kelamaan jumlah pemulung yang berdatangan semakin banyak sehingga pada akhirnya pihak pengelola TPA berinisiatif untuk melakukan pendataan terhadap para pemulung. Proses pendataan terhadap para pemulung dilakukan melalui para tengkulak. Setiap tengkulak akan mendata pemulung yang biasanya menjual hasil sampah mereka pada tengkulak tersebut. Kemudian setelah data didapatkan pihak tengkulak akan menyerahkan data tersebut kepada UPTD Piyungan. Hanya itu, tidak lebih. Keterlibatan pihak UPTD Piyungan terhadap para pemulung hanya sebatas pada proses pendataan itu saja, karena ketika proses pendataan tersebut selesai maka pihak UPTD Piyungan lepas tangan terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh para pemulung di TPA. Kalau pun ada yang dirasa sebanding atas timbal balik yang dilakukan oleh Pemerintah, hal itu sangatlah kecil. Yakni pada program-program pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara berkala, dua kali dalam setahun

> "*Di sini dua kali setahun dilaksanakan pemeriksaan kesehatan Mas. Kami juga menyediakan sarana umum berupa tempat peribadatan (mushola) bagi pemulung di sekitaran TPA.*" (Darmanto, pegawai UPTD Piyungan 2010, wawancara, 7 Desember).

Dari fakta tersebut bisa dikatakan bahwa tidak ada hubungan secara langsung antara pemulung dengan pihak pengelola UPTD Piyungan. Proses pendataan yang dilakukan oleh pengelola TPA semata-mata hanyalah sekedar formalitas belaka. Selain itu tidak ada lagi campur tangan dari pihak UPTD Piyungan kepada pihak pemulung, baik itu dalam kegiatan pengumpulan sampah maupun kegiatan organisasional yang dibentuk oleh komunitas pemulung. Tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk melakukan koordinasi dalam menangani sampah-sampah yang ada, baik itu yang berupa forum pertemuan maupun yang berupa instruksi dari pengelola TPA. Kalaupun memang terdapat hubungan antara pemulung

dengan pihak UPTD Piyungan, maka hubungan tersebut terjadi secara tidak langsung. Hubungan yang tidak langsung tersebut terjadi ketika kegiatan para pemulung dalam melakukan pemilahan sampah ternyata sangat membantu pengelola TPA dalam mengurangi volume sampah.

Pada dasarnya kehadiran para pemulung di TPA Piyungan sendiri dinilai cukup membantu dalam pengelolaan sampah. Hal ini dinyatakan sendiri oleh salah seorang pegawai UPTD Piyungan:

> "*Yang mengganggu itu hanya sapi-sapi mereka saja Mas. Tapi itu dulu, sebelum kami mengubah sistem pembuangan sampah dengan tempo berkala control land fill. Kehadiran wong gresek di sini sedikit banyak membantu kami dalam mendaur ulang sampah. Karena sampah yang ditimbun di sini tidaklah sesuai harapan, yakni telah dipisah antara yang bisa didaurulang dan tidak bisa didaurulang*." (Darmanto, pegawai UPTD Piyungan 2010, wawancara, 7 Desember).

Darmanto menyatakan bahwa kehadiran para pemulung secara tidak langsung membantu pihak pemerintah dalam mengurangi volume sampah yang semakin hari semakin meningkat. Secara kasat mata kegiatan para pemulung disana merupakan kegiatan pengumpulan sampah seperti biasa yang dilakukan pada TPA lain. Pengumpulan sampah ini untuk menambah pundi-pundi penghasilan para pemulung. Disisi lain, kegiatan pemilahan sampah tersebut merupakan suatu cara yang dapat membantu UPTD Piyungan dalam mengurangi volume sampah di TPA Piyungan. Hal ini bisa dilihat dari kegiatan mereka yang setiap hari melakukan pemilahan sampah untuk kemudian dijual kepada pihak tengkulak untuk dijual kembali keluar.

Dalam sehari, setiap pemulung berhasil mengumpulkan sampah sebanyak kurang lebih 20 kilogram. Dapat dibayangkan apabila seandainya seluruh pemulung yang ada di Piyungan yang berjumlah sekitar 400 pemulung berhasil mengumpulkan sampah dengan jumlah tersebut, maka setiap hari setidaknya sebanyak 8000 kilogram sampah berhasil

dipindahkan dari TPA. Selain itu adanya ternak sapi yang dimiliki oleh para pemulung juga cukup membantu dalam mengurangi volume sampah, khususnya pada sampah organik.

Dikuatkan dengan pernyataan mantan Kepala UPTD TPA Piyungan, Pak Sudarsono dan staf operator UPTD TPA Piyungan, Pak Darmanto. Kehadiran para pemulung ini dengan aktivitasnya mensortir, memilih dan memilah sampah berpotensi ekonomis bagi kehidupannya juga mengurangi sedikit permasalahan sampah Karta mantul. Prosentase proses daur ulang yang sekiranya hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah sebesar 20% naik menjadi 50%. Hal ini tentu saja membuat umur penggunaan TPA Piyungan menjadi awet/ bertambah.

Dari sinilah kami melihat bahwa komunitas pemulung berperan sebagai pelengkap dari kebijakan dan sistem Negara yang belum sempurna dan masih mempunyai kelemahan.

Kesimpulan

Setelah membaca uraian dan penjelasan dari awal sampai akhir— latar belakang masalah, teori, bahan bacaan dan informasi di lapangan yang kami himpun— maka kami menarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara pemerintah (UPTD TPA Piyungan) dengan komunitas masyarakat pemulung dalam hal pengelolaan lingkungan (pengolahan sampah). Pemerintah kami nilai belum sempurna dalam menjalankan kegiatannya mengelola sampah di TPA Piyungan. Sistem yang diterapkan selama ini ternyata dinilai oleh banyak pihak masih standar dan perlu untuk diberikan sentuhan perubahan/ penambahan untuk menambal kelemahan/ lubang yang ada.

Memang, tidak ada hubungan dan aturan tertulis (hitam di atas putih) antara pemerintah dengan pemulung di dalam program pengolahan sampah. Akan tetapi, terjadi simbiosis mutualisme antara keduanya. Dari penjelasan sebelumnya, diketemukan argumentasi bahwa pemerintah setidaknya tertolong akan masalah keterbatasan kapasitas TPA Piyungan yang diperkirakan habis masa berlakunya pada tahun 2012 nanti. Sedang,

komunitas pemulung tertolong oleh lahan TPA Piyungan yang memberikannya hidup dan kehidupan. Mereka mengais sampah, memilih, memilah, dan mensortir sampah yang masih bisa dijual untuk penghidupannya sehari-hari. Sedang, hubungan antara komunitas pemulung dengan tengkulak adalah hubungan *patron client* yang kuat karena adanya hierarki kuasa ekonomi yang tidak seimbang antara keduanya.

> "*Kalau ditanya tentang relasi khusus antara pemerintah dengan para pemulung, tidak ada itu Mas. Yang ada itu simbiosis mutualisme. Pemerintah terbantu karena sampah-sampah yang seharusnya dari rumah tangga dll sudah terpisah menjadi organik dan anorganik tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan yang memisahkan sampah-sampah itu jadinya para pemulung di TPA Piyungan. Nah, kalo yang dicari Mas-nya dalam konteksnya adalah politik, lebih terlihat antara tengkulak dan para pemulung. Mereka itu bisnis Mas. Hubungannya hubungan transaksional. Tengkulak yang menentukan harga jual. Pemulung yang manut pada harga yang ditentukan*" (Agus Sumartono, DPRD Provinsi DIY-eks DPRD Bantul Komisi III 2010, wawancara, 20 Desember).

Untuk mengkerangkai hubungan/ interaksi pemerintah dengan komunitas pemulung ini, kami memakai teori Levitsky. Hubungan keduanya ini sesuai dengan tipologi complementary, yang mana komunitas pemulung berperan sebagai pelengkap dari kebijakan dan sistem Negara yang belum sempurna, belum lengkap, dan masih mempunyai lubang/ kecacatan/ kelemahan.

Saran

TPA Piyungan masih beruntung belum menjadi momok menakutkan bagi para pemulung seperti yang terjadi di kota-kota besar lainnya. Taruhlah Bantargebang, Leuwigajah, dan seterusnya, dan selanjutnya yang sekarang sudah ditutup karena tragedi longsor yang menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit bagi para pengais bisnis sampah (pemulung) beberapa tahun lalu, akibat dari penggunaan TPA yang terlalu dipaksakan setelah melewati batas maksimum. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para *stakeholder* TPA Piyungan ini mengingat volume sampah yang semakin menggunung. Pakar-pakar teknokratis Sekber Kartamantul telah melakukan prediksi dan analisis tentang masa fungsi TPA Piyungan yang akan berakhir yang akan menjadi kenyataan apabila tidak segera diantisipasi dari sekarang, berikut adalah beberapa langkah yang harus dilakukan berdasar hasil analisis oleh Sekber Kartamantul mengenai solusi perpanjangan masa fungsi TPA Piyungan;

1. **3 R *(reduce, reuse, and recycle)***

   Rem produksi sampah. menjadi solusi utama dan pertama yang masih dinilai relevan dan mampu menjawab secara komprehensif permasalahan ini. Bukan jawaban-jawaban reaksioner tentang perluasan atau pun penambahan lahan pembuangan sampah di kawasan Piyungan. Selama ini, sampah yang dibuang di TPA Piyungan adalah sampah yang masih campur (Fery, *office manager* Sekber Kartamantul 2010, wawancara, 20 Desember). Padahal, idealnya, sampah yang masuk di di TPA Piyungan adalah sampah yang sudah dipilih, dipilah, dan disortir agar proses pengolahannya dapat maksimal. Jadi, TPA Piyungan tidak ceput penuh dan mendekati limitasi kapasitasnya. Yang penting lagi adalah mengubah *mindset*/pola berpikir bahwa singkatan TPA bukanlah Tempat Pembuangan Akhir Sampah, akan tetapi berubah menjadi Tempat Pengolahan Sampah. "Buang" tidak lagi menjadi tradisi yang dilestarikan. Contoh : Walikota Yogya berencana ingin mereduksi sampai 50% produksi

sampah yang dihasilkan masyarakat Yogyakarta yang akan didistribusikan (baca : dibuang) di TPA Piyungan.

Perluasan lahan TPA Piyungan adalah solusi kedua atau terakhir untuk membantu sedikit permasalahan ini.

2. Perhatian serius dari semua pihak

Memprioritaskan dan memberikan porsi perhatian yang lebih terhadap masalah sampah tentu akan berefek positif pula terhadap energi dan reaksi yang dilakukannya. Pemerintah lokal juga diharapkan tidak berpikiran ekonomistik dan tidak lagi saling lirik alokasi dana yang digunakan untuk iuran bersama dalam pembiayaan operasional TPA Piyungan. Selama ini pihak legislatif menengarai pihak eksekutif terlalu mengenyampingkan alokasi dana untuk TPA Piyungan. Terbukti, alokasi dana untuk sektor TPA Piyungan yang mereka susun selalu berada di urutan paling akhir karena alokasi dana ini dinilai hanya membebani APBD dan tidak ada untungnya karena tidak ada balik modal keuntungan langsung yang didapatinya seperti sektor pembiayaan lainnya (Agus Sumartono, DPRD Provinsi DIY-eks DPRD Bantul Komisi III 2010, wawancara, 20 Desember)

3. Memformalisasi posisi dan status pemulung di TPA Piyungan

Ini adalah solusi paling akhir yang kami dapatkan dan kami setujui setelah melakukan koresponsdensi dengan pihak Sekber Kartamantul. Mengingat komposisi potensi dan fungsi mereka selama ini sangat membantu pemerintah di dalam mengurai sampah. Memasukkan mereka di dalam sistem bersama TPA Piyungan, bukan lagi menempatkan mereka di luar garis koordinasi, subordinasi, dan sistem yang selama ini dijalankan. Walau pun sulit dan lama untuk memproses dan mendapatkan pemulung yang rekomendatif sesuai harapan bersama.

"Ini sulit lho Mas untuk praktisnya di lapangan. Kita tahu, pemulung di sana tidak recomended, begitu juga dengan sapi-sapi mereka. Tentu gak semuanya bisa diformalisasikan di dalam sistem pengelolaan sampah TPA Piyungan." ((Fery, *office manager* Sekber Kartamantul 2010, wawancara, 20 Desember).

4. Mengolah sampah dengan teknologi

Memang berkali-kali, Sekber Kartamantul dan UPTD Piyungan mendapatkan tawaran untuk mengolah sampah dengan kecanggihan tekonologi. Akan tetapi hal ini belum terwujud karena pihak investor/ pengembang yang menawarkannya belum memiliki kredibilitas dan bonafiditas usahanya. Harapan ke depan adalah, sampah-sampah di TPA Piyungan dapat diolah menjadi sumber energi yang terbarukan, pembangkit listrik, dll. Proyek padat modal ini memang membutuhkan banyak biaya, akan tetapi ini sangatlah penting dan efektif untuk menjadikan sampah menjadi bernilai guna tinggi.

Terakhir, tentunya kita tidak ingin bukan DIY yang menjadi destinasi wisatawan besar di Indonesia sekaligus citra kota wisata kembali lagi ke zaman 90-an? Zaman yang penuh dengan permasalahan lingkungan, dimana sungai-sungai di tengah kota penuh dengan sampah. Semoga tulisan ini dapat sedikit membantu di dalam penyelesaian permasalahan lingkungan di DIY pada umumnya dan di TPA Piyungan pada khususnya.

Lampiran

Panduan Wawancara:

A. Sekber Kartamantul

1. Apa itu Kartamantul? Siapa saja orang-orang di dalamnya?
2. Bagaimana sejarah Kartamantul itu berdiri? Apa argumentasi penting dibutuhkannya Kartamantul?
3. Apa saja aktivitas yang dilakukan oleh Kartamantul?
4. Bagaimana sejarah TPA Piyungan didirikan?
5. Sejak kapan TPA Piyungan dibangun dan dioperasikan?
6. Siapa yang mengelola dan mengurus TPA Piyungan?
7. Apa alasan pemilihan TPA Bersama ditempatkan di Piyungan? Mengapa tidak di daerah lain?
8. Apakah ada permasalahan/ konflik dengan masyarakat sepanjang pendirian TPA Piyungan selama ini?

B. UPTD Piyungan

1. Bagaimana sejarah TPA Piyungan didirikan?
2. Sejak kapan TPA Piyungan dibangun dan dioperasikan?
3. Sejak kapan Bapak bekerja di TPA Piyungan?
4. Apa dan bagaimana sistem yang diterapkan UPTD Piyungan dalam pengelolaan sampah?
5. Apa saja kekurangan dan kelebihan sistem yang diterapkan UPTD Piyungan?

6. Bagaimana perhatian UPTD TPA Piyungan terhadap masyarakat sekitar?

7. Bagaimana pandangan UPTD TPA Piyungan terhadap pemulung di TPA Piyungan?

8. Sejak kapan para pemulung hadir di TPA Piyungan?

9. Bagaimana pandangan UPTD TPA Piyungan terhadap pemulung yang hadir?

10. Bagaimana interaksi pemulung di TPA dengan UPTD Piyungan? Apakah mereka diberlakukan peraturan-peraturan khusus selama ini?

11. Apakah pemulung dikenai retribusi/ pembayaran bentuk apa pun (dan sifat apa pun) selama bekerja di TPA Piyungan?

12. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh UPTD Piyungan kepada pemulung/tengkulak?

C. <u>Pemulung dan Tengkulak</u>

1. Siapa mereka? Darimana mereka berasal? Mengapa mereka menjadi pemulung? Apakah ajakan dari orang tertentu? Mengapa mereka bekerja di TPA Piyungan dan bukan di TPA lain?

2. Berapa lama mereka bekerja sebagai pemulung/ wong gresek?

3. Apa saja yang mereka lakukan di sana? Adakah pembagian kerja?

4. Bagaimana moda pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemulung?

5. Apakah ada komunitas yang dibentuk oleh mereka? Bagaimana keseharian komunitas tersebut?
6. Berapa pendapatan mereka selama ini? Berapa lama mereka bekerja setiap harinya?
7. Jenis-jenis sampah apa sajakah yang mereka pilih dan himpun untuk dijual?
8. Kepada siapakah mereka menjual sampah yang telah dihimpun? Apakah dengan sepengetahuan pemerintah?
9. Siapakah yang menjamin tempat tinggal (barak-barak) mereka?
10. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh UPTD Piyungan kepada mereka?

Referensi

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional 2005, 'Memahami prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik', *Modul pelatihan badan perenanaan dan pembangunan nasional*, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Jakarta

Daeng 2010, *Jumlah penduduk Yogyakarta turun*, diakses 20 Agustus, 2010, <http://regional.kompas.com/read/2010/08/20/20283111/Jumlah.Penduduk.Yogyakarta.Turun>

Firha 2010, *Target Pemkot, masalah sampah segera selesai*, diakses 28 Februari, 2011, <http://www.krjogja.com/news/detail/22104/www.krjgogja.com>

Joko & Sri 2007, "Pengolahan Lindian (Leachate) TPA Piyungan sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Opak Yogyakarta", *Jurnal Saint dan Teknologi BPPT*, diakses 28 Februari, 2011, <http://www.iptek.net.id/ind/?mnu=8&ch=jsti&id=204>

Kartamantul 2006, *Kerjasama sarana dan prasarana perkotaan, sejarah dan tujuan, Kartamantul*, diakses 28 November, 2010, <http://www.kartamantul.pemda-diy.go.id/index.php?option=content&task=view&id=32&Itemid=51>

Kementrian Pekerjaan Umum 1994, *Sistem informasi manajemen standar bahan rekonstruksidan rekayasa sipil, tata cara pemilihan lokasi tempat pembuangan akhir sampah,* Kementrian Pekerjaan Umum, Jakarta.

Levitsky, S & G, Helmke 2004, 'Informal institutions and comparative politics', *A research agenda.* Perspectives on Politics, Vol 2, No. 4, Hal. 725-740, diakses 28 November, 2010,<http://www.oecd.org/dataoecd/52/23/37791245.pdf>

Sanctyeka 2009, *Panduan Pembentukan organisasi kerjasama antar daerah*, diakses 09 Januari 2011, <http://www.docstoc.com/docs/15960466/Panduan-Kerja-Sama-Antar-Daerah>

Scribd, *penelitian studi kasus dan teori grounded*, diakses 09 Januari, 2011, <http://www.scribd.com/doc/24668989/Penelitian-Strudi-Kasus-Dan-Teori-Grounded>

Terra 2005, 'Rancangan pengembangan TPA Piyungan Yogyakarta', *Kumpulan Abstrak Tugas Akhir Mahasiswa Tahap Sarjana FTSP ITB Tahun 2005*, ITB Central LibraryÃ‚Â's Collection, Bandung, diakses 28 Februari, 2011, <http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptitbpp-gdl-terraprima-24078>

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Ginah, pemulung di TPA Piyungan, 07 Desember 2010

Wawancara dengan Pak Darmanto, Staft TPA Piyungan, 07 Desember 2010

Wawancara dengan Pak Poniran, tengkulah sampah, 17 Desember 2010

Wawancara dengan Pak Sukiman, tengkulah sampah, 17 Desember 2010

Wawancara dengan Pak Edi, pegawai tengkulak sampah, 17 Desember 2010

Wawancara dengan Pak Agus Sumartono, DPRD Propinsi, sekaligus eks DPRD Bantul Komisi C (Pembangunan), 20 Desember 2010

Wawancara dengan Pak Fery, o*ffice manager* Sekber Kartamantul, 20 Desember 2010

3

Seni Mural Sebagai Media Aspirasi Politik Masyarakat

Diah Ajeng P., Dian Erlina, Gratia Eirene,
Ilfan Rasyid Fadhilah,Isdhama Miswardana, Wahyu Prasetyo

Latar Belakang

Tulisan ini dihadirkan guna membahas mengenai peran praktik mural di kota Yogyakarta sebagai media penyampaian pandangan-pandangan politik. Pandangan ini kami analisis kedalam sebuah tulisan yang berjudul "Seni Mural sebagai Media Aspirasi Politik Masyarakat". Dalam tulisan ini, fungsi politik mural merupakan fokus utama dalam melihat mural sebagai media aspirasi bagi masyarakat (khususnya masyarakat seni) dalam menyampaikan pandangan yang ingin disampaikannya. Keefektivan mural sebagai media aspirasi politik menjadi masalah yang kami kaji berikut hubungannya dengan fungsi politik yang dihasilkan dari adanya mural.

Berbagai media dipergunakan dalam menyuarakan aspirasi. Media politik, media massa, hingga seni rupa menjadi saluran yang lazim dipergunakan dalam menyalurkan pendapat serta aspirasi, termasuk dalam

hal politik. Media politik yang berupa partai politik serta perannya dalam pemilu hingga menduduki kursi parlemen ataupun media massa yang umumnya mengacu pada media cetak serta media elektronik tentunya telah menjadi hal yang biasa dalam penyampaian aspirasi politik. Disamping media politik, media massa sebagai sarana penyampaian aspirasi politik rakyat ternyata dalam perkembangannya menuai banyak kritikan terhadap kenetralitasan media massa tersebut, baik sebagai sumber informasi maupun sebagai saluran aspirasi politik. Hal tersebut menjadi masuk akal mengingat adanya aktor yang berkepentingan di dalam pengaturan media massa. Ketika media politik serta media massa dinilai cukup sulit diandalkan sebagai saluran aspirasi politik bagi rakyat dalam menyampaikan pendapatnya, muncullah sebuah alternatif baru dalam penyampaian aspirasi politik.

Seni pada akhirnya dilirik sebagai alternatif media dalam penyampaian pendapat. Dari berbagai perwujudan seni yang ada, mural, hadir sebagai salah satu media dalam penyampaian nilai-nilai politik pada dinding-dinding di penjuru kota. Mural dianggap media yang paling mudah untuk menyampaikan nilai-nilai politik itu. Tak ayal, kini kita dapat menjumpai berbagai variasi seni yang tersebar hingga ke pinggir-pinggir kota dan pemukiman.

Mural, sebuah kata dari bahasa latin “murus” yang artinya dinding. Menurut Susanto (2002:26), mural sendiri didefinisikan sebagai lukisan besar yang dibuat untuk mendukung ruang arsitektur . Pada awalnya, kurang lebih 31.500 tahun yang lalu, Mural ditemukan sebagai penghias pada dinding-dinding Gua Lascaux, bagian selatan Prancis.

Dipilihnya mural sebagai fokus utama pengkajian kali ini melihat pada fenomena-fenomena yang telah ada sebelumnya mengenai mural di bagian negara lain, dimana mural menjadi media komunikasi politik yang turut menceritakan sejarah pemerintahan suatu negara atau bahkan cukup mempengaruhi kondisi pemerintahan pada masa tersebut. Irlandia Utara menjadi salah satu negara yang terkenal dengan Mural yang sarat dengan muatan politik. Beberapa bagian dari dinding di kota tersebut

menggambarkan kekuatan yang politik yang menguasai daerah-daerah bagian di Irlandia Utara tersebut (Media Indonesia 2010). Selain itu, perhatian terhadap mural sebagai salah satu alternatif media komunikasi politik yang penting bagi rakyat juga didasarkan pada keprihatinan penulis mengenai kondisi media massa saat ini yang telah terkorporasi dan dikelola oleh "pemodal" yang pada akhirnya hanya akan menyampaikan berita sekaligus menjadi media yang menghasilkan berita-berita yang cenderung berkaitan dengan kepentingan "pihak-pihak yang berkuasa" tersebut, sehingga mural sendiri dianggap sebagai salah satu jalan keluar alternatif bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politiknya.

Di Yogyakarta, Mural mulai menjamur menghiasi dinding-dinding kota sejak tahun 2003, saat komunitas Apotik Komik memulai proyek besarnya dalam melukisi dinding-dinding publik yang strategis di seputaran Lampuyangan, Yogyakarta (VAM 2009). Keberadaan mural sebagai sarana aspirasi, terutama aspirasi politik, mulai dipertimbangkan ketika mural itu sendiri dianggap sebagai media yang cenderung mudah dimengerti serta cukup "memasyarakat" untuk dinikmati. Perkembangan mural sebagai media aspirasi politik di negara lain (yang ternyata cukup mempengaruhi pemerintah serta masyarakat) ternyata juga cukup mendorong berkembangnya mural bermuatan politik di kota Yogyakarta. Mural yang menggunakan seni rupa sebagai penyempaian pesan politik diharapkan dapat menjadi sebuah media aspirasi politik yang lebih "ringan" untuk dicerna masyarakat.

Rumusan Masalah

Bagaimana efektivitas mural sebagai alternatif *public sphere*?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui seberapa jauh efektivitas mural sebagai alternatif pembentukan *public sphere* di perkotaan, khususnya di kota Yogyakarta.

Manfaat Penelitian

Penelitian tentang efektivitas mural di kota Yogyakarta ini diharapkan paling tidak dapat memberi manfaat umum, seperti:

1. Memberikan pengetahuan mengenai mural sebagai salah satu *new public sphere* dalam mengemukakan aspirasi seseorang khususnya di bidang politik.

2. Memberikan informasi bahwa sesungguhnya penyampaian pendapat (terutama di bidang politik) tidak hanya dapat dilakukan dalam bentuk konvensional.

Kerangka Konsep

Public Sphere atau ruang publik merupakan suatu area dimana orang-orang dapat berkumpul dan secara bebas berdiskusi mengenai suatu isu tertentu yang pada akhirnya dapat membentuk suatu opini publik. Pengertian berkumpul dan berdiskusi ini tidak selalu harus berkumpul berdiskusi secara *real* namun dapat melalui media lain seperti internet maupun seperti yang dibahas kelompok kami melalui mural (tulisan dan gambar)(Colhoun 1992). Kebanyakan pembahasan tentang ruang publik saat ini berpusat mengenai demokrasi partisipatoris dan bagaimana ruang publik ini memunculkan suatu aksi politik.

Hampir semua studi mengenai ruang publik pada saat ini sedikit banyak mengacu pada tulisan Jurgen Habermas terutama dalam bukunya yang berjudul *"The Structural Transformation of Public Sphere- An Inquiri into a Category of Bourgeois Society"*. Untuk membedakannya dari gerombolan atau kelompok biasa, maka diidentifikasi beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sebagai ruang publik yaitu sebagai berikut:

- Persamaan , tidak mesti pengguna ruang publik memiliki latar belakang yang sama namun lebih kepada persamaan posisi interaksi dalam ruang publik ini, sebab ruang publik lebih kepada

area diskusi bersama (*common discussion*) ketimbang suatu organisasi berdasarkan kelas (Hauser 1999:64)

- Adanya kepentingan bersama, adanya suatu isu yang merupakan masalah dari pengguna ruang publik ini (*common issues*), bukan hanya masalah dari kelompok kepentingan tertentu saja. Meskipun kepentingan bersama ini mungkin merupakan hasil dari kompromi kepentingan-kepentingan.

- Bersifat inklusif, dalam artian tidak ekslusif berarti setiap orang memiliki kemampuan untuk mengaksesnya.

Konsep Habermas mengenai ruang publik pada awalnya adalah sebagai sebuah intermediary ruang privat dan negara. Ruang publik menguat dari timbulnya borjuasi yang mengambil alih peran dari tuan tanah dan bangsawan-bangsawan lama yang berbasis keturunan. Pandangan Habermas "ruang publik borjuis" yaitu tempat individu saling berkumpul dan berdiskusi mengenai mediasi kepentingan antar individu, antarkelompok, antara individu dan kelompok, dan juga kelompok dengan Negara dan seterusnya. Ruang publik sebenarnya merupakan ruang partisipasi masyarakat yang memberikan kekuatan politik pada masyarakat untuk melawan dominasi Negara ataupun kelompok lainnya. Dengan demikian, ruang publik merupakan salah satu penyokong dari langgengnya demokrasi.

Namun demikian, Habermas juga mengemukakan kemungkinan mengenai munculnya proses "refeodalisasi" setelah timbulnya demokrasi. Hal ini disebabkan salah satunya karena kapitalime memunculkan raksasa-raksasa media yang pada akhirnya akan memonopoli arus informasi. Ruang publik pada akhirnya dijadikan sarana kontrol dan iklan dari kaum borjuis, yang artinya melanggar prinsip kebebasannya dari intervensi Negara maupun ekonomi. Artinya, kapitalisme yang pada awalnya memungkinkan kemunculan dari demokrasi dapat menjadi kekuatan yang menghancurkannya pula.

Ruang publik dapat berupa bentuk-bentuk yang tradisional maupun bentuk yang baru. Pertemuan antar masyarakat di kedai kopi atau warung , pertemuan warga dibalai desa merupakan contoh ruang publik yang telah ada sejak lama. Kemajuan dan revolusi industri telah memunculkan media massa sehingga setiap orang dapat mengakses informasi melalui radio, televisi maupun berkomunikasi melalui telepon. Dengan munculnya internet, sekali lagi merevolusi bagaimana masyarakat mencari informasi dan membuat orang dapat bertukar ide dan wawasan dengan murah dan cepat (Kellner 1995: 201-217).

Dalam tulisan ini kelompok kami akan mencoba menjelaskan mengenai suatu media ruang publik baru yaitu mural. Mural dapat didefinisikan sebagai suatu gambar atau tulisan berukuran besar pada dinding atau permukaan permanen lainnya. Biasanya digambarkan dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti wajah orang, tokoh komik, wayang dengan sentuhan pop, aktifitas orang, pemandangan, karakter khayalan, ataupun peristiwa-peristiwa sosial yang sedang aktual. Pesan yang disampaikan biasanya sarat dengan kritik sosial, baik horizontal ke tubuh masyarakat sendiri maupun vertikal untuk negara. Mural, sebuah kata dari bahasa latin "murus" yang artinya dinding. Sementara menurut Susanto (2002: 26), mural sendiri didefinisikan sebagai lukisan besar yang dibuat untuk mendukung ruang arsitektur.

Dalam sejarahnya kemudian mural dapat digunakan untuk berbagai kepentingan berbeda. Mural dapat dipakai secara untuk melanggar hukum, maupun justru mendapat patronase dari pemerintah. Mural telah digunakan oleh beberapa Negara otoriter sebagai alat propaganda pemerintah berkuasa. Sebaliknya mural pun dapat digunakan untuk melawan dan menjatuhkan pemerintah. Meskipun demikian mural dengan izin pemerintah tentunya tidak selalu menjadi alat pemerintah namun juga dapat menjadi alat pengkritisi pemerintah itu sendiri.

Pada kasus Irlandia Utara di Inggris mungkin merupakan situs mural yang paling terkenal di masa modern. Terdapat ribuan mural yang telah didokumentasikan sejak 1970-an. Selain itu pada sisi barat Tembok

Berlin yang terkenal itu juga sempat menjadi “kanvas terbesar dunia” yang menggambarkan pertarungan ideologi dua Negara saat itu. Kemudian penggunaan mural menjadi semakin meluas ke seluruh bagian dunia termasuk menyebar ke Indonesia dan juga akhirnya seperti dalam tulisan ini, Yogyakarta.

Salah satu penyebab mural dianggap penting sebab mural telah membawa masuk seni kedalam ruang publik. Mural secara sadar ataupun tidak mampu menanamkan pengaruh yang besar bagi yang melihatnya dan terutama di lingkungan tempat mural itu ada. Mural diharapkan mampu merepresentasikan gagasan-gagasan yang ada pada seniman dan masyarakat, menyampaikan pesan moral, menggagas ide-ide cerdas warga, dan mengekspresikan himpitan sosial masyarakat akar rumput yang selama ini terabaikan (Soehardjo 2005: 112). Mural akhirnya menjadi instrumen komunikasi publik yang tidak dapat lepas dari dimensi politik. Sebagai suatu media yang berfungsi sebagai salah satu instrumen komunikasi publik yang sangat dekat dengan masyarakat, maka mural dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya masalah-masalah sosial politik.

Melalui pemanfaatan seni mural, masyarakat lebih memahami pesan yang disampaikan dengan menggunakan proses berpikirnya agar dapat menangkap ide dari program tersebut dengan benar . Seni mural dapat digunakan sebagai alternatif media penyalur aspirasi pubik karena tampilannya yang menarik dan komunikatif, sehingga dapat menyampaikan pesan yang terkandung dalam mural.

Untuk dapat menjadi media aspirasi rakyat yang menarik mural harus memenuhi konsep AIDCA, yaitu (Ika 2010):

1. *Attention*, mural memiliki tampilan gambar yang menarik dapat membuat masyarakat menjadi ingin tahu isi dari pesan mural tersebut.

2. *Interest*, setelah mendapat perhatian dari masyarakat, maka masyarakat akan memahami isi dari pesan mural.

3. *Desire*, setelah memahami bahwa isi dari mural tersebut berguna, maka masyarakat akan tergerak untuk melaksanakannya.

4. *Conviction*, apabila masyarakat sudah tergerak untuk melaksanakan, maka masyarakat sudah yakin akan kebenaran isi pesan mural tersebut.

5. *Action*, jika masyarakat sudah yakin akan kebenaran pesan tersebut, maka masyarakat akan menjalankan isi dari pesan mural tersebut.

Sebesar apapun daya tarik dari suatu pesan dalam mural, namun komponen komunikasi tidak bisa lepas dari usaha penyampaian pesan. Komunikasi merupakan bagian penting dalam penyampaian aspirasi melalui mural, ada beberapa syarat dalam pengkomunikasian mural yaitu pertama, *audible* maksudnya dimengerti dengan baik. Kedua, *Clarity* artinya pesan yang akan disampaikan melalui mural harus jelas agar tidak menimbulkan pemahaman yang salah sehingga menimbulkan berbagai interprestasi yang berbeda. Ketiga, *touch* isu dari mural harus mengenai hal-hal yang dialami oleh masyarkat dalam kesehariannya sehingga masyarakat merasa dekat dan lebih mudah menerima pesan mural tersebut.

Sebelum tahun 1998 seni mural tidak pernah dibicarakan secara serius dalam wacana seni kontemporer masyarakat, sebab pemerintah Orde Baru mencoba menekan partisipasi politik masyarakat dan seni dijadikan sebagai alat pengusaan politik Negara (VAM 2009). Padahal seni mural sebagai ruang publik telah ada bahkan sebelum republik ini berdiri. Sebelum kemerdekaan seniman Indonesia kerap menggambar pesan-pesan menyindir pemerintah kolonial. Pada masa perjuangan kemerdekaan mural dijadikan sebagai alat untuk membakar nasionalisme pejuang. Dan pada masa orde lama pun mural masih bisa menjalankan

fungsinya sebagai penyampai dari pesan-pesan politik. Namun semuanya seperti telah disebutkan diatas berakhir pada masa Orde Baru sehingga mural tidak lagi dapat berfungsi sebagai ruang publik.

Keruntuhan Orde Baru membawa angin segar dalam dunia seni dan politik. Dengan demikian diharapkan mural dapat menjadi ruang publik lagi sebagaimana mestinya. Selain itu mural juga dapat menjadi media ruang publik baru untuk menjadi alternatif media kapitalis besar sekaligus menjadi penyalur bakat seni.

Seiring berkembangnya arus globalisasi yang semakin tidak terkendali, kota yang pada dasarnya merupakan pusat kegiatan sosial, politik, ekonomi, dan kultural mempunyai peranan penting dalam menyebarluaskan informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan di bidang teknologi informasi pada perjalanannya, tidak hanya membawa perubahan yang cukup signifikan pada kondisi fisik kota, melainkan juga pola kehidupan masyarakat perkotaan (*urban society*). Nilai-nilai baru yang hadir tidak selalu memberi manfaat dan menggantikan nilai-nilai yang lama, akan tetapi seringkali nilai-nilai baru tersebut bercampur menjadi satu dengan nilai-nilai lama yang sebenarnya belum sepenuhnya ditinggalkan. Lebih jauh Max Weber menjelaskan bahwa nilai-nilai baru yang dibawa oleh modernisasi tersebut terkait dengan masalah rasionalitas. Masyarakat perkotaan yang tidak jarang diidentikkan dengan masyarakat modern diindikasikan lebih banyak menggunakan rasionalitas instrumental.

Salah satu efek dari berkembangnya rasionalitas instrumental sebagai konsekuensi dari modernisasi kaum urban tersebut adalah permasalahan keterbatasan ruang publik yang pada hakekatnya merupakan arena berlangsungnya interaksi sosial. Ruang publik yang seharusnya tercipta secara alami dan nihil kepentingan, pada realitasnya menjadi milik sebagian pihak. Pihak-pihak tersebut tidak lain adalah para kapitalis yang memiliki modal lebih untuk dapat mengoptimalkan rasio instrumentalnya. Hal ini terbukti dari beberapa fakta bahwasannya ruang-ruang yang berlabel "publik" diperkotaan seperti *mall*, bioskop, kafe, dan

lain sebagainya pada kenyataannya tidak bisa diakses oleh semua kalangan atau dengan kata lain hanya bisa dinikmati oleh kalangan terbatas. Geliat para kapitalis ternyata tidak hanya berhenti di tengah ruang berlabel publik saja, namun lebih dari itu ekspansi kekuasaan ternyata juga ditunjukkan di tempat-tempat yang sebenarnya merupakan ruang publik "asli" seperti trotoar tempat pejalan kaki, alun-alun, jalan raya, dan lain sebagainya dalam bentuk baliho-baliho raksasa, poster, maupun iklan.

Dalam kondisi masyarakat perkotaan seperti diatas, pemerintah memiliki peran yang cukup signifikan untuk menjaga stabilitas semua sektor kehidupan khususnya dalam sektor sosial budaya. Pada relasi sosial, interaksi menjadi sesuatu yang signifikan dan sepatutnya dipenuhi. Jika tidak, akan menyebabkan renggangnya rasa keterikatan sosial *(social bonding)* antar penduduk kota. Interaksi sosial dalam masyarakat yang seringkali ditandai dengan hubungan tatap muka *(face to face),* serta hubungan antara individu akan menghasilkan pertukaran norma atau moral dan kapasitas untuk *civic engagement* (Putnam 2001: 24). Hubungan tatap muka atau *face to face* menjadi awal dari terbentuknya *social bonding*. Keberadaan ruang publik kemudian dirasa signifikan dalam terjadinya hubungan tatap muka tersebut. Ketika ruang publik jumlahnya terbatas maka timbul sebuah ide bagi sebagian kalangan kaum kota untuk menciptakan sebuah ruang publik baru yang bisa dinikmati oleh semua orang tanpa melihat isi dompet atau status sosial untuk menjaga proses interaksi.

Di Yogyakarta ide tersebut dituangkan dalam sebuah budaya temporer yaitu mural. Mural sendiri hadir sebagai salah satu alternatif bagi kehampaan dan keterbatasan ruang publik. Keberadaannya bahkan bisa menandingi wacana estetis visual 'publik' yang selama ini telah didominasi oleh iklan-iklan produk konsumsi (ekonomi), jargon parpol, dan slogan negara (politik), serta tangan-tangan vandalis gangster (identitas) (Prawoto 2008). Karena sifatnya yang sangat khas, kompleks, dan spesifik, mural menjadi cepat menular bagai virus.

Melalui mural transformasi moral bisa terjadi. Mural tidak ubahnya seperti sebuah kritik sosial atas carut marutnya moral masyarakat modern. Dalam disertasi Herbert Marcuse yang diselesaikan pada tahun 1922, di University of Freiburg, dengan judul *Derdeutsche Kûnstlerroman* (*The German Artist Novel*), dilukiskan bahwa masyarakat modern ditandai dengan hilangnya "keutuhan". Hancurnya persamaan sosial berlangsung sejalan dengan adanya perkembangan dan pembedaan kelas-kelas, berbagai profesi yang kemudian diikuti dengan terbentuknya kebudayaan yang kompleks.

Dalam situasi semacam ini akan timbul pertentangan antara seni dan kehidupan sosial. Melalui disertasi ini pula Marcuse (2003) memperjuangkan penyatuan kembali antara seni dengan kehidupan lewat sebuah ide yang mendalam mengenai keberadaan spiritual yang utuh melalui bentuk estetika baru. Dia menyebutkan bahwa proses penyatuan tersebut merupakan simbol perjuangan historis yang real (Soetomo 2003: 130). Meskipun pemikiran Marcuse tersebut terbilang klasik namun logika yang digunakan tidak jauh beda dengan ideologi seni mural. Mural merupakan bentuk perjuangan bagi sebagian kalangan masyarakat untuk tetap mempertahankan norma, nilai, dan tradisi yang masih mereka yakini kebenarannya di tengah arus perubahan zaman yang semakin tidak terkendali. Rasio masyarakat modern tidak lagi berorientasi pada kepentingan praksis moral (*how to run a good life*) namun lebih kepada rasio yang hanya bersifat instrumental.

Seperti yang dijelaskan dalam pandangan teori kritis yang dikemukakan oleh Mazhab Frankfurt, bahwasannya rasio instrumental adalah rasio yang melihat realitas sebagai potensi untuk dimanipulasi, ditundukkan, dan dikuasai secara total. Rasio instrumental memandang realitas (alam maupun manusia) sebagai objek untuk diklasifikasi, dikonseptualisasi, ditata secara efisien untuk tujuan apapun yang dianggap penting oleh kekuasaan. Menurut Marcuse rasio instrumental inilah yang telah mereduksi manusia menjadi manusia satu dimensi (*one dimensional man*), dimana semua aspek kehidupan manusia, seni, agama, ilmu pengetahuan, dan bahasa, direduksi pada kepentingan kontrol teknis.

Sebenarnya, rasional instrumental tidak akan membawa manusia menjadi lebih rasional, melainkan hanya menyembunyikan irasionalitas dengan kepentingan menguasai (Adian 2005: 54-55)

Melalui seni mural pula, masyarakat memiliki alternatif media baru untuk menyampaikan aspirasi mereka terhadap situasi sosial dan politik yang mereka rasakan kepada pemerintah. Pada akhirnya mural menjadi salah satu instrumen komunikasi publik yang tidak bisa lepas dari dimensi politik. Seni mural merupakan salah satu instrumen komunikasi publik yang sangat dekat dengan masyarakat sehingga dapat digunakan sebagai alternatif masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya terhadap program-program pemerintah yang dianggap kurang memuaskan.

Dengan memanfaatkan seni mural, masyarakat bisa memahami pesan yang disampaikan dengan menggunakan cara berpikirnya sendiri agar dapat menangkap ide dari program atau kebijakan yang ada dengan benar. Jika masyarakat dapat menangkap pesan yang dibuat dengan benar maka secara tidak langsung akan mempengaruhi pola pikir serta sikap sosialnya yang akan berpengaruh pada tingkah lakunya di masyarakat. Sehingga mural bisa berguna sebagai media penyalur aspirasi masyarakat yang akan memperlancar komunikasi publik. Saat seni mural telah dipublikasikan di ruang publik, maka seni mural itu telah menjadi sesuatu yang objektif. Maksudnya bahwa pemaknaan atas karya seni itu sepenuhnya ada di tangan masyarakat, para pembaca, orang yang lalu lalang, dsb.

Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif telah kami pilih dalam melakukan penelitian ini*. Case study research* sebagai bagian dari metode ini pun kami manfaatkan demi mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam dari para pelaku mural yang akan kami teliti disini, dalam hal ini mereka berperan sebagai responsden. *Case study* sebagai metode yang diturunkan dari metodologi intepretif ini diharapkan bisa membantu kami dalam

mencapai data dan pengetahuan yang kami butuhkan untuk selanjutnya di informasikan pada khalayak umum.

Mural sebagai seni non kontemporer yang ber-*impact* pada terbuka ruang *interest* publik yang baru dan bagian dari proses demokratisasi di Indonesia. Tujuan kami adalah memberikan sebuah informasi tentang bagaimana mural sebagai seni jalanan bisa dijadikan ajang untuk bersuara menyalurkan *interest* sebuah kelompok atau individu kepada pihak pihak yang berkompeten dalam menerima aspirasi yang tersirat dalam seni mural tersebut, dengan kata lain, kami bermaksud melakukan pengecekan efektivitas relevansi tujuan mural dari seorang seniman kepada masyarakat sebagai penikmatnya. Mengingat bahwa seni lukis secara umum adalah sebuah keindahan yang pada dasarnya hanya untuk dinikmati para peminatnya, namun dalam kasus mural ini ternyata bisa dijadikan sarana aspirasi yang baru-baru ini berkembang pasca orde baru. Hal tersebutlah yang membuat kami tertarik untuk meneliti fenomena ini lebih dalam lagi.

Case study sebagai metode yang kami gunakan akan memfokuskan kami pada fenomena ini saja tanpa harus melebar pada hal-hal diluar mural tersebut. Dengan metode inilah kami bisa membatasi aktor mana saja yang akan kami libatkan dalam penelitian ini. Karena *case study* menurut Berg adalah metode yang secara sistematis menggali informasi tentang seseorang, setting sosial, peristiwa, atau kelompok yang memungkinkan peneliti untuk mengerti bagaimana proses tersebut berlangsung dan berfungsi (Yin 2003)

Terpilihnya *case study* atau studi kasus sebagai metode penelitian kami tentunya didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan peneliti dalam mengumpulkan data yang akan berpengaruh pada tahap penganalisisan data. Keterbatasan waktu penelitian yang tersedia menjadi salah satu faktor mengapa peneliti memilih metode ini dalam penelitian, hal tersebut berkaitan dengan sifat *case study* yang cenderung tidak membutuhkan waktu penelitian yang lama seperti halnya yang diperlukan oleh etnografi (Buingin 2008: .22). Alasan lain peneliti menggunakan studi kasus dalam

pengolahan data tak lain adalah kelebihan dari studi kasus yang menurut Black dan Champion mengindikasikan keluwesan dalam pengumpulan data, penerapannya yang dapat dilakukan dalam banyak lingkungan sosial serta kesempatan untuk menguji teori (Buingin 2008: 23). Dalam penelitian mengenai mural sebagai salah satu *public sphere* (media ekspresi), keluwesan dalam pengumpulan data adalah hal yang sangat diperlukan.

Keluwesan yang dimasudkan disini adalah multi sumber bukti atau sumber keterangan yang melibatkan lebih dari satu orang ataupun satu pihak. Rumusan permasalahan yang menyinggung mengenai keefektivitasan mewajibkan peneliti melibatkan lebih dari satu informan saja karena mekanisme *cross check* akan kami gunakan demi sebuah objektivitas dalam penelitian dan meminimalisasi adanya bias pada data data yang akan kami sajikan. Keluwesan juga diperlukan ketika pengumpulan data yang membutuhkan berbagai cara dalam mengumpulkannya, seperti wawancara, observasi serta tinjauan pustaka. Penerapan studi kasus yang relevan pada banyak lingkungan sosial juga menyebabkan metode ini dipilih dalam penelitian mengenai efektivitas mural sebagai media ekpresi rakyat. Cukup luasnya batasan penelitian yang dapat digunakan yaitu menyangkut tentang sesuatu yang menarik dari sebuah kasus secara keseluruhan, tidak hanya seperti fenomenologi yang hanya terbatas pada pengalaman seseorang ataupun etnografi yang terbatas pada perilaku individu/sekelompok masyarakat tertentu.

Sebelum kami bergerak terlalu jauh dalam melakukan penelitian ini, kami akan menentukan terlebih dahulu obyek penelitian yang akan kami gunakan secara tepat. Dalam mengintepretasikan data data yang sudah terkumpul, kami akan melibatkan dosen didalamnya demi memperkuat validitas data yang kami peroleh. Dalam penelitian ini pun akan kami persempit ruang lingkupnya, seni mural sebagai setting penelitian utama disini. Jadi pada hasil akhir dari penelitian ini tidak akan relevan untuk mengintepretasikan seni seni lainnya diluar seni mural.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini kami melalukan beberapa cara untuk mendapatkan data, yakni dengan mendalami obyek penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sudah pasti terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang akan kami kumpulkan dan dapatkan berasal dari hasil penelitian terhadap obyek dari komunitas mural serta tak ketinggalan masyarakat penikmat mural tersebut. pengumpulan data primer ini dilakukan dengan *interview* yang bersifat personal dari peneliti kepada responsdennya kepada Masyarakat Sekitar Penikmat Mural, dan Seniman Mural. Penjelasan mengenai dipilihnya responsden tersebut berdasarkan pada kebutuhan peneliti untuk mengetahui motivasi seniman itu sendiri dalam memanfaatkan mural sebagai *public sphere* serta bagaimana masyarakat yang menikmatinya menangkap dan mencerna mural tersebut. Mengenai penggalian data pada masyarakat mengenai keefektivitasan sebuah mural, akan dipilih masyarakat penikmat mural yang biasanya beraktifitas rutin di sekitar lokasi mural tersebut, masyarakat penikmat yang beraktifitas tidak rutin di sekitar lokasi mural, serta masyarakat yang sekedar melintas dan menikmati mural tersebut secara sekilas.

Adapun untuk data sekunder sudah tentu kami mengambil referensi lain dari berbagai media massa cetak dan elektronik yang bermuatan atau bersinggungan dengan seni mural yang berkembang di kota Yogyakarta dan sekitarnya.

Interview (wawancara) merupakan teknik yang akan kami pergunakan dalam menggali informasi dari informan. Dalam prosesnya, peneliti membuat sebuah *point-point/draft* yang berisi tentang garis besar pertanyaan yang akan diajukan kepada seorang responsden. Namun dalam proses *interview* personal ini, kami akan melakukan pendekatan secara informal dengan tujuan tidak terkesan kaku dan data yang diperoleh bisa lebih informatif dan fleksibel serta meminimalisir pembicaraan yang *out of context* dengan responsdennya. Setelah data primer dari seniman serta

masyarakat terkumpul secara keseluruhan, mekanisme *cross check* akan kami pergunakan dalam analisa.

Data sekunder berguna untuk saling mengisi dan meng-*compare* dengan data data primer yang telah di peroleh. Masing masing data yang di kumpulkan entah itu data primer maupun data sekunder sudah pasti memiliki kekurangan di lini lini tertentu. Maka kedua data yang di peroleh tersebut bisa di bandingkan satu dengan lainnya untuk menguji validitasnya serta saling mengisi kekurangan data yang ada. Data primer sudah tentu di peroleh dari media massa elektronik dan cetak yang berhubungan dengan penelitian yang akan kami lakukan.

Seni Mural: Masyarakat dan Seniman

Mural di Mata Seniman Mural

Seni Mural sebagai salah satu seni kontemporer yang menampilkan estetika, keindahan bentuk dan permainan warna yang selama ini kita temui menghiasi pilar pilar *fly over* dan tembok tembok kota, ternyata memiliki pesan yang tersirat dari setiap gambar yang ditampilkan disana. Aspirasi politik dan kritik sosial adalah dua pesan paling krusial yang coba mereka sampaikan pada masyarakat umum yang menikmati karya seni mereka.

Aspirasi politik dalam artian adalah bagaimana seorang seniman memberikan sebuah *feedback* atas segala macam bentuk kebijakan yang sudah dibuat oleh negara dan *impact* jangka panjangnya saat kebijakan tersebut berjalan. Lantas kritik sosial adalah bagaimana seorang seniman menggambarkan sebuah dinamika sosial yang kerap terjadi di lingkungan sekitarnya berdasarkan pengalaman serta *feedback* dari seniman tersebut dalam hal bagaimana mereka menyikapi dan mengkritisi isu-isu sosial yang sedang populer di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu seniman mural di Kota Yogyakarta, beliau mengakui bahwa setiap karya yang beliau

hasilkan memang memiliki pesan, kritik dan aspirasi politik yang ditujukan untuk negara dan masyarakat di sekitarnya.

> *"Setiap seniman di Jogjakarta memang telah dididik oleh lingkungannya (Forum Seni) supaya memiliki sense of politics yang tinggi dan peka terhadap dinamika masyarakat di sekitarnya"* (Subandi Giyanto 2010, wawancara, 15 Desember).

Statement tersebut kira kira telah menggambarkan bahwa seniman di Yogyakarta dan mural sebagai konteks utama penelitian ini, memang sangat peka terhadap perkembangan dinamika sosial dan politik. *Sense of politics* yang dimaksud disini tercermin dari pemilihan tema dan gambar mural yang terkesan mencoba untuk sekedar mengkritik setiap kebijakan pemerintah yang sekiranya tidak berpihak pada rakyat. Isu privatisasi adalah salah satu isu yang coba mereka angkat dalam lukisan mural tersebut, dan mereka mengangkat isu tersebut tentu bukan tanpa alasan. Bagi mereka privatisasi adalah kebijakan yang sangat tidak berpihak pada rakyat. Salah satu lukisan yang sangat lugas merepresentasikan pesan tersebut terdapat di pilar jembatan layang lempuyangan. Secara spesifik, mural memang memiliki pesan tersirat yang mereka (seniman) coba untuk bawa. Namun dalam *scope* yang lebih general, seni apapun itu bisa dimanfaatkan sebagai media aspirasi politik yang dalam jangka waktu tertentu bisa menghasilkan *public sphere* yang baru di masyarakat.

Judul gambar mural dan arti dari gambar tersebut

"Aja Adol Negara (Jangan Menjual Negara)", dengan hanya melihat gambar mural ini saja, masyarakat bisa dengan cepat mengetahui apa maksud dari gambar mural tersebut. Tergambar jelas dalam mural ini, tiga tokoh pewayangan yang salah satunya mengenakan jas dan dasi yang merepresentasikan politisi, safari sebagai birokrat dan sarung yang menggambarkan *wong cilik.*

Divisualisasikan disana terjadi perseteruan antara politisi dengan birokrat dalam rangka perebutan sumber daya dan kekuasaan yang divisualisasikan dengan lumbung padi. Di saat salah satu pihak bisa merebut lumbung padi yang tersedia, maka pihak tersebut akan menjualnya kepada pihak asing mengingat mindset mereka (politisi dan birokrat) yang sangat *profit oriented*. Tentu mereka yang berseteru tidak menyadari bahwa rakyat kelaparan karena sumber daya mereka yang paling vital tengah diperebutkan dan selanjutnya akan di "jual" kepada pihak asing.

Privatisasi adalah poin kunci yang bisa kami ambil dari gambar tersebut. Pengelolaan BUMN yang diserahkan kepada pihak pemodal asing, menurut si pelukis secara tidak langsung telah menjual negara secara partial. Di saat BUMN masih bisa dikelola oleh negara namun kebijakan pemerintah berkata lain yang mengharuskan pengelolaan tersebut diberikan kepada pihak pemodal asing yang ber-*impact* pada degradasi kesejahteraan rakyat.

> *"Negara ini kaya, namun saya menggambar gareng yang sedang terkapar kelaparan"*(Samgar, Mahasiswa Atma Jaya Yogyakarta 2010, wawancara, 12 Desember).

Mengapa mural?

Seniman adalah pihak subordinat yang tidak memiliki cukup *power* untuk berpendapat dalam ranah perpolitikan negara. Pertanyaan yang muncul kemudian, mengapa para seniman tersebut lebih memprioritaskan mural sebagai media mereka untuk beraspirasi di tengah banyaknya industri seni yang lain. Jawabnya karena ada keterbatasan aksesibilitas, modal, dan tingkat efektivitas dalam menyelipkan pesan tertentu didalamnya. Aksesibilitas yang dimaksud adalah keterbatasan dalam mencari ruang untuk beraspirasi lewat karya seni di tengah gempuran media massa cetak dan elektronik yang cenderung mengambil alih semua opini publik yang muncul. Serta mengingat seniman adalah pihak subordinat yang tidak bisa berbuat banyak. Dan

dari segi modal, seni mural tidak menghabiskan banyak pengeluaran dibandingkan dengan bidang kesenian yang lainnya seperti teater, wayang dan lainnya. Sedaangkan mengenai efektivitasnya, mural sangat identik dengan budaya pop dimana semua orang bisa menikmatinya tanpa ada batasan umur, gender, agama dan lain sebagainya serta fleksibel karena bisa kita temui di setiap sudut kota. Dan dengan segala nilai lebihnya, diharapkan mural semakin memasyarakat dan bisa menjadi *public sphere* yang baru dan efektif dalam rentang waktu ke depan.

Mural sebagai public sphere?

Setelah menganalisa hasil wawancara dengan narasumber kami yaitu seorang seniman mural yang bernama Bapak Subandi, disimpulkan bahwa efektivitas *public sphere* terjadi disaat adanya *feedback* yang bersinergis antara masyarakat dengan sang kreator mural mengenai pesan yang seorang seniman bawa lewat karya muralnya. Memang sudah jelas terpampang dalam tulisan sebelumnya bahwa mural adalah karya seni yang bermuatan politik serta sarat akan kritik sosial. Dalam tahap ini, mural sudah menjadi salah satu bentuk *public sphere* yang baru di saat seorang seniman yang ber-notabene seorang rakyat biasa mencoba berpendapat, beraspirasi serta mengkritisi segala macam bentuk kebijakan negara, dan hasil karya tersebut di lempar ke ranah publik dan membiarkan publik untuk melihat dan menilai serta membuat berbagai asumsi sendiri mengenai apa makna dan tujuan dari mural tersebut. Singkat kata, mural adalah salah satu bentuk *public sphere* yang baru. Namun untuk menguji masalah tingkat keefektivitasannya, kami akan mengkomparasikan temuan data antara seniman dengan data dari masyarakat yang akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya.

Mural dalam pandangan masyarakat

Masyarakat yang yang merupakan penikmat karya mural di sepanjang kota, termasuk mural yang dinilai bermuatan politik, dijadikan sebagai narasumber yang berfungsi sebagai pengklarifikasi indikator mural sebagai *public sphere* yang telah diungkapkan oleh pelukis

sebelumnya. Dalam penelitian kali ini, terdapat tiga elemen masyarakat yang dipilih menjadi narasumber untuk menilai ke*efektivan* sebuah mural sebagai *public sphere*, yaitu:

- Individu yang memiliki aktivitas rutin di sekitar tempat mural (salah satunya rutinitas mata pencaharian)
- Individu yang sering (atau sedang) melakukan aktivitas di sekitar lokasi mural namun aktivitas tersebut tidak bersifat rutin
- Individu yang melintas di lokasi mural (*commuter*).

Pemilihan narasumber dari elemen masyarakat yang berbeda bertujuan untuk memperoleh keseimbangan data dari pandangan masyarakat mengenai keefektivitasan mural itu sendiri.

Dari beberapa data wawancara yang diperoleh, maka beberapa pendapat dari masyarakat tersebut, antara lain :

1. Mural cukup menarik untuk dinikmati, sehingga mudah dipahami.

   Kehadiran mural yang menghiasi dinding kota seperti yang telah diperkirakan sebelumnya, cukup menarik minat masyarakat untuk menikmatinya. Gambar yang dibuat dengan nilai artistik yang tinggi ternyata membuat masyarakat yang menikmatinya tak hanya berhenti pada tahap menikmati saja, melainkan juga berusaha untuk menangkap pesan dari gambar tersebut.

   "*Waktu liat gambar ini ya langsung senyum-senyum sendiri, soalnya udah lakonnya wayang, tulisannya juga nyindir pemerintah...*"(Samgar, mahasiswa Atma Jaya Yogyakarta 2010, 12 Desember)

   Itulah penuturan Samgar, seorang mahasiswa Universitas Atma Jaya semester 7 yang saat itu sedang melintas

di sekitar lokasi mural. Menurutnya, gambar yang tertuang dalam sebuah mural lebih bersifat ringan, tidak memusingkan, namun cukup sarat dengan pesan yang dinilai menyindir pemerintah. Mural dianggap tidak bersifat memaksa penikmatnya untuk berpikir keras, namun tetap mampu menyampaikan pesan yang dibuat pelukis dengan cara yang ringan dan cukup "menyegarkan". Berbeda dengan televisi yang menurutnya cenderung sering menyajikan berita dengan melebih-lebihkan, yang justru membuat berita tersebut semkain sulit dinikmati.

Tak berbeda jauh dengan Samgar, Bapak Paiman yang berprofesi sebagai seorang penarik becak yang sehari-harinya *mangkal* tepat di sebelah lokasi mural mengungkapkan bahwa mural merupakan sarana yang cukup unik dalam menyampaikan pesan-pesan politik. Paiman berpendapat bahwa gambar-gambar tersebut merupakan *sanepa* dari cerita kuno Jawa mengenai penggunaan tokoh wayang sebagai tokoh sentralnya. Adanya penokohan wayang dalam mural dianggap lebih dapat ditangkap oleh masyarakat (Paiman, tukang becak didaerah Jembatan Lempuyangan 2010, 8 Desember).

Kehadiran mural di sepanjang tembok kota memang bertujuan utama memberikan sebuah pemandangan yang segar serta menghibur, meskipun di balik hampir keseluruhan mural ada pesan yang ingin disampaikan oleh pelukis, termasuk pesan politis. Adanya mural dalam menyampaikan pesan-pesan tertentu dari pelukis ternyata lebih dapat ditangkap secara ringan tanpa mewajibkan penikmatnya untuk berpikir serta memberikan respons secara langsung.

2. Mural dianggap mampu "menggerakkan" masyarakat

Apabila kembali melihat fungsi-fungsi mural dalam menyampaikan sebuah pesan dari pelukis, kehadiran mural yang ada di sepanjang tembok perkotaan

tentunya juga bertujuan agar para penikmatnya "tergerak" untuk melakukan pesan yang ada dalam mural tersebut.

"Wis sakmestinya tho ya prihatin. Wong dibayangkan tho ya mbak, orang negeri kaya, beras padi ada dimana-mana..lha kok rakyatnya bisa kelaparan..." (Paiman, tukang becak didaerah Jembatan Lempuyangan 2010, 8 Desember).

Penuturan tersebut keluar dari mulut Bapak Paiman ketika ditanyai mengenai pendapatnya ketika melihat mural tersebut dan merenungkannya. Diakuinya, mau tak mau setiap hari dirinya memang harus menikmati gambar mural tersebut, karena di lokasi itulah dirinya memarkirkan becaknya untuk menunggu penumpang yang akan menggunakan jasanya.

Tergeraknya atau termotivasinya masyarakat ketika melihat sebuah gambar mural merupakan tahap selanjutnya setelah individu dalam masyarakat tersebut telah melihat serta mengerti apa yang dimaksud gambar dalam mural tersebut. Respons yang diberikan oleh setiap penikmat mural tentu saja berbeda-beda mulai dari tergeraknya hati hingga adanya tekad untuk melaksanakan pesan tersebut.

Miswa, seorang ibu rumah tangga yang terkadang membawa putrinya yang berusia 3 tahun untuk menikmati pemandangan kereta api yang melintas di lintasan kereta api, dengan polosnya menyatakan keprihatinannya terhadap pemerintahan Indonesia sekarang ini yang dinilai bekerja hanya demi kepentingan untuk memperkaya dirinya sendiri.

"Apa-apa uang sekarang ini, Mbak...mau masuk sekolah aja mahalnya minta ampun, ga mustahil toh kalo negara juga sampe dijual pejabat demi

uang....” (Miwsa, ibu rumah tangga seputar rel Stasiun Lempuyangan 2010, 20 Desember)

Berbeda dengan respons yang diberikan oleh Samgar, dirinya bertekad akan menjadi seorang birokrat yang baik kelak apabila dirinya berhasil menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Adanya lukisan mengenai pandangan politik dari seseorang (pelukis) ternyata cukup dapat ditangkap, bahkan dinikmati oleh orang-orang yang melihatnya. Mural politik yang menjadi kajian kami dianggap dapat membangkitkan asumsi masyarakat yang melihat serta mengerti pesan mural tersebut untuk menentukan emosi ataupun sikap terhadap isi pesan mural tersebut, meskipun respons yang ditimbulkan mungkin saja berbeda-beda.

3. Mural merupakan media penyampaian pendapat bagi rakyat

‘“Nek di tivi itu kan kayak panggung sandiwara, mbak...udah diatur siapa yang habis ini naek, habis ini turun, ya yang maen orang-orang sana itu yang petinggi-petinggi. Wong sampun kagungan tivi piyambak-piyambak kok...”

“”Piyambak-piyambak” maksudipun menapa, Pak?”

“Ya…kan sampun gadhah dewe-dewe…Trans ono sing nduwe, Metro, RCTI ono sing nduwe..nek koyo saya, mbak’e, kan bisanya cuma ngerasani...nek iso nggambar yo nggambar, nek ra iso ya uwis ngerasani koyo saiki, ya tho?” (Paiman, tukang becak didaerah Jembatan Lempuyangan 2010, 8 Desember).

Dengan menggebu-gebu Paiman menceritakan mengenai media massa sekarang ini. Televisi serta media-media surat kabar dipandangnya sebagai media yang telah dimiliki oleh “petinggi-petinggi di sana”.

Kami tak ingin menspesifikkan serta menerka-nerka siapa yang dimaksud oleh Paiman tersebut, namun yang jelas tersirat dari perbincangan tersebut adalah bagaimana seorang Paiman, seorang penarik becak yang notabenenya sering dipandang sebelah mata dalam memahami dunia perpoltikkan pun menganggap bahwa media massa arus utama yang ada sekarang ini tidaklah lagi bersifat netral sebagaimana mestinya etika kenetralan sebuah media. Mural, yang saat ini masih cenderung terdapat kebebasan untuk melukisnya, dianggap sebagai salah satu media yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat kecil untuk mengungkapkan pendapat politiknya ketika media massa arus utama serta partai politik tidak mampu menampung aspirasi mereka karena telah dikuasai oleh para “petinggi-petinggi”.

Dengan alasan yang berbeda, Miswa berpendapat bahwa mural memang merupakan salah satu media yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat, namun kali ini Miswa menggunakan sifat mural yang lebih *accessable* ketimbang media pemyampaian lainnya. Keterbatasan masyarakat dalam mengakses media massa arus utama dalam menyampaikan pendapatnya membuat mural dianggap sebagai media yang lebih memasyarakat serta dapat dinikmati secara lebih memasyarakat pula.

4. Mural merupakan media yang cukup sensitif, sehingga perlu berhati-hati dalam mempergunakannya.

Meskipun sebelumnya mural dinggap sebagai sebuah media yang baik dalam menyampaikan aspirasi, namun himbaun untuk tetap “bijak” dalam melukis sebuah mural, terutama yang

bermuatan politik. Hal tersebut diungkapkan Samgar, bagaimana sebuah mural sangat berpotensi menyulut kemarahan bagi pihak-pihak yang merasa "tersinggung" oleh kehadiran serta cerita dalam mural tersebut. Cerita yang dinilai cukup menyinggung tentunya akan beresiko melahirkan sebuah konflik, baik konflik antara sesama masyarakat ataupun pemerintah dengan masyarakat. Maka dari itu, perlu adanya sebuah kebijaksanaan serta penggunaaan etika serta estetika yang tepat pula dalam menggambarkannya.

Beberapa poin yang telah dipaparkan tersebut merupakan rangkuman dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan di masyarakat. Namun demikian, ukuran keefektivitasan mural sebagai media ataupun *public sphere* terutama dalam perpolitikan, belum dapat dinilai serta dibuktikan apabila belum ada pengecekan serta pengkroscekan data antara pendapat masyarakat dengan data hasil wawancara dengan pelukis, dimana pelukis merupakan aktor utama yang bermaksud menyampaikan aspirasinya (yang kemudian dijadikan sebagai indikator) serta masyarakat sebagai penikmat yang diharapkan dapat menangkap isi dari pesan yang ada dalam sebuah mural.

Mural: Hiburan atau Media Alternatif

Cross Check antara Seniman dan Masyarakat

Melalui mural transformasi moral bisa terjadi. Mural tidak ubahnya seperti sebuah kritik sosial atas carut marutnya moral masyarakat modern. Dalam disertasi Herbert Marcuse yang diselesaikan pada tahun 1922, di University of Freiburg, dengan judul *Derdeutsche Kûnstlerroman* (*The German Artist Novel*), dilukiskan bahwa masyarakat modern ditandai dengan hilangnya "keutuhan". Hancurnya persamaan sosial berlangsung sejalan dengan adanya perkembangan dan pembedaan kelas-kelas, berbagai profesi yang kemudian diikuti dengan terbentuknya kebudayaan yang kompleks.

Dalam situasi semacam ini akan timbul pertentangan antara seni dan kehidupan sosial. Melalui disertasi ini pula Marcuse memperjuangkan penyatuan kembali antara seni dengan kehidupan lewat sebuah ide yang mendalam mengenai keberadaan spiritual yang utuh melalui bentuk estetika baru. Dia menyebutkan bahwa proses penyatuan tersebut merupakan simbol perjuangan historis yang real (Soetomo 2003: 130). Meskipun pemikiran Marcuse tersebut terbilang klasik namun logika yang digunakan tidak jauh beda dengan ideologi seni mural. Mural merupakan bentuk perjuangan bagi sebagian kalangan masyarakat untuk tetap mempertahankan norma, nilai, dan tradisi yang masih mereka yakini kebenarannya di tengah arus perubahan zaman yang semakin tidak terkendali. Rasio masyarakat modern tidak lagi berorientasi pada kepentingan praksis moral (*how to run a good life*) namun lebih kepada rasio yang hanya bersifat instrumental.

Seperti yang dijelaskan dalam pandangan teori kritis yang dikemukakan oleh Mazhab Frankfurt, bahwasannya rasio instrumental adalah rasio yang melihat realitas sebagai potensi untuk dimanipulasi, ditundukkan, dan dikuasai secara total. Rasio instrumental memandang realitas (alam maupun manusia) sebagai objek untuk diklasifikasi, dikonseptualisasi, ditata secara efisien untuk tujuan apapun yang dianggap penting oleh kekuasaan. Menurut Marcuse rasio instrumental inilah yang telah mereduksi manusia menjadi manusia satu dimensi (*one dimensional man*), dimana semua aspek kehidupan manusia, seni, agama, ilmu pengetahuan, dan bahasa, direduksi pada kepentingan kontrol teknis. Sebenarnya, rasional instrumental tidak akan membawa manusia menjadi lebih rasional, melainkan hanya menyembunyikan irasionalitas dengan kepentingan menguasai (Adian 2005: 54-55)

Pada akhirnya mural sebagai sebuah seni yang cukup kental memiliki ideologi perjuangan mencoba untuk melakukan kritik sosial atau pendidikan moral lebih tepatnya atas realitas sosial yang melanda masyarakat modern. Dengan menyadari keterbatasan ruang publik yang semakin terdominasi oleh kuasa pasar, maka mural menggunakan ruang publik yang masih tersisa yaitu tembok. Meskipun pada awal tulisan

sudah dijelaskan bahwa idealnya ruang publik akan dirasakan signifikan membawa kegunaan atau manfaat jika didalamnya terkandung sebuah interaksi yang ditandai dengan tatap muka, jika tidak akan menimbulkan renggangnya rasa keterikatan sosial *(social bonding).* Dengan logika tersebut maka sangat sulit untuk dipenuhi di zaman sekarang. Oleh karena itu dengan segala alternatif, kreatifitas, dan inovasi, mural berusaha melakukan optimalisasi ruang publik yang tersisa tanpa menghilangkan ideologi dari mural itu sendiri maupun konsepsi awal dari ruang publik.

Mural sebagai Efek Katartis

Sebuah karya seni tidak akan tersampaikan maknanya jika tidak ada respons dari masyarakat yang notabene merupakan objek dari karya seni tersebut. Terkait dengan hal tersebut setelah melalui proses dialektika yang cukup panjang, maka pada tahun 1977 Marcuse mengadakan penilaian ulang atas tulisannya mengenai proses reseptif, yaitu proses ketika orang menghayati dan merasakan keindahan seni. Dalam proses ini Marcuse mengembangkan analisis yang sangat mencerahkan mengenai efek katarsis yang lahir dalam momen reseptif. Marcuse menyatakan bahwa seni memang tidak dapat mengubah dunia tetapi seni mampu menyumbangkan satu perubahan kesadaran terhadap manusia dan pada gilirannya, manusia inilah yang mampu mengubah dunia. Dalam perkembangannya analisis yang baru mengenai pengalaman reseptif menimbulkan pemahaman yang baru mengenai watak afirmatif yang menjadi ciri pembahasannya. Menurut Marcuse perubahan yang radikal harus berakar dalam subjek individu itu sendiri, dalam akal budi mereka, dalam hasrat-hasrat dan tujuan individu tadi. Baginya, kapasitas yang mencerahkan dari seni terletak dalam kemampuan untuk mengaktifkan rasa perasaan yang sedang dominan dalam diri seseorang untuk melakukan perubahan.

Marcuse menganggap kebutuhan radikal ini dalam kegiatan sehari-hari sering dikelabuhi oleh keinginan palsu yang disebarkan oleh masyarakat kapitalis. Jika dikontekskan dengan gagasan dalam karya tulis ini, keinginan palsu tersebut sering ditimbulkan masyarakat kapitalis

melalui sampah-sampah visual berupa iklan, poster, baliho yang tidak jarang bersifat hiper-realitas. Sedangkan karya seni yang autentik menyampaikan ekspresi dari hasrat untuk membangun pribadi yang kaya. Dengan demikian karya seni memungkinkan kelahiran kembali subjek yang bersifat kritis dan pendobrak dalam diri si penghayat seni. Marcuse berkeyakinan bahwa ungkapan hasrat untuk hidup lebih baik yang tersimpan dalam karya seni memang pada awalnya hanya memberi ilusi kepuasan sesaat akan tetapi pada perjalanannya akan memberikan efek progresif daripada retogresif. Dengan membuka dimensi baru dalam pengalaman, tindakan karya seni mampu menimbulkan perubahan dalam kesadaran si penikmat. Hal tersebut yang pada akhirnya akan menimbulkan perasaan bebas dan membuat individu mampu mengambil jarak dari keberadaan dan kehidupan fungsional dalam masyarakat (Soetomo 2003: 144).

Penutup

Mural merupakan salah satu bentuk media berkomunikasi antara seniman dengan masyarakat. Mural tidak hanya berdiri sendiri tanpa kehadiran ribuan makna (Wicandra 2009). Bagi pembuatnya, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan melalui mural. Tersimpan pesan yang memanfaatkan kehadiran mural dengan mencitrakan kondisi sekelilingnya. Mural bukan hanya sekedar untuk kepentingan estetik, tetapi juga untuk menyuarakan kondisi sosial budaya, ekonomi dan juga politik. Dari hasil pengamatan di lapangan dan wwancara yang telah kami lakukan, cukup banyak dikalangan masyarakat yang dapat mengerti dan dapat menjelaskan dengan sangat baik pesan yang terkandung dalam lukisan mural.

Dalam hubungannya dengan ruang publik yang ada di kota, mural mencoba bersikap kritis terhadap ruang publik kota yang telah menjadi arena bertarung bagi berbagai macam kepentingan. Para seniman mural yang ada di Yogyakarta bermaksud untuk mengembalikan kembali ruang publik kepada masyarakat untuk dijadikan salah satu medium untuk

merekatkan hubungan-hubungan sosial antarmasyarakat kota yang mulai luntur diterpa modernisasi.

Menurut dari hasil studi lapangan yang telah kami lakukan, dari beberapa orang masyarakat yang kami wawancarai menyatakan bahwa mereka setuju akan keberadaan mural di ruang-ruang publik sekitaran Yogyakarta. Mereka mengaku dapat menangkap pesan dari pelukis yang disampaikan melalui media mural. Serta mural merupakan salah satu media yang cukup efektif untuk menyampaikan pesan-pesan sosial dan politik kepada masyarakat. Namun, ada satu narasumber yang menyatakan bahwa beliau menyetujui keberadaan mural, karena mural dirasakan dapat menjadi salah satu media aspirasi masyarakat (Suyono, penikmat kawasan Jembatan Lempuyangan 2010, 8 Desember). Namun, beliau menyatakan bahwa ia tidak setuju akan keberadaan mural yang digunakan sebagai media politik. Menurutnya politik merupakan isu yang sangat sensitif dan mudah disusupi kepentingan dan provokasi, oleh karenanya isu politik harus diperlakukan secara hati-hati sesuai koridor yang tepat.

Mural yang mengandung pesan politik di Yogyakarta dapat kita temukan pada beberapa wilayah. Mural dengan muatan politik yang cukup menonjol adalah mural dari partai politik dengan logo sebagai *point of interest*-nya (Wicandra 2009). Partai politik yang memanfaatkan mural sebagai saluran politik mereka adalah PDI Perjuangan dan PAN. Seperti di wilayah Langenastran terdapat dinding besar yang dicat dengan warna merah bergambarkan orang yang memakai pakaian khas Jogja dengan *blangkon* di kepala sedang berdiri dengan sikap seperti pagar bagus atau penerima tamu dalam pesta pernikahan Jawa. Di samping orang tersebut logo PDIP terpampang tanpa ada teks penjelas. Mural dengan pesan sponsor dari partai politik biasanya menjamur ketika musim Pemilu tiba.

Mural sebagai media penyampaian pesan politik hendaknya digunakan secara bijak. Bukan digunakan memprovokasi massa untuk menciptakan keributan, namun digunakan sebagai media penyaluran aspirasi yang ada di masyarakat. Diharapkan masyarakat bisa bertindak

lebih aktif dan peduli menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi di sekitarnya, dan tidak lagi bersikap apatis dan masa bodoh.

Seniman harus dapat memposisikan perannya di tengah masyarakat, yakni dengan berkarya seni tanpa mengabaikan dinamika masyarakat sekitarnya. Jika cara yang dipilih adalah melalui mural, seniman harus mempersepsikan dahulu citra kota yang akan dibangun melalui mural tersebut, harus mempertimbangkan masyarakat mana yang akan merespons sehingga mural bukan sekedar menjadi hiasan dinding semata. Praktek seni mural yang awalnya dilakukan kalangan seniman ternyata mampu menggerakkan ruang dialog dan menginspirasi masyarakat untuk menemukan sendiri ruang ekspresinya di kota. Inilah aspek paling penting dari praktek seni mural yang ada di kota Yogyakarta.

Referensi

Adian, Donny Gahral 2005, *Percik pemikiran kontemporer,* Jalasutra, Yogyakarta.

Buingin, Burhan 2008, *Analisis data penelitian kualitatif,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Calhoun, Craig 1992, *Habermas and the public sphere* , The MIT Press, Cambridge.

Folgarait, Leonard 1998, *Mural painting and social revolution in Mexico, 1920-1940: Art of the New Order,* Cambridge University Press, Cambridge.

Hauser, Gerard 1999, *Vernacular voices: The rhetoric of publics and public spheres,* University of South Carolina, Columbia.

Ika, Benedicta E, Harlia, Bunga Sapady dan Seputro, Jati 2010, *Program kreativitas mahasiswa gagasan tertulis: Seni mural sebagai media aspirasi rakyat,* Universitas Brawijaya, Malang, diakses 24 Desember,

<http://jatiseputro.blogspot.com/2010/03/seni-mural-sebagai-media-aspirasi.html>

Kellner, Douglas 1995, 'Intellectuals and new technologies', *Media, culture, and society*, Vol. 17, Hal. 201-217.

Majelis Umum 1948, *Deklarasi universal hak asasi manusia* , Majelis Umum, Jakarta, diakses 31 Oktober 2010, <http://pusham.uii.ac.id/files.php?type=data&id=33&lang=id>

Media Indonesia 2010, *Melihat sejarah Irlandia Utara lewat mural,* diakses 31 Oktober, 2010, <http://www.mediaindonesia.com/mediatravelista/index.php/read/2010/05/03/662/2/Melihat-Sejarah-Irlandia-Utara-lewat-Mural>

Pratikno (ed.) 2001, *Merajut modal sosial untuk perdamaian dan integrasi sosial,* Fisipol UGM, Yogyakarta.

Prawoto , Eko (et al.) 2008, *Kampung sebelah art project,* Jogja Mural Forum, Yogyakarta.

Soehardjo, A.J 2005, *Pendidikan seni dari konsep sampai program,* Fakultas Sastra UNM, Malang.

Soetomo , Greg 2003, *Krisis seni krisis kesadaran,* Kanisius, Yogyakarta.

UPI, 'Media Grafis Mural', *Slide mural presentation*, UPI, Jakarta, diakses 31 Oktober, 2010, <http://file.upi.edu/Direktori/A%20-%20FIP/JUR.%20KURIKULUM%20DAN%20TEK.%20PENDIDIKAN/197706132001122%20-%20LAKSMI%20DEWI/MEDIA%20GRAFIS/MEDIA%20GRAFIS-HSL%20MHSISSWA/Mural/Presentation1.pdf>

Visula Magazine 2009, *Mural merambah kota* , diakses 31 Okctober, 2010, < http://www.visualartsmagazine.info/index.php/en/reflection/103-mural-merambah-kota>

Wicandra , Obed Bima 2009*, Berkomunikasi secara visual melalui mural di Jogjakarta*, diakses 27 Desember, 2010, <http://dgi-indonesia.com/berkomunikasi-secara-visual-melalui-mural-di-jogjakarta/>

Yin, Robert K 2003, *Case Study Research : Design And Method,* vol 5, Sage Publication London.

Wawancara

Wawancara dengan Miswa, ibu rumah tangga sekitar rel Stasiun Lempuyangan, 20 Desember 2010.

Wawancara dengan Paiman, tukang becak di daerah Jembatan Lempuyangan, 8 Desember 2010.

Wawancara dengan Samgar, mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 12 Desember 2010.

Wawancara dengan Subandi Gianto, seniman mural, 15 Desember 2010.

Wawancara dengan Suyono, penikmat kawasan jembatan Lempuyangan, 8 Desember 2010.

4

Fungsi Paguyuban Dalam Ekonomi Informal Perkotaan: Studi Kasus Pedagang Kakilima Kawasan Sekip Jalan Kaliurang Km 4.5

Wasisto Raharjo Jati, Novita Widayani, Caysa Kusuma Praditha
Ria Melani, Satya Lesmana, Azis Setyawijaya, Muhammad Ghufron Rum

Pendahuluan: Latar Belakang Masalah

Penelitian ini ingin melihat bagaimana bentuk kontekstualisasi ekonomi informal yang berada di kawasan perkotaan yang memunculkan PKL sebagai aktor utama dalam arena tersebut. Hal ini kemudian menjadi menarik ketika PKL ini hadir sebagai bentuk resistensi terhadap massifnya perkembangan ekonomi kota dalam bentuk ikatan sosial yang terjadi antara PKL tersebut sebagai bentuk *urban villagers* dengan melakukan empowerisasi ekonomi terhadap sesamanya dalam bentuk paguyuban.

Dalam era sekarang ini, kota telah mengalami perkembangan signifikan yang terkarakterisasi dalam berbagai hal seperti pesatnya perluasan kota, meningkatnya kegiatan perekonomian, dan semakin

tingginya laju urbanisasi (Rutz 1987). Dari sekian indikasi tersebut, faktor perekonomian menjadi hal yang sangat mencolok dimana kota sebagai mesin pertumbuhan perkembangan ekonomi merupakan salah satu dinamika yang berkembang dalam konteks studi perkotaan (Christensen & Raynor 2003: 14). Adapun perilaku sentralisasi ekonomi yang terkonsentrat di kota mulai dari bidang industri, perdagangan, kegiatan transaksional di pasar, dan pertumbuhan layanan jasa yang sangat massif telah memicu orang untuk berkecimpung dalam pergulatan ekonomi di kota.

Meningkatnya laju urbanisasi yang menuju kota ternyata memicu permasalahan tersendiri yakni keterbatasan kota untuk menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi warganya di tengah iklim ekonomi yang kompetitif. Berbagai metode dicoba untuk mengatasi hal tersebut mulai dari modernisasi infrastruktur kota, dengan harapan dapat menaikkan lapangan kerja di sektor modern (formal), yang kemudian justru mengalami dekadensi dan resistensi tersendiri (Abimanyu 1995). Maka kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi mengalami sprawlisasi di daerah pinggirnya yaitu menjadi sentrum ekonomi baru untuk mensubstitusi kapasitas perekonomian kota (Burgess, cited in Giddens 2002). *Sprawlisasi* merupakan istilah akademik dalam studi perkotaan dimana terjadi fenomena kotanisasi yang berada di daerah pinggiran kota *(suburban fringe)* dengan ciri utama yakni perluasan kegiatan ekonomi yang tidak terakomodir di kota sehingga meluber ke daerah pinggiran sehingga membentuk sentrum ekonomi alternative. Oleh karena itulah kemudian hal tersebut memunculkan aktor ekonomi dalam sektor informal seperti halnya PKL yang hadir sebagai wujud protes terhadap struktur perekonomian makro kota yang tidak afirmatif.

Kehadiran PKL sendiri sebagai kulminasi urbanisasi ekonomi informal telah membentuk suatu sistem asosiasi sosial tersendiri dimana muncul suatu keterikatan sosial di antara mereka ketika romansa gotong royong tidak lagi diketemukan di kota (Wirth 1983). Oleh karena itu, tumbuhnya suatu organisasi terutama paguyuban PKL sendiri merupakan bentuk representasi dan eksistensi PKL untuk terus berjuang meraih

keuntungan atau kesejahteraan maksimal terkait sumber daya ekonomi di kota bagi semua anggotanya. Berangkat dari hal tersebut, maka kelompok kami akan mencoba memahaminya dalam bentuk penelitian studi kasus lapangan yang bersifat deskriptif untuk melihat sejauh mana paguyuban PKL menjalankan fungsinya sektor informal ekonomi perkotaan yang berada di kawasan Sekip tepatnya Jalan Kaliurang Km.4,5.

Rumusan Masalah

Dari pokok kajian yang telah disebutkan di atas, maka kami mendefinisikan pertanyaan penelitian sebagai berikut, yaitu:

"Bagaimana fungsi pemberdayaan yang diemban oleh paguyuban PKL yang terletak di kawasan Sekip?"

Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah tersebut, kami menguraikan beberapa tujuan penelitian, yaitu:

1) Untuk mengetahui karakter PKL di sekitar UGM

2) Untuk melihat sejauh mana urgensi keberadaan paguyuban bagi PKL dengan cara melakukan perbandingan di semua paguyuban

3) Untuk mengetahui fungsi yang diemban paguyuban PKL yang terletak di kawasan Sekip

Kerangka Konseptual

Informal Ekonomi

Ekonomi informal memang berjalan sendiri dan terpisah dari kegiatan ekonomi kota. Namun pada dasarnya ekonomi formal, baik secara langsung maupun tidak langsung, dipengaruhi oleh keberadaan ekonomi kota. Untuk membahas mengenai ekonomi informal lebih lanjut,

maka kita perlu membedakan antara ekonomi formal dan ekonomi informal terlebih dahulu. Secara ringkas, kegiatan ekonomi formal sering diidentikkan dengan berbagai instansi seperti perkantoran, pendidikan dan kesehatan serta lain sebagainya. Kegiatan ekonomi informal sendiri umumnya menampung angkatan kerja urban yang tidak terserap dalam sektor ekonomi formal (Quijano 1974). Ekonomi informal sendiri kemudian dapat dimaknai sebagai kurangnya akses pelaku ekonomi marginal untuk berkecimpung dalam bidang formal ekonomi sehingga dapat dikatakan ekonomi informal ini hadir sebagai timpangnya struktur ekonomi kota. Namun di sisi lainnya ekonomi formal kemudian menciptakan peluang hadirnya informal ekonomi di tengah limitasi yang dihadapi formal ekonomi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi kota. Maka informal sendiri dapat dikatakan sebagai penyokong kegiatan barang jasa formal ekonomi (McGee,1974. cited in Hidayat 1978).

Negara berkembang, seperti Indonesia, pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari keberadaan ekonomi informal. Hal ini disebabkan ketidakmampuan sebagian besar rakyat Indonesia dalam mengakses ekonomi formal. Dan secara garis besar, sector informal memang lebih mampu menampung setiap tenaga kerja yang tidak mampu meraih sector formal. Di Indonesia sendiri ternyata sudah ada kesepakatan mengenai ciri – ciri pokok sektor informal (Hidayat 1978). Ciri – ciri tersebut diantaranya:

1. Bentuk kegiatan yang tidak terorganisasi dengan baik
2. Kebanyakan unit usaha tidak memiliki izin usaha
3. Kegiatan tidak teratur terutama terkait dengan lokasi maupun jam kerja
4. Dalam menjalankan usaha tidak membutuhkan pendidikan formal tetapi sangat mengutamakan pengalaman
5. Adanya model kekeluargaan dan kekerabatan, artinya dalam mempekerjakan buruh biasanya merupakan kerabat atau saudara sendiri

6. Modal usaha biasanya berasal dari tabungan sendiri maupun lembaga keuangan yang tidak resmi dalam bentuk pinjaman.

Model ekonomi informal kota yang sering dijumpai adalah pedagang kaki lima (PKL). Dikaitkan dengan awal kehadirannya, PKL memang bukanlah suatu kelompok masyarakat yang gagal dan membebani kota. PKL hadir sebagai wujud ketidakmampuan kota di sector formal dalam menampung seluruh tenaga kerja yang ada. Dari sanalah, tenaga kerja yang tidak tertampung tersebut kemudian berinisiasi untuk merengkuh kue – kue ekonomi dari sector informal dengan berjualan di sekitar perkantoran, kampus dan lain sebagainya. Secara harfiah, PKL didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana orang yang berjualan (pedagang) dengan menggelar barang dagangan di meja dengan memiliki empat kaki, yang kemudian jika ditambah dengan sepasang kaki pedagang tersebut maka jumlahnya akan menjadi lima.

Asosiasi Sosial: Paguyuban

Urbanisasi yang terjadi seiring dengan laju perkembangan ekonomi yang tinggi di kota kemudian menimbulkan suatu perspektif mendasar yaitu suatu sistem asosiasi sosial *(social association)*. Asosiasi sosial ini umumnya merupakan bentuk representasi dan eksistensi suatu kelompok masyarakat kota yang berintegrasi atas dasar persamaan latar belakang profesi, sosial, ekonomi, budaya, politik, hobi, dan keinginan yang sama sehingga membentuk suatu keterikatan sosial yang erat diantara mereka (Wirth 1983). Dalam hal ini fungsi asosiasi yang dijalankan hanya berlaku pada kalangan internal semata dikarenakan individualisasi kota yang memaksa mereka untuk melakukan *regrouping* sendiri, selain halnya untuk sebagai makna simbolik dan identitas yang melekat pada diri mereka sebagai anggota asosiasi.

Adapun dalam asosiasi tersendiri, kepemilikan material ekonomi menjadi sumber daya kunci bagi anggotanya untuk berintegrasi dalam asosiasi tersebut dan terbuka peluang untuk menjalin kerjasama maupun hubungan sosial dengan anggota lainnya sehingga disitulah letak

inklusivitas dalam internal mereka sehingga dalam asosiasi tersendiri diandaikan sebagai komunitas tersendiri dimana mereka memiliki kenyamanan dalam hal solidaritas dan tenggang rasa di kalangan sesamanya (Elwood,n.d).

Fenomena asosiasi yang didasarkan dari beberapa kesamaan antar anggota memang mewabah di kota. Sebagai misal, kesamaan tempat usaha, kesamaan bentuk usaha, kesamaan asal daerah, dan kesamaan – kesamaan lainnya. Menilik pada kasus ekonomi informal (PKL) maka kita dapat melihat adanya paguyuban yang mampu menaungi setiap anggotanya. Paguyuban ini biasanya dibentuk dalam suatu struktur yang nonformal dan tidak terlalu mengikat anggotanya. Sebagai suatu identitas tertentu, paguyuban juga melakukan pemberdayaan bagi anggotanya.

Pemberdayaan memang hal yang penting dan urgen karena pemberdayaan sendiri lahir dari adanya pemusatan faktor produksi sehingga mengakibatkan marginalisasi masyarakat kelas pekerja dan timbulnya pengusaha pinggiran sehingga pemberdayaan dapat dikatakan sebagai antitesa terhadap kegiatan perekonomian yang diskriminatif kepada rakyat banyak (Kidar & Silk 1995). Dari penjabaran tersebut, kita dapat melihat bahwa pemberdayaan ini memiliki dua tujuan secara langsung. Pertama, munculnya inisiatif dalam mengembangkan potensi diri supaya tidak lagi termarginalkan. Kedua, memperkuat posisi masyarakat dalam pola ekonomi maupun kekuasaan. Pemberdayaan kemudian tidak hanya terbatas pada penguatan setiap anggota individu dalam paguyuban misalnya. Akan tetapi lebih dari itu, pemberdayaan mengandung makna bahwa ada suatu penanaman nilai seperti kerja keras, bertanggung jawab, keterbukaan dan lain sebagainya.

Jika dikaitkan dengan focus tulisan ini maka pemberdayaan yang kami maksud adalah pemberdayaan PKL melalui adanya berbagai paguyuban PKL. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa kehadiran paguyuban memang mampu memberdayakan semua anggotanya. Pemberdayaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah

pemberdayaan sector informal terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya setiap anggota paguyuban.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak perlu terikat dengan teori sejak awal (Sarantakos 1993, p.15). Penelitian kualitatif memberikan peluang bagi tercapainya kesimpulan melalui interpretasi terhadap data yang diperoleh dengan kerangka pikir yang jelas. Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui fungsi pemberdayaan yang dilakukan oleh paguyuban PKL di kawasan SEKIP UGM maka hal tersebut dapat dideskripsikan secara jelas, ketika penelitian ini mampu mengeksplorasikan pengalaman dari para pemilik warung tenda yang tergabung dalam paguyuban sebagai informan kami.

Dalam mengkaji tema penelitian yang telah disebutkan di atas, maka kami akan menggunakan metode penelitian *case study*. Penggunaan metode studi kasus dalam penelitian ini juga didasarkan pada bentuk pertanyaan penelitian yaitu 'bagaimana' dan 'mengapa'. Selain itu juga karena fokus penelitian yang kami kaji merupakan peristiwa kontemporer, yakni memfokuskan penelitian pada peristiwa yang terjadi saat ini dan tidak adanya kontrol peneliti atas peristiwa tersebut (Yin 1997, p.3). Hal tersebut nampak pada pertanyaan penelitian yang kami ajukan dengan dimulai 'bagaimana'.

Unit Analisis

Unit analisis merupakan salah satu komponen dari metode penelitian studi kasus. Bagian ini berisi tentang apa yang dimaksud dengan 'kasus' dalam penelitian yang dilakukan. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu akan melihat bagaimana paguyuban PKL di sekitar UGM memberdayakan anggotanya, di tengah ketidak mampuan mereka unuk mendapatkan pekerjaan formal di kota Yogyakarta.

Bentuk ekonomi informal di kota yang sering dijumpai adalah pedagang kaki lima (PKL). Kehadiran PKL bukan merupakan akibat dari suatu kelompok masyarakat yang gagal dan membebani kota. Namun, PKL hadir sebagai wujud ketidakmampuan kota dalam menampung banyaknya tenaga kerja di sektor formal. Oleh sebab itu, tenaga kerja yang tidak tertampung tersebut kemudian berinisiasi untuk merengkuh kue – kue ekonomi dari sector informal dengan berjualan menjadi PKL.

Kehadiran PKL sebagai kulminasi urbanisasi ekonomi informal, telah membentuk suatu sistem asosiasi sosial tersendiri. Oleh karena itu, tumbuhnya suatu organisasi terutama paguyuban PKL sendiri merupakan bentuk representasi dan eksistensi PKL untuk terus berjuang meraih sumber daya ekonomi di kota. Dengan membentuk paguyuban PKL, menimbulkan keterikatan sosial antar sesama anggota paguyuban PKL tersebut. Dengan alasan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana paguyuban PKL menjalankan fungsinya sebagai sektor informal ekonomi perkotaan yang berada di kawasan sekitar UGM.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian kami meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian kami berupa data pokok mengenai kemunculan PKL di sekitar UGM, proses terbentuknya paguyuban serta fungsi dari paguyuban tersebut. Sedangkan data sekunder yang kami pergunakan sifatnya menyokong data primer.

Data pokok pertama berkaitan dengan karakter PKL disekitar UGM. Data ini berupa informasi tentang karakteristik PKL disekitar UGM, yang tentunya berbeda dengan PKL di wilayah lain. Data kedua berupa informasi tentang proses terbentuknya paguyuban PKL di sekitar UGM. Data yang dibutuhkan adalah informasi tentang penyebab dari bergabungnya para pemilik warung tenda untuk membentuk suatu paguyuban. Serta menelaah lebih lanjut proses terbentuknya tiga paguyuban yang ada di sekitar Jakal UGM. Data yang ketiga berupa

informasi tentang fungsi paguyuban tersebut dalam memberdayakan anggotanya. Data tersebut kami peroleh melalui dua metode, yaitu:

1) Observasi

Sebelum melakukan wawancara dan penggalian data lebih lanjut. Kami melakukan observasi terhadap objek kajian terlebih dahulu. Ini memudahkan kami untuk mengidentifikasi karakter pedagang dan di paguyuban mana mereka tergabung. Dari sanalah data observasi ini akan bisa menjadi data awal di samping metode wawancara dalam penelitian yang akan kami lakukan.

2) Wawancara

Metode wawancara merupakan salah satu cara mendapatkan informasi – informasi yang penting yang layak diangkat sebagai data penelitian lapangan selama penelitian. Adapun wawancara yang dilakukan nanti juga bersifat *cross check* antara ketua paguyuban PKL, warung-warung PKL di kawasan Sekip Jalan Kaliurang Km 4.5 serta komunitas lainnya yang masih memiliki relasi dengan PKL. Hal ini kami lakukan supaya kami dapat melakukan verifikasi data secara langsung untuk mendapatkan data penelitian yang valid.

Sedangkan data sekunder yang digunakan berupa literature-literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian kami. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari media cetak maupun elektronik. Dari sana pula kami dapat melakukan sedikit komparasi antara data yang ada dalam realitas dengan data yang ada dalam berbagai media tersebut. Dengan demikian, data tersebut merupakan data komplementer yang sifatnya melengkapi data awal yang kami peroleh di lapangan.

Teknis Analisis Data

Fenomena PKL sebagai ekonomi informal memang hadir sebagai ketidakmampuan setiap orang untuk ambil bagian dalam sektor formal. Selain itu, sebagian dari "penikmat" ekonomi informal ini adalah kaum urban yang notabene adalah pendatang dari desa, kota atau daerah lainnya. Dan dari sana dapat dilihat munculnya asosiasi antara orang – orang yang tergabung dalam ekonomi informal terutama PKL. PKL ini kemudian mengorganisir diri mereka ke dalam suatu paguyuban dengan alasan kedekatan lokasi serta kepentingan yang sama.

Langkah yang kami lakukan pertama kali dalam penelitian ini adalah menggunakan teori awal sebagai arahan kami dalam melakukan penelitian. Setelah itu kami melihat dan menganalisis realitas yang ada di lapangan terutama di semua paguyuban di sepanjang Jakal dan di Paguyuban Sekip pada khususnya. Dari sanalah, hasil penelitian akan menunjukkan kepada kita apakah perlu adanya suatu verifikasi ataukah teori berjalan sama dengan realita yang ada. Lebih jelasnya mengenai hal tersebut dapat kita lihat di bawah ini,

Diagram 4.1. Teori dan Realita

Teori / Pendekatan
Social Structure accumulation

Realita Lapangan
di Kawasan Sekip Jalan Kaliurang Km 4,5

Verifikasi Pendekatan Teori / menemukan fakta baru di luar kerangka teori
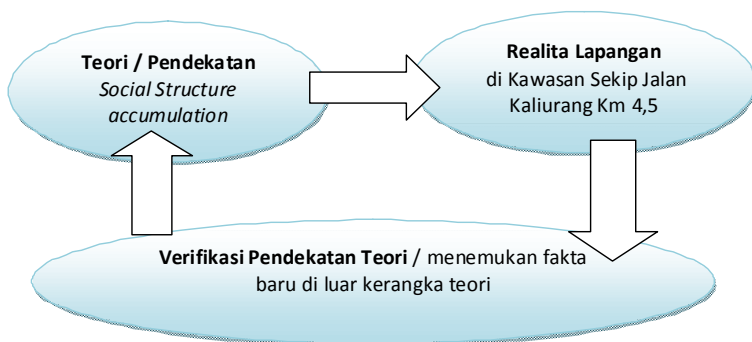
Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian kami bagi dalam lima bab. Bab pertama berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan dari penelitian kami. Serta berisi tentang kerangka konseptual mengenai informal ekonomi dan asosiasi social. Bab kedua berisi tentang fenomena kemunculan PKL di sekitar UGM serta melihat karakter dasar yang ada dalam PKL di kawasan UGM. Bab ketiga memuat tentang bagaimana PKL berasosiasi dan tergabung dalam suatu perkumpulan yang disebut sebagai paguyuban PKL. Pada bab ini pula kami melakukan komparasi antar paguyuban untuk melihat perbedaan mendasar antara PKl yang diwadahi oleh paguyuban serta yang tidak. Bab keempat akan membahas tentang fungsi pemberdayaan yang dilakukan oleh paguyuban PKL di sekitar Jakal UGM. Terakhir, bab kelima dari tulisan ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan.

Interview Guide

Interview guide disusun dengan skema pada halaman berikut:

Tabel 4.1. Instrumen Penelitian

Bab	• Sub Bab	• Narasumber*	Pertanyaan Wawancara
II	Fenomena PKL di UGM serta karakter PKL	PKL Sekip, Paguyuban Sekip atau Deptan	- Apakah para PKL kawasan SEKIP merupakan pendatang? - Dimanakah tempat tinggal mereka di Jogja? - Kenapa mereka berjualan di sekitar kampus UGM? - - Adakah daya tarik UGM bagi para PKL?
III	Lingkungan PKL	PKL SEKIP	- Bagaimana system keamanan di lingkungan mereka berjualan? - - Bagaimana relasi dengan SKKK selaku penjaga keamanan kampus
III	Paguyuban PKL	PKL SEKIP, PKL Utara Kehutanan, PKL Jakal bagian Tengah	- Apakah mereka memiliki organisasi yang mewadahi mereka seperti paguyuban? - Bagaimana keanggotaan paguyuban PKL? - Identifikasi batasan lokasi suatu paguyuban?
III	Komparasi antara ketiga Paguyuban	PKL SEKIP, PKL Utara Kehutanan, PKL Jakal bagian Tengah	- Adakah paguyuban yang menjadi wadah bagi keberadaan PKL? - Apa bedanya ketika ada paguyuban atau tidak? - Apa aktivitas paguyuban? - - Apa fungsi yang dijalankan setiap paguyuban?
IV	Fungsi paguyuban PKL SEKIP	PKL SEKIP, Paguyuban SEKIP	- Fungsi apa yang dijalankan paguyuban? - Sejauhmana fungsi yang dijalankan paguyuban? - Adakah aktor informal yang mengkoordinir paguyuban? - - Adakah model arisan dan simpan pinjam dalam paguyuban?

Karakter PKL Di Kawasan UGM

"Namanya juga Cak Anto Mbak, sudah pasti berasal dari Jawa Timur" (Ibu PKL Cak Anto, PKL Jakal 2010, 10 Desember)

Subbab sebelumnya telah banyak menjabarkan berbagai rancangan awal mengenai desain penelitian yang akan kami lakukan. Oleh karena itu, subbab kedua ini akan menjelaskan tentang fenomena kemunculan PKL di sekitar UGM dan bagaimana karakteristik PKL di kawasan tersebut yang membedakan dengan PKL di tempat lain. Penjelasan diawali dengan melihat karakter PKL di sekitar UGM serta dinamika yang terjadi di dalamnya.

Dinamika keberadaan PKL di kota–kota besar merupakan suatu persoalan yang dilematis. Di satu sisi PKL harus dilindungi hak-haknya karena mereka merupakan salah satu aktor ekonomi kota. Di sisi lainnya, mereka harus menerima kenyataan bahwa pada suatu masa mereka akan digusur atau dalam bahasa yang lebih halus mereka akan direlokasi dengan anggapan bahwa PKL–PKl ini telah mengganggu kebersihan dan keindahan kota. Namun tulisan ini tidak akan membahas bagaimana fenomena penggusuran atau relasi antara PKL dengan aktor–aktor negara (pemerintah). Tulisan ini hanya akan melihat bagaimana PKL itu hadir serta bagaimana paguyuban mampu menampung setiap permasalahan yang dihadapi oleh PKL.

Karakteristik PKL di Sekitar UGM

Tulisan ini dimulai dengan penjelasna kemunculan PKL di kota sebagai wujud adanya daya tarik kota bagi semua orang baik dari desa, dari luar kota maupun luar daerah. PKL menjadi satu–satunya jawaban atas ketidakmampuan mereka dalam mengakses ekonomi formal. Di lingkungan sekitar UGM sendiri, PKL dari depan Kopma (Koperasi Mahasiswa UGM) sampai depan Fakultas Kehutanan lebih banyak diisi oleh pendatang yang pada awalnya hadir ke Jogja untuk mendapatkan bagian kue industrialisasi. Namun kenyataannya hal tersebut sukar terjadi

karena keterbatasan mereka untuk ambil bagian dalam konteks ekonomi formal. Selain itu, sebagai pendatang mereka juga melihat keterbukaan sektor ekonomi informal yang lebih menjanjikan dengan usaha atau modal yang ringan serta tidak perlu pendidikan yang tinggi.

Begitu banyaknya PKL di sekitar UGM jelas bukanlah tanpa sebab. Hal tersebut menunjukkan bahwa UGM merupakan magnet yang besar bagi kehadiran orang dari berbagai wilayah dengan berbagai macam profesi, tidak hanya PKL tentunya. UGM yang menjadi sentra tujuan pembelajaran bagi segenap mahasiswa menjadikan para pedagang berlomba – lomba untuk membangun tenda dan menjual dagangannya. Dan dirunut lebih jauh ternyata PKL di Jakal ini dimulai dari satu keluarga yang kemudian berkembang dan hampir semua orang yang tinggal di kawasan pinggiran seperti Belimbingsari dan Sendowo yang bekerja sebagai PKL. Suatu pekerjaan yang menjanjikan memang ditengah pusaran ketimpangan ini.

PKL dimanapun tidak terkecuali di kawasan UGM, dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Sudut pandang pertama memaknai PKL sebagai bibit kewirausahaan mandiri perkotaan dimana tumbuh kembangnya PKL ini kemudian memicu gairah ekonomi masyarakat kota lainnya yang ditandai dengan munculnya berbagai ekonomi kreatif maupun ekonomi waralaba yang marak di berbagai kota Indonesia. Kemunculan ekonomi kreatif di sini merupakan bentuk revolusi ekonomi informal yang turut memperkuat citra perkotaan. Revolusi PKL yang dulunya sangat kumuh dan jorok kini bertransformasi menjadi PKL yang bersih dan nyaman di kunjungi sehingga sektor ekonomi informal yang kreafit ini kemudian menghasilkan tambahan PAD bagi pemerintah kota. Peran PKL sebagai aktor ekonomi informal dapat mendukung keberadaan ekonomi formal kota yang menjadi basis utama sehingga mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap sektor formal dan sebaliknya sektor formal kota mendukung teciptanya peluang hadirnya PKL dalam sistem ekonomi mereka. Maka dalam sudut pandang ini, formalisasi PKL melalui revolusi PKL ini menjadi hal yang penting untuk menciptakan keseimbangan antara sektor ekonomi formal maupun informal sehingga

mampu bersinergis memajukan dan menguatkan perekonomian kota (Mc Gee, 1973, cited in Abimanyu 1995).

Cara pandang kedua lebih memahami keberadaan PKL sebagai manifestasi kegagalan kota untuk mendistribusikan secara merata kue perekonomian kota dimana pemerintah lebih berorientasi pada kapitalis besar dan mengacuhkan keberadaan PKL. PKL merupakan wujud resistensi dan eksistensi upaya untuk merebut kue prekonomian dalam level mikro sehingga dapat *survive* di tengah kian kompetitifnya kegiatan prekonomian warga kota. Adapun pola sprwalisasi (kotanisasi) daerah pinggiran turut menjadikan PKL ini menjadi sentrum ekonomi baru yang berfungsi sebagai penyedia lapangan kerja alternatif yang sah ketika sektor formal ekonomi kota tidak mampu menyerap angkatan kerja yang semakin besar dan pengikis angka kemiskinan perkotaan. Dalam hal ini kehadiran PKL dalam perspektif ini juga dapat dimaknai sebagai suatu siasat alternatif dalam mencapai akumulasi ekonomi di kota (Hart, 1973, cited in Tadjuddin & Manning 1996).

Dari beberapa sudut pandang tersebut, PKL di kawasan UGM memang dapat dilihat dari sudat pandang manapun. PKL di kawasan UGM dianggap mendukung sector formal terutama dalam pemenuhan makanan bagi civitas UGM. Di samping itu, PKL di kawasan UGM memang hadir karena ketidakmerataan kue perkenomian yang dapat dilacak dari keterbatasan PKL terkait pendidikan dan modal.

Hadirnya Paguyuban Sebagai Wadah Asosiasional PKL: Suatu Studi Komparasi

> *"Dari sini* (warung tenda PKL di samping Mandiri Sekip) *sampai PKL – PKL di Kehutanan memiliki paguyuban yang berbeda tetapi masih dalam satu induk UGM."*(Ibu PKL Cak Anto, PKL Jakal, 10 Desember 2010)

Banyaknya PKL di kota–kota besar jelas membutuhkan suatu wadah sebagi wujud berekspresi, berorganisasi bahkan sebagai sarana mengikat persaudaraan lainnya. Urgensi akan adanya paguyuban ini tidak hanya terasa di kawasan UGM. Urgensi paguyuban juga terlihat di Sukoharjo yang terlihat ketika Satpol PP membuat peraturan baru yang isinya mewajibkan setiap PKL untuk tergabung dalam paguyuban (Harian Joglosemar, 30 Juli 2010, hal. 72). Hal ini dilakukan jelas untuk menjaga ketertiban PKL.

Dari sedikit pengantar tersebut maka kita dapat melihat bahwa Paguyuban PKL dapat dibagi menjadi dua, yaitu paguyuban PKL binaan pemerintah dan paguyuban PKL non-binaan pemerintah. Meskipun pada awalnya pembentukan paguyuban itu merupakan gagasan mandiri dari para PKL, tetapi secara operasional pemerintah ikut menjaga keberlangsungan PKL–PKL, setidaknya pemerintah turut mengakui keberadaan PKL. Keuntungan dari adanya paguyuban PKL binaan pemerintah ini, pedagang tidak perlu khawatir sewaktu-waktu digusur oleh Pemda karena sudah mendapat izin berdagang terlebih dahulu. Lain halnya dengan paguyuban PKL non–binaan pemerintah, dimana PKL masih terancam aktivitas kesehariannya dalam mencari nafkah. Paguyuban PKL semacam ini dapat menjadi lawan dari kebijakan pemerintah, selain tentunya merugikan diri mereka sendiri karena harus selalu waspada jika sewaktu-waktu ada penyisiran PKL ilegal.

Keberadaan paguyuban di Sukoharjo yang terkesan dipaksakan oleh pemerintah sedikit berbeda dengan paguyuban yang ada di kawasan UGM yang sifatnya lebih sukarela dan binaan. Namun baik secara sukarela

maupun tidak, keberadaan paguyuban memang dirasa sangat dibutuhkan bagi PKL. Paguyuban inilah yang kemudian memiliki peran penting baik itu secara internal (antaranggota) maupun secara eksternal (dengan lingkungan dimana PKL berada). Oleh karena itu kita perlu melihat perbedaan mendasar antara PKL yang tergabung dalam paguyuban dan yang tidak. Dengan membatasi paguyuban–paguyuban yang ada di kawasan UGM maka kami melakukan studi komparasi ke tiga paguyuban yang memang ada di kawasan UGM.

Paguyuban di sekitar UGM terbagi atas tiga kelompok utama yaitu paguyuban SEKIP, paguyuban Jakal bagian Tengah, serta paguyuban PKL Utara Kehutanan. Pembagian paguyuban ini didasarkan pada kedekatan antara satu warung PKL dangan warung yang lainnya serta untuk memberikan berbagai kemudahan akses atau keuntungan seperti yang akan dibahas dalam bagian berikutnya dalam tulisan ini. Meskipun berbeda dalam setiap paguyuban terutama dalam pengelolaan dan pemberdayaan anggotanya akan tetapi semua paguyuban tetap berinduk pada UGM.

Paguyuban Sekip

Paguyuban ini berada di kawasan Jakal km. 4,5 dan berdiri sejak tahun 1995. PKL ini tersebar dari depan Larissa sampai depan Bank BNI atau sebelah kanan Bank MANDIRI yang jumlahnya sekitar 15 warung. Kelima belas warung tersebut kemudian membentuk suatu sinergi dan mewujudkan terbentukya suatu paguyuban yang disebut sebagai paguyuban Deptan (Depan Pertanian). Dari paguyuban inilah, para pedagang bisa menikmati adanya listrik yang jelas memberikan kemudahan bagi setiap pedagang. Kehadiran listrik ini dimulai pada tahun 2004 dan dikelola secara legal oleh ketua paguyuban itu sendiri yaitu Pak Rully yang tinggal di daerah Kota Baru. Terkait dengan pembayarannya, dilakukan pemungutan setiap harinya sebesar Rp 1.500 per PKL.

Keuntungan lain adanya paguyuban ini adalah terkait dengan pemberdayaan dan kesejahteraan anggota. Selain itu paguyuban ini digunakan sebagai suatu sarana bertegur sapa antar anggota atau pemilik

PKL maka diadakan pertemuan arisan paguyuban yang kebanyakan terdiri dari kaum adam alias bapak-bapak. Arisan ini diadakan setiap tanggal 20 malam pukul 23.00 WIB setelah warung ditutup. Dalam arisan itu, dibahas pula model simpan pinjam bagi setiap anggota paguyuban. Ada pula perkumpulan kopi lepas yang sifatnya memang tanpa terorganisir terlebih dahulu atau tanpa sengaja.

Syarat bagi simpan pinjam yang ada dalam paguyuban tidak terlalu berat. Hal tersebut dikarenakan pinjaman biasanya disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan anggota untuk membayarnya kembali. Bahkan, dari paguyuban ini pulalah setiap anggota paguyuban yang kekurangan tenda diperbolehkan untuk meminjam tenda untuk berjualan. Lebih dari itu, dedikasi tinggi dari ketua paguyuban terbuktikan adanya usaha untuk menjadi fasilitator bagi masuknya program-program kredit usaha serta memberikan kepercayaan bantuan dana dengan nominal besar dan agunan ringan.

Beberapa hal diatas merupakan keuntungan internal dengan adanya paguyuban. Sedangkan dari sisi eksternal, berbagai keuntungan juga dapat kita temukan dengan adanya PKL–PKL ini, diantaranya menurunnya tingkat kriminalitas di sepanjang Jakal. Hal ini disebabkan kawasan ini menjadi sangat terang, ramai dan jauh dari preman-preman. PKL jelas tidak mungkin hadir tanpa relasi dengan komunitas-komunitas informal lainnya seperti tukang parkir serta penjual krupuk, penjual sedotan minuman dan lain sebagainya.

Kehadiran berbagai warung PKL ternyata memunculkan aktor lainnya seperti tukang parkir. Dan terkait dengan adanya tukang parkir di kawasan Sekip, beliau-beliau ini berasal dari satu daerah yang sama yaitu kampung Sendowo. Dan perlu diketahui pula bahwa tukang parkir ini juga ada yang mengelola walaupun secara informal (*big boss*). Pada dasarnya, tukang parkir tidak hanya menjaga kendaraan yang diparkir semata tetapi juga menjaga keamanan jika ada seseorang yang membuat kerusuhan.

Jika sebagian orang berpendapat bahwa PKL di sekitar UGM memiliki *link* yang kuat dengan SKKK UGM yang bertugas menjaga keamanan kampus UGM. Maka dari penelitian yang kami lakukan menunjukkan hal yang berbeda. Pada kenyataannya, PKL dan SKKK tidak memiliki relasi khusus selain sebatas relasi antara penjual dan pembeli.

Paguyuban Jakal Bagian Tengah

Dibandingkan dengan PKL lainnya, PKL di kawasan Jakal ini memang lebih tertata rapi, bangunannya kokoh serta kawasannya sangat bersih. Karena itulah, pungutan bagi PKL di kawasan Jakal ini lumayan besar dibandingkan PKL lainnya. Hal tersebut terbukti dengan adanya pungutan listrik serta pungutan kebersihan sebesar Rp 7.000,00 bagi setiap PKL tiap malamnya.

Berbeda dengan PKL–PKL lainnya, kawasan PKL di Jakal ini ternyata diintervensi oleh Pemda. Dari Pemdalah tersedia tukang parkir dan tukang kebersihan yang menjaga dan membersihkan kawasan ini sewaktu–waktu. Selain itu, terkait dengan penerangan di kawasan ini, para pedagang menggunakan listrik secara swadaya oleh Pak Sukhan selaku warga yang bertempat tinggal di kawasan tersebut. Di samping itu, seperti pada PKL di Sekip, PKL di kawasan ini juga tidak memiliki relasi dengan SKKK UGM.

Dalam lingkup internal, PKL–PKL Jakal ini juga memiliki suatu perkumpulan atau paguyuban yang dikenal sebagai PEKALIMAGAMA (Paguyuban Pedagang Kaki Lima Universitas Gajah Mada). Paguyuban ini didirikan pada akhir tahun 2001 tepatnya dua tahun setelah PKL mulai bermunculan di kawasan Kampus UGM dari kawasan PKL Burger Monalisa hingga sampai perempatan pos polisi Bulaksumur (Warung tenda Tora– Tora). Paguyuban ini mengadakan pertemuan atau arisan setiap tanggal 10 tiap bulannya. Ketua paguyuban PEKALIMAGAMA adalah Pak Brewok penjual Mie Jakarta yang merupakan pedagang paling berpengalaman di kawasan Jakal. Dalam paguyuban tersebut, setiap anggota boleh melakukan simpan pinjam. Biasanya sebagian anggota

paguyuban menggunakan dana pinjaman untuk membeli generator pembangkit listrik yang sangat diperlukan para pedagang ketika mati listrik.

Dari penjelasan diatas, secara operasional, organisasi paguyuban ini terdapat dua elite penting yakni Sulkhan yang bertindak sebagai penyedia listrik di paguyuban ini dimana para anggota paguyuban wajib membayar iuran listrik kepada beliau listrik Rp 1.500/lampu atau sekitar Rp 7.000/hari dan Pak Brewok sebagai ketua paguyuban dan juga pemilik lapak Mie Jakarta yang telah menduduki jabatannya dari 2001 hingga sekarang melalui mekanisme sistem voting sesama anggota.

Paguyuban Utara Kehutanan

PKL yang berada di bagian utara Fakultas Kehutanan UGM ini, tepatnya di sepanjang Jalan Selokan Mataram, tidak memiliki paguyuban lagi seperti PKL-PKL di Sekip (Deptan) maupun seperti di Jakal bagian tengah (PEKALIMAGAMA). Paguyuban PKL sudah bubar sekitar dua tahun yang lalu dikarenakan ketua dari paguyuban tersebut pergi dan tidak ada yang mau menggantikan secara sukarela, meskipun sudah ditunjuk sekalipun oleh warga PKL. Kawasan tersebut oleh Pemda sebenarnya sudah tidak diperbolehkan lagi ada PKL. Tetapi karena ada beberapa yang melakukan demo agar mereka tetap diijinkan berjualan di tempat itu, maka Pemda tetap memberi izinberjualan di kawasan itu dengan ketentuan batas wilayah berdagang para PKL tidak lebih dari 8 meter.

Tidak adanya paguyuban, membuat PKL di sepanjang jalan ini sedikit berbeda dengan PKL di daerah lain. Mereka menjadi jarang berinteraksi satu sama lain, seperti yang dikatakan oleh PKL Cak Midun (Cak Midun, PKL Jakal 2010, 20 Desember).

> *"...karna nggak ada paguyuban ya kita sesama PKL di deretan jalan ini jadi nggak saling kenal mbak, cuma tahu aja. Kesannya jadi individual, nggak kayak dulu waktu masih ada paguyuban..."*

Hal tersebut terjadi karena memang tidak ada pertemuan khusus seperti halnya jika ada paguyuban. Tetapi untuk penerangan listrik tidak begitu kesulitan, karena ada seorang warga yang bertempat tinggal di sekitar daerah itu yang mau mengelolanya dimana tiap PKL diharuskan membayar Rp 3.000,00 per PKL. Kelemahan lain dengan tidak adanya paguyuban adalah tidak adanya sistem keamanan yang jelas. Jadi, dalam sistem keamanan biasanya pedagang bekerjasama dengan tukang parkir yang mengelola kawasan tersebut, yang dibagi menjadi 3 bagian atau 3 orang per 2–3 warung PKL.

Jika dibandingkan dengan daerah Sekip dan Jakal bagian Tengah, jumlah PKL Utara Kehutanan ini memang lebih sedikit jumlahnya. Tidak ada kepedulian dari PKL ketika PKL di sebelahnya tidak berjualan, sehingga ada PKL yang lebih sering tidak berjualan. Ruang kosong dimana ketika PKL itu tidak berjualan atau memang karena ada batas berjualan ternyata berimbas pada jalan yang menjadi sepi dan gelap. Lain halnya jika ada PKL, tempat tersebut akan menjadi lebih terang dan ramai sehingga orang tidak akan khawatir lagi untuk melewati jalan itu. Karena tempat yang sepi dan gelap akan memicu berbagai tindak kejahatan. Mungkin jika Pemda memberi batasan berjualan, maka Pemda juga harus berinisiatif untuk memberi penerangan pada jalan tersebut.

Fungsi Paguyuban PKL Sekip

"...Ya adanya paguyuban sangat menguntungkan Mbak. Dari paguyuban kita bisa minjem duit untuk modal."(Ibu PKL Cak Anto, PKL Jakal 2010, 10 Desember)

Kemunculan PKL sebagai sektor usaha ekonomi informal tidak hanya dituntut penataannya yang tertib, tetapi juga perlu adanya pengkoordinasian secara internal yang jelas sehingga memudahkan untuk pengelolaan PKL yang datang dan pergi. Kawasan Sekip UGM ini merupakan kawasan yang strategis untuk berjualan berbagai macam jenis makanan dengan konsumen mayoritas adalah mahasiswa. Sehingga PKL muncul bak jamur di musim penghujan, tidak hanya di kawasan kampus

saja, mereka juga mendekati daerah–daerah yang merupakan daerah kost. Banyaknya PKL tersebut perlu adanya suatu wadah untuk menyatukan para PKL. Paguyuban yang dibentuk oleh para PKL merupakan wadah yang sesuai dengan kebutuhan para PKL itu sendiri, baik untuk relasi internal PKL maupun relasi PKL dengan pihak luar, termasuk Pemda.

Paguyuban dimaknai dengan tegas sebagai suatu kesatuan yang solid dengan ikatan sosial yang erat di tiap-tiap anggota dengan persamaan misi dan visi perihal kegiatan ekonomi yang mereka lakukan. Sebagai sebuah bentuk informal ekonomi yang memiliki kerentanan terkait legalitas, sejatinya diperlukan *empowering* baik dari segi kelembagaan nonformal, maupun sistem pengelolaannya. Paguyuban menjadi sebuah pilihan yang relevan bila konteks yang hadir bersifat informal. Paguyuban PKL disini memiliki fungsi sebagai kelompok kepentingan yang anggotanya yaitu sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan, dan tujuan dalam bentuk kelompok yang terorganisasi (Perwita & Yudi 2006). Selain itu, tujuan lain dari dibentuknya paguyuban ini yaitu untuk sosialisasi kebijakan, menampung kritik dan saran dari PKL sehingga paguyuban ini dapat menjadi wahana dialogis untuk menyelesaikan berbagai masalah, baik itu masalah internal maupun eksternal (Dyah 2006).

Tak ubahnya seorang pedagang, mereka hanyalah sekumpulan orang yang berusaha mencari penghidupan melalui penjualan barang dagangan kepada konsumen, permasalahan muncul ketika hal tersebut berbenturan dengan legalitas, sistem pengelolaan serta penjaminan terhadap proses yang mereka lakukan. Paguyuban Sekip UGM pun demikian adanya, tengah lama berdiri dan berproses mereka pun tak serta merta berjalan tanpa sistem pengelolaan yang jelas. Pembentukan paguyuban pun dimaksudkan agar semuanya berjalan aman, nyaman, legal serta sistematis. Wacana mengenai pembentukan paguyuban hadir pada pertengahan tahun 2002 ketika pada waktu itu isu relokasi atau boleh disebut sebagai “penggusuran secara halus” terlontarkan dari pihak Rektorat UGM sebagai pemilik kepentingan di kawasan yang mereka tempati. Setelah paguyuban terbentuk, otomatis seluruh pedagang pun

memiliki kekuatan untuk *constraint* terhadap segala sesuatunya termasuk kebijakan dari pihak terkait, dan akhirnya isu relokasi tersebut terpatahkan dan paguyuban ini menjadi nyaman untuk berkegiatan seperti sedia kala. Berjalannya fungsi dari sesuatu yang bernama paguyuban ini pun tak berhenti pada titik tersebut.

Urgensi pembentukan paguyuban memang seharusnya muncul melalui kesadaran bukan kebutuhan, namun setelah terbentuk dan berjalan, manfaat dan keuntunganlah yang berbicara. Paguyuban yang beranggotakan sembilan pedagang ini dikepalai oleh seseorang bernama Pak Rully yang sebenarnya pernah menjadi bagian dari kumpulan pedagang di kawasan tersebut dahulu (1994-1999). Beliau memiliki akses terhadap institusi formal dari mulai PLN, Pemerintah kabupaten sampai pada pihak Rektorat UGM, dan hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan terkait pengangkatan beliau. Luasnya jaringan serta *link* yang dimiliki oleh pemimpin sebuah paguyuban pedagang ini menjadi indikasi kesuksesan paguyuban tersebut. Di tangannya, paguyuban ini memiliki posisi tawar terhadap kebijakan Rektorat UGM terkait isu relokasi.

Selanjutnya, sistem pengelolaan paguyuban seperti arisan pun berjalan dengan sangat efektif di tangan beliau. Terlebih lagi permasalahan kesejahteraan anggota terkait mekanisme kredit pinjaman Bank Mandiri (karena posisi paguyuban ini sangat berdekatan dengan bank yang dimaksud) yang sangat lunak dan menguntungkan bagi para anggota yang tercermin dari sistem, kepercayaan serta besar nominal pinjaman. Hal menarik pun muncul ketika pendalaman mengenai paguyuban ini dilakukan, paguyuban ini memiliki kebijakan untuk tidak menambah jumlah anggota dalam artian membuka lapak baru bagi siapa saja yang berminat karena disamping mereka belum memiliki kapasitas untuk melakukan hal itu (legalitas mereka terhalang oleh perijinan terkait Rektorat UGM yang sampai saat ini katakanlah tidak melarang dan tidak pula mengijinkan secara legal – formal), mereka pun sangat eksklusif terkait hubungan inter – personal tiap anggota dikarenakan ikatan sosial mendalam yang terjalin dalam hitungan belasan tahun tersebut. Berbagai mekanisme paguyuban ini pun terlihat efektif bila melihat eksistensi

mereka sampai sekarang ini, terlebih lagi kehadiran mereka secara tidak langsung telah memberikan rasa aman kepada para pengguna jalan dengan penerangan di setiap lapak. Dengan demikian tingkat kriminalitas di jalan tersebut menurun drastis bahkan hampir tidak ada sama sekali. Berikut adalah tabel yang menggambarkan sejauh mana fungsi paguyuban PKL di Sekip.

Tabel 4.2. Fungsi Paguyuban PKL Sekip UGM

Fungsi	Mekanisme dan Sistem
Wadah nonformal terkait legalitas dan urusan birokrasi	Advokasi, pembentukan posisi tawar terhadap kebijakan terkait relokasi, penggusuran dan sejenis
Wadah kekeluargaan dan solidaritas	Memastikan ikatan kekeluargaan terbina dengan baik sekaligus mensejahterakan anggota melalui arisan. Arisan dilangsungkan serta diundi sebulan sekali dengan biaya sebesar seratus ribu rupiah (Rp 100.000) tiap anggota. Selain itu dilakukan pula evaluasi kerja, diskusi mengenai suatu isu, serta *sharing* antar anggota.
Penyedia sistem dan mekanisme terkait pengelolaan paguyuban	Program pemberdayaan berupa kredit lunak simpan-pinjam baik internal (koperasi, iuran sebesar Rp. 20.000/anggota yang disetor setiap arisan) paguyuban maupun dengan pihak luar (Bank Mandiri, kredit pinjaman dengan nominal pinjaman yang besar, agunan ringan, dan prosedur peminjaman yang sangat dipermudah)
Mensejahterakan anggota paguyuban	Permasalahan penguatan kapasitas dan pengembangannya bersifat sederhana, dengan menggunakan musyawarah, yang artinya terjadi input dari seluruh anggota bukan hanya bertumpu pada ketua paguyuban
Memberdayakan anggota perihal kapasitas dan keterampilan	Pengorganisasian paguyuban bersifat terbuka karena azas kekeluargaan yang diusung (ketua paguyuban hanya simbol semata, memberikan inovasi, fasilitasi, advokasi namun tidak meregulasi)

Kesimpulan

Kehadiran PKL dalam kota bukanlah suatu fenomena yang disebabkan oleh kegagalan kota. Kehadiran PKL tidak lebih disebabkan oleh adanya kue industrialisasi yang ditawarkan di kota. Hal inilah yang membuat sebagian orang berdatangan ke kota, Jogja pada khususnya, untuk bergabung dalam sector ekonomi informal. Selain itu, hal tersebut menjadi bukti atas ketidakmampuan mereka (kaum urban) dalam meraih ekonomi formal yang lebih mensyaratkan banyak hal seperti modal yang besar dan pendidikan tinggi yang kesemuanya itu sangat jarang dimiliki oleh kaum urban. Namun ada suatu timbal balik antara ekonomi informal (PKL) dengan ekonomi formal kota yang tidak bisa disangsikan kebenarannya. Keberadaan PKL sebagai aktor ekonomi informal ternyata mendukung keberadaan ekonomi formal kota sehingga mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap sektor formal dan sebaliknya sektor formal kota mendukung teciptanya peluang hadirnya PKL dalam sistem ekonomi mereka.

PKL–PKL yang hadir sebagai ekspresi ketidakmampuan sector formal dalam menampung mereka juga dirasa sangat perlu untuk membentuk suatu wadah yang mampu menampung aspirasi dan wujud asosiasi serta pelekatan identitas sebagai anggota paguyuban PKL. Hasil penelitian kami di PKL sekitar UGM juga menunjukkan adanya suatu pengorganisiran setiap PKL ke dalam paguyuban–paguyuban. Bahkan dari penelitian ini pula kami dapat melihat betapa *urgent*-nya keberadaan paguyuban sehingga kami dapat mengidentifikasi PKL yang tidak ada paguyuban dan yang ada. Alasannya adalah PKL yang tidak tergabung dalam paguyuban tidak terkelola bahkan tidak saling mengenal satu sama lain.

Paguyuban memang sangat penting bagi PKL. Paguyuban ini pada dasarnya berfungsi sebagai wadah bersatunya para PKL, berinteraksi, berkoordinasi bahkan secara eksternal paguyuban ini pulalah yang mengelola relasi antara PKL dengan pemerintah maupun kampus. Paguyuban kemudian juga berfungsi sebagai sistem keamanan dalam

rangka menekan angka kriminalitas di sepanjang Jalan Kaliurang kawasan UGM. Namun yang terutama, semua paguyuban tersebut selalu berusaha untuk mensejahterakan anggotanya melalui suatu system pemberdayaan yang dapat ditunjukkan dengan adanya model arisan, simpan pinjam serta kredit bersama.

Referensi

Abimanyu, Anggito 1995, *Pembangunan ekonomi & pemberdayaan rakyat,* BPFE-PAU UGM, Yogyakarta.

Christensen, C.M & M.E. Raynor 2003, *The innovator's solution: Creating sustaining successful growth*, Harvard Business School Press, Boston.

Dyah, Helga et al. 2006, *Penertiban pedagang kaki lima di sekitar kawasan UGM*, diakses 20 Desember, 2010, <http://elisa1.ugm.ac.id/files/PSantoso_Isipol/YoK3G4xS/Penertiban%20PKL.doc,>

Effendy, Tadjuddin & Manning, Chris 1996, *Urbanisasi, pengangguran, & sektor informal di kota,* Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Giddens, Anthony 2002, *Sociology,* Blackwell Publisher Ltd, Oxford.

Harian Joglosemar 2010, *PKL harus masuk paguyuban*, diakses 18 Desember, 2010, <http://harianjoglosemar.com/berita/pkl-harus-masuk-paguyuban-21304.html?page=72>

Hidayat 1978. 'Peranan sektor informal dalam perekonomian Indonesia', *Ekonomi Keuangan Indonesia*, vol XXVI, no 4, pp. 415-443.

Kirdar, Uner & Silk, Leonard (ed.) 2005, *People: From impoverishment to empowerment,* New York University Press, New York.

Mantra, Ida Bagoes 2004, *Filsafat penelitian dan metode penelitian sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mulayadi 2010, *Pembangunan masyarakat*, diakses 18 Desember, 2010, <http://www.harianbatampos.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=10150>

Perwita & Yudi, Khrisna 2006, *Peran paguyuban pedagang kaki lima sebagai pemadu kepentigan pedagang kaki lima: Studi deskriptif peran dan fungsi paguyuban pedagang kaki lima di Surabaya)*, Airlangga University Library, Surabaya, diakses 20 Desember, 2010, < http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-s1-2006-perwitakhr-1395&node=378&start=6&PHPSESSID=8133311a73963884396f864c26b0636e,>

Quijano, A.1974. 'The marginal pole of the economy and the marginalized labour force', *Economy and the society,V*vol.3, Hal.. 393-428.

Rutz, Werner 1987, *Cities and towns in Indonesia: Their development, current positions, and functions with regard to administration and regional economy*, G. Borntraeger, Berlin.

Sarantakos, S. 1993, *Social research,* Macmillan Education Australia PTY LTD, South Melbourne.

Wirth, Arthur G. 1983, *Productive work-in industry and schools: Becoming persons again*, University Press of America, Lanham, MD.

Yin, Robert. K 1997, *Studi kasus : Desain dan metode*, 1th edn., PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wawancara

Wawancara dengan Pak Hollywood, pelopor PKL Sekip, 30 November 2010

Wawancara dengan Ibu PKL Cak Anto dari Jawa Timur, PKL Jakal 10 Desember 2010

Wawancara dengan Pak Brewok II, PKL Jakal, 19 Desember 2010

Wawancara dengan Pak PKL Sari Laut Rinda II, PKL Jakal, 20 Desember 2010

Wawancara dengan Ibu PKL Cak Midun, PKL Jakal, 20 Desember 2010

Wawancara dengan Pak Brewok I, PKL Jakal , 20 Desember 2010

Wawancara dengan Paguyuban Dentan, 21 Desember 2010

5

Gerakan Politik Calon Legislatif DPRD Kota Yogyakarta Mempergunakan Supporter Sepakbola

Deliana Putri, Wisnu Wibowo, Amalia Nur Arifah ,Aditya Ekky S

Ariesta Budi Rahayu, Nandy Rinaldi N.S., Nurudin Al Akbar

Latar Belakang

Komunitas kecil merupakan sekumpulan masyarakat yang terbentuk melalui proses interaksi yang berbasis pada ikatan teritorial (Koentjaraningrat 1985). Berangkat dengan ikatan kesamaan nilai inilah kemudian membawa sekumpulan masyarakat ke dalam komunitas. Basis komunitas sangat beragam, salah satunya adalah hobi. Bermula dari hobi memiliki kesukaan yang sama terhadap suatu hal, kemudian dapat mewujud sebagai sarana gerakan sosial. Hadirnya komunitas merujuk pada kehadiran civil society, di mana masyarakat memiliki nilai – nilai sendiri yang disebut modal sosial oleh Robert Putnam. Menurutnya, modal sosial adalah kemampuan warga untuk mengatasi maslah publik dalam iklim demokratis (Mintorahardjo n.d)

Bentuk dari modal sosial tersebut berupa: Keterlibatan dan komitmen warga negara dalam proses politik. Hal ini menunjuk pada seberapa besar respon masyarakat terhadap proses – proses politik baik formal maupun informal. Keterlibatan itulah yang akan memengaruhi tingkat legitimasi masyarakat terhadap sistem politik. Kesetaraan politik yang menunjukkan adanya jaminan bagi setiap masyarakat untuk bebas mengakses politik dan berpolitik. Kepercayaan, dan toleransi dari nilai ini menggambarkan adanya bentuk solidaritas antar masyarakat., Solidaritas dimaknai sebagai sebuah sifat atau perasaan bersatu, perasaan senasib dan sekawan. Kehidupan assosiasional yang kuat berupa kategori ini mengukur tingkat kesungguhan masyarakat dalam berorganisasi. Putnam menambahkan, demokrasi tidak hanya bekerja melalui praktek–praktek dan institusi–institusi politik seperti lembaga legislatif, melainkan melalui id–ide, sentimen, dan nilai–nilai kewargaan. Artinya, ruang– ruang publik masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai alat politik seseorang untuk mencapai keinginannya.

Brayat Yogyakarta Mataram Utama Suporter Sejati (Brajamusti) menjadi satu contoh riil mewujudnya komunitas yang terdiri dari berbagai golongan masyarakat ini. Komunitas ini menamai dirinya dengan Brajamusti yang merupakan kelompok suporter sepakbola Yogyakarta pendukung Persatuan Sepakbola Indonesia Mataram (PSIM). Nama Brajamusti baru diresmikan pada 14 Februari 2003, ketika menjuarai sayembara pemilihan nama kelompok suporter sepakbola, sedangkan mulanya komunitas ini bernama Paguyuban Tresna Laskar Mataram. Sebagai organisasi, Brajamusti memiliki struktur koordinasi yang terencana. Di dalamnya terdapat beberapa pemangku jabatan seperti Presiden dan wakil Presiden, Sekretaris Jenderal, juga Menteri Koordinator I, II, dan III. Masing–masing area memiliki struktur tersebut, hanya saja beda pembagian. Wilayah dalam kota Yogyakarta dibawahi oleh Koordinator Cabang sedangkan untuk area luar kota Yogyakarta dibawahi oleh Koordinator Wilayah.

Sebagai komunitas suporter sepakbola Yogyakarta, Brajamusti memiliki banyak anggota yang tersebar di berbagai daerah. Massifnya

massa yang bergabung dalam komunitas ini, menjadi daya tarik kuat bagi pemenangan caleg pada Pemilu Legislatif DPRD 2009–2014 Kota Yogyakarta. Agung Damar Kusumandaru misalnya, salah seorang calon legislatif (kala itu) yang kini berhasil menduduki kursi DPRD Kota Yogyakarta. Beliau dengan suara sah sebanyak 28.051 untuk dapil Kota Yogyakarta 3 merupakan wakil dari Partai Amanat Nasional (PAN) , bahkan jumlah suara syah yang memilihnya dapat menyaingi calon yang lain baik dari sesama partai maupun partai lainnya.

Proses pemenangan itu tak luput dari peran serta Brajamusti sebagai basis pemenangannya dalam pemilihan legislatif. Dewasa ini wacana tersebut menjadi lumrah karena mutualisme kedua pihak. Calon legislatif memerlukan banyak dukungan, dan massa (dalam hal ini Brajamusti) tentunya mendapat imbalan yang pas. Menariknya, kami hendak mengetahui transformasi Brajamusti sebagai basis politik pemenangan seorang caleg DPRD Kota Yogyakarta (KPUD DIY 2009).

Tulisan ini ingin melihat bagaimana politisi terkhusus Agung Damar dan Dwi Saryono mempergunakan strategi khusus guna menarik Brajamusti sebagai basis suara guna pemenangan pilkada DIY pada tahun 2009.

Rumusan masalah

Bagaimanakah langkah anggota legislatif khususnya bagi Agung Damar Kusumandaru – Dwi Saryono dalam memanfaatkan Brajamusti – komunitas sosial suporter sepakbola Kota Yogyakarta sebagai basis dukungan politisnya ?

Kerangka teori

Untuk menguraikan rumusan masalah di atas, kami mulai menjabarkan beberapa teori menjadi seperti berikut di bawah ini.

Mobilisasi massa dan konsensus politik

"Menurut O'Donnel dan Schmitter kehadiran mobilisasi masa tak hanya sekedar efek demokratisasi. Adanya mobilisasi massa di dalam suatu bentuk konsensus politik biasanya merupakan salah satu bentuk aksi untuk dapat mengkooptasi suatu kekuasaan yang ada. Sehingga biasanya penggerak dari massa tersebut dapat mempengaruhi suatu peristiwa yang ada dan mendapatkan dukungan secara popular untuk berada di dalam kekuasaan tersebut."(Ulfelder 2005)

Konsensus politik mempergunakan mobilisasi massa tentunya memiliki *impact* yang sangat besar terhadap pemerintahan yang ada saat ini. Mempengaruhi transisi rezim dan katalis transisi rezim merupakan fungsi pertama, sehingga dengan adanya mobilisasi massa rezim yang berkuasa saat ini secara tidak langsung dapat diberikan stereotyping yang menyebagiankan pentingnya untuk menemukan calon baru di dalam suatu bentuk pemerintahan. Fungsi yang kedua adalah *bargaining* , liberalisasi politik dan demokratisasi bagi elite yang berkuasa. Jadi di saat adanya mobilisasi massa dan konsensus politik dapat menjadi alat efektif di dalam mengkampanyekan sesuatu (menyeruakkan suara demokrasi) bagi elite yang melakukan mobilisasi massa.

Melihat perkembangan politik yang ada di Indonesia khususnya mengenai pemilu legislative, pentingya basis masa secara populis merupakan suatu hal yang sangat penting. Banyak peristiwa yang memperlihatkan jika kelompok-kelompok asosiasi yang terkadang diikat oleh nilai-nilai tertentu, secara tidak langsung dapat menjadi basis utama untuk pendulangan suara pemilu . Adanya peristiwa ini merupakan salah satu bentuk nyata bagaimana mobilisasi massa ternyata sangat mudah dilakukan untuk mengadakan suatu bentuk konsensus politik.

Banyak yang tidak menduga keberadaan suporter sepakbola ternyata dapat dijadikan basis massa dalam pendulangan suara pemilu. Bagi beberapa calon anggota DPRD ternyata hal tersebut disadari merupakan tindakan efektif untuk menjaring *floating mass*. Selain itu,

pemanfaatannya dapat pula menekan biaya kampanye yang besar dan memudahkan politisi DPRD untuk menggencarkan propagandanya terhadap usaha pencalonan yang efisien dan efektif. Secara tidak langsung, massa sepakbola yang ada dalam permasalahan ini tentunya memiliki ikatan-ikatan modal sosial tertentu seperti yang dikatakan oleh Robert Putnam.

Perubahan transformasi sebuah kegiatan asosiasi mobilisasi massa menjadi suatu gerakan politik tentunya merupakan intisari utama yang menjadi permasalahan dalam kasus penelitian ini. Upaya politis ini nampak ketika politisi mengorganisir sekumpulan massa ke dalam sebuah gerakan politik. Dalam identifikasinya suatu gerakan politik pasti memiliki pola pergerakan, pola pengorganisasian, metode pembiayaan, medium gerakan ataupun corak gerakan yang akan dipakai oleh kelompok yang bersangkutan di dalam ajang pemilu legislatif. Inilah hal yang perhatian kami untuk meneliti.

Politik Identitas

Secara epistemologis, identitas bermakna ciri-ciri, keadaan khas atau jati diri seseorang. Dengan kata lain identitas berupa situasi di mana manusia mampu mengaca diri dan menemukan berbagai tanda khas atau unik yang diperolehnya melalui interaksi internal maupun eksternal serta dengan lingkungan sosialnya.

Ada beberapa aspek yang dapat membantu dalam memaknai apa yang disebut dengan identitas (Castell & Putranto, cited in Hapsarin n.d), yaitu :

a. Identitas sebagai suber makna dan pengalaman
b. Bersifat plural atau jamak
c. Berbeda dengan role, identitas berfungsi menata dan mengelola makna, sedangkan role untuk menata fungsi

d. Identitas terkait dengan proses internalisasi nilai-nilai, norma-norma, tujuan-tujuan, dll

e. Identitas sendiri terbagi menjadi dua, yaitu identitas individu dan kolektif. Namun individulisme juga bisa menjadi identitas kolektif.

f. Ada tiga bentuk dan asal usul identitas: *(a) legitimizing identity,* atau identitas yang sah,contohnya otoritas dan dominasi, *(b) resistance identity,* atau identitas perlawanan,contohnya politik identitas, dan *(c) project identity,* atau identitas proyek, contohnya feminisme.

Ada beberapa tokoh yang mendefinisikan politik identitas, seperti Agnes Heller. Ia mengatakan bahwa politik identitas merupakan konsep dan gerakan politik yang memfokuskan pada perbedaan sebagai hal utama. Politik identitas memberi ruang untuk kebebasan ide dan keterbukaan untuk mengakomodir berbagai kepentingan yang ada.

> "*Politik identitas adalah politik yang fokus utama kajian dan permasalahannya menyangkutperbedaan-perbedaan yang didasarkan atas asumsi-asumsi fisik tubuh seperti persoalanpolitik yang dimunculkan akibat problematika jender, feminisme dan maskulinisme,persoalan politik etnis yang secara dasariah berbeda fisik dan karakter fisiologis, danpertentangan-pertentangan yang dimunculkannya, atau persoalan-persoalan politik karenaperbedaan agama dan kepercayaan dan bahasa.*"(Abdillah, 2002)

Dari keterangan tersebut kami menyimpulkan politik identitas sebagai sebuah tindakan politik kolektif massa yang karakteristik sama untuk mengedepankan kepentingan-kepentingannya. Kemunculannya ditengarai sebagai respon atas ketidakadilan pelaksanaan hak asasi manusia. Contoh konkretnya dapat dilihat melalui aksi kelompok yang merasa hak-hak berpolitiknya dimarginalkan. Dengan politik identitas, mereka merasa mampu mengakses dunia politik menggunakan teori-

teori modern sehingga kemudahan akses menjadi keniscayaan. Namun sayangnya dalam masa sekarang ini politik identitas telah dibajak oleh kelompok mayoritas untuk meraih dominasi kekuasaan (Lukmantoro 2008).

Brajamusti

Salah satu unsur penting dalam sepakbola adalah keberadaan suporter. Melihat asal katanya, suporter menunjukan kata benda yang merupakan serapan dari bahasa Inggris dan bermakna pendukung (*support*-er). Biasanya kehadiran suporter ditandai dengan yel-yel kebanggaan yang berfungsi sebagai penyemangat tim ketika berlaga. Keberadaannya turut mendukung tim untuk selalu bersemangat menghadapi lawan. Begitu pula dengan Brajamusti. Sebagai suporter kebanggan PSIM, Brajamusti juga memiliki yel-yel penyemangat yang diteriakkan sekitar 8.600 suporter yang masih aktif.(Bola.net 2010).

Jumlah yang massif, tingginya tingkat kekompakan, dan besarnya solidaritas yang muncul dalam tubuh Brajamusti rupanya menjadi magnet bagi politisi. Mereka melihat peluang besar untuk memanfaatkan massa suporter sebagai basis pemenangan. Sebagai contoh, kasus Yayasan Suporter Surabaya (YSS) dan Bonek Merah Putih (BMP). Keberadaan mereka diduga untuk mendukung calon bupati Surabaya dan masing-masing suporter diberi imbalan uang sebesar dua puluh lima ribu sebagai balasannya mendukung calon bupati tersebut. Umumnya, politisi itu hadir dari dalam tubuh suporter sendiri, seperti bupati ataupun walikota manajer klub suporter. Dengan mudah ia dapat menggiring suporter sebagai basis pemenangan mengingat posisinya yang strategis dalam tubuh klub suporter. The Jakmania misalnya. Suporter sepak bola Jakarta ini juga tidak lepas dari incaran para politisi karena jumlah mereka yang menggiurkan, 44 ribu supporter (Suporter Indonesia.com 2010).

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan case study (studi kasus) sebagai metode penelitiannya. Alasan ini diambil mengingat fenomena yang dijadikan penelitian tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melingkupinya, sehingga tidak mungkin melakukan penelitian di area eksperimen yang dibuat peneliti (Quinn 2009, p.24). Studi kasus memungkinkan peneliti melakukan penelitian secara mendalam dan mendapatkan informasi yang kaya (Quinn 2009, p.23). Inilah yang menjadikan case study sebagai pilihan yang tepat dalam penelitian karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi hubungan kompleks yang terjadi baik dalam level individu ataupun organisasi beserta konteks yang melingkupinya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami cara yang digunakan oleh seorang politikus dalam upayanya menjaring dukungan lewat suporter sepak bola seperti Brajamusti. Bagaimana dia bisa meyakinkan suporter bahwasanya dia akan memberikan timbal balik yang menguntungkan kepada mereka. Selain itu melihat bagaimana sang politisi membangun citra dan kepercayan yang kuat supaya dirinya dapat diterima sebagai bagian dari komunitas tersebut. Dalam hal ini analisis untuk memahami fenomena tersebut akan dilihat pada relasi antara politsi dan suporter bola yang ia jadikan lumbung suara.

Untuk medapatkan hasil yang maksimal, maka peneliti akan berupaya melakukan *cross chek* antara apa yang dinyatakan oleh politisi ataupun supporter dengan berupaya menanyakan pada kedua belah pihak. Upaya crosschek sejalan dengan metode tianguilasi yang memungkinkan peneliti mampu menganalisa berbagai persepsi yang ada guna mengklarifikasi makna (Denzin & Lincoln (eds.) 2009, p.203). Upaya ini uga diharapkan akan memperkaya data dikarenakan adanya kemungkinan satu pihak kurang menjalaskan secara detail suatu permasalahan atau fenomena dan ternyata pihak lain justu melengkapinya.

Unit Analis Data

Unit analisis data adalah seluruh aktor yang terlibat langsung dalam fenomena yang terjadi yaitu sang politisi, sedangkan di pihak supporter adalah pengurus maupun orang-orang yang terlibat aktif dalam dukung-mendukung sang politisi.

Informan

Mengingat keterbatasan waktu, maka peneliti menggunakan (menentukan) informan dengan cara memilih informan berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Dalam hal ini yang dijadikan sebagai informan adalah:

1. Politisi (Calon legislatif DPRD kota Yogyakarta)
2. Tim Sukses
3. Pengurus Supporter beserta anggota
4. Tokoh-tokoh Pendukung politisi di kalangan suporter

Untuk medapatkan data mengenai sapa saja politisi yang terlibat dalam penggunan Brajamusti sebagai basis massanya, peneliti akan menanyakan informasi terkait politisi yang menggunakan Brajamusti kepada orang-orang yang mengetahui atau orang yang memiliki kekayaan informasi (Quinn 2009, p.89). Cara yang peneliti gunakan pertama kali adalah menanyakan kepada anggota dan pengurus Brajamusti yang sekiranya memiliki pengetahuan terpercya. Kemudian berbekal informasi yang didapat, peneliti akan berupaya mencari informasi ke pada informan lain mengenai keberadaan politisi yang bersnagkutan, dalam hal ini peneliti akan mencoba mencari inforrman lain yang dapat menunjukkan keberadaan politisi. Terkhir berbekal informasi yang didapat, peneliti akan mencari informasi terkait strategi langsung kepada politisi yang bersangkutan.

Jenis Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara dengan politisi, tim sukses, pengurus, dan tokoh-tokoh kunci dalam supporter yang menjadi pendukung politisi. Selain itu studi pustaka dipergunakan untuk menjadi acuan bagi penulisan teoritik dalam penelitian. Sedangkan data sekunder didapatkan dari berbagai dokumentasi yang relevan dengan fenomena yang ditelisik, baik berupa laporan-laporan yang ada pada tim sukses, dokumen-dokumen supporter, maupun berbagai pemberitan dan dokumen lain yang dapat diakses pada bebagai media cetak maupun elektronik.

Teknik Pengumpulan Data

Data primer maupun sekunder dapat diperoleh dengan berbagai cara. berikut ini penjelasan cara yang ditempuh peneliti dalam memperoleh data:

1. Teknik wawancara (Creswell 1998: 120-125)

   Wawancara dilakukan dengan melakukan *indepth interview*, dengan alasan dapat mengekporasi data secara medalam terkait pengalaman politisi dalam melakukan strategi pemenangan suara lewat barajamusti, dan dapat mengeksporais hal-hal yang sifatnya sensitif, seperti permasalahan keuangan dan teknis pelaksanaan strategi (Mack 2005). pedoman wawancara sebagai panduan yang berguna bagi peneliti untuk menggali data secara sistematis dan memahami point-point yang akan ditanyakan pada saat wawancara agar tetap fokus. Peneliti akan berupaya menggunakan alat rekam guna mendokumentasikan percakapan antara peneliti dan informan selain mencatat pokok pokok pembicaraan yang terjadi dengan harapan bisa lebih fokus pada wawancara (Quinn 2009: 237). Akan tetapi penggunaan alat rekam ini hanya dilakukan apabila sang informan bersedia pembicaraannya direkam. Untuk menghindari hal-hal yang tidak

diharapkan maka pada awal pembicaran akan diberikan informasi terlebih dahulu kepada informan sebagai tanda persetujuan/tidaknya. Sebagai tambahan, selama proses percakapan berlangsung, apabila informan merasa ada hal-hal yang tidak boleh direkam ataupun disebarkan maka peneliti akan memenuhi apa yang infoman inginkan. Hal ini peneliti lalukan terkait etika penelitian yang harus diperhatikan, karena bisa jadi informasi yang terekam dalam alat perekam atau catatan dapat berakibat fatal pada subyek penelitian (Denzin & Lincoln (eds.) 2009: 312), seperti dipecat dari partai karena menyebarluaskan rahasia, atau merasa strateginya dapat ditiru lawan apabila disebarkan, bahkan snag politisi dapat terancam kehidupannya jika hubungnnya dnegan Brajamusti dibongkar.

Teknik wawancara yang lain akan dilakukan dengan cara informal, cara ini memanfaatkan jejaring kedekatan dan relasi networking dari salah satu peneliti. Sehingga wawancara dapat dilakukan dengan cara yang cukup santai , namun validasi dari hasil wawancara akan lebih meyakinkan, karena dimungkinkan adanya nilai-nilai tertentu yang membuat informasi akan lebih mudah digali dalam pemberian informasi. Wawancara ini juga berfungsi sebagai data primer tambahan yang mempermudah dalam teknik analisa data.

2. Studi Pustaka

Adalah mengumpulkan data dengan mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan pemilu dan cara-cara mendapatkan basis suara dalam pemilu. Buku-buku yang dianggap relevan nantinya akan digunakan sebagai salah satu acuan dalam penulisan penelitian. Sehingga triangulasi data akan menjadi lebih valid jika dikerangkai oleh hal-hal yang berkaitan dengan teoritik.

3. Teknik Dokumentasi

Berkaitan dengan data sekunder yang digunakan peneliti adalah teknik dokumentasi berkaitan dengan mengumpulkan dan mempelajari dukumen-dokumen yang tertulis baik dalam media cetak maupun elektronik, ataupun dokumen dokumen yang ada dan dapat diakses di pihak tim sukses maupun suporter. Dokumen ini akan digunakan sebagai bahan referensi dan komparasi (Miles & Huberman 1992: 75).

Teknis analisis data

Analisis data dilakukan agar data-data yang sudah terkumpul di lapangan dapat diorganisasi sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bermakna. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis kualitatif, dimana data dianalisis dengan cara diinterpretasikan sesuai tujuan penelitian yang sudah ditentukan, dalam hal ini data tidak dianalisis dengan angka-angka.

Proses yang dilakukan peneliti adalah dalam menemukan jawaban penelitan dengan cara peneliti memulai melakukan pengumpulan data lewat *interview* dan dokumen-dokumen pendukung terhadap fenomena yang ingin diketahui, kemudian dikumpulkan. Pada tahap pengumpulan ini data-data diklasifikasikan berdasar kategori yang ditentukan. Setelah masing-masing terkumpul dalam satu kategori, selanjutnya peneliti melakukan interpretasi (Stauss & Corbin 2003, p.144).

Di saat ada data yang tidak sinkron dengan data yang lain, tentunya proses triangulasi data akan dilakukan untuk mempermudah interpretasi. Selain itu, hal ini dimaksudkan agar peneliti dipermudah dalam mencari kesimpulan. Sehingga kesimpulan yang ditarik dalam hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini akan dibagi kedalam lima bagian. Bagian pertama akan memuat latar belakang, rumusan masalah dan tujuan dari penelitian. Selain itu juga terdapat pemaparan mengenai teori yang menopang bangunan pembuatan argumen dan kerangka berpikir penelitian ini. Dalam bagian kedua berisi tentang relasi politisi dan supporter sepak bola (Agung Damar Kusumandaru dan Dwi Saryono dengan Brajamusti). Bagian ketiga berisi tentang manajemen operasi gerakan calon anggota DPRD Kota Yogyakarta dalam strategi pemenangan pemilu melalui Brajamusti. Bagian keempat berisi tentang Implikasi Hubungan Politisi-Supporter Bola antara Brajamusti dengan anggota DPRD kota Yogyakarta yang didukungnya ,terutama Agung Damar Kusumandaru. Bagian terakhir berisi tentang kesimpulan penelitian serta posisi hasil penelitian ini dalam teori gerakan politik dan politi identitas yang mengikat para suporter. Dan dalam laporan studi kasus kali ini berisi lampiran daftar pertanyaan, profil dari anggota DPRD yang diwawancarai, timeline dan logika berpikir dalam penyusunan makalah penelitian studi kasus .

Relasi Politisi dan Suporter Sepak Bola (Agung Damar Kusumandaru dan Dwi Saryono dengan Brajamusti)

Ikatan sosial yang bersifat emosional kini disadari dapat dimanfaatkan secara total oleh politisi untuk mendulang suara sebesar-besarnya dengan dukungan dari suporter sepakbola. Apalagi ketika hubungan bersifat emosional dimaksimalkan dalam suatu komunitas akan mempermudah dukungan suara mengalir padanya ketika para politisi mengajukan dirinya untuk menduduki kursi calon legislatif. Bahkan, dalam upaya untuk duduk di kursi dapat dilihat jika Brajamusti merupakan satu contoh nyata konstelasi politik diantara para supporter sepakbola.

Jika dilihat dari perjalanannya Brajamusti, isu politik sudah ada sejak tahun 2004 (Pengurus Brajamusti 2010, wawancara,10 Desember) ketika adanya pemilihan walikota di Yogyakarta. Walikota terpilih Heri

Zudianto secara tidak langsung "memanfaatkan" Brajamusti untuk terpilih menjadi walikota. Bahkan walikota juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina PSIM. Heri kemudian menang lagi untuk periode yang kedua kalinya. Dapat dikatakan walikota yang "gila bola", nantinya juga akan didukung oleh masyarakat yang gila bola seperti kelompok supporter (VW, pendukung aktif Brajamusti 2010, wawancara, 10 Desember). Brajamusti yang sebenarnya merupakan supporter sepak bola saat ini dijadikan basis dukungan massa oleh para calon legislatif. Terlebih lagi saat ini basis massa supporter tersebut makin kuat dan banyak memiliki orang-orang berpengaruh yang bergabung di dalamnya. Hal tersebut memudahkan untuk membangun jejaring antar aktor dalam membangun basis massa. Para calon legislatif yang memanfaatkan dukungan Brajamusti diantaranya adalah Agung Damar Kusumandaru dan Dwi Saryono. Saat ini Agung Damar menjabat sebagai Wakil DPRD Kota Yogyakarta, sedangkan Dwi Saryono merupakan anggota dari Fraksi PDI-P DPRD Kota Yogyakarta. Dari awal beliau masuk ke Brajamusti ternyata tidak ada pikiran bahwa dirinya akan menggunakan Brajamusti jika kelak mencalonkan diri menjadi caleg. Mereka tergabung dalam Brajamusti karena kecintaannya terhadap bola dan PSIM. Ternyata Brajamusti inilah yang membuat mereka mendapatkan suara terbanyak di Pemilu legislatif kota Yogayakarta dan menjadi anggota DPRD kota Yogyakarta (Agung Damar Kusumandaru; Dwi Saryono, Anggota legislatif Kota Yogyakarta 2010, wawancara, 10 Desember).

Hubungan politisi dan Brajamusti

Agung Damar yang sudah cukup lama menjadi anggota Brajamusti, kemudian menjabat sebagai Presiden Brajamusti. Hal tersebut menyebagiankan dirinya dikenal baik dikalangan Brajamusti dan masyarakat Kota Yogyakarta. Di dalam Brajamusti sendiri ada semacam ikatan yang khas diantara anggotanya, ada kedekatan yang akhirnya menimbulkan loyalitas di antara anggotanya. Antar pengurus dan anggota tidak ada jarak karena mereka sama-sama merupakan bagian dari Brajamusti. Jika anggota lain ingin meminta bantuan, maka tak segan-

segan para anggota yang lain ikut membantu. Sikap loyal para anggota Brajamusti ternyata juga sampai ke ranah politik.

Loyalitas inilah yang dijadikan Agung Damar sebagai peluru dan anggota Brajamusti inilah yang menjadi sejata untuk membantunya dalam memperoleh suara di pemilu legislatif. Brajamusti digunakan sebagai senjata untuk memobilisasi massa. Brajamusti yang mempunyai laskar-laskar di setiap wilayah di Yogyakarta merupakan basis massa yang kuat. Dengan bantuan dari anggota laskar di daerah Jetis inilah Agung Damar berusaha mendekatkan diri dengan masyarakat di luar Brajamusti.

Cerita lain datang dari Dwi Saryono yang sampai saat ini masih menjabat sebagai Korcam Brajamusti wilayah Pakualaman. Apalagi dalam sejarahnya Koordinator Kecamatan (Korcam) tersebut berdiri, Dwi Saryono merupakan salah satu tokoh yang terlibat aktif. Dengan posisisnya sebagai pengurus Brajamusti tentunya tercipta hubungan yang sangat erat diantara keduanya. Apalagi Dwi Saryono dikenal malang melintang dalam dunia persepakbolaan dan olahraga sejak dahulu. Tercatat semenjak kecil Dwi Saryono pernah mendirikan sebuah klub sepak bola bernama AJAG (Anak Jagalan) dan sempat menjabat sebagai ketua KONI Kecamatan Gondomanan. Ikatannya dalam dunia persepakbolaan ini mempunyai implikasi tersendiri dengan citranya di mata bajamusti, dimana tentunya mempunyai nilai "lebih" dibandingkan politisi-politisi lain yang tidak memiliki latar belakang ataupun keterlibatan dengan Brajamusti.

Namun menurut Dwi Saryono *point* utama dari keberhasilannya tidak bisa terlepas dari kedekatannya dengan PDIP. Jagalan merupakan kampung basis PDIP dengan jumlah simpatisan cukup tinggi. Maka tak heran bila pria yang akrab disapa Lek Yono ini mengaku dekat dengan PDIP. Saat kanak-kanak, ia kerap membuntuti PDIP berkampanye di berbagai wilayah. Berangkat dengan PDIP-lah kemudian ia meraih jabatannya sekarang di DPRD. Sehingga kolaborasi antara citra yang dibangun melalui Brajamusti dengan kedekatan dengan PDI-P membuat Dwi Saryono dapat melenggang ke gedung DPRD Kota Yogyakarta.

Brajamusti sebagai basis dukungan massa

Dengan adanya kedekatan dan posisi dirinya dalam Laskar Brajamusti yang ada di Jetis tersebut, Agung Damar kemudian mulai coba masuk ke wilayah masyarakat yang bukan Brajamusti tentunya dengan bantuan para anggota Brajamusti. Para anggota Brajamusti yang merupakan bagian dari masyarakat sendiri dengan mudah melakukan mobilisasi massa. Pada saat proses kampanye dengan mudahnya Agung Damar melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung karena adanya perantara dari para anggota Brajamusti tersebut. Jadi para anggota Brajamusti secara langsung maupun tidak menjadi tim sukses dari Agung Damar.

> "*Jika calon-calon lain sering mengeluh dirinya sulit diterima di masyarakat, lain sekali dengan saya*" (Agung Damar, Anggota Legislatif Kota Yogyakarta 2010, wawancara, 15 Desember).

Posisi Dwi Saryono sebagai Korcab Brajamusti wilayah Pakualaman diakui tidak dimanfaatkan DS untuk berkampanye. Perlu diingat, Brajasmusti memiliki banyak anggota yang berasal dari bermacam-macam partai sehingga Dwi Saryono yang berasal dari PDI-P perlu berpikir ulang untuk memanfaatkan Brajamusti. Ia sendiri mengetahui ada beberapa dewan yang menggunakan cara-cara itu untuk mendulang suara terbanyak. Namun, kesadaran mengingatkannya memurnikan Brajamusti dari berbagai rekayasa politik hanya untuk sebuah kemenangan. Oleh karena itu, dalam proses pemenangannya ia tidak pernah meminta doa restu pada Brajamusti. Dwi Saryono menyerahkan sepenuhnya kebijakan untuk memilih atau tidak memilihnya sebagai anggota DPRD Yogyakarta mutlak kepada masing-masing anggota Brajamusti. Dwi Saryono sama sekali tidak meminta doa restu pada Brajamusti, apalagi mengumpulkan Brajamusti untuk berkampanye hal tersebut juga senada dibenarkan oleh Agung Damar Kusumandaru (Agung Damar, Anggota Legislatif Kota Yogyakarta 2010, wawancara, 15 Desember).

Manajemen operasi gerakan

Pola Pengorganisasiaan

Jejaring Brajamusti merupakan kekuatan eksternal nonpartai, yang dimaksud disini adalah lebih mengarah pada jaringan sosial yang telah terbangun sejak lama. Agung Damar yang sebelumnya adalah Ketua Brajamusti, sebuah organisasi suporter PSIM Yogyakarta dapat dipastikan mempunyai modal atau kekuatan ekternal ini. Jaringan dari Brajamusti sendiri cukup kuat, karena sudah terorganisasi, sehingga hampir di setiap kecamatan di Yogyakarta mempunyai koordinator sendiri-sendiri.

Melalui kawan-kawannya di Brajamusti inilah Agung Damar mengkampanyekan diri. Dengan mengumpulkan masyarakat yang ada disekitar tempat tinggal kawan-kawannya tersebut. Memang tidak secara resmi Agung Damar menggunakan Brajamustinya, namun melalui orang-orang di Brajamusti yang notabene adalah teman-temanya inilah kekuatan ekternal ini dibangun. Bisa dikatakan modal eksternal ini adalah modal pertemanan.

Dan menurut Agung Damar, dia sudah cukup dikenal banyak orang melalui Brajamusti ini. Karena memang suporter sepakbola ini terdiri dari berbagai kalangan dan berasal dari hampir semua daerah di kota Yogyakarta khususnya. Sehingga tidak menjadi hal yang sulit bagi Agung Damar dalam menjalin jaringan ini, karena jaringan ini sebenarnya sudah terbangun sejak lama.

Selain itu Agung Damar yang masuk ke dalam PAN sejak partai ini berdiri, yaitu pada tahun 1999, setelah reformasi. Kekuatan internal dari partai politik yang mengusung, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) sangat memberikan bekal pembangunan jejaring. Didalam sebuah partai akan ada banyak kader dan simpatisan yang nantinya akan mendukung para caleg ini. Dengan membangun hubungan yang baik dalam internal partai, diharapkan dukungan akan mengalir kepada para calon. Hal ini

tidak dapat dilakukan serta merta dan mendadak, tetapi kekuatan ini sudah terbangun sejak lama.

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Dwi Saryono, melalui sikap loyalitas dan supel yang dimilikinya dapat menjadi nilai *plus* di mata masyarakat. Bagi masyarakat Jagalan, ia adalah sosok yang sangat aplikatif dan bekerja secara nyata. Bagi Brajamusti, tentu ia adalah sosok yang berpengaruh karena sikapnya bisa menjadi panutan dan teladan kaum muda. Ia adalah sosok kharismatik yang berpengaruh dalam Brajamusti dan masyarakat Jagalan. Dalam PDIP ia juga dikenal sebagai generasi muda yang mau belajar. PDIP melihat peluang kemenangan besar dari citra positif yang dimilikinya, maka tak mengherankan bila ia dijagokan dalam Pemilu Legislatif, meskipun ia harus bersaing dengan sejumlah senior di tubuh partai. Hingga akhirnya, kemenangan itu hanya dicapai melalui citra baiknya dalam masyarakat.

Sehingga dapat dikatakan dua calon tersebut menggunakan dua pola pengorganisasian yang diterapkan pada waktu yang sama yaitu: 1) Jaringan Brajamusti dimana dalam jaringan ini mereka mengembangkan koneksi yang telah ia bangun sejak lama di berbagai tempat. Kekuatan jaringan ini begitu penting untuk membangun basis massa. 2.) Kekuatan Partai yang mengusung, sebagai pondasi politik dari kedua politisi. Dimana mereka mencoba memposisikan dirinya sebagai wakil dari Jejaring dan mengusung ideologi dari ikatan jejaring mereka. Terbukti bahwa cara ini berhasil mendulang suara dan memenangkan politisi tersebut hingga ke kursi anggota DPRD.

Metode, medium dan pembiayaan operasi gerakan

Selama 1,5 tahun sebelum pelaksanaan pemilu legislatif berlangsung, Agung Damar sudah melakukan sosialisasi terhadap para anggota Brajamusti. Dengan melakukan pertemuan informal, Agung Damar meminta secara langsung kepada anggota Brajamusti untuk membantunya dalam pemilu legislatif karena akan mencalonkan diri sebagai caleg DPRD kota. PAN sebagai partai politik yang mengusung Agung Damar sebagi calon legislatif dari awal sangat optimis akan

kemenangan calon tersebut. Sudah terlihat dari awal bahwa Agung Damar memiliki basis dukungan massa yang sangat kuat yaitu dari Brajamusti. Peran dari PAN sendiri justru tidak terlalu terlihat dalam mencari massa di wilayah Jetis. Keberadaan Brajamusti inilah yang justru menjadi penyokong yang kuat. Dengan mengatasnamakan sepak bola, Agung Damar bahkan dapat merangkul kalangan rohaniawan gereja yang juga sama-sama menyukai sepak bola. Padahal jika dilihat basis partai yang mengusung Agung Damar yaitu PAN yang identik dengan Muhammadiyah.

Begitu juga upaya pemenangan Dwi Saryono sekiranya dapat dibaca dengan medium dan strategi konvensional, terbuka dan terselubung, dimana terlihat secara terbuka melalui kampanye-kampanye yang ia lakukan di hadapan massa baik melalui jalur partai maupun yang diinisiasi oleh teman-temannya. Akan tetapi ada metode terslubung yang dapat diperkirakan, ini terlihat dari upayanya memakai jaringan yang telah terbentuk, sedangkan jaringannya tersebut meliputi berbagai kalangan, seperti teman-temannya yeng menduduki posisi sebagai RT, RW, Camat yang dapat menyebarkan pengaruhnya ke bawahan-bawahannya atau teman-tamannya agar memilih Dwi. Diakui oleh Dwi, metode jaringan ini belum dapat dilakukannya secara optimal, termasuk menurutnya adalah jaringannya di Brajamusti. Namun sebuah analisa dapat dilakukan, bahwa ada beberapa tokoh yang merupakan politisi dari partai lain di dalam Brajamusti sehingga dwi tidak dapat secara bebas melakukan "kampanye" didalam Brajamusti. Apalagi jika yang menjadi pengurus tingkat atas adalah orang yang partainya berbeda.

Dalam proses demokrasi saat ini terutama saat pemilu, tak dapat dipungkiri lagi bahwa modal uang merupakan salah satu yang tidak bisa dipisahkan. Hal tersebut juga dialami oleh Agung Damar dan Dwi Saryono saat dirinya menjadi calon legislatif. Untuk masalah pembiayaan saat kampanye, Agung Damar merasa dana yang dikeluarkannya tidak sebesar calon lain. Menurut pendapatnya masuk ke dalam Brajamusti ternyata merupakan investasi yang murah untuk menjual nama pada pemilu legislatif yang tidak dibayangkan sebelumnya. Meskipun begitu perlu

waktu yang cukup lama sampai akhirnya menjadi presiden Brajamusti dan dikenal banyak orang.

Agung Damar tentu saja melibatkan kawan-kawannya yang dulu ataupun sekarang ada di Brajamusti untuk masuk dalam tim suksesnya dalam pemilu 2009. Dikatakan oleh Agung bahwa orang-orang di Brajamusti memang mendukungnya dengan sepenuh hati dan sukarela, mereka tidak mengharapkan agar dibayar dengan uang terlebih dahulu agar mau mendukungnya. Terbukti bahwa Agung Damar bahkan tidak membagikan kaos kepada mereka, dan ternyata mereka masih tetap mendukung. Adapun dana atau sekedar uang konsumsi yang diberikan sebagai rasa terima kasih atas usaha kawan-kawannya dalam mengumpulkan massa atau masyarakat sekitar rumahnya untuk diperkenalkan dengan Agung Damar. Tidak ada muatan politis dalam memberikan dukungan, mereka mau mambantu dan mendukung karena memang Agung Damar pantas untuk didukung. Tidak melihat dari partai apa dia berangkat. Perlu diketahui bahwa dari Brajamusti sendiri bukan hanya Agung Damar saja yang menjadi caleg, namun ada 5 orang. Namun yang berhasil lolos hanya dua orang, salah satunya Agung Damar ini.

Dalam membiayai kampanyenya, Dwi Saryono juga menggunakan biaya pribadi, karena diakui olehnya bahwa dia berasal dari kelompok yang kaya. Selain itu, banyak juga dari teman-teman yang memberi bantuan dana. Ia membiarkan prosesnya berjalan mengalir. Tindakan itu untuk menghindari politik uang yang selama ini menjadi musuh PDIP. Bahkan ketika berkampanye, sedikitpun ia tidak memberikan uang kepada simpatisannya. PDIP pun melakukan hal sama yang dilakukan Dwi Saryono. PDIP percaya pada citra positif yang dimiliki jagoannya akan mendulang suara terbanyak. Sejauh ini PDIP memang cenderung menghindari politik uang demi mengembalikan proses demokrasi yang bersih. Selain itu PDIP bukanlah partai yang beruang, bahkan untuk pembiayaan dalam tubuh partai sendiri sulit. Selama kampanye berlangsung, Dwi saryono mengaku menggunakan biaya pribadi, hasil dari penjualan ayam goreng Code. Ia pun sempat menolak bantuan dana dari berbagai jaringannya karena ia tidak mau terbebani

balas budi di kemudian hari. Namun menurut Dwi Saryono, selama dia masih sanggup untuk membiayai semuanya sendiri, maka dia akan menolak bantuan dari teman-teman, karena dia tidak mau ada utang budi di kemudian hari.

Kontrak Politik (Strategi Contentious Politics)

Antara Brajamusti dan Agung Damar ini tentu saja ada kontrak poltiknya. Memang tidak terlalu bermuatan politis dan menyangkut pendapatan jabatan ataupun kedudukan. Namun kontrak politik yang terjadi adalah, intinya saat Agung Damar menang, maka dia harus memperjuangkan dan benar-benar menjadi media bagi Brajamusti untuk menyalurkan aspirasinya. Memperjuangkan Brajamusti untuk lebih baik, berkembang dan maju. Ini sebagai rasa terima kasih dari Agung Damar kepada kawan-kawannya di Brajamusti khususnya.

Dwi Saryono sebagai anggota Brajamusti yang berafiliasi ke sejumlah partai, menurutnya tidak mudah untuk menyuarakan suara para supporter yang telah memiliki pemikiran politik di dalam kepalanya. Inilah yang menyebagiankan Dwi memilih untuk mengandalkan strategi kontrak politik dengan menyuarakan suara jejaringnya dalam pemenangannya yakni dengan meminta pendapat melalui jaringan yang telah ia bangun.

Untuk menyuarakan suara para konstituennya di DPRD Yogyakarta sendiri, Dwi Saryono duduk di Komisi A (Pemerintahan-Hukum), ada 8 (delapan) orang yang duduk disana. Beliau senang duduk di Komisi ini, karena menurutnya komisi ini aman, jauh dari proyek-proyek masyarakat. Sedangkan bagi Agung Damar Kusumandaru yang saat ini menjadi wakil ketua II DPRD Kota Yogyakarta, beliau membawahi salah satu komisi yang membawahi bidang kepemudaan dan keolahragaan . Sehingga melalui kedudukannya dan kapasitas otoritas yang dimiliki, kedua politisi tersebut secara prosedural bisa dikatakan dapat mewakili konstituennya dan diharapkan dapat memenuhi semua kontrak politik yang telah mereka janjikan.

Melihat analisa data pada pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan relasi politik yang terjadi antara para politisi dengan Brajamusti merupakan perpaduan yang unik. *Dalam pembangunan basis massa dalam dukungan politik terhadap kedua anggota DPRD tersebut merupakan bentuk perpaduan antara pembangunan pondasi nilai-nilai ikatan modal sosial yang diperkokoh dengan mesin-mesin politik yang berasal dari berbagai partai politik.* Hal tersebut membuat pola-pola pengorganisasian yang cukup efektif dalam mendulang suara. Berikut adalah tabel penggambaran operasi gerakan yang dilakukan para calon terhadap Brajamusti .

Tabel 3.1 Instrumen dan Managemen Operasi Gerakan

No	Instrumen	Manajemen Operasi Gerakan
1	Pola Pengorganisasian	Gerakan Brajamusti yang dipadukan dengan metode pengorganisasian nilai politik yang diadopsi melalui partai politik yang mendukung para calon
2	Metode Operasi Gerakan	Metode konvensional melalui temu diskusi terbuka, door to door dan pemaparan visi dan misi
3	Target Gerakan	Suporter , masyarakat sekitar tempat tinggal, dan anak muda
4	Metode Pembiayaan	Dana Pribadi dan Sukarela dari para Suporter
5	Medium Gerakan	Perpaduan antara medium terbuka dan tertutup
6	Corak Gerakan	Gerakan anti kekerasan dengan mengusung semangat solidaritas
7	*Contentious Politic Action*	Ada berupa janji untuk memajukan masyarakat sekitar dan masalah dalam dunia kepemudaan keolahragaan.

Implikasi hubungan politisi-suporter bola

Kemunculan The Maident

Kemenangannya menjadi anggota dewan rupanya membuat beberapa pihak merasa dirugikan. Entah sengaja atau tidak, pihak yang kecewa kemudian mengembuskan isu bahwa Brajamusti kini ditumpangi politik, dengan bukti kemenangan Dwi Saryono menjadi anggota dewan.

Pihak yang kecewa lantas memisahkan diri dari Brajamusti kemudian membentuk barisan suporter sepakbola PSIM selain Brajamusti, yang dikenal dengan The Maident (Mataram Independent).

Brajamusti sebagai wadah supporter untuk mendukung PSIM yang sebelumnya tunggal kini menjadi dualisme supporter. Tidak bisa dipungkiri lagi saat melihat tim kebanggaan masyarakat Kota Yogyakarta berlaga di Stadion Mandala Krida terdapat dua kelompok supporter besar yang ada di Yogyakarta yaitu Brajamusti dan kemunculan The Maident. Kemunculan The Maident setelah terjadi Musta (Musyawarah Anggota) Brajamusti yang ke tiga. Musyawarah anggota dilaksanakan untuk menentukan Presiden Brajamusti yang baru setelah masa jabatan presiden telah habis. Musta ketiga dilaksanakan di Balaikota pada tanggal 26 September 2010. Dalam Musta tersebut terpilih presiden baru yang bernama Eko Satriyo Pringgodani mengalahkan calon-calon lain yang diusung para laskar. Dia mengalahkan saingan terberatnya yang bernama Setio Hadi G. Pemilihan suara diikuti 159 laskar yang memiliki hak suara. Laskar itu terdiri dari 119 Kota Yogyakarta, 28 Bantul, 8 Kulonprogo dan 4 Sleman.

Dalam proses demokrasi pemilihan presiden Brajamusti tersebut pada kenyataannya tidak membawa kepuasan bagi salah satu calon Presiden. Setio Hadi G (SHG) yang sempat menjadi pesaing berat presiden terpilih di ajang Musta ke tiga, akhirnya lebih memilih untuk mendirikan kelompok supporter yang bernama The Mataram Independent (Maident). Menurut SHG, sebenarnya sudah lama ingin berdiri dan ingin menunjukkan diri kalau Maident adalah supporter yang santun membela PSIM dan supporter yang cerdas.

Brajamusti berdiri tujuh tahun silam untuk menggantikan PTLM sebagai arah untuk mendukung PSIM. Secara tidak langsung, Brajamusti lahir setelah keresahan laskar yang trgabung dalam PTLM yang telah vakum dan hanya diisi oleh kalangan dewasa maupun orang tua. Munculnya Maident tidak serta merta karena kekalahannya dalam Musta Brajamusti ketiga. Akan tetapi The Maident berdiri sebagai wadah supporter dan

tetap bertujuan untuk mendukung PSIM. Maident tetap berkomitment dan berorganisasi mandiri dan tidak ingin lagi dengan Brajamusti, karena mengangap bahwa Brajamusti itu telah bobrok karena dimasuki suatu isu politik. Mengapa dikatakan bobrok karena telah terjadi kekosongan presiden setelah presiden yang menjabat sebelumnya telah habis masa jabatannya dan seharusnya sebelum habis masa jabatan sudah harus ada Musta (Musyarawarah Anggota). Pada kenyataannya Musta yang ke tiga selalu diundur dan akhirnya digelar pada tanggal 26 September 2010.

Akhirnya The Maident secara resmi berdiri pada tanggal 1 Oktober 2010, selain itu telah didukung sebanyak kurang lebih 60 laskar yang dahulunya adalah laskar dari Brajamusti, organisasi ini didukung oleh 10 advokat di Yogyakarta. Dalam mendukung PSIM berlaga di Stadion Mandala Krida, Maident menempatkan dirinya di tribun sebelah utara dan Brajamusti berada di tribun sebelah timur dan selatan bersama PTLM. Dari kubu manajemen dan Pembina PSIM, mereka tetap bersikukuh supporter yang ada unuk mendukung PSIM itu Brajamusti dan masih mengakui Brajamusti sebagai supporter tunggal dan tidak mengakui Maident sebagai wadah supporter. Mereka beralasan bahwa Musta ke tiga yang dilakukan Brajamusti adalah sah dan legal.

Hubungan Maident dan PDI-P

Nuansa politik yang kental dalam tubuh Brajamusti telah menimbulkan efek negatif bagi supporter tersebut. Sehingga berbagai isu merebak apalagi setelah adnaya kelompok “sempalan” bernama Maident. Dimana ada isu yang berkembang Maident adalah sebuah supporter yang memisahkan diri dari Brajamusti akibat adanya unsur politik dalam Brajamusti. Akan tetapi ternyata isu yang beredar bukan hanya itu, ada isu lain bahwa Brajamusti telah dikuasai oleh partai tertentu paska pemilihan keua umumnya sehingga menyebagiankan supporter lain dengan dukungan partai lain berusaha memisahkan dirinya. Berbagai isu yang berkembang tersebut sejatinya menunjukkan adanya sebuah pengaruh besar politik pada tubuh Brajamusti yang mengakibatkan adanya berbagai isu yang berkembang.

Dari kemunculan Maident yang kecewa terhadap kinerja Brajamusti yang menyimpang. Dengan terlalu lamanya diadakan Musta dan terjadi kekosongan kekuasaan setelah presiden sebelumnya habis masa jabatannya, yang menyebagiankan Brajamusti vakum dan hampir tidak ada kegiatan sama sekali. Kemunculan Maident juga terdapat unsur politiknya. Jadi dapat dikatakan antara Maident dan Brajamusti sama-sama ada unsur politik yang mendasarinya. Anggota dari Maident sendiri yang sebagian besar terdapat kalangan PDI-P walau ada campuran partai politik lain didalamnya. Maka kesalahan terjadi ketika Maident untuk mendukung PSIM harus dikawal Satgas dari PDI-P. karena hal itu juga akan memperburuk citra PDI-P untuk pemilihan walikota yang akan dilaksanakan tahun 2011. Padahal PDI-P adalah partai yang paling siap untuk menghadapi pemilu walikota di Yogyakarta dan sudah ada calonnya walikotanya tinggal memilih wakilnya saja.

Dalam pandangan Dwi Saryono, isu yang banyak beredar tentang perpecahan Brajamusti adalah akibat dari politisasi sejumlah kalangan untuk menjelekkan PDI-P. Menurutnya perpecahan Brajamusti hanyalah peroalan internal organisasi saja yaitu rasa ketidakpuasan sejumlah anggota terhadap ketuanya. Akan tetapi isu yang bergulir dan membuat citra PDI-P menjadi jelek, membuat PDI-P menyiapkan langkah dengan mengawal meiden agar tidak terjadi keributan. Bahkan meurut penuturan Dwi Saryono, ada anggota PDI-P yang berada dalam medien yang sempat dipanggil oleh pengurus karena dianggap malakukan perbuatan yang bertentangan dengan partai. Kejadian tersebut sesungguhnya memperlihatkan bahwa sebuah supporter bernama Brajamusti ternyata sangat mudah untuk dimasuki oleh hal-hal yang berbau politik-partai dan sebagai basis lumbung suara maupun sebagai isu politik. Keterlibatan PDI-P secara nyata dalam Maident menunjukkan bahwa di dalam Brajamusti terjadi aliran-aliran yang saling berupaya menggunakan organisasi tersebut guna kepentingan politiknya.

Perpecahan dalam tubuh Barajamusti merupakan imbas dari pemilihan ketua Brajamusti. Namun yang sangat disayangkan adalah ketika ada oknum yang menghembuskan isu bahwa Maident (pecahan

dari Brajamusti) merupakan orang-orang PDI-P yang selalu berbuat anarkis. Hal ini tentu mencemarkan nama baik PDI-P, apalagi menjelang pemilihan walikota. Seperti diketahui, PDI-P menjadi partai yang paling siap untuk pemilihan walikota, nama calonnya pun sudah dikantongi, hanya tinggal memilih wakilnya saja. Hal inilah yang diduga dimanfaatkan oleh lawan politiknya untuk menjatuhkan nama PDI-P. Sehingga untuk mengantisipasi hal ini, kini kepergian Maident selalu dikawal oleh satgas PDI-P untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian setiap menonton pertandingan sepak bola, PDIP-P menganjurkan para supporter untuk memakai atribut Brajamusti. Antisipasi lain juga dilakukan dengan cara memanggil anggota Maident dan memberikan pembinaan kepada mereka tentang akibat yang bisa muncul dari terbentuknya Maident ini bagi partai. Posisi ketua Dewan yang dipegang PDI-P, dan banyaknya anggota DPRD yang berasal dari PDI-P mungkin menjadi kekhawatiran dari lawan politiknya apabila nantinya sang walikota juga berasal dari PDI-P.

Semuanya berawal ketika berlangsungnya pemilihan ketua Brajamusti, ketika gagalnya capres Brajamusti yang berasal dari PDI-P. Perpecahan yang terjadi di Barajamusti adalah suatu hal yang wajar, karena Brajamusti memang terdiri dari berbagai macam ideologi. Perpecahan dan pembentukan Maident memang disesali oleh Dwi Saryono dan Agung Damar Kusumandaru, banyak dari mereka yang hanya terkesan ikut-ikutan, tanpa tahu betapa besar imbasnya bagi partai untuk ke depannya dan perlu diketahui saat ini Maident sendiri belum resmi.

Penutup

Dapat disimpulkan kedua calon mempergunakan cara yang sama dalam manajemen relasi operasi gerakan mobilisasi masa Brajamusti. Perbedaan dalam manajemen operasi yang diterapkan oleh kedua calon tersebut terkait penekanan pada fokus prioritas penggunaan Brajamusti dalam operasi manajemen gerakan. Calon Agung Damar Kusumandaru memang sangat mempergunakan Brajamusti sebagai fokus utama dalam pengembangan jaringannya sehingga strukturasi jaringan lain juga dapat

terpengaruhi dengan perannya dalam mobilisasi Brajamusti. Sedangkan Dwi Saryono sendiri menjadikan Brajamusti sebagai bagian dari subsystem jaringan yang akan menjadi fokus dari mobilisasi massa, sehingga pemanfaatannya hanya sekedar sebagai pembangunan citra diri saja.

Hasil pemilu pun menyebutkan calon Agung Damar Kusumandaru yang menjadikan Brajamusti sebagai fokus utama dalam pembangunan jaringan dengan melakukan mobilisasi massa lewat permintaan doa restu, misalnya, dapat mendongkrak perolehanl suara yang cukup telak jika dibandingkan dengan Dwi Saryono. Dwi Saryono yang menjadikan Brajamusti sebagai subsystem jaringan basis massanya- terlihat dari tidak ada upayanya yang cukup seris memobilisais massa Brajamusti- tidak memperoleh suara yang cukup telak di daerah pemilihannya. Dampak positif yang di dapat dari Agung Damar Kusumandaru yang memanfaatkan secara maksimal kekuatan Barajamusti, saat ini dia menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta. Dengan posisinya yang cukup tinggi saat ini, jelas pertanggung jawaban atas contentious politics melalui kontrak politik yang telah dilakukannya akan lebih mudah untuk dilakukan jika dibandingkan dengan Dwi Saryono. Sebagai contoh kasus Bantul di saat pasangan Sukardiyono-Darmawan Manaf yang mengerahkan organisasi yang pasangan ini kenal cukup lama ternyata dapat mendulang suara 30% di dalam rezim yang cukup mendinasti (rezim Samawi) walaupun kalah dalam pemilihan kepala daerah (Rinaldi (et al.) 2010) .

Dinamika yang terjadi akibat besarnya politisasi di dalam tubuh Brajamusti dari banyaknya elite pengurus yang terjun di dunia politik ternyata menimbulkan friksi di dalam tubuh Brajamusti sendiri. Tentunya hal tersebut membuat kekecewaan terhadap berbagai pihak baik dari suporter juga elite yang membangun Brajamusti. Kemunculan Maident sebagai salah satu bentuk nyatanya, ternyata cukup menjadi kerisihan tersendiri bagi berbagai pihak. Berbagai prasangka berdatangan akibat kemunculan dari kelompok suporter tandingan ini, Maident sering disebut sebagai suporter independent namun ada juga yang beranggapan jika

Maident juga sama saja ditengarai sebagai bentuk mesin politik baru non-partai melalui suporter sepakbola yang tengah diusung sebagai bentuk manuver politik dalam rangka menyambut pilkada kota Yogyakarta.

Hal ini membuktikan betapa hebatnya peranan yang dapat dilakukan oleh suporter sepakbola sebagai salah satu bentuk baru dalam basis dukungan massa non-partai. Masalahnya jika terlalu dipolitisasi suporter sepakbola justru akan kehilangan nilai-nilai solidaritas yang mungkin akan merugikan bagi banyak pihak . Konflik pun mungkin akan sering terjadi jika hal tersebut terjadi. Di sinilah kebijaksanaan para elite yang berada dalam kepengurusan suporter sepakbola sangat dibutuhkan. Tentunya dalam penggalangan massa nurani dan keikhlasan suporter harus selalu diutamakan. Memecah suporter adalah hal yang bodoh, tentunya kesolidan para suporterlah yang membuat kita berada di jabatan ini, begitulah kata Agung Damar Kusumandaru diakhir perbincangan dengan peneliti.

Catatan Proses

Setelah menemukan tema dan merumuskan masalah penelitian, kegiatan dilanjutkan dengan menyususn laporan. Laporan peneletian dimulai denga penyusunan proposal peneitian. Rumusan masalah ini berfungsi sebagai dasar dalam melakukan penelitian, karena inti yang dicari dalam pencarian data adalah yang menjadi pertanyaan atas sesuatu. Selanjutnya pencarian teoripun dilakukan, melalui studi-studi pustaka yang ada, baik buku maupun internet. Dengan sumber-sumber yang relevan dengan tema besar penelitian. Meskipun teori disini tidak terlalu mempunyai porsi besar, mengingat ini adalah penelitian kualitatif, dan bukan penelitian yang menguji teori. Hingga akhirnya proposal penelitian pun selesai kami susun.

Langkah kedua yang kami lakukan adalah mencari data langsung yang ada dilapangan, dengan melalui wawancara. Wawancara pertama kami lakukan kepada pihak Brajamusti. Yaitu dengan memanfaatkan kedekatan interpersonal dari salah satu anggota kelompok (Wisnu

Wibowo) yang juga merupakan anggota dari Brajamusti. Sehingga basis awal penggalian data mengenai keterlibatan politisi dapat digali lebih mendalam untuk memudahkan wawancara selanjutnya. Selain itu, wawancara awal ini sangat membantu kami dalam proses diskusi yang dilakukan di kelas bersama.

Selanjutnya wawancara dengan Agung Damar Kusumandaru menggunakan hubungan interpersonal ditambah strategi teknik wawancara pemberitaan para jurnalis. Ternyata tidak terlalu sulit saat kami ingin melakukan wawancara kepada Agung Damar yang merupakan wakil DPRD Kota Yogyakarta. Saat kami mencoba melakukan janji melalui sms ternyata beliau langsung menanggapi dan menyanggupi untuk diwawancarai pada hari berikutnya. Kami pun keesokan harinya menuju Kantor DPRD Kota Yogyakarta, dan sempat menunggu Agung Damar beberapa waktu, karena beliau sedang ada tamu. Wawancara kemudian dilakukan diruangan Agung Damar yang berada di lantai dua. Ternyata Agung Damar termasuk orang yang cukup blak-blakan dan supel sehingga kami tidak terlalu merasa canggung. Saat kami mencoba melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang cukup sensitif ternyata beliau menjawab dengan santai dan justru malah bercerita banyak hal kepada kami, terutama mengenai kedekatannya dengan Brajamusti. Awalnya peneliti mengaku sebagai jurnalis yang ingin memberitakan masalah RUUK Yogyakarta, di saat janji temu wawancara sudah didapatkan. Dalam momen wawancara ini sekaligus peneliti mengutarakan maksudnya untuk menanyakan perihal hubungan politisi dengan Brajamusti.

Wawancara yang ketiga dengan Dwi Saryono. Karena kami dengan nara sumber yang ini kurang mempunyai info mengenai contact person dan tempat tinggal, makan kami menggunakan sedikit adaptasi teknik lobbying. Untuk mendekatkan diri dengan Dwi Saryono peneliti mengunjungi salah satu bisnisnya "Ayam Goreng Code" untuk mendekatkan diri dengan politisi sekaligus untuk meraih simpati agar memudahkan wawancara . Karena akses inilah yang kami nilai sebagai langkah awal untuk mendaptkan informasi tentang nara sumber. Walau pada akhirnya kami tidak dapat menemui nara sumber secara langsung, dikarenakan

beliau sedang pergi. Namun setidaknya kami mendapatkan nomor telephone rumah dari Dwi Saryono, sekaligus mengetahui di mana beliau tinggal. Sampai akhirnya kami menghubungi beliau melalui nomor telephone yang telah kami dapatkan, dan bersepakat untuk bertemu dan akhirnya dapat melaksanakan wawancara di rumah beliau.

Wawancara yang kami lakukan ini kami bagi dalam tim, mengingat jumlah anggota kelompok kita yang berjumlah tujuh orang yang kurang baik jika melakukan wawancara secara bersamaan. Tim kami bagi menjadi dua tim, ke tim Agung Damar dan satunya lagi ke tim Dwi Saryono. Pembagaian ini memudahkan kami, karena lebih efektif dan efisien waktu, karena bisa bagi tugas dan tidak "*grudukan*".

Selesai mencari data dilapangan, kami tetap berupaya menggali informasi dan data dari sumber lain, seperti internet. Hingga penyusunan laporan akhirpun kami laksanakan.

REFERENSI

Bola.net 2010, *Suporter PSIM berharap tak ada pembatasan penonton*, diakses 12 Januari, 2010, <http://www.bola.net/indonesia/suporter-psim-berharap-tak-ada-pembatasan-penonton.html>

Creswell, John W 1998, *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five tradition*, Sage Publications, London.

Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. (eds.) 2009, *The handbook of qualitative research*, Pustaka Pelajar ,Yogyakarta.

Hapsarin, Cin Pratipta, *PolitikiIdentitas: Geliat sosial antara aku dan yang lain*, diakses 23 November, 2010, <*http://www.scribd.com/doc/29223314/Politik-Identitas-Geliat-Sosial-Antara-Aku-dan-Yang-Lain*>.

Koentjaraningrat 1985, *Antropologi sosial*, Dian Rakyat, Jakarta

KPUD Provinsi DIY 2009, *Daftar terpilih anggota DPRD Pemilu 2009*, KPUD Provinsi DIY Yogyakarta, diakses 11 November, 2010, <http://pilpres2009.kpud-diyprov.go.id/calonterpilih.php?ktg=kab&dapel=Kota%20Yogyakarta>

Lukmantoro, Triyono 2008, *Politik identitas dan demokrasi*, diakses 23 November, 2010, <http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2'1833&Itemid=62>

Mack, Natasha et al. 2005, *Qualitative research methods: A data collector's field guide, diakses 09 Januari, 2010,* <http://www.fhi.org/NR/rdonlyres/emgox4xpcoyrysqspsgy5ww6mq7v4e44etd6toiejyxalhbmk5sdnef7fqlr3q6hlwa2ttj5524xbn/datacollectorguideenrh.pdf>

Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael 1992, *Analisis data kualitatif*, UI Press, Jakarta.

Mintorahardjo, Sukowaluyo, *Runtuhnya modal sosial*, diakses 11 Januari, 2011, < http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=7892&coid=4&caid=4&gid=2 >

Quinn, Paton Michael 2009, *Metode evaluasi kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Rinaldi, Nandy (et.al.) 2010, 'Laporan penelitian gerakan poltik: studi kasus pemenangan calon Sukadarma dalam Pilkada Bantul', *Tugas mata kuliah gerakan politik*, Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta

Strauss , Anselm & Corbin, Juliet 2003, *Dasar-dasar penelitian kualitatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta.

Suporter Indonesia.com *2010, Waspada! Supporter bisa d jadikan ajang politik* , diakses 11 Januari, 2010, <*http://www.supporter-indonesia.com/waspada-supporter-bisa-di-jadikan-ajang-politik.html*>

Ulfelder, Jay 2005, 'Contentious collective action and the breakdown of authoritarian regimes', *International political science review, V*ol. 26, No. 3, Hal. 311–334.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak . Agung Damar Kusumandaru, Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Desember 2010

Wawancara dengan Bapak. Dwi Saryono, Sekretaris Fraksi PDI-P Kota Yogyakarta, Desember 2010

Wawancara dengan Pengurus Brajamusti, Desember 2010

Wawancara dengan VW Suporter Aktif Brajamusti, Desember 2010

Wawancara dengan masyarakat sekitar wilayah Jagalan, Desember 2010

Lampiran

Daftar Pertanyaan Interview

Pertanyaan *Interview* Bagian II

- Apa yang strategi politisi yang diusung partai dalam pemenangan pemilu legislative kemarin ?
- Mengapa politisi mempergunakan Brajamusti untuk mendukung pemenangan pemilu legislative kmrin ?
- Sudah berapa lama anda bermitra dengan Brajamusti dalam mendukung perolehan suara anda ?
- Apa politisi yang diusung partai memiliki kedekatan dengan Brajamusti ? Bisa Dijelaskan ?
- Apa Brajamusti merupakan kendaraan utama untuk menyokong suara selain partai politik ?

Pertanyaan *Interview* Bagian III

- Bagaimana pola pengorganisasian dalam pemenangan pemilu yang dilakukan calon terhadap Brajamusti ?
- Bagaimana metode operasi gerakan dalam pemenangan pemilu yang dilakukan calon terhadap Brajamusti ?
- Medium apa saja yang dipergunakan oleh Brajamusti dalam pemenangan pemilu dan target gerakan mobilisasi masanya ?
- Bagaimana metode pembiayaan dalam pemenangan pemilu yang dilakukan calon terhadap Brajamusti ?
- Adakah bentuk contentious politic action yang dilakukan antara calon dengan Brajamusti ? Apa saja ?

Pertanyaan *Interview* Bagian IV

- Apa Implikasi yang terjadi di saat Brajamusti dijadikan basis dukungan massa oleh para politisi ?
- Bagaimana pendapat politisi mengenai Maident ?

6

Pola Relasi Kuasa dalam Pengelolaan Kantin Fisipol UGM

Nanang Aprilianto, Ridwan Budiman, Riezky Chandra N., Putu Dika Arlita K. D

Pendahuluan: Latar Belakang

Universitas Gadjah Mada dikenal memiliki tidak kurang dari 40 ribu mahasiswa. Ini tentu menjadi sumber daya srategis yang mampu dimanfaatkan tidak hanya bagi pemerintah daerah, pihak kampus, namun juga masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Para mahasiswa yang merantau tersebut tentu tidak hanya membayar uang kuliah saja namun juga mengeluarkan *living cost* (biaya hidup). Biaya hidup itu biasanya meliputi: biaya tempat tinggal (kos ataupun kontrak rumah); biaya alat tulis, fotokopi, buku; dan tentunya biaya makan serta minum.

Biaya makan minum ini tentunya merupakan suatu kebutuhan primer bagi para mahasiswa. Mahasiswa rantau biasanya jarang memasak sendiri, sehingga hampir selalu membeli makanan di luar. Mahasiswa

yang berasal dari jogja pun juga kerap kali jajan atau setidaknya makan siang di luar. Inilah yang membuat kawasan sekitar kampus begitu ramai menawarkan berbagai makanan mulai dari masakan daerah hingga masakan internasional. Hal ini juga terjadi di kantin kampus. Hampir seluruh fakultas di UGM memiliki kantinnya masing-masing termasuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (selanjutnya disebut sebagai Fisipol). FISIPOL memiliki kantin yang luas dan ramai dikunjungi para mahasiswa baik mahasiswa FISIPOL maupun non-FISIPOL. Konsep kantin yang menawarkan banyak makanan minuman secara bebas, tempat duduk yang luas, serta taman atau lapangan sansiro yang asri menjadi kelebihan dan daya tarik tersendiri bagi kantin FISIPOL.

Masalah yang hendak kami angkat dalam penelitian ini adalah mengenai relasi kuasa dalam pengelolaan kantin Fisipol UGM. Sebagai tempat yang strategis, Kami meyakini bahwa terdapat pola relasi kuasa dalam pengelolaan kantin FISIPOL UGM. Ini merupakan suatu kajian yang menarik untuk diteliti terutama sebagai warga FISIPOL UGM sendiri untuk lebih mengenal fakultasnya. Kantin di lingkungan kampus FISIPOL UGM sebagai salah satu sektor strategis setelah biaya kuliah untuk meraup uang dari mahasiswa. Kantin Fisipol UGM diasumsikan tidak dikelola mutlak oleh fakultas ataupun universitas melainkan dikelola secara mandiri oleh kelompok tertentu karena adanya hubungan dan kedekatan dengan aktor dalam. Ini artinya pihak fakultas dan universitas membiarkan pundi-pundi uang mereka digenggam oleh kelompok lain, maka dari hal tersebut menjadi kajian menarik untuk kami teliti lebih lanjut tentang bagaimana relasi kuasa dalam pengelolaan kantin di kampus Fisipol UGM.

Tema ini juga kami pilih karena kemudahan untuk mengakses data yang berada dalam lingkungan kampus Fisipol UGM. Selain itu, sejauh pengetahuan kami penelitian tentang pengelolaan kantin Fisipol UGM juga belum pernah dilakukan sebelumnya.

Rumusan Masalah

Bagaimana Pola Relasi Kuasa dalam Pengelolaan Kantin Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami pola relasi kuasa dalam pengelolaan kantin fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Gadjah Mada.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, antara lain:

1. Memberikan pengetahuan bagi para mahasiswa UGM pada umumnya dan mahasiswa FISIPOL pada khususnya tentang pengelolaan kantin FISIPOL UGM.

2. Memberikan pemahaman secara nyata mengetahi pembentukan aktor dan pola relasi kuasa antar aktor dalam ilmu politik.

3. Memberikan saran dan masukan bagi pihak kampus FISIPOL UGM dalam tata kelola kantin yang baik.

Kerangka Konseptual

Dalam sistem masyarakat di negara berkembang seperti di Indonesia, sudah lazim dipahami bahwa tipikal kekuasaan yang hadir dan merajai setiap sendi-sendinya adalah sistem kekuasaan yang bersifat Patrimonial (Eko 2003, p.50). Meskipun rezim kekuasaan sudah berganti, dari otoriter menjadi demokrasi di tahun 1990-an akhir, nafas patrimonialisme yang berakar selama lebih dari 30 tahun di bawah rezim kekuasaan orde baru, tetap tak bisa berubah. Stagnasi gaya berkuasa ini tak hanya hadir di ranah elit-elit negara, tapi masuk dan menjadi corak

umum gaya kekuasaan sampai di tingkat dan sistem kelompok masyarakat kecil sekalipun, misalnya sistem pengelolaan kantin Fisipol UGM.

Kantin Fisipol UGM adalah bagian dari struktur dari kelompok masyarakat Indonesia, maka sistem pola pengelolaan sebuah kantin di dalam kampus Fisipol UGM pun sejatinya tidak terlepas dari pengaruh elite-elite (Pareto, Scribd n.d, p.1) yang berada di dalam kampus tersebut yang kental dengan nuansa patrimonial. Hal tersebut tergambar dari hubungan mutualisme-struktural yang terjalin antara petinggi kantin dengan para dosen maupun dekan serta wakil-wakil dekan. Dan karena menggunakan perspektif strukturalis, maka petinggi-petinggi kampus tersebut dapat dikategorikan sebagai elite yang mempunyai kekuasaan di dalam mengelola segala hal yang berkaitan dengan kantin kampus Fisipol UGM. Misalnya, sistem pergiliran lapak yang mengisi kantin Fisipol juga dapat dijadikan acuan dalam menganalisis para elite tersebut menggunakan kekuasaannya untuk menentukan siapa sebenarnya yang diprioritaskan dalam mengisi lapak tersebut. Karena jika dilihat secara cepat memang tidak terdapat rekruitmen terbuka dalam hal siapa saja yang boleh menjajakan barang dagangannya di dalam kantin Fisipol. Mereka yang sekarang ini menduduki kantin Fisipol dengan stand makanan mereka, lebih rata-rata menggunakan hubungan kedekatannya dengan para elite yang berada di kampus Fisipol.

Aktor elite di kampus Fisipol terbentuk karena posisi strategis jabatan yang dimiliki sehingga menyebabkan ia mempunyai sebuah kekuasaan atas suatu sumber daya dalam banyak hal. Seperti yang dikemukakan oleh Gaetano Mosca (1858-1941, cited in Varma 1982, p.202) bahwa dalam sebuah system tatanan social masyarakat akan selalu muncul dua kelas di dalam masyarakat yakni kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah, sebagai sebuah watak natural sosial manusia (Scribd n.d, p.2). Kelas yang pertama – yang biasanya jumlahnya lebih sedikit – memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan serta menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatkannnya dari kekuasaan. Sementara kelas yang kedua yang jumlahnya lebih besar, diatur dan

dikontrol oleh kelas pertama, terwakili di posisi atas serta mensuplai kebutuhan kelas pertama, paling tidak pada saat kemunculannnya, dengan instrument-instrmen yang penting bagi vitalitas organisme politik.

Berkaca dari teori kekuasaan yang dikemukakan oleh Mosca dan Pareto tersebut, jika diterapkan dengan fenomena yang terjadi dalam kampus Fisipol dalam hal ini adalah system pola pengelolaan kantin, maka kami berhipotesa bahwa ada campur tangan elite di dalamnya dalam pengelolaan kantin Fisipol dalam hal pengaturan manajemen yang sarat dengan persoalan kekuasaan bercorak patrimonial dan elitis. Singkatnya, ada pola relasi kuasa antara elit birokrat kampus dengan pengurus kantin Fisipol, sehingga berdampak pada manajerial pengelolaan kantin Fisipol UGM.

Seperti dikatakan di awal bahwa baik dosen maupun dekan beserta wakil-wakilnya berperan sebagai actor elite atau kelas yang pertama (*rulling class*) – seperti yang disebutkan oleh Mosca. Sedangkan para pedagang kantin merupakan masyarakat kelas kedua (*rulled class*) dimana pergerakan mereka dalam usaha dagangnya di dalam kantin mendapat control dari para actor elite tersebut. Mengingat kantin Fisipol disini adalah sebuah sumber daya ekonomi yang sangat potensial, sehingga memungkinkan untuk dikuasai para actor elite tersebut. Campur tangan elite kampus disini secara tidak langsung telah membuat sebuah *hidden consensus* dimana di dalamnya terdapat peraturan tidak tertulis mengenai system pengelolaan kantin Fisipol UGM. Peraturan tersebut terlihat benar pada siapa yang mempunyai kedekatan yang cukup intens dengan para actor elite kampus Fisipol ini maka dialah yang berhak masuk ke dalam lingkungan kantin untuk berdagang.

Selain itu, hasil dari system pengelolaan kantin yang berdasarkan *hidden consensus* tersebut, juga melahirkan kebijakan fundamental yang dapat menjaga stabilitas kedudukan dari *rulling class* tersebut oleh *rulled class,* misalnya mengenai beberapa persen keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan di kantin Fisipol yang harus disetorkan ke pihak kampus, penentuan prioritas orang-orang yang diperkenankan membuka

lapak, serta terbukanya akses yang sangat luas pula untuk *rulling class* dalam menjalankan aktivitas ekonominya di kantin Fisipol UGM tersebut, tanpa harus melewati penyeleksian ketat sebagaimana pedagang kantin lainnya masuk menunggu giliran.

Poin-poin konseptual seperti inilah yang sekiranya akan menjadi dasar pokok dalam berargumentasi sekaligus pula mengkerangkai penelitian yang berjudul "Pola Relasi Kuasa dalam Pengelolaan Kantin Fisipol UGM" ini. Kerangka Konseptual ini akan menjadi titik pandang dalam meneliti keterkaitan antara pengelolaan (manajemen) kantin dalam kaitannya dengan relasi kuasa yang hadir di Kantin Fisipol UGM. Hal ini penting dibangun dari awal, agar penelitian ini tidak terjebak dalam studi-studi manajemen yang menjelaskan hanya secara deskriptif – tanpa mampu menganalisis – pengelolaan kantin saja. Atau, tidak sampai terjebak pada studi ekonomi yang menghitung tentang sistem keuangan atau *cashflow* yang ada dalam pengelolaan kantin Fisipol UGM.

Metode Penelitian

Dalam meneliti pola relasi kuasa kantin, kelompok kami menggunakan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus lebih dipahami sebagai pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau mengintrepretasi suatu kasus dalam konteksnya yang alamiah tanpa adanya intervensi pihak luar. Di antara semua ragam studi kasus, kecenderungan yang paling menonjol adalah upaya untuk menyoroti suatu keputusan atau seperangkat keputusan, yakni mengapa keputusan itu diambil, bagaimana ia diterapkan dan apa pula hasilnya (Salim 2006). Selain itu dengan menggunakan studi kasus (*case study*) kami dapat memberikan gambaran tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang khas dari kasus, tipe pendekatan dan penelaahannya terhadap satu kasus dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif (Faisal, 2001, cited in Dewi 2006).

Definisi studi kasus menurut Surachrnad (1982, cited in Scribd n.d, p.1) membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan

dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Karena penelitian kami menggunakan studi kasus, maka penelitian akan dibatasi oleh ruang lingkup sebagai berikut:

1. Waktu, penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan Desember 2010 sampai dengan Januari 2011 Masalah yang diteliti adalah Pola Relasi Kuasa dalam Pengelolaan Kantin Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada.

2. Lokasi dibatasi oleh Kantin Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada.

3. Masalah dibatasi pada Pola Relasi Kuasa dalam. Pengelolaan Kantin Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (Wahono 2005).

Sedangkan definisi dari Studi Kasus menurut Robert K.Yin adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan dimana multi sumber bukti dapat dimanfaatkan. Studi kasus dipilih karena mempunyai beberapa keunggulan dibanding metode lain yaitu *pertama,* studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *How,* yang pada dasarnya lebih eksplanatoris sehingga sesuai dengan rumusan masalah kelompok yang mengangkat tentang Bagaimana pola relasi kuasa yang ada di kantin Fisipol. *Kedua,* peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki. Peristiwa–peristiwa yang kelompok kami selidiki tentang kantin Fisipol tidak semuanya dimasukkan, namun hanya sebatas tentang siapa saja aktor yang terlibat di dalam pengelolaan kantin dan bagaimana relasi antar aktor tersebut. Sedangkan hal-hal lain diluar itu sedikit dicantumkan tetapi hanya sebagai pelengkap semata. *Ketiga,* Fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata. Dalam hal ini, pola relasi kuasa yang ada di kantin Fisipol menjadi sangat menarik untuk diteliti karena merupakan fenomena masa kini

yang sebelumnya belum banyak yang mengangkat tentang kantin Fisipol ini.

Dalam mengumpulkan data kelompok kami menggunakan *wawancara* dan *observasi langsung.* Wawancara merupakan sumber informasi yang penting bagi studi kasus. Wawancara yang kita ambil dalam studi kasus kantin Fisipol bertipe *open ended* (Yin 2006: 108). Wawancara *open ended* yaitu peneliti dapat bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa di samping opini mereka mengenai suatu peristiwa yang ada dan bahkan bisa meminta responden untuk mengetengahkan pendapatnya sendiri terhadap peristiwa tertentu dan bisa menggunakan proposisi tersebut sebagai dasar penelitian selanjutnya. Aktor-aktor yang diwawancarai oleh kelompok kami merupakan aktor yang mempunyai peranan penting di dalam kantin Fisipol. Adapun dalam melakukan wawancara kelompok membagi anggota kelompok menjadi beberapa bagian agar wawancara dapat dilakukan pada aktor-aktor yang berbeda dan tentunya lebih fokus. Sebagian anggota bertugas umewawancarai Manager Operasional kantin Fisipol, mewawancarai para penjual di kantin Fisipol, dan ada yang mewawancarai pihak Dharma Wanita. Observasi Langsung dilakukan dengan datang langsung ke kantin FISIPOL. Observasi langsung seringkali bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan tentang topik yang akan diteliti dang akan menambah dimensi-dimensi baru untuk pemahaman konteks yang diteliti. Kantin FISIPOL yang letaknya strategis dan dekat menjadikan observasi dapat dilakukan secara intensif.

Teknik pengumpulan data dimulai dengan menerapkan beberapa tahapan yaitu langkah pertama yang dilakukan adalah perencanaan. Perencanaan ditujukan untuk menyepakati kasus/ topik apa yang nantinya akan dibahas lebih dalam. Hal ini dilakukan dengan melibatkan seluruh anggota kelompok yang akhirnya menentukan topik pola relasi kuasa dalam pengelolaan kantin FISIPOL. Kedua, mengidentifikasi stakeholder, dalam kasus ini aktor-aktor yang terlibat adalah pedagang-pedagang yang berjualan di kantin FISIPOL dan pengurus kantin FISIPOL yang mempunyai wewenang untuk menentukan siapa yang berhak berjualan

atau yang tidak berhak berjualan/ petinggi kampu (dekan, wakil-wakil dekan, dosen dan istri-istri petinggi kampus). Ketiga, cara menghimpun/ memperoleh data adalah wawancara dengan narasumber yakni kepada pihak kampus, pengurus kantin FISIPOL, dan para penjual untuk membandingkan data yang kita peroleh dan nantinya menguji hipotesa tersebut (*Cross-check examination*).

Setelah data tersebut terkumpul baik hasil wawancara dengan pedagang kantin dan juga petinggi kampus FISIPOL serta dokumen-dokumen pendukung lainnya, maka selanjutnya dilakukan proses analisis data dengan cara merangkum seluruh informasi dan data yang didapatkan serta menarik kesimpulan dari studi kasus tersebut. Analisis dilakukan dengan cara mengkaitkan teori yang telah ada sebelumnya yaitu teori dari Gaetano Mosca yang menyatakan bahwa dalam sebuah sistem tatanan sosial masyarakat akan selalu muncul dua kelas di dalam masyarakat yakni kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah dengan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam. Setelah itu, dapat dilihat sebenarnya bagaimana pola relasi kuasa yang ada di kantin Fisipol, apakah hanya para penjual yang memiliki kedekatan dengan orang dalam kampus Fisipol saja yang boleh berjualan atau setiap orang bisa berjualan di kantin Fisipol dengan melewati tahapan-tahapan tertentu. Nantinya juga akan dilihat bagaimana hubungan antara aktor-aktor dalam kantin Fisipol tersebut, baik secara horizontal maupun vertikal.

Sejarah Dan Perkembangan Kantin Fisipol Ugm

Kantin Fisipol ini didirikan 6 November 2006. Berdirinya kantin Fisipol ini satu tahun setelah Gedung Yong Ma berdiri. Keberadaan kantin Fisipol dapat membantu warga Fisipol secara baik itu bagi penjual yang mendapat lapangan pekerjaan bagi mereka dan juga bagi para pembeli khususnya mahasiswa yang tidak perlu jauh-jauh untuk membeli makanan di luar Fisipol. Kantin Fisipol buka pada hari Senin sampai Jumat mulai pukul 07.00 dan tutup pada pukul 16.00. Setiap harinya, kantin ini banyak dikunjungi para pembeli. Para pembeli berasal dari Mahasiswa Fisipol dan luar Fisipol. Kantin Fisipol yang bersih dan

memiliki menu yang bervariatif ini membuat para mahasiswa Fisipol dan non-Fisipol datang di kantin Fisipol. Bahkan tidak jarang, mahasiswa di kampus-kampus yang letaknya jauh memilih kantin Fisipol untuk mengadakan pertemuan dengan teman-temannya di kantin Fisipol karena memang kantin Fisipol tempatnya nyaman untuk makan ataupun berdiskusi.

Saat ini ada 10 lapak yang berjualan dikantin dan setiap lapak memiliki menu yang berbeda-beda. Menu makanan yang dijual berbeda disebabkan pedagang diwajibkan oleh pengelola kantin yaitu Dharma Wanita dan Manager Operasional kantin (Bapak Haking dan Ibu Nining) untuk menjual makanan yang berbeda-beda jenisnya. Makanan yang dijual berbeda itu hanyalah menu pokok yang dijual oleh penjual namun untuk minuman semua pedagang disamakan supaya lebih mudah. Air minum untuk membuat minumanpun juga disamakan yaitu menggunakan air minum RO (*Reverse Osmosis*). Pembedaaan menu makanan ini bukan sebagai diskiriminasi bagi penjual, namun sebagai upaya agar setiap pedagang lapak dapat bersaing secara sehat dan mengurangi resiko konflik antar pedagang. Selain itu dengan menghadirkan makanan yang bervariasi merupakan salah satu strategi untuk menarik pembeli agar kantin selalu ramai dikunjungi. Dari 10 tersebut 7 lapak merupakan lapak yang disediakan pengelola kantin untuk penjual yang memiliki hubungan dengan pegawai Fisipol (istri pegawai Fisipol) dan 3 lapak diisi oleh penjual dari luar. Lapak-lapak No.2A, 2B, dan 2C berasal dari Dharma Wanita ada tiga lapak yaitu Pedagang Bakso, Gudeg, Bubur dan Kethoprak Dharma Wanita. Sementara lapak-lapak lainnya yaitu lapak No.1 berjualan Warung Rames dan penyetan, lapak No.3 berjualan Pecel dan Gado-Gado, lapak No.4 berjualan Ayam Bakar dan Mie Ayam, lapak No.5 diisi oleh Mat Geboy (cendol dan batagor), lapak No.6 berjualan Empek-empek Palembang, lapak No.7 berjualan Soto, lapak No.8 berjualan Snack dan cemilan. Lapak-lapak yang merupakan lapak penjual dari luar Fisipol (bukan dari kalangan Pegawai) yaitu lapak Mat Geboy, Ayam Bakar dan Mie Ayam, dan lapak Empek-Empek Palembang.

Kantin Fisipol merupakan kantin percontohan bagi kantin-kantin se-UGM. Hal itu dikarenakan kantin Fisipol merupakan kantin terbaik se-UGM dan kantin yang memiliki omset terbesar se-UGM. Hasil prestasi kantin Fisipol tentu saja tidak luput dari hasil kerja para anggota Dharma Wanita untuk mengelola kantin. Namun awalnya Kantin Fisipol didirikan oleh Pak Mohtar dan Ibu Mohtar Mas'oed yang pada saat itu menjabat sebagai ketua Dharma Wanita. Keadaan Kantin pada saat pertama kali dibangun tidaklah seperti sekarang, pada saat itu tempatnya kurang nyaman dan pengelolaan baik ruang ataupun keuangan kantin berantakan. Hal tersebut dapat kita lihat dari Fasilitas yang ada juga kurang memadai seperti tidak ada meja ataupun kursi, tentu saja hal tersebut mengurangi kenyamanan pengguna kantin. Selain itu aneka makan dan minuman yang di jual kurang menarik karena pada saat itu penjual yang ada di Kantin Fisipol tidak diseleksi atau hanya asal-asalan saja. Dan juga manajemen keuangan kantin juga cukup kacau belum adanya sistem kasir seperti sekarang. Melihat keadaan kantin yang kurang baik pada saat itu para anggota Dharma Wanita mencoba mengambil alih untuk mengelola kantin tersebut. Dharma Wanita yang pada saat itu di ketuai oleh Ibu Mohtar Mas'oed bekerjasama dengan pihak fakultas untuk memperbaiki kantin. Dari pihak Fakultas memberi dana talangan sebesar Rp 50.000.000,00 bagi pengadaan peralatan kantin (meja,kursi,lapak penjual dan lain-lain), tapi kini uang inventaris kursi, meja, lapak dan lain-lain telah berpindah ke tangan Dharma Wanita karena dana talangan tersebut telah berhasil dilunasi oleh Dharma wanita.

Sekarang ini pengelolaan kantin Fisipol dipercayakan penuh kepada Dharma Wanita yang sekarang diketuai oleh Ibu Ida Pratikno. Namun Ibu Ida Pratikno selaku ketua Dharma Wanita, dalam pengelolaan kantin Fisipol ibu Ida yang menjabat kantin Fisipol tetap menggandeng Ibu Mohtar (mantan Ketua Dharma Wanita dan selaku pendiri Fisipol). Maka sekarang pengelolaan kantin secara struktural memang berada ditangan Ibu Ida Pratikno, namun secara kultural pengelolaannya dipegang Ibu Mohar Mas'oed. Pengelolaan kantin memperkerjakan pekerja non-pedagang dan pekerja pedagang. Pekerja non-pedagang adalah manager operasional kantin (kasir) yang juga bertugas melakukan kontrol dan

melakukan pengechekan terhadap para penjual karena terlibat secara langsung dengan penjual dan perkerja kebersihan kantin. Sedangkan pekerja pedagang merupakan para penjual di lapak-lapak tersebut. Semua pengelolan kantin diawasi oleh Dharma Wanita. sistem pembayaran kantin menggunakan sistem satu pintu, artinya setiap pembayaran dilakukan pada satu tempat pembayaran khusus yaitu kasir. Bagi yang ingin membeli makanan, maka nantinya akan diberikan nota pembelian yang kemudian diserahkan ke kasir beserta uang pembayarannya, baru kemudian makanan ataupun minuman yang dipesan bisa dinikmati.

Melihat pedagang di kantin Fisipol yang didominasi oleh orang-orang terdekat, tentu saja menimbulkan kecurigaan adanya monopoli dalam pengelolaan kantin. Namun dugaan itu salah karena pada dasarnya tujuan dibangunnya kantin Fisipol ini ada dua macam yaitu :

1. Untuk Kesejahteraan Warga Fisipol (pegawai, TU, Dosen, dll)
2. Untuk Peluang usaha bagi pihak Luar

Jika kita lihat dari tujuan dasar dari pembangunan kantin Fisipol maka sangatlah wajar bila pihak dalamlah yang didahulukan. Namun dalam pengelolaannya tentu saja ada aturan-aturan yang perlu dipatuhi oleh setiap pedagang. Sedangkan tujuan dari mendatangkan pihak luar adalah kantin Fisipol yang berkeinginan untuk memberikan peluang usaha bagi pihak luar untuk berdagang di kantin Fisipol dan juga sebagai arena kompetisi bagi penjual pihak luar.

Kantin Fisipol juga dikelola dengan sistem kekeluargaan. Rasa kekeluargaan yang dimiliki oleh para anggota Dharma Wanita sangat kuat. Hal ini terbukti ketika salah seorang Dosen dari jurusan Hubungan Internasional yaitu Pak Sugiono meninggal, istri beliau yang bernama Ibu Aziz mendapat bantuan dari Dharma Wanita. Bagi seorang istri ketika suaminya meninggal, akan kehilangan sesosok tulang punggung keluarga yang menafkahi keluarganya setiap harinya. Maka dari itu penghasilan keluarga Ibu Aziz akan berkurang sepeninggal suaminya. Oleh karena itu,

berdasarkan rasa rasa kekeluargaan dari para anggota Dharma Wanita, maka Dharma Wanita setuju untuk memberikannya 1 lapak di kantin untuk Ibu Aziz kelola. Sehingga dalam hal ini lapak milik Ibu Aziz ini memiliki hak khusus yaitu tidak akan digusur. Ibu Aziz pun merasa sangat terbantu sekali dengan adanya keputusan dari Dharma wanita untuk memberikan bantuan kepadanya. Dengan adanya bantuan tersebut setidaknya kehidupan rumah tangga Ibu Aziz menjadi sangat terbantu dengan adanya perbaikan ekonomi. Selain itu, bantuan sosial juga diberikan kepada penjual kantin Fisipol bilamana mereka sakit atau mengalami bencana seperti Merapi kemarin. Hal inilah yang menggambarkan adanya basis kekeluargaan yang kuat diantara pengelola kantin dan para penjual kantin Fisipol.

Mekanisme Pengelolaan Kantin Fisipol UGM

Mekanisme Perekrutan

1. Persyaratan

Dalam proses perekrutan penjual di kantin Fisipol UGM, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Prioritas bagi Pegawai Fisipol UGM

Kantin Fisipol UGM menyediakan sepuluh tempat untuk dapat diisi oleh para penjual. Kesepuluh tempat tersebut pun selalu penuh ditempati para penjual baik orang yang memiliki kedekatan hubungan dengan pihak Fisipol maupun pihak luar. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kantin Fisipol UGM ini memang lebih diperuntukkan untuk orang-orang di dalam Fisipol itu sendiri, baik itu dosen, ataupun karyawan-karyawan lainnya. Namun, terdapat dua tempat kosong yang diperuntukkan untuk penjual dari luar guna menjaga persaingan yang ada di dalamnya.

b. Jenis Makanan

Salah satu syarat terpenting yang harus dilakukan oleh seorang penjual yang ingin berjualan di kantin Fisipol UGM adalah jenis makanan yang akan dijualnya tidak boleh sama dengan penjual lain yang sudah ada. Setiap penjual dari sepuluh tempat yang ada diharuskan untuk menjual jenis-jenis makanan yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk memberikan jenis makanan yang variatif bagi mahasiswa Fisipol, sehingga mereka tidak perlu pergi mencari makan di tempat luar, karena segala jenis makanan sudah tersedia di kantinnya.

Selain itu juga hal ini bertujuan untuk paling tidak memberikan penghasilan yang kurang lebih sama kepada setiap penjualnya, dan juga sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi kompetisi tidak sehat antar penjual karena jika terdapat penjual yang menjual jenis makanan yang sama, pilihan konsumen akan terbagi kepada kedua penjual tersebut. Namun, untuk minuman setiap penjual memang dipersilahkan untuk menjual minuman baik teh, jeruk, ataupun jus lainnya. Hal ini hanya untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan karena bila didirikan satu *drink counter* maka akan menimbulkan antrian dan pelayanan yang lama.

c. Kualitas Makanan

Syarat lain yang tidak kalah penting adalah kualitas makanan. Sebelum akhirnya dapat masuk untuk berjualan di kantin Fisipol UGM, penjual harus memberikan *sample* makanan, dan komposisi makanan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan makanan yang berkualitas bagi konsumen kantin Fisipol UGM yang sebagian banyak adalah pelajar. Makanan-makanan tersebut harus bersih, sehat, dan tidak mengandung bahan-bahan berbahaya yang akan meberikan efek yang tidak baik untuk kesehatan. Selain itu, syarat kualitas makanan lain yang juga penting adalah rasa. Kualitas rasa juga merupakan syarat

yang harus dipenuhi oleh seorang penjual sebelum memasuki kantin Fisipol UGM. Hal itu ditujukan agar selain sehat, makanan tersebut juga nikmat untuk dikonsumsi (Penjual Bakso Dharma Wanita dan Ibu Aziz penjual Warung Nasi Rames 2010, wawancara, 16 Desember 2010).

Ketiga persyaratan tersebut diatas harus dipenuhi oleh seorang penjual sebelum berjualan di kantin Fisipol UGM, baik itu penjual dari dalam (karyawan-karyawan kampus), begitu juga oleh penjual dari luar kampus. Selain itu, pelayanan juga diutamakan dalam penjualan. Keramahan dan kesopanan para penjual juga menjadi faktor yang penting dalam bisnis pengadaan makanan dan minuman ini.

2. Prosedur

Setelah memenuhi ketiga persyaratan tersebut, terdapat beberapa proses yang harus dijalani sebelum penjual tersebut akhirnya berjualan di kantin Fisipol UGM, antara lain:

a. Pengisian Formulir

Para penjual yang berjualan di kantin Fisipol UGM yang bukan merupakan karyawan kampus, pada umumnya masih merupakan orang-orang yang pernah bekerja di UGM, ataupun mahasiswa alumni Fisipol UGM. Hal ini dikarenakan pengelola kantin Fisipol UGM tidak memberikan *open recruitment* yang terbuka bagi masyarakat luas, sehingga sifatnya semi tertutup. Proses penyebaran informasi mengenai terdapatnya tempat kosong untuk dihuni ini hanyalah melalui info dari mulut ke mulut atau langsung menghubungi Ibu Nining (Kasir).

Jika terdapat penjual yang ingin mendaftarkan barang dagangannya untuk kemudian dipasarkan di kantin Fisipol UGM, penjual tersebut harus mengisi terlebih dahulu formulir

yang sudah disediakan, formulir ini dapat didapatkan di meja ibu Nining selaku kasir. Proses pengisian formulir ini harus pula disertai dengan proposal singkat mengenai profil singkat produk penjual tersebut. Dalam proposal tersebut harus dijelaskan mengenai beberapa hal, seperti:

1. Jenis makanan
2. Komposisi makanan
3. Tempat berjualan sebelumnya
4. Jumlah pendapatan per-harinya untuk penjual yang sebelumnya sudah pernah berjualan

Setelah semua persyaratan itu telah terisi lengkap, formulir pendaftaran dan proposal tersebut dapat diberikan kembali kepada Ibu Nining. Kemudian, para pendaftar tersebut menunggu hingga ada posisi kosong di kantin.

b. Penyeleksian

Setelah salah satu lapak kosong, keseluruhan formulir dan proposal yang masuk tersebut kemudian diseleksi oleh para istri dosen Fisipol UGM yang tergabung dalam Dharma Wanita yakni komisi ekonomi. Selaku tim seleksi yang berwenang untu menguji kelayakan penjual dapat berjualan di kantin Fisipol ataupun tidak. Jumlah tempat kosong dan penjual yang mendaftar yang tidak banyak, biasanya Dharma Wanita tersebut memanggil para penjual tersebut untuk kemudian memberikan sample makanannya untuk di lakukan uji cita rasa. Proses penyeleksian uji cita rasa ini dapat berlangsung singkat ataupun lama, karena jika rasa yang diberikan oleh penjual tersebut tidak sesuai, atau di anggap masih kurang, penjual akan dituntut untuk mengubah cita rasa makanannya sampai makanan tersebut dianggap sudah pas dan sesuai

dengan standar. Namun bila hal tersebut gagal, maka pihak dari luar lah yang berkesempatan untuk berjualan disana.

c. Persetujuan

Sistem berjualan di kantin Fisipol UGM ini sifatnya tanpa pemungutan biaya, tanpa dikenakan sewa tempat, dan tidak dikenakan komisi lain-lain, seperti untuk listrik, air, dan lain-lain, para penjual tersebut sebelum akhirnya berjualan di kantin Fisipol UGM, harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

1. Penjual harus setuju untuk memberikan lima belas persen dari pendapatan kotor hariannya kepada pengelola kantin. Lima belas persen ini dapat diambil dari jumlah uang yang terkumpul di ibu kasir setiap harinya, jumlah tersebut kemudian akan dihitung bersama dengan para penjual yang bersangkutan pada saat kantin sudah tutup.

2. Penjual juga harus menyetujui perjanjian untuk tetap menjaga kualitas rasa dan kualitas makanan dari makanan yang akan di jual di kantin Fisipol UGM. Karena jika dikemudian hari terdapat perubahan dari kedua hal tersebut, penjual dapat saja sewaktu-waktu di paksa keluar dari kantin Fisipol UGM.

3. Penjual juga harus dapat terus meningkatkan kualitas mutu penjualan, sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang memuaskan setiap harinya. Jika pendapatan seorang penjual menurun, hal tersebut dapat juga berpengaruh terhadap pendapatan keseluruhan kantin tersebut, yang juga akan berdampak kepada pemaksimalisasian pengelolaan kantin (Haking; Nining; Aziz manager operasional dan penjual di Kantin FISIPOL

UGM 2010, wawancara, 20 Desember). Setelah penjual menyetujui persyaratan-persyaratan tersebut, dan juga makanan yang akan dijual telah disetujui oleh darmawanita, penjual tersebut dapat berjualan di kantin Fisipol UGM.

3. Aktor-Aktor Pembuat Keputusan

Selain para penjual, terdapat beberapa aktor penting lainnya yang berada di balik proses perekrutan penjual di kantin Fisipol UGM. Aktor-aktor tersebutlah yang membuat keputusan akhir mengenai siapa yang akan berjualan di kantin, dan aktor-aktor tersebut adalah:

a. Dharma Wanita

Dharma Wanita merupakan suatu perkumpulan istri-istri dosen yang bekerja di Fisipol UGM, Dharma Wanita ini diketuai langsung oleh istri Dekan. Ketua dari Dharma Wanita ini juga merangkap sebagai ketua pengelolaan kantin. Sedangkan dari pihak fakultas disini hanya bertugas untuk proses pengelolaan tempat dan menerima bagi hasil. Sehingga keseluruhan proses perekrutan penjual yang ingin berjualan di kantin Fisipol UGM diambil alih oleh darmawanita. Sehingga dapat dikatakan aktor utama yang berperan dalam proses penyeleksian penjual yang ingin masuk di Fisipol UGM adalah Dharma Wanita.

b. Pengelola Kantin

Pengelola dan penjaga kantin disini adalah ibu Nining. Ibu Nining biasa disebut dengan panggilan ibu kasir, karena pada kesehariannya ibu Nining bertugas untuk menjaga kasir kantin. Ibu Nining bekerja mengelola kantin bersama suaminya yakni Bapak Haking yang juga supir dekan Fisipol. Dalam proses penyeleksian,

> mereka bertugas untuk melihat makanan apa saja yang sudah tersedia di kantin, kualitas rasa, dan keinginan selera konsumen, hingga keluhan-keluhan yang ada di Kantin Fisipol (Nining, koordinator pengelola lapangan Kantin Fisipol UGM 2010, wawancara, 16 Desember).

Setelah penjual-penjual tersebut terpilih untuk pada akhirnya berjualan di kantin Fisipol UGM, akan dilakukan evaluasi kerja setiap enam bulan sekali. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas penjualan dan juga pendapatan, baik pendapatan individu penjual, dan juga pendapatan kantin secara keseluruhan. Terdapat beberapa hal yang dibahas dalam evaluasi kerja ini, yaitu:

1. Kualitas Makanan

Kualitas makanan disini adalah, apakah penjual tesebut tetap menjaga kualitas makanan, baik itu dari segi rasa dan juga kebersihan dan kesehatan makanan seperti pada awal masa penyeleksian. Hal ini bertujuan agar penjual dapat mempertahankan kualitas makanan.

2. Pendapatan

Walaupun tidak terdapat jumlah minimal pendapatan yang ditetapkan oleh pengelola kantin, namun para penjual harus mempunyai standar masing-masing mengenai jumlah minimal pendapatan perhari mereka. Hal ini bertujuan untuk tetap dapat memaksimalkan pelayanan di kantin, dan juga dapat memberikan keuntungan dalam proses pengelolaan dan penjualannya.

3. Pelayanan

Setiap penjual harus memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen. Segi pelayanan ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah konsumen yang mengeluhkan pelayanan seorang penjual kepada ibu kantin, hal ini beberapa kali terjadi, keluhan tersebut dapat datang dari segi pelayanan, maupun kualitas makanan yang di jual (Nining, koordinator pengelola lapangan Kantin Fisipol UGM 2010, wawancara, 16 Desember).

Walaupun terlihat sedikit rumit, proses rekruitmen yang dilakukan di kantin Fisipol UGM ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap para konsumennya, baik itu dosen, mahasiswa, dan juga konsumen lain yang datang untuk makan di kantin Fisipol UGM tersebut. sistem bagi hasil tersebut juga dilakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, karena hasilnya pun sebagian besar digunakan untuk pengelolaan kantin itu sendiri.

Mekanisme Keuangan

Pengelolaan Kantin yang bergerak pada jasa penyediaan makanan tentu termasuk dalam dunia bisnis. Manajemen keuangan juga dibutuhkan dalam hal ini termasuk Kantin FISIPOL UGM. Sejak berdiri di tahun 2006, Kantin ini sudah memiliki banyak kemajuan dan perkembangan termasuk pengelolaan keuangannya. Sejak empat tahun ini, kantin menggunakan pembayaran melalui kasir. Keuangan merupakan hal yang sangat sensitif dalam dunia bisnis, salah sedikit maka dapat fatal akibatnya. Mengelola kantin yang terdiri dari 10 lapak dan melayani ribuan mahasiswa tentu bukan merupakan hal yang mudah. Oleh sebab itu, pihak FISIPOL terutama dalam hal ini Dharma Wanita FISIPOL pun melakukan proses perekrutan pegawai hingga terpilihlah Ibu Nining selaku kasir.

Ibu Nining sebagai Kasir

Memilih variasi jajanan dari 10 lapak yang tersedia di kantin FISIPOL UGM, kemudian membayarnya di kasir. Kita akan menjumpai sosok ibu yang menawan dan selalu menebar senyum ramah kepada setiap orang yang menghampirinya. Beliaulah Ibu Nining sang Kasir. Latar belakang Ibu Nining dalam keuangannya pun juka cukup baik. Ibu Nining sebelumnya telah bekerja di Lembaga Bimbingan Belajar Primagama selama 13 tahun sebagai pegawai administrasi keuangan. Beliau harus berada dan duduk di kantin sebagai kasir sejak pukul 7 pagi tepat hingga pukul 16.30. Beliau lah orang kepercayaan dan perpanjangan tangan langsung dari Dharma Wanita yang setiap hari memantau dan mengetahui keadaan kantin terutama dalam hal keuangan. Setiap harinya

beliau hanya diberi kesempatan istirahat untuk menjalankan shalat dzuhur. Saat menjalankan shalat, posisi kasir akan digantikan sekejap oleh Mas Anton. Selain Mas Anton, ada juga Pak Slamet yang bertugas untuk mengambil piring dan gelas dari meja-meja pembeli. Ibu nining digaji dengan gaji tetap oleh pihak Dharma Wanita. Namun, beliau akan mendapat bonus sebesar Rp. 50.000 setiap kelipatan Rp. 6.000.000. Ketelitian, loyalitas, dan kejujuran merupakan prinsip utama yang beliau pegang hingga saat ini (Nining, koordinator pengelola lapangan Kantin Fisipol UGM 2010, wawancara, 16 Desember)..

Mekanisme Keuangan Kantin FISIPOL

1. Sumber Pendapatan Pengelola Kantin

Pada dasarnya, Kantin Fisipol tidak memberikan biaya sewa kepada setiap lapak yang berjualan di Kantin Fisipol melainkan berasal dari presentasi jumlah pendapatan kotor harian kantin sebesar 15%. Setiap harinya jumlah pendapatan kantin dari 10 lapaknya akan dikumulatifkan dan dipotong sebesar 15 % oleh pihak pengelola. Sehingga, 85% sisanya akan langsung dikembalikan kepada para penjual. Pada setiap akhir minggu, Ibu Nining selaku kasir akan menyerahkan pendapatan kantin sebesar 15% tersebut kepada Ibu Ida (Ketua Dharma Wanita FISIPOL UGM). Selain itu, setiap bulannya, Ibu Nining akan memberikan laporan tertulis mengenai pendapatan total kantin termasuk pendapatan masing-masing lapak kepada Ibu Ida sebagai bentuk pertanggungjawaban (Nining, koordinator pengelola lapangan Kantin Fisipol UGM 2010, wawancara, 16 Desember).

Setelah itu, Ibu Ida selaku Ketua Dharma Wanita akan mengelola pendapatan hasil pengelolaan kantins sebesar 15% tersebut untuk membayar gaji pegawai kantin (Ibu Ning, Pak Slamet, dan Bapak Pengambil Makanan), membayar retribusi sampah, serta membeli alat-alat kebersihan kantin. Setelah biaya-biaya tersebut dikeluarkan, pendapatan tersebut akan dibagi dua untuk Pihak Dekanat dan Pihak Dharma Wanita.

2. Mekanisme Pembayaran

Sistem pembayaran kantin menggunakan sistem satu pintu, artinya setiap pembayaran dilakukan pada satu tempat pembayaran khusus yaitu kasir. Inisiatif pembuatan nota rangkap pun juga dilakukan oleh Bu Nining. Saat dijumpai beberapa waktu lalu, Beliau memperagakan ketrampilannya saat "bermain" dengan mesin kasir. Nota rangkap yang diberikan oleh setiap orang kepadanya lalu dicatat ke mesin kasir yang dibedakan ke dalam 10 bagian (sesuai jumlah lapak). Lalu nota tersebut diserahkan satu kepada pembeli berikut struk pembayaran (yang kemudian diserahkan pembeli kepada masing-masing lapak sebagai bukti pembayaran untuk mengambil makanan). Sementara nota satunya disimpan oleh Bu Nining yang akan dihitung di setiap sore akhir untuk memperoleh pendapatan kumulatif per lapak. Setiap lapak pun setiap akhir sore menghampiri Bu Nining dengan membawa kumpulan nota penjualan yang diperolehnya untuk disesuaikan dengan jumlah nota dan penghitungan Kasir yang pada akhirnya mendapatkan jumlah pendapatannya setelah dipotong 15% (Nining, koordinator pengelola lapangan Kantin Fisipol UGM 2010, wawancara, 16 Desember).

3. Besaran Penghasilan Kantin

Menurut Bapak Haking pendapatan total kotor Kantin Fisipol UGM dapat mencapai Rp. 100.000.000.000,- setiap tahunnya (Haking, manajer operasional 2010, 19 Desember). Menurut beliau, pendapatan kantin setiap bulannya berkisar 100-125 juta rupiah. Mari Kita buat prakiraan dan gambaran kurang lebih seberapa besar pendapatan Kantin Fisipol setiap bulannya:

Tabel 6.1. Penghasilan Kantin Fisipol

Pendapatan	Keterangan	Pengeluaran	Pendapatan
A.Pendapatan Total Kotor Kantin	*100 %*		***Rp. 100.000.000,-***
B.Pendapatan Pengelola Kantin:			
Pendapatan kotor Pengelola Kantin	15 % dari pendapatan total kotor kantin		**Rp. 15.000.000,-**
Biaya Gaji Pegawai (3 karyawan)	Ibu Nining Mas Anton Pak Slamet	Rp. 1.650.000,- Rp. 1.000.000,- Rp 850.000,-	
Retribusi Sampah		Rp. 500.000,-	
Alat-alat kebersihan		Rp. 300.000,-	
Total Pengeluaran Pengelola Kantin		Rp. 4. 300.000,-	
Pendapatan bersih Pengelola Kantin			**Rp. 10.700.000,-**
Distribusi Keuntungan	Fakultas : Dharma Wanita = 50: 50		
Pendapatan Fakultas	Rp. 10.700.000 :2		**Rp. 5.350.000,-**
Pendapatan Dharma Wanita	Rp. 10.700.000 :2		**Rp. 5.350.000,-**
C. *Pendapatan Pedagang Kantin*			
Pendapatan Kotor Seluruh Pedagang Kantin	85 % dari pendapatan total kotor kantin		**Rp. 85.000.000,-**
Rata-rata Pendapatan Setiap Pedagang Kantin	Rp 85.000.000: 10 lapak		**Rp. 8.500.000/lapak**
Rata-rata keuntungan setiap lapak	**Keuntungan makanan biasanya 50% dari pendapatan: Rp.8.500.000 x 50 %**		**Rp. 4.250.000/ bulan**

Berdasarkan perkiraan tersebut, setiap bulan pihak Pengelola Kantin memperoleh keuntungan kurang lebih Rp. 10.000.000,- atau kurang lebih Rp. 5.000.000,- untuk masing-masing (Fakultas dan Dharma Wanita). Mengenai besar atau tidaknya jumlah tersebut tentu begitu relatif dan subjektif pada masing-masing orang memandangnya. Namun setidaknya, penghasilan yang diperoleh masing-masing lapak yang menginjak angka empat jutaan tersebut tentu mampu menghidupkan dan menyejahterakan karyawan dan atau keluarga besar kantin Fisipol UGM sesuai dengan misi dan tujuan awalnya.

Berikut diagram keuangan kantin Fisipol UGM:

Diagram 6.1. keuangan Kantin Fisipol UGM

Total Pendapatan Kantin

Pihak Pengelola (15%)

Pihak Penjual (85%)

Dikurangi pengeluaran gaji pegawai, sampah, dan alat/bahan kebersihan

Keuntungan Dekanat dan Dharma Wanita/ 50:50
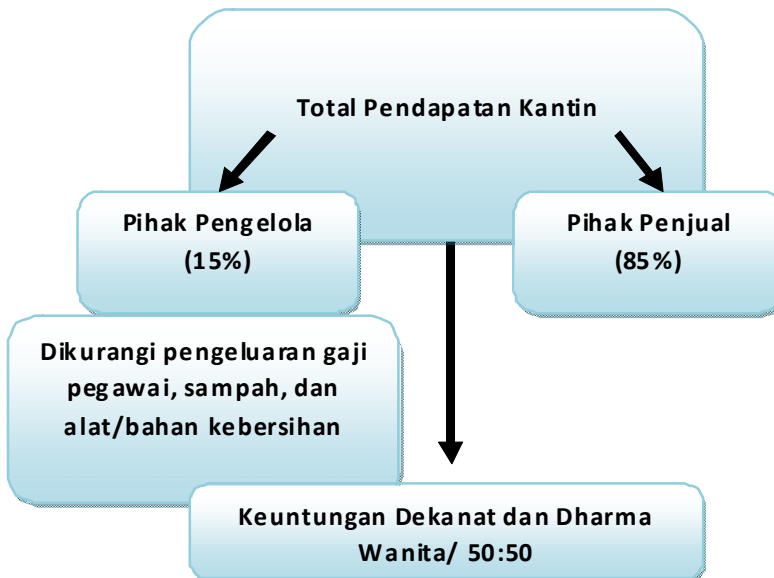
4. Hambatan dan Kesulitan

Dalam sektor keuangan Kantin FISIPOL UGM, meskipun loyalitas, ketelitian, dan kejujuran selalu berusaha diterapkan Ibu Nining dan Pak Haking sebagai manajer operasional. Namun, ketidak jujuran masih kerap kali dilakukan oleh para pedagang di kantin. Ketidak jujuran itu nampak dari sikap kecurangan para pedagang dengan menerima pembayaran secara langsung tanpa melalui pembayaran di kasir. Hal ini kerap dilakukan agar mereka tidak mendapat potongan sebesar 15% (Nining, koordinator pengelola lapangan Kantin Fisipol UGM 2010, wawancara, 16 Desember). Selain itu, ada juga masalah internal penjual yang melanda dan berakibat pada naik turunnya pendapatan Kantin. Misalnya seperti yang terjadi pada lapak Mat Geboy belakangan ini. Selama 10 hari, lapak Mat Geboy absen berjualan karena para pegawainya keluar dan menjadi pengungsi letusan Gunung Merapi. Meskipun ini masalah internal Mat Geboy, namun Pihak Pengelola Kantin mengingatkan dan menegur Mat Geboy agar segera berjualan. Hal ini diperlukan mengingatkan pendapatan kantin berkurang.

Pola Interaksi

Aktor-aktor yang terlibat dan peranannya dalam pengelolaan kantin Fisipol

Aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan kantin FISIPOL UGM diantaranya adalah Dharma Wanita Istri-istri dari dosen-dosen FISIPOL UGM yang merupakan organisasi yang dibentuk dan beranggotakan istri-istri dari dosen-dosen Fisipol UGM. Dharma wanita menjadi aktor utama dalam pengambil keputusan atas pengelolaan kantin Fisipol, mulai dari rekrutmen, tes kelayakan makanan dan pelayanan, serta perputaran lokasi lapak penjualan. Selain itu, Ibu Nining dan Bapak Haking selaku manajer operasional kantin Fisipol yang tugasnya meliputi pengaturan pemasukan kantin, pendistribusian pendapatan pedagang serta penyetoran kepada pihak Dharma Wanita. Aktor ketiga sekaligus pemilik sumberdaya kantin adalah pihak Fakultas ISIPOL yang penyedia tempat dan fasilitas serta

mendapat pemasukan dari retribusi kantin setelah dikurangi dana operasional dan gaji pengelola.

Serta para penjual di kantin FISIPOL sebagai *street level actor* yang berhadapan langsung dengan konsumen kantin di Fisipol UGM, mereka membayar retribusi sebesar 15% dari pendapatan per hari. Para penjual di kantin Fisipol harus melalui beberapa tahap seleksi sebelum dapat masuk dalam lingkup kampus Fisipol seperti yang telah dipaparkan di subbab sebelumnya.

Pola Relasi Vertikal dan Horisontal Antar Aktor

Kantin FISIPOL UGM sebagai salah satu kantin dengan pendapatan terbesar di kampus UGM yakni 100-125 juta setiap bulannya tentu mempunyai sistem manajemen dan pengelolaan yang cukup mumpuni. Tentunya sistem pengelolaan kantin tersebut melibatkan banyak aktor didalamnya yang mempunyai peran masing-masing untuk mendukung sistem pengelolaan kantin hingga dapat seperti sekarang ini. Mulai dari aktor *elite* hingga aktor *grassroot*-nya berkontribusi memajukan kantin FISIPOL UGM ini. Akan tetapi sejatinya aktor-aktor yang ada tadi, dalam menjalankan fungsinya masing-masing mempunyai keterkaitan dengan aktor-aktor lainnya, dalam artian terdapat pola relasi baik itu secara vertikal dari aktor yang berbeda kedudukannya maupun secara horisontal yakni relasi aktor yang mempunyai strata kedudukan yang sama.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa kantin FISIPOL UGM ini mempunyai beberapa aktor penting yang berperan vital dalam pengelolaan kantin FISIPOL ini. Beberapa pola relasi yang terjadi antar aktor ini selain dikarenakan oleh faktor strata sosial, faktor sejarah juga berandil besar dalam pola relasi yang terjadi. Misalnya saja ketika kita berbicara tentang aktor-aktor elite yang ada di kantin FISIPOL maka akan terdapat nama-nama seperti Ibu Pratikno yang sekarang ini menjabat sebagai ketua Dharma Wanita, dimana posisi sebagai ketua Dharma Wanita berarti posisi yang mengepalai segala urusan mengenai kantin FISIPOL ini, sehingga kalau digambarkan Ibu Pratikno seharusnya yang bertengger

di posisi paling atas dari struktur kekuasaan kanti FISIPOL. Namun karena faktor sejarah kantin yang cukup panjang sebelum mencapai kejayaan seperti sekarang ini, dimana dulunya dapat dikatakan kantin FISIPOL juga mengalami perjuangan panjang baik dalam berdirinya maupun pengelolaannya, dan posisi yang dicapai kantin saat ini tidak lepas dari peran Ibu Mohctar Mas'oed sebagai ketua Dharma Wanita sebelumnya, dimana beliau yang memperjuangkan dan berinisiastif untuk mengelola kantin dengan sistem pembayaran satu pintu, dan ternyata memang berhasil dan berlanjut hingga saat ini.

Secara struktural Ibu Mochtar Mas'oed sebenarnya sudah tidak punya andil dalam kantin FISIPOL ini karena sudah tidak menjabat dalam struktur organisasi Dharma Wanita, namun sekali lagi karena faktor sejarah yang mencatat betapa besarnya jasa yang telah diberikan oleh Ibu Mochtar sebagai pendiri Kantin, maka Ibu Pratikno memutuskan untuk mengggandeng Ibu Mochtar untuk tetap menangani kantin FISIPOL UGM ini bersama-sama. Sehingga posisi ketua Dharma Wanita secara informal menjadi ganda yakni Inu Pratikno dan Ibu Mochtar. Mungkin secara struktural memang hanya nama Ibu Pratikno yang tercantum, akan tetapi secara fungsional baik Ibu Pratikno dan Ibu Mochtar keduanya bersama-sama mengepalai segala urusan tentang kantin FISIPOL UGM ini. Hubungan untuk kedua aktor yakni antara Ibu Pratikno dan Ibu Mochtar adalah hubungan vertikal yang kini berubah menjadi hubungan horisontal.

Pola relasi secara vertikal terlihat ketika kita melihat hubungan kerja yang terjadi dari struktur Dharma Wanita kepada beberapa karyawan kantin FISIPOL UGM. Bisa kita ambil contoh karyawan kantin FISIPOL ini adalah Bapak Haking dan Istrinya yakni Ibu Nining. Bapak Haking dan Ibu Nining disini diberikan mandat sebagai pengelola kantin di lapangan, maksudnya segala sistem pengelolaan dan manajerial kantin, Bapak Haking bertugas untuk memonitor dan memberikan laporannya kepada struktur diatasnya yakni Dharma Wanita. Disini posisi Bapak Haking sebagai Manajer Operasional bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kantin FISIPOL terutama kepada seluruh penjual yang menjajakan dagangannya di lapak kantin FISIPOL. Beliau juga melakukan pengecekan

rutin terhadap segala sesuatunya di kantin, termasuk penjualnya atau apapun yang terjadi di kantin FISIPOL. Pengecekan terhadap penjual, dapat berupa pelayanan yang diberikan oleh penjual terhadap konsumen, atau keuntungan yang didapat perharinya oleh para penjual ataupun kualitas makanan yang dijajakan oleh para penjual. Segalanya itu dicatat oleh Bapak haking dan Ibu Nining kemudian dilaporkan setiap bulannnya kepada pihak Dharma Wanita yang biasanya langsung diwakili oleh Ibu Ida Pratikno.

Sedangkan istri dari Bapak Haking, yakni Ibu Nining diberikan mandat oleh pihak Dharma Wanita sebagai kasir dari kantin FISIPOL. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sistem pembayaran di kantin FISIPOL ini melalui jalur satu pintu yakni melalui Ibu Nining sebagai Kasir. Sebagai seorang kasir yang mengurusi segala transaksi pembayaran maka sudah sepentasnya jika Ibu Nining mengetahui segala perputaran uang yang terjadi di kantin FISIPOL UGM ini. Hampir sama seperti suaminya, Ibu Nining juga melakukan pencatatan perputaran uang tersebut lalu melapokannya setiap bulan kepada pihak Dharma Wanita. Pihak Dharma Wanita yang menerima laporan baik dari Bapak Haking maupun Ibu Nining akan melakukan tindakan apabila memang itu dirasakan perlu berdasarkan laporan yang diterimanya. Namun ketika kita membicarakan relasi antara Bapak Haking dengan Ibu Nining dengan para penjual di kantin FISIPOL, tidak terkesan pola relasi vertikal yang terjadi, malah sebaliknya. Hal itu dikarenakan baik Bapak Haking dan Ibu Ning memposisikan diri mereka sama dengan para penjual yang ada di kantin, dan ikut membaur sehingga tampak satu strata, meskipun jika dilihat dari mandat yang diberikan oleh pihak Dharma Wanita kepada mereka berdua, hubungan yang terjadi adalah hubungan vertikal antara mereka dengan penjual kantin.

Pola relasi horisontal terlihat antar sesama penjual yang menduduki lapak-lapak di kantin FISIPOL, dimana posisi dan kedudukan mereka semua sama yakni sebagai penjual di kantin FISIPOL. Namun dalam kantin FISIPOL memang terdapat penjual yang telah lama berjualan sejak kantin ini dibangun untuk pertama kalinya. Sehingga hal itu

menyebabkan pedagang itu lebih dihormati karena posisinya yang lebih senior. Akan tetapi keseniorannya tidak lantas memberikan kekuasaan yang lebih untuk dapat berkuasa atas kantin FISIPOL daripada pedagang lain yang lebih junior.

Menjalani profesi sebagai seorang pedagang sudah menjadi hal yang wajar jika mereka memasuki arena persaingan, akan tetapi persaingan yang dilakukan adalah persaingan yang sehat. Namun seringkali beberapa oknum memang melakukan sedikit kecurangan dalam menjajakan barang dagangan mereka. Hal itu juga yang terjadi di kantin FISIPOL, dimana hasil wawancara dengan salah seorang pedagang di kantin FISIPOL mengeluhkan bahwa ada oknum yang melakukan kecurangan. Seperti telah dijelaskan bahwa peraturan di kantin menyebutkan bahwa seluruh pedagang yang ada di kantin FISIPOL diharuskan menyajikan menu makanan yang berbeda satu dengan lainnya, akan tetapi ternyata terdapat pedagang yang menjual makanan yang sama dengan pedagang lain yang telah menjual makanan itu lebih dahulu. Hal tersebut disesalkan oleh salah satu pedagang yang kebetulan kami wawancarai. Kembali lagi ke hubungan antara pedagang dimana kejadian-kejadian seperti itulah yang seringkali menimbulkan hubungan yang kurang baik antar sesama pedagang yang berada di kantin FISIPOL (Penjual Bakso; Aziz 2010, wawancara, 16 Desember).

Berdasarkan uraian diatas dimana pada dasarnya basis dari penelitian ini menggunakan dua pendekatan teori yang berkaitan dengan persoalan relasi kuasa, yaitu Theory Mosca tentang teori Elit dan Migdal tentang teori *Local Big Men.* Dua teori inilah yang mengkerangkai dari awal tentang penelitian kantin ini agar bangunan penelitian yang dibangun tidak mengarah ke dalam logika berpikir ekonomi atau manajemen. Namun, demikian basis deskriptif penelitian seperti sistem manajemen kantin, omzet, relasi horizontal-vertikal, atau *cashflow of money* tetap dibutuhkan untuk memperkuat argumentasi bahwa dalam relasi kuasa pun juga diiringi oleh motif-motif yang berada di luar logika politik kekuasaan.

Berkaca dari hasil penelitian yang dilakukan dimana pola hubungan yang terjadi di kantin FISIPOL yang demikian maka dapat dilakukan analisis bahwa pola hubungan yang vertikal antara pihak Dharma Wanita dengan pengurus kantin FISIPOL merupakan hubungan yang top-down. Hubungan tersebut sekaligus membenarkan teori Mosca tentang struktur kelas dalam masyarakat dimana *kelas pertama* dalam kasus kantin FISIPOL ini diwakili oleh pihak Dharma Wanita sebagai pemegang kekuasaan dan pemberi mandat sedangkan *kelas kedua* direpresentasikan oleh pengurus kantin dimana mereka menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya yang notabene mengendalikan kekuasaan Selain itu Hubungan vertikal-horizontal ini yang menggambarkan betapa ada relasi kuasa kuat antar masing-masing aktor di dalamnya, yang pada gilirannya melahirkan kepentingan dari *hidden consensus* yang tercipta. Misalnya, antar aktor dharma wanita dengan pihak fakultas dalam menentukan siapa yang berhak terlebih dahulu dalam menempati lapak. Atas nama kekeluargaan dan kedekatan dengan orang dalam, maka seorang pedagang dapat lebih masuk terlebih dahulu untuk berjualan tanpa melalui *waiting list* yang ketat.

Selain itu, dari adanya *hidden consensus* inilah maka lahirlah *local big men* yang mendiskresi kebijakan di tingkat formal. Misalnya, kehadiran Ibu Nining sebagai Kasir yang memiliki kewenangan besar dalam mengelola sirkulasi keuangan tiap pekannya. Ibu Nining memiliki peranan besar di kantin tersebut dan hubungannya terhadap dharma wanita. Begitu kuatnya relasi kuasa yang dibangun antara pihak dharma wanita dengan pihak fakultas, maka inilah yang menyebabkan pengelolaan kantin berdasarkan prinsip *good cooperate goovernance* tak dijalankan. Misalnya, tentang transparansi keuangan, pergiliran kekuasaan, dan sebagainya.

Pola hubungan horisontal yang terjadi antar penjual di lapak-lapak kantin FISIPOL, menyingkap tabir harga yang menyelimuti kantin FISIPOL. Pada kenyataannya harga masing-masing komoditi di masing-masing lapak adalah salah satu kebebasan dari para pedagang dalam bemain harga. Artinya, siapa yang bisa memberikan harga terbaik berbanding

lurus dengan pelayanannya yang juga baik, maka akan banyak dilirik oleh pelanggan kantin. Namun, perbedaan harga tersebut tidak menentukan perbedaan penyisihan 15% keuntungan yang mesti disetorkan ke Pengelola Kantin setiap harinya. Meskipun, konsekuensi yang didapatkan adalah kemungkinan besar pelanggan akan beralih ke lapak lain yang lebih murah, perbedaan harga ini adalah *freedom of deciding* masing-masing lapak. Maka tidak ada sama sekali hubungan dengan pola relasi kuasa antar masing-masing aktor yang terlibat dalam pengelolaan kantin. Ini hanyalah urusan internal masing-masing lapak. Dengan analisis yang telah dilakukan maka terjawab sudah pertanyaan tentang bagaimana pola relasi kuasa yang terjadi di kantin FISIPOL bahwa terdapat relasi kuasa antar aktor untuk mengendalikan dan mengontrol pengelolaan kantin Fisipol.

Kesimpulan

Berdirinya kantin Fisipol UGM bukan hanya sekedar bertujuan untuk memperoleh tambahan pemasukan dari dompet mahasiswa dan konsumen lainnya, melainkan bagaimana fakultas dapat berupaya mensejahterakan karyawan dan keluarga besar Fisipol UGM. Meski demikian tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua pegawai memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses untuk berjualan di kantin Fisipol UGM. Adanya seleksi yang ketat mulai dari tes kelayakan makanan dan kelayakan pelayanan membuat persaingan untuk masuk ke dalam lingkup kanitn Fisipol kian ketat.

Persaingan terjadi bukan hanya dalam proses seleksi untuk menjadi penjual di kantin Fisipol, para penjual yang telah lolos seleksipun masih harus bersaing untuk menyajikan menu yang berbeda dari yang lainnya serta memberi pelayanan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pendapatan mereka dan tentu saja mempertahankan posisi mereka sebagai penjual di kantin FISIPOL. Konflik dan kecemburuan antar pedagang tidak dapat dihindari ketika ada pedagang yang menjual masakan yang sejenis dengan pedagang lainnya, namun semua persaingan tersebut dapat dikelola dengan cukup baik mengingat bahwa perkumpulan

pedagang dan pengelola kantin Fisipol memegang teguh azas kekeluargaan yang kuat.

Sistem pengelolaan kantin sendiri secara operasional diserahkan oleh Ibu Nining dan Bapak Haking selaku kasir dan manajer kantin Fisipol UGM, mulai dari proses rekruitmen hingga pengelolaan dan pembukuan keuangan. Meskipun demikian titik kekuasaan dan keputusan tertinggi tetap berada ditangan Dharma Wanita Fisipol UGM yang tiap enam 6 bulan sekali mengadakan pertemuan rutin dengan para pengelola dan penjual di kantin Fisipol untuk membahas berbagai macam hal terkait dengan pengelolaan kantin Fisipol. Di lain pihak, fakultas FISIPOL sendiri hanya berperan sebagai penyedia ruang dan sarana yaitu kantin FISIPOL untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya guna mensejahterakan penjual dan karyawan Fisipol UGM. Dengan mengambil retribusi 15% dari pendapatan penjualan kantin dan dikurangi biaya operasional serta bagian untuk Dharma Wanita, pihak fakultas sudah mendapat pemasukan yang cukup untuk menyediakan sarana dan fasilitas bagi penjual di kantin Fisipol UGM.

Sistem pengelolaan kantin yang cukup kompleks membuat pihak fakultas pada akhirnya menyerahkan pengelolaan kantin Fisipol kepada Dharma Wanita Fisipol UGM yang berikutnya menunjuk Ibu Nining dan Pak Haking sebagai manajer operasional Kantin FISIPOL. Sistem pengelolaan kantitn yang diserahkan kepada pihak kedua diluar pihak fakultas bisa dianalogikan layaknya Negara yang menyerahkan pengelolaan sumber daya negerinya kepada pihak swasta.

Oleh sebab itu, berdasarkan sejarah dan perkembangan, serta mekanisme pengelolaan Kantin Fisipol UGM yang telah kami teliti dapat Kami simpulkan bahwa Kantin Fisipol UGM tidak dikelola mutlak oleh fakultas melainkan dikelola oleh aktor-aktor tertentu berikut juga para pedagang Kantin Fisipol karena adanya hubungan dan kedekatan dengan aktor dalam. Hal tersebut dilakukan dan dibenarkan karena tujuan awal pendirian Kantin ini untuk menyejahterakan karyawan dan keluarga Fisipol berdasarkan azas kekeluargaan. Meskipun demikian, berbagai

sistem dan prosedur yang cukup panjang dan rumit tetap dilakukan guna menjamin kualitas Kantin Fisipol agar semakin baik dari masa ke masa.

Tabel 6.2. Interview Guide

Aktor	Pertanyaan
Elite Kampus 1. Ibu Nining 2. Bapak Haking **3.** Pak Suharyanto	1. Apa tujuan didirikannya kantin Fisipol ? 2. Siapa saja yang berhak berjualan di kantin Fisipol ? 3. Siapa saja yang memiliki peran penting dalam pengelolan kantin Fisipol? 4. Bagaimana sistem bagi hasil antara lapak penjual dan pengurus kantin? 5. Apakah ada evaluasi bersama antara pengelola kntin dengan setiap lapak? 6. Apakah ada sistem punishment yang diberikan kepada penjual setiap lapak jika tidak tertib? 7. Bagaimana hubungan antara para pengelola kantin dengan para pedagang di Kantin Fisipol UGM ini?
Para Pedagang Lapak	1. Sejak kapan berjualan di Kantin? 2. Bagaimana proses bisa berjualan di Kantin? 3. Pola persaingan antar pedagang bagaimana?

Referensi

Dewi, Erni Sisca 2006, *Metode penelitian*, diakses 9 Januari, 2011, <http://www.damandiri.or.id/file/ernisiscadewiipbab4.pdf>

Eko, Sutoro 2003, *Transisi demokrasi di Indonesia: Runtuhnya rezim Orde Baru,* APMD Press, Yogyakarta.

Salim, Agus 2006, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta.

Scribd 2010, *Elit Dan Sirkulasi Elit; Perbandingan Indonesia dan Venezuela* , diakses 18 Desember, <http://www.scribd.com/doc/22992480/Elit-Dan-Sirkulasi-Elit-Studi-perbandingan-politik>

Scribd 2011, *Penelitian studi kasus dan teori grounded*, diakses 09 Januari <http://www.scribd.com/doc/24668989/Penelitian-Strudi-Kasus-Dan-Teori-Grounded>

Varma, S.P 1982, *Teori politik modern*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wahono, Didik 2005, *Metode penelitian*, diakses 9 Januari, 2011, <http://www.damandiri.or.id/file/didikwahonounairbab4.pdf>

Yin, Robert K. 2006, *Studi kasus desain dan metode*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wawancara:

Wawancara dengan Ibu Aziz, pemilik Warung Nasi Rames, 16 Desember 2010

Wawancara dengan Bakso Dharma Wanita, 16 Desember 2010

Wawancara dengan Ibu Nining, koordinator pengelola lapangan Katin FISIPOL UGM, 16 Desember 2010

Wawancara dengan Bapak Haking, manajer operasional Kantin FISIPOL UGM, 20 Desember 2010

Wawancara dengan Bapak Suharyanto, pihak FISIPOL UGM, 20 Desember 2010

7

Fenomena Penggunaan *BlackBerry* di Kalangan Mahasiswa Fisipol UGM

Belgys Noor Amelia, Dwi Prayogi P. N., Malikuruba, M. Fahmi
Suaidatus Sinni Hanna, Wahib Ainurofiq, Wasis jati Purwani

Pendahuluan: Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi dibidang telekomunikasi begitu pesat. Jika dulu alat telekomunikasi hanya bersifat tradisional dan membutuhkan waktu yang lama (kentongan, surat, telegram) untuk dapat berkomunikasi dengan komunikan, kini beralih menjadi lebih modern, lebih canggih dan lebih cepat. Kemajuan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat ini salah satunya disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap arus informasi dan komunikasi, sehingga tak bisa dielakkan lagi masyarakat membutuhkan media atau alat untuk berkomunikasi. Seiring dengan berkembangnya teknologi tersebut, munculah inovasi-inovasi baru yang memfasilitasi kemudahan dalam berkomunikasi.

Handphone merupakan salah satu dari teknologi komunikasi yang membantu manusia untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi secara cepat. Semua kalangan baik tua maupun muda, kaya ataupun miskin bisa menikmati manfaat dari alat komunikasi tersebut. Bahkan, *handphone* yang awalnya merupakan kebutuhan sekunder telah berubah menjadi kebutuhan primer. Ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi dan informasi bagi masyarakat. Melihat fenomena tersebut, perusahaan-perusahaan telekomunikasi kemudian memanfaatkan peluang dan berlomba-lomba untuk menciptakan alat komunikasi yang lebih canggih dan memiliki kelebihan-kelebihan yang berbeda dengan alat komunikasi lain. Mereka berusaha menciptakan *smartphone* yang mengerti seluruh kebutuhan-kebutuhan konsumen. Dalam hal ini, *BlackBerry* menjadi terobosan baru dari perusahaan telekomunikasi sebagai *icon* dari *smartphone* tersebut.

BlackBerry merupakan salah satu *smartphone* yang dewasa ini mulai mencuat di kalangan masyarakat. Fitur-fitur yang menarik disertai dengan kemudahan untuk mengakses informasi secara cepat, serta fasilitas-fasilitas tertentu yang hanya dimiliki oleh *handphone* ini menyebabkan masyarakat mulai tertarik untuk menggunakannya. Namun demikian, dewasa ini mulai muncul fenomena-fenomena unik yang disebabkan oleh *BlackBerry* tersebut. Inovasi yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi ini kemudian memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi masyarakat, terutama dikalangan mahasiswa. *BlackBerry* kini menjadi suatu mode tersendiri, bahkan muncul anggapan bahwa tanpa *BlackBerry* maka mereka tidak bisa dikatakan sebagai "anak gaul". *BlackBerry* kemudian mengalami transformasi fungsi menjadi suatu *token of the membership*.

Penggunaan *BlackBerry* yang semakin berkembang di kalangan mahasiswa turut menimbulkan berbagai macam perubahan sikap dan perilaku. Muncul fenomena-fenomena buruk dikalangan mahasiswa seperti berkurangnya konsentrasi belajar mahasiswa, berkurangnya konsentrasi dalam berkendara, dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena mereka disibukkan dengan "mainan" baru mereka. Terlihat pula

banyak teman-teman mahasiswa yang kini kurang berkonsentrasi pada saat mengikuti perkuliahan. Jika diteruskan hal ini akan berdampak buruk bagi mahasiswa itu sendiri. Hal inilah yang menyebabkan kami memilih tema "Fenomena Penggunaan *BlackBerry* di Kalangan Mahasiswa". Apalagi, fenomena tersebut semakin hari kian marak di berbagai kalangan mahasiswa.

Penelitian kami ini ingin melihat bagaimana *BlackBerry* mempengaruhi gaya hidup mahasiswa. Mahasiswa yang kami teliti disini adalah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada. Penelitian akan difokuskan pada cara-cara yang dilakukan oleh *BlackBerry* terkait dengan pencitraan yang dilakukannya sehingga bisa menarik perhatian para mahasiswa untuk menggunakannya. Selain itu kami berusaha mengidentifikasi berbagai karakteristik mahasiswa yang menggunakan *BlackBerry*, melihat penggunaan *BlackBerry* ini mulai menimbulkan fenomena-fenomena buruk yang melanda mahasiswa.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka rumusan permasalahan kami adalah: *"Bagaimana BlackBerry dapat mempengaruhi gaya hidup mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada?"*

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif. Ini ditujukan agar kita bisa lebih memahami jenis-jenis serta penggunaan dari metode kualitatif. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasikan citra diri *BlackBerry* di kalangan mahasiswa, sehingga menyebabkan banyak dari mereka memilih menggunakan *BlackBerry* daripada *handphone* jenis lain. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan gambaran secara umum mengenai penggunaan *BlackBerry* secara berlebihan yangmana mempunyai dampak yang tidak baik bagi kehidupan masyarakat, khususnya mahasiswa.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasikan pengguna *BlackBerry* di kalangan mahasiswa. Sehingga diharapkan bisa memberikan penjelasan mengenai sikap mereka dalam menanggapi fenomena dari penggunaan *BlackBerry*. Kami juga berharap kepada mahasiswa agar kemudian tidak menyalahgunakan perkembangan tekhnologi yang ada, sehingga kita bisa memperoleh manfaat yang maksimal dari perkembangan tekhnologi tersebut dengan menerima resiko seminimal mungkin.

Kerangka Konseptual

Fenomena penggunaan *BlackBerry* yang marak terjadi dewasa ini mengundang kami untuk melihat bagaimana pencitraan yang dilakukan *BlackBerry* hingga dapat mempengaruhi gaya hidup masyarakat, khususnya mahasiswa. Melihat fenomena tersebut kami berusaha memandangnya melalui teori postmodernisme. Fenomena postmodernisme adalah salah satu fenomena mutakhir dalam kehidupan manusia kontemporer. Teori ini dikenalkan pertama kali oleh Jean Francois Lyotard (1984) dalam filsafat. Ide dari teori postmodern ini hakikatnya menolak ide otonomi aesthetik dari modernis. Postmodernisme ini menolak hierarkhi, kontinuitas, dan juga perkembangan yang dihasilkan oleh modernisme. Lyotard mengatakan bahwa postmodernisme ini berupaya untuk mempersentasikan sesuatu yang tidak dipersentasikan oleh modernisme. Ihab Hasan dan Jean Baudillard pun menganggap postmodernisme sebagai fenomena kritis atas modernitas.

Postmodernisme merupakan keseluruhan usaha yang bermaksud merevisi kembali paradigma modern. Salah satu karakter dasar dari posmodernisme ini adalah keberagaman atau pluralitas. Baudillard mengemukakan bahwa jika modernitas ditandai dengan eksplosi maka postmodernisme ditandai dengan implosi (ledakan kedalam) alias peleburan sebagai batas wilayah dan pembedaan antara budaya tinggi dan budaya rendah, penampilan dan kenyataan, dan segi sisi oposisi biner lainnya yang selama ini dipelihara terus oleh teori sosial maupun filsafat tradisional. Menurut Huston Smith, postmodernisme searah dengan

pluralisme kultural yang menerima adanya beragam pandangan tentang realitas (*world view*). Pola pikir modern menurut Smith tidak lain adalah sebuah epistemologi yang meniadakan unsur transendesi dalam prinsip-prinsipnya.

Postmodernisme ini hendak menggantikan uniformitas universal modernisme dengan pluralitas. Menurut keyakinan postmodernisme, tidak ada satu hal pun yang bersifat universal dan permanen. Namun dampak dari hal tersebut bisa menyebabkan hal lain. Meminjam istilah Jacques Lacan, kita menyebutnya dengan pluralitas yang berkarakter skizofrenia. Seseorang yang terkena sindrom ini tidak bisa lagi mengenal dirinya sebagai seorang individu yang komplit, tetapi lebih sebagai seseorang yang terpecah-pecah dalam berbagai cara. Karakter skizofrenia ini tampak dalam lingkup kebudayaan kapitalisme yang kian marak berkembang dewasa ini. Dimana kapitalisme tidak hanya mendorong untuk menghasilkan produksi sebanyak-banyaknya melainkan juga terus menerus mendorong masyarakat agar mengkonsumsi sesuatu jauh lebih banyak dan lebih besar daripada yang seharusnya. Masyarakat menjadi masyarakat konsumen yangmana tidak lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok pada umumnya, melainkan demi terpenuhinya gaya hidup.

Corak-corak konsumerisme ini bisa kita katakan berkarakter skizofrenik, sebab produk, gaya, dan citraan yang datang silih berganti dalam kehidupan masyarakat konsumeris ini hanya menciptakan”hutan rimba”, tanda-tanda yang silang-menyilang dan saling kontradiktif. Masyarakat telah mengalami pergeseran kepribadian dan kehilangan historiositas, menjadi masyarakat konsumen. Titik awal analisis postmodern atas alat konsumsi adalah dengan satu pemahaman bahwa masyarakat postmodern adalah sebuah masyarakat konsumen (Featherstone 1991). Akibatnya, secara bertingkat seseorang akan kehilangan individualitas kemandiriannya, konsep diri, dan juga jati dirinya. Sebab mereka secara tidak sadar hanya mengikuti budaya yang ada. Masyarakat hanya memenuhi peran yang dirancangkan untuk dan oleh masyarakat, sehingga individualitas masyarakat digantikan oleh

kumpulan citra diri yang hanya dipakai sementara dan kemudian dicampakkan. Dalam pandangan ini, individu mempunyai peran yang pasif dalam menentukan perilakunya. Individu bertindak karena ada kekuatan struktur sosial yang menekannya. Identitas diri muncul dari kelompok. Kenyataan tidak lebih dari sebuah konstruk sosial.

Kondisi ini semakin terlihat setelah berlangsungnya Perang Dunia II. Manusia tidak hanya dipandang sebagai konsumen, tetapi juga produsen. Industri periklanan dan *massmedia* telah menciptakan citra komersial yang mampu mengikis keragaman individualitas. Kepribadian seseorang telah berubah menjadi gaya hidup yang bisa diikuti banyak orang. Manusia tidak lagi dipandang melalui kepribadiannya, namun dipandang melalui kemampuannya mengikuti gaya hidup. Individu tidak lagi dapat menentukan kepribadiannya karena struktur sosial lebih berperan dalam hal ini. Gaya hidup yang sedang menjadi *trend* masyarakat secara otomatis akan menekan individu untuk mengikutinya. Hal ini kemudian menarik jika digunakan untuk melihat fenomena *BlackBerry* yang kini sedang naik daun dikalangan masyarakat, khususnya mahasiswa.

Seiring berkembangnya postmodernisme, muncul *new media* yang dapat dikatakan sebagai pendukung dari postmodernisme (Bimantara 2010). Dimana telah terjadi pergeseran atau perubahan media komunikasi yang digunakan oleh masyarakat. Masyarakat tidak lagi bergantung pada media cetak maupun televisi untuk mendapatkan informasi yang terjadwal setiap harinya, melainkan bisa melalui internet yang telah disediakan dalam aplikasi alat komunikasinya. Kini masyarakat dapat lebih aktif untuk turut serta dalam penyebaran informasi kapan saja dan dimana saja tanpa terbatas waktu, usia, ataupun latar belakang. Termasuk juga di dalamnya mahasiswa yang notabene sangat aktif dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosialnya, melalui facebook misalnya.

Perkembangan jaman yang semakin modern menjadi pendorong bagi media informasi dan komunikasi agar semakin berkembang. Disini *new media* merupakan wadah pertukaran informasi dan komunikasi baru

yang telah bertransformasi menjadi kebutuhan dan banyak digandrungi masyarakat. Contoh konkrit dari *new media* antara lain jejaring sosial, blog, ataupun website pribadi. Namun, disini *new media* lebih ditekankan pada media internet yang memiliki fungsi sebagai sirkulasi informasi dan komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, baik untuk keperluan privat ataupun keperluan publik.

Media yang berbasis internet ini secara tidak langsung menggeser keberadaan media informasi dan komunikasi yang banyak digunakan sebelumnya seperti; televisi, radio, dan surat kabar. Bentuknya yang lebih canggih dan dapat di – *update* kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja yang memiliki akses internet menjadikannya media yang lebih fleksibel. Oleh karena itu, *new media* sangat berperan dalam era postmodernisme. Dimana masyarakat dianggap sebagai konsumen, sehingga setiap individu dipengaruhi oleh individu lainnya melalui *new media.* Berdasar pengertian *new media,* dapat kita lihat bahwa *BlackBerry* merupakan salah satu alat yang memiliki fungsi untuk mengakses *new media.* Dimana di dalamnya terdapat aplikasi yang bisa menghubungkan komunikan dengan internet sehingga bisa mendapat dan memberikan informasi dengan cepat dan mudah.

Metode Penelitian

Untuk menganalisis permasalahan mengenai penggunaan *BlackBerry*, kami menggunakan metode penelitian fenomenologi. Metode penelitan fenomenologi ini dipilih sebagai cara untuk menganalisa fenomena penggunaan *BlackBerry* di kalangan mahasiswa, karena fenomena ini kebanyakan dialami oleh kelompok mahasiswa tertentu saja dalam hal ini mahasiswa yang menggunakan *BlackBerry*. Dan lagi, pencitraan yang dilakukan produsen *BlackBerry* akan lebih mudah dipahami ketika kita dapat menggambarkan pengalaman mahasiswa-mahasiswa yang menggunakan *handphone* merk ini. Pencitraan yang dilakukan oleh produsen *BlackBerry* hanya dapat kita ketahui ketika kita sudah dapat mendiskripsikan esensi dari penggunaan *BlackBerry* itu sendiri. Hal ini dapat kita ungkap ketika kita dapat memahami

pengalaman-pengalaman dari mahasiswa-mahasiswa yang menggunakan *BlackBerry*. Memahami suatu pengalaman lebih mudah menggunakan metode ini untuk dapat mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang kami ajukan. Oleh karena itulah metode fenomenologi ini dipilih.

Fenomenologi hakikatnya berasal dari bahasa Yunani, *phainomai,* yang berarti "menampak" dan *phainomenon* merujuk "pada yang menampak". Istilah fenomenologi ini diperkenalkan oleh Johann Heinrickh Lambert, namun yang memeloporinya adalah Edmund Husserl (Widyadana 2010). Metode ini berakar pada ilmu Filsafat yang lantas meluas ke berbagai ilmu lainnya seperti Sosiologi dan Psikologi. Metode fenomenologi menurut Polkinghorne,

> *"a phenomenological study describes the meaning of the lived experiences for several individuals about a concept or the phenomenon. Phenomenologist explores the structure of cosciousness in human experiences"* (Creswell 1998: 51-52).

*Hakikatnya, p*enelitian fenomenologi ini mencoba menjelaskan atau mengungkap suatu konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Fenomenologi dapat juga diartikan sebagai studi tentang pegetahuan yang timbul karena rasa kesadaran ingin mengetahui. Fenomenologi menganggap pengalaman aktual sebagai data tentang realitas yang dipelajari. Kata gejala *phenomenom* yang bentuk jamaknya adalah *phenomena* merupakan istilah fenomenologi yang dibentuk dan dapat diartikan sebagai suatu tampilan objek, kejadian, atau kondisi-kondisi menurut persepsi (Littlejohn, 2002, p.184, cited in Pawito 2007). Persepsi merupakan apa yang dilihat, didengar, diyakini, dipercayai, dirasakan, atau dengan kata lain semua pengalaman inderawi. Metode fenomenologi berfokus pada struktur dan esensi dari suatu pengalaman atau fenomena. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan pengalaman subyektif dari

responden. Fenomenologi mempelajari mengenai pengalaman sehari-hari secara langsung dari pelaku tanpa pretensi untuk melakukan evaluasi atau mengkritisi, sehingga seorang yang menggunakan metode fenomenologi ini akan menggambarkan esensi atau struktur dari pengalaman atau fenomena secara utuh apa adanya.

Sumber dan penggalian data dalam penelitian ini berasal dari *in-depth interview* atau wawancara mendalam dengan narasumber yang terkait. Wawancara mendalam (*in–depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Dalam hal ini narasumber yang dimaksud adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada yang menggunakan *BlackBerry*.

Selain itu juga dengan metode observasi. Bungin (2007: 115) mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok tidak terstruktur. Observasi partisipasi (*participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden. Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan *guide* observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek. Observasi kelompok adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus. Metode analisis yang digunakan adalah deskripsi pengalaman, dimana sumber data yang diperoleh dari interview dan juga observasi akan dianalisa secara lebih mendalam untuk mendapatkan pemaknaan atas apa yang terjadi.

Sistematika Bab

Penelitian ini dibagi menjadi empat subbab utama. *Subbab pertama* pendahuluan yang berisi rencana penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual serta metode penelitian. *Subbab kedua* berisi mengenai pencitraan yang dilakukan *BlackBerry* kepada konsumennya sehingga mereka lebih memilih *BlackBerry* sebagai alat komunikasi. Pada bab ini akan dijelaskan pula mengenai fitur-fitur yang dimiliki oleh *BlackBerry* yang notabene berbeda dengan fitur *handphone-handphone* lain. Hal ini perlu dilakukan agar kita bisa mengetahui usaha-usaha yang dilakukan *BlackBerry* sebagai produsen dalam menarik perhatian para konsumennya.

Pada *subbab ketiga* akan dipaparkan mengenai karakteristik pengguna *BlackBerry* dikalangan mahasiswa FISIPOL UGM. Ini penting dilakukan agar kita bisa mengetahui ciri-ciri dari aktor yang lebih memilih *BlackBerry* sebagai peranti komunikasinya. Karakteristik pengguna *BlackBerry* ini kami klasifikasikan menjadi dua, mahasiswa yang memandang *BlackBerry* hanya sebagai *gadget* pendukung dan memandang *BlackBerry* hanya sebagai *life style*. Pada *subbab empat,* kami berusaha memaparkan analisa hasil penelitian kami mengenai pengaruh *BlackBerry* terhadap gaya hidup mahasiswa. Pada bagian ini pula kami berusaha menjawab rumusan masalah yang kami rumuskan sebelumnya. Kemudian laporan penelitian ini kami akhiri pada *subbab kelima* yang merupakan bab penutup.

Pencitraan *Blackberry* Bagi Mahasiswa

Masyarakat Indonesia tergolong masyarakat yang mudah terpengaruh oleh *trend* yang sedang berkembang. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang seringkali berlomba-lomba untuk mengikuti *trend* baru yang ada. Setiap muncul fenomena baru masyarakat berbondong-bondong untuk turut mengikutinya agar tidak dibilang ketinggalan zaman. Sebagai contoh, penggunaan internet di

Indonesia pada tahun 2009 meningkat berkali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2000. Dimana terdapat 30,000,000 *user* per September 2009 dibandingkan tahun 2000 yang hanya kisaran 2 juta *user.* Hal ini sekaligus menempatkan Indonesia kedalam peringkat ke-5 negara paling banyak menggunakan internet tahun 2009 (Internet World Stats 2010).

Begitu pula yang terjadi dengan fenomena penggunaan *BlackBerry* sebagai alat komunikasi yang tergolong baru dan menjadikannya sebagai *trend* masa kini. Sebagaimana yang kita tahu *BlackBerry* atau yang sering disingkat BB merupakan *smartphone* yang paling marak digunakan di kalangan masyarakat Indonesia. Pada awalnya, kebanyakan pengguna *BlackBerry* dikhususkan bagi karyawan di sebuah perusahaan tertentu saja sehingga peranti ini identik dengan sebutan *corporate device*. Namun kini pengguna *BlackBerry* tersebar di semua segmen. Di Indonesia, *BlackBerry* bukan lagi diperuntukkan bagi kalangan korporat saja. Dewasa ini, hampir seluruh kalangan masyarakat juga turut menggunakan ponsel pintar tersebut, mulai dari kalangan pebisnis, mahasiswa, karyawan, bahkan hingga anak sekolah pun menggunakan *BlackBerry*.

Meningkatnya pertumbuhan penggunaan *BlackBerry* di Indonesia terus berlangsung secara signifikan. Beberapa sumber menyatakan bahwa peminat atau pengguna *BlackBerry* kian meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan penggunaan layanan *BlackBerry* di Indonesia sendiri saat ini, menurut Tifatul Sembiring yang merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) ada sekitar 750 ribu pengguna *BlackBerry* (DetikInet 2010). Jumlah ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan riset yang dilakukan oleh perusahaan pembuat *BlackBerry* di Kanada (RIM) pada tahun 2009, pada saat itu jumlah pengguna layanan *BlackBerry* hanya mencapai 300.000 lebih dari tiga operator yaitu Telkomsel, Indosat dan Excelcomindo Pratama (XL) (Bakery Magazine 2009). Tentu saja angka itu bukan jumlah yang sedikit. Bahkan

BlackBerry ini masuk kategori 10 besar ponsel terlaris di dunia (Handphone2000.com 2009).

BlackBerry sedikit banyak juga mempunyai peran dalam mengubah cara berkomunikasi dan mempermudah penggunanya dalam mengakses internet. Ini sebabnya *BlackBerry* menjadi salah satu wadah dari *new media*. Serta menjadikannya sebagai *smartphone* yang paling populer saat ini di berbagai kalangan, terutama mahasiswa. Sebab para mahasiswa yang notabene gemar *surfing* diinternet untuk *browsing* maupun membuka jejaring sosial semakin mengalami kemudahan. Terlebih ketika peranti ini semakin hari semakin memiliki bentuk yang *stylish*, warna yang keren serta dijejalkannya berbagai macam fungsi dan juga penambahan *software* aplikasi dari pihak ketiga, dalam artian provider-provider yang menyediakan layanan *BlackBerry*.

Hal tersebut di pacu dengan fitur-fitur *BlackBerry* yang lebih lengkap dari *smartphone* lainnya. *BlackBerry* tidak hanya digunakan untuk telepon dan pesan singkat seperti halnya telepon biasa. Salah satu fitur yang menjadi kelebihan *BlackBerry* dari *handphone-handphone* lainnya adalah penggunaan *BlackBerry Messanger* (BBM). ini merupakan salah satu fasilitas yang membuat *BlackBerry* memiliki daya tarik yang cukup tingggi. BBM ini merupakan fasilitas *chatting* atau fasilitas percakapan singkat yang disediakan *BlackBerry*. Dengan fasilitas BBM ini maka pengguna dapat mengirim pesan singkat, mengirim gambar atau data, melakukan percakapan secara berkelompok atau *conference*, mengirimkan pesan suara maupun mengirimkan lokasi dimana kita berada tanpa dipungut biaya tambahan, apabila yang bersangkutan sudah berlangganan *BlackBerry* di salah satu operator.

Tidak hanya itu, salah satu fitur yang menjadi andalan lainnya adalah *push e-mail* (mengirimkan pesan elektronik dengan jaringan internet). Produk ini mendapat sebutan *push e-mail* lantaran seluruh surat-e baru, daftar kontak, dan informasi jadwal (*calendar*) didorong masuk ke dalam *BlackBerry* secara otomatis. Selain itu, sistem operasi yang tersedia memungkinkan aktivasi nirkabel lengkap dan sinkronisasi dengan *e-mail*,

kalendar, daftar tugas, catatan dan buku telepon, serta tambahan dukungan bagi Novell GroupWise and Lotus Notes (Bakery Magazine 2009). Dengan *push e-mail* semua *e-mail* masuk dapat diteruskan langsung ke ponsel. *E-mail* yang masuk sudah mengalami proses kompresi dan scan di server *BlackBerry* sehingga aman dari virus. Lampiran file berupa dokumen Microsoft office dan PDF dapat dibuka dengan mudah. sebuah *e-mail* berukuran 1 MB, jika diterima melalui *push e-mail* dapat menjadi 10 kb dengan isi yang tetap. Fasilitas lain dari *BlackBerry*, misalnya; fasilitas *browsing* (penjelajahan dunia maya dengan jaringan internet), hiburan seperti pemutaran musik maupun video, kamera dan juga kemampuan penyimpanan data yang hampir mirip seperti yang terdapat pada komputer.

Penggunaan PIN (*Personal Identification Number*) dalam berjejaring yang hanya bisa digunakan antara sesama pengguna *BlackBerry* juga membuat banyak orang memilih untuk ikut menggunakan *BlackBerry* agar bisa berjejaring lebih mudah dengan komunitasnya yang sudah menggunakan *BlackBerry* di dunia maya. Hal tersebut memang terkesan ekslusif sehingga *Research In Motion* (RIM) memutuskan akan membuka *application programming interface* atau API untuk *BlackBerry Messenger* sehingga semua pengembang aplikasi dapat mengakses fitur interaktif tersebut. *Personal Identification Number* (PIN), kode yang selama ini hanya dipakai di *BlackBerry Messenger* (BBM) pun akan menjadi alat jejaring sosial yang lebih luas.

Merebaknya penggunaan perangkat *BlackBerry* kemudian menjadikannya tak lepas sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat. Kemunculan *BlackBerry* ini secara tidak sadar memicu timbulnya pergeseran paradigma berpikir bagi masyarakat di Indonesia dalam berkomunikasi. Fenomena tersebut tidak terkecuali pula bagi mahasiswa FISIPOL UGM. Hal ini terlihat dengan banyaknya masyarakat yang tidak lagi meminta nomor handphone, akan tetapi sudah mulai meminta PIN (*Personal Identification Number*) *BlackBerry*. Bahkan beberapa dari mereka tidak segan-segan untuk mempublikasikan PIN mereka lewat akun–akun jejaring sosial yang mereka miliki. Dalam konteks

mahasiswa sebagai basis penelitian dari tulisan ini, proses peralihan gaya hidup mereka itu sangat terlihat sekali. Meskipun fokus kajian kami tidak pada akibat atau efek dari penggunaan *BlackBerry*, namun secara tidak langsung kita bisa mengidentifikasikan pengaruh penggunaan *BlackBerry* tersebut bagi masyarakat khususnya bagi mahasiswa.

Dalam teori komunikasi yang sangat umum dijelaskan bahwa akan terjadi suatu proses internalisasi akan hal-hal yang dihadapkan secara terus-menerus kepada masyarakat. Hal tersebut bisa berupa nilai-nilai, faham, sampai pada proses pencitraan baik itu pencitraan orang yang biasa terjadi dalam proses kampanye politik maupun pencitraan produk produk melalui iklan. Dampaknya, masyarakat akan terpengaruh terhadap opini, pendapat, ajaran, ataupun tawaran yang dibentuk/dikonstruksikan oleh pihak yang melakukan internalisasi (Bakery Magazine 2009). Dari perspektif ini kita akan melihat bahwa *BlackBerry* dalam proses pencitraannya memiliki cara yang berbeda dengan iklan produk-produk lain. jika produk-produk lain mengiklankan produknya secara langsung, Pencitraan *BlackBerry* dilakukan melalui provider-provider yang bekerjasama dengannya maupun lewat kuis-kuis yang menjanjikan hadiah *BlackBerry*. Hal tersebut sangat marak diiklankan terutama lewat televisi. Tahun 2004 merupakan awal masuknya *BlackBerry* di Indonesia melalui Indosat dan perusahaan Starhub. Layanan yang disediakan Indosat adalah layanan *BlackBerry Internet Service* dan *BlackBerry Enterprise Server*. Dengan segmentasi personal dari masyarakat maupun korporasi. Baru kemudian perusahaan provider besar lainnya yaitu Excelkom dan Telkomsel ikut menawarkan layanan *BlackBerry*.

Distributor *BlackBerry* sendiri di Indonesia adalah PT Teletama Artha Mandiri (TAM). Hampir setiap bulan PT TAM ini meluncurkan *BlackBerry* dengan seri berbeda dengan fitur-fitur yang lebih menarik dan penambahan spesifikasi seperti kapasitas memori, resolusi kamera, dan lain sebagainya. Melalui proses pencitraan-pencitraan seperti ini tidak sedikit konsumen yang tidak mau ketinggalan teknologi. *BlackBerry* dengan seri yang sudah lama bisa jadi mereka ganti dengan seri terbaru

yang lebih menarik. Bahkan, fitur-fitur menariknya tidak jarang membuat orang menjadi sulit untuk memisahkan dirinya dengan *BlackBerry*.

Selain itu, harga paket berlangganan *BlackBerry* untuk individu atau yang disebut dengan BIS cukup terjangkau. Apalagi, perusahaan jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan *BlackBerry* kini semakin banyak sehingga harganya pun semakin murah. Bahkan provider-provider layanan *BlackBerry* inipun sampai mengategorikan paket-paket layanan *BlackBerry* beserta harganya. Operator yang awalnya terdaftar menyediakan layanan *BlackBerry* di Indonesia diantaranya adalah XL (Pascabayar), Indosat (Matrix, Mentari), dan Telkomsel (Halo, Simpati) (Handphone2000.com 2009). Namun kini Three dan Axis pun juga turut menyediakan layanan *BlackBerry*.

Selain menawarkan paket regular, provider-provider juga bersiasat menyediakan paket-paket khusus untuk segmen-segmen tertentu. Misalkan untuk kalangan mahasiswa ditawarkan paket layanan *BlackBerry* gaul. Xl menawarkan layanan ini dengan harga Rp 2.000/hari atau Rp 50.000/30hari. Sedangkan Indosat menawarkan Rp 2.000/hari sampai dengan Rp 45.000/30hari. Telkomsel dengan menggunakan sebutan lain yaitu *BlackBerry* Lifestyle menawarkan harga sebesar Rp 2000/hari, Rp 15.000/minggu, dan Rp 45.000/bulan petama serta Rp 60.000/bulan selanjutnya. Sama halnya dengan Telkomsel, Axis menggunakan nama BB Friends sebagai sebutannya untuk paket gaul. Sama halnya dengan tiga operator lainny untuk harga harian, Axis menawarkan harga Rp 2.000/hari. Sedangkan per-minggu dan per-bulan berturut-turut sebesar Rp 20.000 dan Rp 60.000. Three juga menawarkan paket tersebut, namun harganya relatif lebih murah yaitu berkisar Rp 1.800/hari, Rp 20.000/minggu, dan Rp 40.000/bulan. Berbeda dengan paket reguler, paket *BlackBerry* gaul hanya menyediakan fasilitas *Chatting* dan social *network* (facebook, twitter, dan jejaring social lainnya) (Nyambungterus.com 2008).

Sebagai gambaran untuk menikmati layanan *BlackBerry* dengan lebih lengkap, kami mengambil contoh operator XL dan Indosat. Selain Paket Gaul, XL juga menyediakan Paket Bizz dengan harga Rp 3.000/hari, Rp 20.000/minggu, dan Rp 50.000/bulan dengan akses terhadap fitur-fitur *chat* dan *e-mail*. Adapula Paket One yang merupakan paket terlengkap dengan jangkauan harga Rp 5.000/hari, Rp 39.000/minggu, dan Rp 99.000/ bulan (Nyambungterus.com, 2008). Sedangkan paket lain yang ada di Indosat diantaranya adalah paket BIS (*BlackBerry Internet Service*) yang menyediakan fitur-fitur *internet Browsing*, *push e-mail*, melihat *attachment, chatting, i-stock*, dan *BlackBerry*® Unite dengan harga Rp 6.600/hari, Rp 40.000/minggu, dan Rp 160.000/bulan. Paket termahal yaitu paket BES yang ditujukan untuk menjawab kebutuhan pelanggan korporasi dimulai dengan harga Rp 231.000/bulan. Lainnya ada paket irit dan paket *mail chatting* dengan harga paket termurah yaitu sebesar Rp 2.750/hari, Rp 16.500/minggu, dan Rp 55.000/bulan (Azin 2010).

Karakteristik Pengguna *Blackberry*

Subbab ini menjelaskan mengenai bagaimana karakteristik pengguna *BlackBerry* khususnya di kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UGM. Untuk memperoleh informasi berkaitan dengan karakteristik pengguna *BlackBerry* ini maka kelompok kami melakukan wawancara mendalam secara langsung kepada obyek yaitu mahasiswa pengguna *BlackBerry* di FISIPOL UGM. Wawancara ini kami lakukan terhadap 20 informan yang berasal dari enam jurusan yang ada di FISIPOL UGM. Sebanyak 7 responden berasal dari mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi, 4 berasal dari Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan, 2 dari Jurusan Sosiatri, dan 2 dari Jurusan Sosiologi. Sisanya berasal dari Jurusan Administrasi Negara sebanyak 2 mahasiswa dan 3 berasal dari Jurusan Hubungan Internasional.

Wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan yang telah kami buat yang kami lampirkan pada bagian akhir laporan penelitian ini. Akan tetapi, *interview guide* yang kami pakai tersebut tidak bersifat wajib. Dalam proses wawancara di lapangan pertanyaan yang kami ajukan kepada

informan tetap mengalami pengembangan, agar kami bisa mengeksplore lebih jauh mengenai temuan-temuan kami. Karakteristik mahasiswa pengguna *BlackBerry* tersebut dapat kita lihat dari jawaban para responden tentang penggunaan *BlackBerry* bagi diri mereka sendiri. Hasil wawancara ini akan sangat berguna untuk menganalisis bagaimana *BlackBerry* bisa mempengaruhi gaya hidup mahasiswa FISIPOL UGM.

BlackBerry merupakan sebuah *smartphone* dengan fitur-fitur yang menarik dan menyediakan akses-akses internet yang cepat. Kemunculan fenomena *BlackBerry* ini menjadi bukti bahwa manusia selalu ingin berkembang dan selalu ingin maju dengan tekhnologi yang ada (Herlinawati 2010). Hal ini menjadi perhatian dan perbincangan masyarakat yang luar biasa saat ini. Pandangan mengenai *BlackBerry* tentu saja berbeda bagi kalangan yang menggunakan *BlackBerry* dan bagi kalangan yang tidak menggunakan *BlackBerry*. Sebab kepentingan dari kedua kalangan ini berbeda. Namun dalam makalah ini kelompok kami lebih memfokuskan penelitian kepada kalangan mahasiswa pengguna *BlackBerry* agar kita bisa lebih fokus melihat bagaimana pencitraan *BlackBerry* bisa mempengaruhi gaya hidup mahasiswa, terutama mahasiswa FISIPOL UGM.

Dari wawancara serta observasi yang kami lakukan, kelompok kami melihat bahwa para pengguna *BlackBerry* di kalangan mahasiswa FISIPOL mempunyai ciri-ciri yang hampir sama. Pencitraan *BlackBerry* yang cenderung ditujukan kepada kalangan menengah keatas terbukti memang benar. Terlihat bahwa kebanyakan dari pengguna *BlackBerry* dikalangan FISIPOL UGM tergolong dalam kategori mahasiswa kelas menengah keatas. Hal ini bisa dilihat dari segi ekonomi, sosial, serta fasilitas-fasilitas yang mereka punya.

Dari segi ekonomi, para mahasiswa yang menjadi informan kami ini rata-rata memiliki uang saku lebih atau sama dengan Rp 1.500.000 perbulan. Jika dibandingkan dengan memakai *handphone* biasa, biaya yang dihabiskan untuk *BlackBerry* mereka pun tergolong lumayan tinggi yaitu sekitar Rp 150.000 sampai Rp 200.000 perbulan. Namun, mereka

menyebutkan bahwa biaya yang mereka habiskan untuk mengakses internet pun menjadi berkurang. Sebab, mereka lebih memilih menggunakan layanan *BlackBerry* untuk sekedar *browsing*, maupun mengakses situs jejaring sosial mereka. salah satu informan kami dari Jurusan Hubungan Internasional menyatakan;

> *"....uang saku saya lumayan siy, diatas Rp 1,5 juta lah....kalo buat BB sekitar 100 ribu sampai 200, tergantung mood siy. Kalo lagi mood BB-an ya bisa abis banyak tapi kalo ngga ya malah ga kepake..."* (Civitas Hubungan Internasional Fisipol 2010, wawancara, 3 Desember).

Dari segi sosial, rata-rata mahasiswa yang menggunakan *BlackBerry* bergaul dengan sesama pengguna *BlackBerry*. Obrolan mereka seringkali berkisar pada situs jejaring sosial yang mereka punya serta situs-situs maupun berita yang sedang nge-*trend* dibicarakan di dunia maya. Para mahasiswa ini juga mengaku lebih *update* mengenai isu-isu yang sedang marak dibicarakan, baik isu yang sedang terjadi dalam kancah nasional maupun kancah internasional. Hal ini membuktikan bahwa *BlackBerry* yang menyediakan layanan internet sebagai *newmedia* mampu melingkupi kebutuhan mahasiswa akan informasi dan komunikasi. Selain itu, mahasiswa pengguna *BlackBerry* ini cenderung asik bermain dengan BBM-nya ketika sedang berinteraksi dengan mahasiswa lain. Bahkan makan pun tangan mereka tidak terlepas dari *BlackBerry*-nya tersebut. Mereka cenderung melakukan kegiatan yang sedang mereka lakukan sembari mengutak-atik *BlackBerry* mereka. Hal ini terjadi pula ketika kami melakukan wawancara dengan sebagian besar informan-infrman kami.

Dari segi fasilitas yang dimiliki oleh para pengguna *BlackBerry* yang kami teliti, kebanyakan dari mereka mempunyai fasilitas-fasiltas pendukung kuliah yang cukup lengkap, seperti laptop, modem, dan juga alat transportasi. Sebagian besar informan kami memiliki fasilitas-fasilitas tersebut. Meskipun mereka sudah memiliki *BlackBerry* yang

dikatakan lebih cepat dalam mengakses internet, namun dalam wawancara kami kebanyakan dari mereka juga mempunyai modem. Mereka mengatakan bahwa modem ini mereka gunakan ketika berada di kos, sedangkan *BlackBerry* hanya digunakan untuk sekedar *chatting* melalui BBM. Selain itu, mereka lebih merasa nyaman ketika menggunakan layar monitor yang lebih besar ketika hendak *surfing* internet. Hal tersebut tidak hanya mengindikasikan bahwa mahasiswa pengguna *BlackBerry* ini merupakan mahasiswa yang berada di kelas menengah keatas, namun juga mengindikasikan adanya ketidak sinkronan jawaban yang dikemukakan oleh informan. Alasan pengguna *BlackBerry* yang mengatakan bahwa *BlackBerry* bisa menghemat biaya untuk mengakses internet daripada pergi kewarnet tidak sepenuhnya benar. Nyatanya mereka pun kebanyakan telah memiliki modem yang juga berfungsi untuk mengakses internet.

Terlepas dari hal tersebut, kami menemukan beberapa dampak positif dan negatif dari penggunaan perangkat *BlackBerry* ini. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh *BlackBerry* bagi mahasiswa antara lain; *pertama, BlackBerry* begitu mudah membuat pemiliknya merasa kecanduan, sebab *BlackBerry* bisa memicu kenaikan penggunaan internet secara signifikan. Hal itu kemudian bisa memicu seseorang untuk bersikap *apatis* terhadap lingkungan sekitarnya sebab pengguna *BlackBerry* ini sudah asik dengan dunianya sendiri. Akibatnya, hubungan sosial antara pengguna *BlackBerry* dengan orang didekatnya (nonBB) menjadi merenggang. Bahkan ada pula yang menyebutnya mengakibatkan munculnya sikap anti sosial.

Kedua, beberapa mahasiswa menyebutkan bahwa dengan layanan internet yang 24 jam, *BlackBerry* bisa bergetar dan berdering setiap saat. Hal ini kemudian mengganggu ketenangan tidur orang tersebut sebab mereka diributkan dengan "ulah" *BlackBerry* mereka. Bahkan ada juga yang menjadi insomnia karena terlalu asik memainkan *BlackBerry*-nya. *Ketiga,* mengurangi konsentrasi dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Karakternya yang mampu membuat pengguna melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan cenderung membuat seseorang kesulitan

menyerap informasi lantaran fokusnya teralihkan pada hal lain. Hal ini tentunya berbahaya bagi mahasiswa sebab konsentrasi mereka terhadap studinya menjadi berkurang sehingga bisa mengganggu pemahamannya terhadap materi perkuliahan.

Sedangkan dampak positif yang ditimbulkan dari pengunaan *BlackBerry* yakni, mempermudah mereka dalam mengakses internet. Mereka bisa mengakses internet kapanpun dan dimanapun. Dengan demikian mereka bisa lebih mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan ataupun mengakses isu-isu yang sedang marak diperbincangkan, sehingga mereka tidak ketinggalan informasi penting. Apalagi *newmedia* yang sering dianalogikan dengan internet semakin marak digunakan. Selain itu jika berkaitan dengan urusan akademis maupun bisnis mereka juga bisa lebih mudah mengirim dan menerima *e-mail*, sehingga jika ada tugas yang masuk bisa langsung di *share* kepada teman-teman mereka yang lain. Meskipun masih menjadi perdebatan dari segi ekonomi, sebagian informan mengaku lebih bisa menghemat uang saku sebab mereka tidak perlu ke-warnet untuk mengakses internet. Mereka hanya perlu berlangganan layanan *BlackBerry* dan bisa langsung mengakses internet sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan.

Mekanisme *Blackberry* Dalam Menarik Mahasiswa

Berdasarkan pengamatan dan juga wawancara yang telah kami lakukan, *BlackBerry* sedikit banyak memang telah mempengaruhi gaya hidup mahasiswa FISIPOL UGM. Hal ini bisa kita identifikasikan karena dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini dipengaruhi oleh fitur-fitur unggulan yang ditawarkan oleh *BlackBerry*, dimana fitur-fitur tersebut memiliki daya tarik tersendiri dikalangan masyarakat khususnya mahasiswa. Sebab fitur-fitur ataupun fasilitas yang ditawarkan oleh *BlackBerry* berbeda dengan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh perangkat lain. Fitur-fitur dalam *BlackBerry* ini berisi layanan yang memang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk melakukan berbagai aktifitas serta kepentingannya.

Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan sekitar masyarakat yang banyak menggunakan *smartphone* tersebut, sehingga menarik pihak-pihak lain untuk turut menggunakan *BlackBerry* sebagai alat komunikasi. Selain pertimbangan akses komunikasi yang lebih mudah atau akses informasi internet, gaya hidup merupakan pertimbangan utama mayoritas pengguna *BlackBerry* yang menjadi narasumber kami. Selain itu, banyak provider-provider yang berlomba-lomba dalam meningkatkan akses koneksi jaringannya sehingga bisa meningkatkan kualitas layanan pelanggan *BlackBerry*. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati akses layanan yang semakin cepat dan dapat diandalkan. Hal ini kemudian secara tidak langsung menambah daya tarik dari *BlackBerry* itu sendiri.

Melihat adanya perbedaan karakteristik dari tiap pengguna *BlackBerry* tersebut, oleh karenanya kami melakukan pengelompokan terhadap informan kami. Informan tersebut kami kelompokan menjadi dua, kelompok pertama dengan melihat mahasiswa yang menggunakan *BlackBerry* sebagai *gadget* pendukung dalam artian mereka menggunakan *BlackBerry* memang karena kebutuhan primer mereka, bukan merupakan kebutuhan sekunder yang dipaksakan berubah menjadi kebutuhan primer. Sebaliknya, kelompok kedua merupakan kelompok mahasiswa yang menggunakan *BlackBerry* hanya sebagai tuntutan *life style*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 20 mahasiswa pengguna *BlackBerry* di FISIPOL UGM, kami menyimpulkan bahwa alasan utama mahasiswa menggunakan *BlackBerry* bukan karena merupakan suatu kebutuhan yang penting melainkan hanya karena *fashion*. Para responden memang menyebutkan bahwa alasan mereka menggunakan *BlackBerry* karena mereka membutuhkannya. Kebutuhan untuk menggunakan internet dan mengakses informasi lebih cepat. Keunggulan fitur-fitur yang menarik dan memudahkan mereka dalam mengakses informasi inilah yang membuat sebagian besar mahasiswa memilih *BlackBerry* sebagai alat komunikasi mereka. Fitur-fitur tersebut seperti *BlackBerry Massenger*, *Blackberry Aplication World, Media Player, E-mail, YM* dan jejaring sosial lainnya (*facebook* dan *twitter*).

Akan tetapi setelah ditelusuri lebih dalam lagi, para responden secara tidak langsung menyebutkan alasan utama mereka memakai *BlackBerry* sebagai alat komunikasi mereka. Berdasarkan analisis kami, sesungguhnya alasan utama para mahasiswa memilih menggunakan *BlackBerry* adalah karena kemudahan penggunaan layanan *instant messaging* yang terintegrasi pada *handset BlackBerry* untuk keperluan komunikasi dengan teman-teman, pacar, dan keluarganya dengan biaya bulanan yang relative terjangkau. Meskipun memang tidak semua mahasiswa mempunyai alasan yang demikian halnya. Namun, kebanyakan dari mereka menggunakan *BlackBerry* yang dimilikinya hanya untuk mengakses Facebook dan Twitter. Padahal kegunaan dan fungsi dari *BlackBerry* itu sendiri jauh lebih luas daripada hanya untuk sekedar mengakses situs jejaring sosial tersebut.

Alasan lainnya kebanyakan karena mereka terpengaruh oleh lingkungan sosial mereka. Mereka mengakui bahwa mereka mengganti *handphone* lamanya dengan *BlackBerry* karena pengaruh teman-teman sepergaulan dan juga keluarga mereka yang menggunakan *BlackBerry*. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi yang mengatakan bahwa;

> *".......gue ganti BB ya karena temen-temen gua pada pake BB. Kalo temen-temen gue ga pake BB ngapain juga gue ganti HP. Ney ja gue disuruh temen-temen ganti BB makanya gue mau ga mau juga ikutan pake BB. Kalo kumpul ma temen-temen trus ga pake BB tu rasanya kayak ga gaul gitu lho....."* (Wina Dwi Septi, mahasiswa Jurusan Komunikasi Fisipol UGM 2010, wawancara6 Desember).

Informan lain mengatakan alasan mereka menggunakan *BlackBerry* karena pacar mereka juga memakai *BlackBerry*. Hal ini mereka tujukan agar komunikasi dengan pacar mereka berjalan lancar dan kelihatan kompak. Berikut garis besar dari ungkapan salah seorang mahasiswi Jurusan Politik dan Pemerintahan;

> *"......Pacar aku pake BB makanya aku juga ganti pake BB. Kalo pake BB kan bisa BBM-an jadinya bisa ngobrol sepuasnya meski ga ketemu. Lagian kan kelihatan lebih kompak…."*(Bertha Zahratunnisa, mahasiswa Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM 2010, wawancara, 3 Desember)

Namun demikian, ada juga mahasiswa yang menggunakan *BlackBerry* memang karena mereka membutuhkannya. Dengan *BlackBerry* mereka lebih mudah berkomunikasi dengan dosen ataupun teman sehingga bisa mempermudah dalam mengetahui maupun dalam mengerjakan penugasan kuliah. Selain itu, adapula mahasiswa yang membutuhkan *BlackBerry* demi kepentingan bisnis yang sedang mereka geluti. Dengan menggunakan *BlackBerry* maka mereka bisa lebih mudah berkomunikasi dengan konsumen mereka sehingga konsumen pun bisa dilayani dengan baik. Mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi pun mengatakan bahwa mereka menggunakan *BlackBerry* agar memudahkan mereka dalam mengakses informasi dan memberikan informasi diantara para anggotanya, baik anggota taktis maupun anggota strategis mereka. Dengan demikian bisa terjalin koordinasi yang baik diantara para anggotanya. Mahasiswa Jurusan Sosiologi FISIPOL UGM yang menggunakan *BlackBerry* demi kepentingan organisasinya mengatakan bahwa;

> *" .....dengan adanya Blackberry saya bisa lebih mudah menghubungi teman-teman lain jika ada keadaan yang mendesak. Selain itu, kalo ada tugas kuliah atau tugas organisasi saya jadi lebih cepat ngirim e-mail. Lebih cepet pake internet juga jadi saya lebih gampang update info..."* (Pristiqa, mahasiswa Jurusan Sosiologi Fisipol UGM 2010, wawancara, 5 Desember).

Dengan melihat hasil wawancara bisa di ketahui bahwa para pengguna *BlackBerry* yang berasal dari kelompok pertama yaitu yang memandang *BlackBerry* sebagai suatu *gadget* pendukung, menganggap

bahwa *BlackBerry* dengan fitur-fiturnya membantu mereka untuk melakukan kepentingan mereka. Fasilitas yang diberikan oleh *BlackBerry* memudahkan mereka untuk melakukan aktifitasnya sehingga mereka tidak perlu kerepotan mengakses internet ke warnet. Akan tetapi, mereka pun terkadang juga terjebak dengan dunia *BlackBerry* yang menyebabkan mereka menjadi asik dengan dunianya sendiri. Meskipun memang hal ini jarang terjadi, namun hal tersebut tidak bisa dipungkiri juga terjadi pada kelompok ini. Terkadang ketika saat kuliah mereka sering berkutat dengan *BlackBerry* mereka dari pada memperhatikan dosen. Hal inilah yang kemudian mengganggu daya konsentrasi mahasiswa.

Disisi lain mereka yang berada pada kelompok kedua yaitu yang memandang *BlackBerry* sebagai *life style*, secara tidak sadar mereka seperti membuat kelompok pertemanan sendiri. Mereka hanya bergaul dengan teman-teman mereka yang juga menggunakan *BlackBerry*. Lebih lanjut, *BlackBerry* ini mempunyai nilai tersendiri bagi penggunanya. Sebab, pastinya ada kebanggaan atau gengsi tersendiri yang dirasakan ketika sebuah telepon genggam bertekhnologi tinggi seperti *BlackBerry* berada di genggaman. Hal ini berdampak pada pola pertemanan mereka yang seolah-olah mengeksklusifkan kelompok mereka dari teman lain yang tidak menggunakan *BlackBerry*. Akibatnya, fenomena tersebut menyebabkan timbulnya sikap anti sosial dan juga diskriminasi sosial dari para pengguna *BlackBerry*. Mereka lebih asik berkutat dengan *BlackBerry* mereka daripada berinteraksi langsung dengan teman-teman lain disekitar mereka.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas kami menyimpulkan bahwa *BlackBerry* mempengaruhi gaya hidup mahasiswa baik secara langsung maupun tidak langsung. Berangkat dari teori postmodernisme, hal tersebut diatas dapat kita konklusikan bahwa dewasa ini masyarakat Indonesia dalam hal ini khususnya mahasiswa Fisipol UGM, secara tidak sadar telah kehilangan individualitas kemandiriannya, konsep diri ataupun jati dirinya. Para mahasiswa tersebut disibukkan dengan usaha pemenuhan gaya hidup yang secara tidak langsung memaksa seseorang untuk mengikutinya. Mereka kini hidup dengan berkiblat pada *trend* yang sedang berkembang hingga seringkali melupakan citra diri mereka sendiri. Intinya mode memegang peranan utama bagi kelangsungan hidup para mahasiswa Fisipol UGM.

Upaya mereka untuk memenuhi peran yang dirancangkan untuk dan oleh masyarakat, menyebabkan individualitas mereka digantikan oleh kumpulan citra diri yang hanya dipakai sementara dan kemudian dicampakkan. Terlihat dari banyaknya mahasiswa Fisipol yang menggunakan *BlackBerry* hanya karena alasan *fashion* bukan karena kebutuhan primer mereka. Penggunaan *BlackBerry* bukan hanya sebagai kebutuhan akan alat komunikasi, tetapi lebih kepada pemenuhan gaya hidup yang dewasa ini menggandrungi masyarakat Indonesia. Fitur canggih *BlackBerry* yang mampu memenuhi hasrat akan teknologi, terutama jejaring sosial, menjadikannya primadona dan *trend setter* teknologi komunikasi. Apalagi *newmedia* kini sedang marak dibicarakan sebagai media informasi dan komunikasi, sehingga semakin menarik minat mahasiswa untuk turut mengaksesnya.

BlackBerry tidak hanya merubah gaya hidup mahasiswa Fisipol UGM, tetapi juga struktur sosial dan kebiasaannya. Komunitas pengguna *BlackBerry* secara tidak langsung mengeksklusifkan diri melalui BBM yang notabene hanya dapat dimasuki oleh pengguna *BlackBerry*. Fitur-fitur yang terdapat di dalamnya tidak hanya menjadikan pengguna *BlackBerry* lebih eksklusif, tetapi juga menjadikan penggunanya berlaku

asik dengan dunianya sendiri. Perubahan perilaku ini turut mengganggu lingkungan sosial dan aktivitas lainnya, seperti perkuliahan. Bahkan kalangan mahasiswa merelakan sebagian uang jajannya untuk memenuhi kebutuhan *BlackBerry* yang tidak sedikit. Fenomena ini menunjukkan bahwa *BlackBerry* telah menjadi gaya hidup mahasiswa, khususnya mahasiswa Fisipol UGM. Penggunaan *BlackBerry* sudah menjadi kebutuhan hidup, bahkan melebihi pendidikan.

Bisa kita lihat pula disini bahwa semakin lama manusia makin dipandang sebagai konsumen. Industri periklanan dan *massmedia* menciptakan citra komersial yang mampu mengurangi keanekaragaman individualitas. Kepribadian menjadi gaya hidup. Manusia kini dinilai bukan dari kepribadiannya melainkan dengan melihat seberapa besar kemampuannya mencontoh gaya hidup. Apa yang kita pertimbangkan sebagai "pilihan kita sendiri" dalam berbagai macam hal kini berubah maknanya menjadi "pilihan kebanyakan orang". Namun sebenarnya pilihan-pilihan tersebut merupakan seperangkat kegemaran yang diperoleh dari kebudayaan yang cocok dengan tempat kita dan struktur ekonomi masyarakat kita. Perilaku seseorang kini banyak ditentukan oleh gaya hidup orang-orang lain yang ada di sekelilingnya, bukan oleh dirinya sendiri. Kepribadiannya hilang dan individualitasnya lenyap. Fenomena tersebutlah yang menimpa mahasiswa Fisipol UGM saat ini dalam konteks penggunaan *BlackBerry*.

Referensi

Afriani, Iyan 2009, *Metode penelitian kualitatif* ,diakses 11 November, 2010, <http://penalaran-unm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/116-metode-penelitian-kualitatif.html>

Azin 2010, *BIS on demand*, diakses 7 Januari, 2011, <http://bosspulsa.com/internet-blcakberry-indosat>

Bakery Magazine 2009, *Demam BlackBerry*, diakses 18 Desember, 2010, <http://www.bakeryindonesiamag.com/2009/11/07/demam-*BlackBerry*/>

Bimantara, Rudi Tresna 2010, *Theorizing new media (Digital theory)*, diakses 07 Januari, 2011,<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/09/digital-theory-theorizing-new-media/>

Bungin, Burhan 2007, *Penelitian kualitatif : Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu social,* Kencana Prenama Media Group, Jakarta.

Creswell , John W. 1998, *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five tradition,* Sage Publications, London.

DetikInet 2010, *Bantahan dari Menkominfo tentang penghentian layanan Blackberry di Indonesia*, diakses 28 Desember, 2010, <http://www.indobb.com/bantahan-dari-menkominfo-tentang-penghentian-layanan-*BlackBerry*-di-indonesia/>

Featherstone, Mike 1991, *Consumer culture and postmodernism*, Sage Publications, California.

Handphone2000.com 2009, *Apa yang membuat handphone Blackberry lebih unggul daripada handphone biasa?*, diakses 07 Januari, 2011 <http:/

/www.handphone2000.com/tips-a-trick/93-apa-yang-membuat-handphone-*BlackBerry*-lebih-unggul-daripada-handphone-biasa-.html>

____________________, *10 ponsel terlaris di dunia*, diakses 07 Januari 2011 <http://www.handphone2000.com/berita/273-nokia-ponsel-terlaris-di-dunia-.html>

Herlinawati, Ferry 2010, *Fenomena gaya hidup pengguna BlackBerry smartphone di kalangan mahasiswa Kota Bandung*, skripsi S.Kom, diakses 11 November, 2010, < http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-ferryherli-22548>

Internet World Stats 2010, *Internet usage in Asia: Internet users & population statistics for 35 countries and regions in Asia*, diakses 07 Januari, 2011, <http://www.internetworldstats.com/stats3.htm>

Kadir, Abdul, *Teori post modernisme*, diakses 19 November, 2010, <http://www.scribd.com/doc/ 27492923/5-teori-postmodernisme>

Lyotard, Jean Francois 1984, *The postmodern condition: A report on knowledge*, Vol. 10, University of Minnesota Press, Minneapolis.

Nyambungteru.com 2009, *Blackberry paket layanan*, diakses 07 Januari, 2011, < http://www.nyambungterus.com/paket-layanan/*BlackBerry*>

Pawito 2007, *Penelitian komunikasi kualitatif*, Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS), Yogyakarta, diakses 11 November, 2010, <http://books.google.com/books?id=UfM33NzcHJsC&pg=PA35&lpg=PA35&dq=Pawito,+penelitian+komunikasi+kualitatif,2007+Lembaga+Kajian+Islam+dan+Sosial+(LKIS):+Yogyakarta&source=bl&ots=_xKAbH71Gz&sig=uOdGMpgz3Jj9FqpFKfP7nchuyuA&hl=en&ei=s19lTdzHJoWnrAeG6PGIBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false>

Sugiharto, Bambang 1996, *Postmodernisme: Tantangan bagi filsafat*, Kanisius, Yogyakarta.

Widyadana 2010, *Fenomenologi: Metode penelitian kualitatif*, diakses 11 November, 2010, <http://id.shvoong.com/books/dictionary/1967914-fenomenologi-metode-penelitian-kualitatif/>

Wora, Emanuel 1996, *Perenialisme: Kritik atas modernisme dan postmodernisme*, Kanisius, Yogyakarta.

Wawancara

Wawancara dengan Bertha Zahratunnisa, mahasiswa Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, 3 Desember 2010

Wawancara dengan Pristiqa, mahasiswa Jurusan Sosiologi FISIPOL UGM, 5 Desember 2010

Wawancara dengan Wina Dwi Septi, mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM, 6 Desember 2010

Wawancara dengan civitas Jurusan Hubungan Internasional FISIPOL UGM, Desember 2010

Lampiran

- Garis besar *interview guide* atau daftar pertanyaan yang kami ajukan kepada seluruh informan yaitu mahasiswa Fisipol UGM, antara lain:

1. Darimanakah anda mengetahui *BlackBerry*?
2. Mengapa anda menggunakan *BlackBerry*?
3. Sebelum menggunakan BB apakah anda tahu mengenai fungsi BB?
4. Apakah *BlackBerry* penting bagi anda?

5. Fitur apa saja yang dimiliki *BlackBerry*?
6. Apakah anda sering menggunakan fitur-fitur tersebut?
7. Fitur apa yang sering anda gunakan?
8. Berapa lama anda menggunakan setiap fitur *BlackBerry*?
9. Apakah *BlackBerry* mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi anda?
10. Berapa biaya yang anda keluarkan untuk memenuhi kebutuhan *BlackBerry*?
11. Apakah anda selalu menggunakan paket *BlackBerry*?
12. Apakah semenjak menggunakan *BlackBerry* anda lebih asik berkutat dengan *BlackBerry* dibanding berinteraksi dengan lingkungan sekitar anda?
13. Apakah *BlackBerry* mempengaruhi perkuliahan anda?
14. Apakah *BlackBerry* menunjang perkuliahan anda? berikan contohnya!
15. Apakah dampak positif dan negative setelah anda menggunakan BB?
16. Apa keunggulan BB daripada *handphone* lain?

8

Mengungkap Mekanisme Pengelolan Jaringan Kekerabatan Komunitas Warung Burjo Elina

Luthfi Hamzah Husin, Fajar Kurniawan, Miftah Dinianingrum, Dian Muflikah Mukhariroh, Idham Farsyah, Hendra Juansyah, Yakob Jati Yulianto

Pendahuluan: Latar Belakang

Warung burjo (warjo) menjadi salah satu tempat makan favorit bagi para mahasiswa. Selain harganya yang terjangkau, warjo memiliki menu yang cukup unik yakni bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau menjadi menu andalan dalam sebuah warjo, di samping menu-menu pendamping seperti Indomie telor (Intel), gorengan dan berbagai camilan. Warjo dapat kita temui di berbagai tempat di saentero Sleman. Semakin lama jumlah warjo di kabupaten Sleman semakin bertambah jumlahnya. Menjamurnya jumlah warjo menjadi sebuah fenomena menarik untuk di ungkap secara lebih mendalam.

Dorongan kelompok kami untuk memilik warung burjo sebagai objek penelitian kami adalah sebagai berikut: *Pertama*, dari segi historis, pada awalnya warung burjo menjadi solusi untuk mengatasi problema

kemiskinan di Desa Balong, Kecamatan Garawangi Utara Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Problema kemiskinan di Kabupaten Kuningan menjadi sebuah tantangan bagi masyarakat setempat, mengingat di wilayah tersebut memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya: lapangan pekerjaan cukup minin, sumber kehidupan yang terbatas, dan iklim bisnis yang tidak mendukung. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah pemikiran kreatif dan inovatif untuk dapat mendirikan usaha yang mampu menjadi pundi-pundi penghasilan. Sehingga, usaha warjo-lah yang di anggap mampu untuk menjawab permasalah tersebut.

Kedua, bangunan sistem jejaring warjo terbilang kuat dan terstruktur sehingga dapat tetap eksis walaupun berada di "daerah lain". Asumsi kami di awal, hal tersebut dikarenakan adanya sistem perekrutan karyawan warjo yang berbasiskan pada ikatan kekeluargaan. Sejauh pemantauan kami, sistem yang dibangun adalah sistem kolusi bisnis. Dalam konteks ini kolusi bisnis dapat dipahami sebagai bentuk perekrutan orang-orang terdekat yang masih memiliki ikatan kekerabatan untuk mengisi peluang lapangan pekerjaan. Dalam sebuah warjo ada pola unik yang terlihat, yakni seseorang yang ingin memiliki warjo, dia harus bekerja dulu sebagai karyawan warjo milik saudaranya. Setelah yang bersangkutan memiliki *skill* dan modal yang cukup, barulah dia dapat mendirikan warjo sendiri.

Ketiga, warjo identik dengan usaha masyarakat Kuningan yang dioperasikan di daerah luar daerah, salah satunya Kab. Sleman. Usaha tersebut dapat dibaca sebagai upaya mengambil alihan potensi ekonomi lokal di Kab. Sleman oleh masyarakat pendatang. Prospek bisnis tersebut di dukung oleh adanya anak-anak kos dan pendatang yang cenderung menggandrungi makanan murah meriah yang siap saji. Peluang ini yang kemudian dibaca oleh pengusaha warjo sebagai sebuah peluang bisnis yang menguntungkan. Hal ini menyebabkan jumlah warjo di Sleman semakin menjamur, bahkan berhasil mengalahkan eksistensi warung makan lokal, seperti angkringan dan warung gudeg.

Keempat, sebagian besar warjo buka 24 jam. Fakta inilah yang menjadi ciri khas warjo dibanding warung makan alternatif lain. Tentunya, sistem tersebut membawa sebuah konsekwensi bagi pengelolaan warjo. Selain mengelola makanan, mereka pun mengimbanginya dengan pengelolaan waktu dan SDM yang baik, sehingga dapat tetap dapat melayani pelanggan secara prima. Inilah yang menjadi tantangan sekaligus keunggulan dari sebuah warjo.

Untuk dapat menilik lebih mendalam terkait eksistensi warjo yang cukup menarik untuk di sorot lebih mendalam, kami mencoba mengambil studi kasus warjo Elina sebagai objek penelitian kami. Hal yang membuat kami tertarik untuk memilih Warjo Elina sebagai objek penelitian kami adalah sebagai berikut: 1) Pemilik warjo Elina adalah bekas karyawan warjo Kabita. Realitas ini sangat relevan dengan fakta yang menyebutkan bahwa jenjang karir seorang pemilik warjo akan selalu diawali dengan menjadi karyawan warjo dahulu. 2) Dari segi territorial, kami menemukan adanya kedekatan antar sesama komunitas warjo Elina di Pogung. Warjo Elina memposisikan tata lokasi bisnisnya dalam satu wilayah yang sama, 3) Pemilik dan karyawan warjo semuanya berasal dari Kab. Kuningan dan masih memiliki hubungan kekerabatan. Warjo Elina dapat di maknai sebagai warjo yang menerapkan kolusi bisnis dalam cara berjejaringnya. Berpijak dari beberapa relevansi tersebut, agaknya warjo Elina kami pandang representatif untuk membantu kami mengungkap fakta di balik pengelolaan warjo.

Rumusan Masalah Penelitian

Bagaimana Komunitas Pedagang Warjo Elina mengelola jaringan kekerabatannya?

Kerangka Konseptual

Teori Komunitas

Benedict Anderson (2001) dalam buku *Immagined Communities* menggambarkan definisi menarik tentang komunitas. Menurutnya komunitas dalam konteks kebangsaan adalah: "komunitas politis dan dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat teratas secara inheren sekaligus berkedaulatan." (Anderson 2001: .8) Dia membayangkan bahwa komunitas tersebut adalah ikatan antara manusia yang imajiner dan terbayang, akan tetapi memiliki legitimasi dan kekuatan yang mengikat anggotanya. Dengan demikian, apabila kita kerangkai teori komunitas menurut Anderson tersebut, Komunitas Warjo Elina memiliki relevansi yang signifikan. Warjo Elina adalah komunitas terbayang yang diimajinasikan oleh pendirinya di mana dari warungnya-lah mereka akan mengais rezeki di "negeri orang". Akan tetapi dalam waktu yang bersamaan, komunitas tersebut memiliki legitimasi dan kekuatan dalam mengikat pemilik dan karyawannya dalam memutar roda perekonomian bisnisnya.

Community atau komunitas dapat pula dimaknai sebagai pengelompokan manusia yang berkumpul atas dasar kesamaan ikatan yang bersifat emosional (*emotional attachment*). Pengelompokan manusia yang diikat oleh persamaan ikatan emosional ini, saling berinteraksi kemudian membentuk jejaring di antara mereka. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan: makin banyak jenis tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di internal mereka, maka makin banyak pula fungsi-fungsi baru yang harus dijalankannya, juga makin beraneka ragam pula struktur atau lembaga yang diciptakan untuk menangani fungsi-fungsi itu. Indikator yang menjadi tolok ukur sesuatu dapat dikatakan komunitas yaitu: adanya ruang hidup bersama, *social relationships* antara anggota-anggota suatu kelompok, dan *community sentiment* (kesadaran seseorang bahwa dia mempunyai peran dalam sebuah kelompok dan ada saling ketergantungan antar aktor dalam satu kelompok), dan adanya *collective goods* guna memenuhi kepentingan hidup bersama. Konsep *collectice*

goods dibedakan dengan *economic goods* (sumber daya ekonomi) atau *political goods* (sumber daya politik).

Dalam konteks warjo Elina, kerangka berpikir awal kami adalah memastikan bahwa warjo Elina dapat digolongkan sebagai sebuah komunitas. Hingga kini, Warjo Elina telah terbukti dapat bertahan dan melakukan ekspansi bisnisnya di daerah lain. Hal tersebut tentu telah membuktikan bahwa Warjo Elina telah berhasil dalam dunia bisnis makanan dengan mengandalkan modal komunitas sebagai mesin penggerak bisnisnya sekaligus mengelolanya. Komunitas Warjo Elina dapat dikatakan sebagai komunitas ketika dia memiliki mimpi yang dibangun oleh pemilik atau penggagas awalnya yang kemudian mengikat para anggotanya sehingga menimbulkan ruang hidup bersama, relasi sosial di antara mereka, termasuk membangun tujuan dan kemaslahatan bersama. Pemahaman komunitas tersebut dikonstruksi oleh penggagasnya secara imajiner yang kemudian membuahkan bentuk gerakan dan komitmen bahkan keyakinan akan adanya tujuan bersama.

Teori Jejaring Kekerabatan

Komunitas yang basisnya adalah sistem kekerabatan dan struktur sosial ini bisa dikatakan sangat penting dan sentralyang di dalamnya ada akumulasi pengaruh kerabat, pengetahuan, kekuasaan, relasi dan tradisi sehingga mampu membentuk struktur sosial tertentu (Claessen & Soekadijo 1974, p.65). Kekerabatan ini memiliki kedudukan yang paling sentral karena memiliki kemampuan untuk menentukan kelangsungan hidup individu atau komunitas. Selain itu kekerabatan juga mampu membentuk karakter kepribadian, perilaku sosial budaya, ekonomi dan politik. Dalam hal ini komunitas juga dilihat sebagai kesatuan hidup manusia yang menempati ruang nyata dan berinteraksi menurut sistem adat istiadat serta yang terikat dalam identitas sebagai *community*. Adalah menjadi kepastian, masing-masing komunitas akan berusaha mempertahankan eksistensinya bahkan melebarkan sayapnya guna terjadinya *sustainable* dalam jangka panjang. Dengan mengandalkan jejaring kekerabatan, maka komunitas tersebut dapat memiliki derajat

endurance yang menguatkan komunitasnya. Jejaring kekerabatan dapat digolongkan sebagai salah satu faktor determinan yang digunakan dalam menguatkan suatu komunitas.

Di sini, jaringan kekerabatan dalam komunitas mempunyai beberapa fungsi, seperti sebagai *self governing community*, pelayanan penyediaan lapangan pekerjaan bagi anggotanya, dan dukungan kepentingan anggotanya dalam mengakses sumberdaya ekonomi, sosial, dan politik. Teorisasi jaringan kekerabatan mendeskripsikan bahwa dalam sebuah komunitas tertentu masing-masing aktor di dalamnya mencoba untuk saling bahu membahu menolong aktor lain yang berada di lingkaran kelompoknya berdasarkan ikatannya. Bentuk bantuannya dapat berupa penyediaan lapangan pekerjaan maupun bantuan yang bersifat sosial. Basis yang menjadi fondasi pemberian bentuan tersebut adalah kedekatan emosial dalam bingkai kekeluargaan.

Dalam konteks jaringan kekerabatan Komunitas Warjo Elina, bisa dilihat dari bagaimana jaringan tersebut terbentuk. Jaringan tersebut nampaknya bisa terbentuk melalui proses interaksi yang berbasis pada ikatan territorial (Koentjaraningrat 1985). Ikatan sosial yang berbasis territorial ini direproduksi oleh anggota kelompok sehingga menjadi identitas kolektif yang terus dibawa ketika berinteraksi dengan kelompok sosial lainnya. Kecintaan terhadap kelompok territorial menjadi dasar munculnya primordialisme kewilayahan. Secara teoritis, komunitas yang berjejaring dari tingkat yang paling mikro sampai tingkat makro, cenderung akan bergerak dinamis dan berubah dari sisi komposisi penduduknya, identitas basis kekuatan sosial ekonomi juga struktur sosialnya. Jejaring kekerabatan pun dapat didasarkan pada ikatan kekeluargaan. Hal tersebut terlihat dari bagaimana pola pengelolaan bisnis yang biasa dikuasai oleh suatu oligarkhi keluarga tertentu seperti Bakrie Group, Keluarga Cendana, termasuk asumsi kami dalam Burjo Elina ini. Maka, kami akan melihat jejaring apakah yang terjadi dalam Komunitas Warjo Elina. Kemudian kami akan memotret dan menginterpretasikan seperti apakah pengelolaan jejaring tersebut sehingga hingga kini

Komunitas Burjo Elina masih tetap eksis dalam dunia bisnis makanan di Kab. Sleman.

Hipotesa

Penelitian ini berakar dari beberapa hipotesa, yakni:

Hipotesa mayor

Sebagai komunitas yang berbasiskan jejaring kekerabatan, Warjo Elina memiliki pengelolaan rapi dan tersrtuktur dalam usahanya.

Hipotesa minor:

- Komunitas warjo menggunakan kekerabatan yang berbasiskan ikatan kekeluargaan dan etnis kedaerahan dalam berjejaring.
- Merujuk dari semakin menjamurnya jumlah Warjo Elina di Pogung Kab. Sleman, kami mengasumsikan bahwa dalam pengelolaannya warjo tersebut memiliki sistem koordinasi dan komunikasi yang rapi dan terstruktur.

Metode Penelitian

Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang kami pilih adalah kualitatif. Metodologi ini dapat dipahami sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan & Taylor, 1975: 5). Dalam melihat sebuah realitas perlu di pandang secara holistik. Variabel dan kategori muncul dalam interaksi antara peneliti dengan informan (tidak ditentukan sebelumnya). Tujuannya, menguji sebuah teori untuk menguatkan, melemahkannya atau bahkan membangun teori baru untuk menjelaskan realita tertentu. Dalam kualitatif kadar keilmiahan sebuah karya dapat di lihat dari kadar subjektivitas peneliti dalam memaknai (membaca) realita

menurut teropong yang telah di tetapkan peneliti. Kondisi ini memaksa peneliti untuk dekat dengan informan. Kedekatan antara peneliti dan informan dapat dipahami sebagai upaya untuk mengungkap realita secara mendalam. Mengingat, poin penting dalam metodologi ini adalah kedalaman realita bukan sebaran realita.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang kami gunakan kali ini adalah studi kasus *comparative* (perbandingan). Menurut Bogdan dan Bikien (Scribd 1982) studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Studi kasus juga dapat di pahami sebagai sebuah strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan di selidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer di dalam konteks kehidupan nyata (Yin 2002: 1).

Sedangkan studi kasus perbandingan dapat di lakukan dengan membandingkan dua buah kasus. Dalam pelaksaannya, dapat di lakukan dengan dua hal, yakni mencari persamaan dalam sebuah perbedaan ataukah menemukan perbedaan dalam sebuah persamaan. Dalam kasus Warjo Elina kami hendak mencari perbedaan dari sebuah persamaan. Objek kami hanya satu yakni warjo Elina, tapi kami tergelitik untuk mencari perbedaan dalam pola pengelolaan warjo Elina.

Studi kasus menjadi metode penelitian yang diyakini dapat membantu kami untuk menjawab pertanyaan penelitian secara sempurna dan tepat. Alasannya, pertanyaan penelitian kami adalah *how*. Tipe petanyaan *how* membutuhkan sebuah pendalaman terhadap realita yang menjadi objek penelitian. Indikator dari kedalaman tersebut dapat di baca dari informasi yang detail dari objek penelitian, yang perlu di dukung oleh cerita utuh dari realita yang di dalami. Dalam konteks Warjo Elina perlu sebuah upaya untuk dapat mendapatkan informasi secara detail dan

mendalam sehingga asumsi dasar kami tentang pengelolaan Warjo Elina dapat terkuak. Hal itulah yang mendasari kami untuk memilih studi kasus sebagai strategi untuk mengungkap realitas di balik jejaring Warjo Elina.

Disisi yang lain, kami ingin melakukan pengamatan intesif terhadap suatu kasus, fenomena, atau entitas sosial untuk menguji kebenaran suatu teori atau hipotesis. Untuk dapat menggapai mimpi tersebut perlu sebuah ikhtiar yakni dengan membangun analisis mendalam mengenai kasus Warjo Elina sehingga harapannya kami dapat mempunyai fakta yang akan membantu untuk menguji sebuah teori, ketika teori yang ada tidak relevan dengan kasus yang diangkat, hal itu dapat membuka peluang untuk membangun teori baru.

Teknik Penghimpunan Data

Wawancara

Dalam penelitian ini, tipe wawancara yang akan di lakukan adalah *open-ended*, di mana peneliti dapat bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa di samping opini mereka mengenai peristiwa yang ada. Dalam proses pencarian data, tidak menutup kemungkinan peneliti bisa meminta responden untuk mengetengahkan pendapatnya sendiri terhadap peristiwa tertentu dan bisa menggunakan proposisi tersebut sebagai dasar penelitian selanjutnya.

Dalam hal ini, responden kunci yang akan kami wawancarai adalah pemilik dan karyawan Warjo Elina Pogung. Bentuk wawancaranya adalah wawancara yang terfokus, dimana responden di wawancarai dalam waktu yang pendek (Yin 2002: 109). Untuk memperoleh data yang valid dan mendalam, proses wawancara akan dilakukan secara rutin. Rutinitas wawancara yang kami lakukan di harapkan akan muncul rekomendasi orang lain yang potensial untuk di jadikan responden agar dapat menggali informasi secara lebih mendalam.

Dalam konteks Warjo Elina, jenis wawancara yang di gunakan adalah wawancara pembicaraan informal. Dalam pelaksaannya, wawancara ini di lakukan secara alamiah. Hubungan yang di bangun antara pewawancara dengan informan berada dalam situasi yang biasa dan wajar. Kondisi ini membuat informan tidak merasa sedang di wawancarai, sehingga informasi yang di dapat lebih valid sesuai dengan kondisi yang senyatanya. Strategi yang kami lakukan dalam wawancara adalah membangun kedekatan personal dengan informan. Kedekatan tersebut di bangun dengan menempatkan pewawancara sebagai pelanggan Warjo Elina dan mencoba mencari pengetahuan mengenai informan. Hal itu di pahami sebagai upaya untuk mendekatkan diri dengan informan.

Teknik wawancara yang kami lakukan adalah wawancara mengalir. Pada awalnya kami mencoba melakukan wawancara dengan pemilik Warjo Elina 1 (Yanto) dan 2 (Syafril) di daerah Pogung dengan menggunakan *interview guide* dasar. *Interview guide* tersebut di turunkan dari tiga alat bantu yang menjadi strategi untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian, yakni 1) relasi antar aktor (peran), tujuannya melihat struktur kuasa aktor dalam Warjo Elina, 2) kerjasama antar aktor, untuk mengetahui simbiosis mutualisme dalam lingkaran kekerabatan, dan 3) koordinasi dan komunikasi, untuk melihat bentuk koordinasi dan komunikasi yang di lakukan oleh Warjo Elina untuk menguatkan jaringan kekerabatannya.

Dari wawancara awal yang di lakukan berbasis *interview guide* tersebut, kami mendapatkan instrumen (variabel) baru yang dapat membantu kami untuk membedah kasus Warjo Elina. Instrumen yang di maksud adalah Burjo Elina 3 dan Elina 4. Dari hasil wawancara awal, kami mendapatkan informasi dari Warjo Elina Pogung (1 dan 2) bahwa di lokasi lain juga terdapat Elina 3 dan 4 yang notabene masih mempunyai hubungan kelurga dengan Elina pogung. Berakar dari hal tersebut, kami mencoba untuk menempatkan Warjo Elina 3 dan 4 sebagai instrumen tambahan untuk menguatkan data primer yang diharapkan dapat menjelaskan jejaring Warjo Elina.

Adanya instrumen tambahan tersebut, mendorong kami untuk melakukan wawancara kepada pemilik (pengelola) Warjo Elina 3 (Jl. A. M. Sangaji) dan Elina 4 (Cokrodiningratan). Wawancara tahap lanjut pun berhasil di lakukan dengan menggunakan *interview guide* yang sama, namun teknis di lapangan menuntut kami untuk berimprovisasi karena kami menempatkan *interview guide* hanya sebagai acuan untuk melakukan wawancara, namun dalam pelaksaannya kami berusaha untuk menyesuaikan pertanyaan dengan kondisi informan. Mengingat, dalam metodologi kualitatif informan harus di perlakukan secara berbeda, tidak dapat di samakan. Merujuk dari keyakinan tersebut, kami mencoba memberikan perlakuan yang berbeda kepada setiap informan yang kami temui.

Setelah, wawancara tahap lanjut usai dilakukan, kami segera mengidentifikasi data dan menginventarisasi data yang masih di perlukan untuk mendukung penelitian. Oleh karena itu, wawancara tahap akhir pun di lakukan untuk meyakinkan kembali bahwa data yang ada memang sudah valid dan mencari tambahan data yang di butuhkan. Jadi, secara umum ada tiga tahap wawancara yang di lakukan, yakni, wawancara tahap dasar, lanjut, dan akhir.

<u>Observasi Langsung</u>

Observasi di lakukan sebagai bukti pendukung dari data wawancara. Observasi di lakukan di Warjo Erlina 1-4. Bentuk observasi dilakukan secara informal. Observasi formal di lakukan dengan mengukur peristiwa tipe perilaku tertentu dalam periode tertentu. Dalam kasus Warjo Elina observasi in formal dilakukan dengan mengamati simbol-simbol yang ada di warjo tersebut, dan situasi warjo. Setelah itu, kami akan mencoba melakukan pemaknaan terhadap simbol dan situasi tersebut. Pemaknaan terhadap simbol tersebut di pahami sebagai upaya untuk mencari informasi tambahan terkait jejaring Warjo Elina. Hasil pemaknaan terhadap simbol itulah yang kemudian menjadi poin pertanyaan yang di klarifikasi dalam wawancara akhir.

Pencarian Data sekunder

Data sekunder di peroleh dari media internet dan pengetahuan penelitian hasil pembacaan literatur. Data sekunder ini yang membuka cakrawala awal mengenai jejaring Warjo Elina dan memutuskan teori yang akan kami uji dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, data sekunder tidak di tempatkan sebagai data pelengkap semata, namun kami mencoba menempatkan data sekunder sebagai informasi awal yang di jadikan basis pengetahuan awal peneliti terhadap objek penelitian.

Teknik Analisa Data

Analisa data menurut Patton (1980: 268) di pahami sebagai proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Poin penting dalam analisa data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorikan data. Pada tahap analisa data ini, kami melakukan sinkronisasi antara data dan hipotesa. Dalam proses ini, kami melakukan proses pemisahan antara data yang mendukung hipotesa dan data yang tidak mendukung hipotesa.

Dalam pelaksaannya, kami mencoba untuk mengumpulkan data-data hasil wawancara, kemudian mereviewnya dalam sebuah catatan singkat yang merupakan refleksi hasil wawancara. Kemudian kami mencoba untuk meingidentifikasi apakah data yang kami temukan dapat mendukung argumensi untuk mendukung jawaban dari pertanyaan penelitian atau tidak. Pada tahap itulah proses analisa data mulai di lakukan. Metode analisa data yang dilakukan adalah deskriptif analisis. Jadi, dalam tahap ini kami mencoba untuk mendekripsikan jejaring yang di bangun oleh Warjo Elina yang diikuti dengan refleksi atas paparan tersebut. Sedangkan, Teknik pengujian teori yang kami gunakan adalah *controlled comparison* (Melihat kesesuaian atau ketidaksesuaian antara kasus dengan teori yang diuji).

Komunitas Warjo Elina

Sebab dan kronologis lahirnya Komunitas Warjo Elina

Fakta awal penyebab muncul dan menjamurnya warjo di Kab.Sleman adalah faktor ekonomi. Keterbatasan lapangan pekerjaan di Kab. Kuningan telah memaksa warga untuk merantau dan membuka lapangan kerja alteratif guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dewasa ini, warjo telah menjadi solusi alternatif bagi terbukanya lapangan pekerjaan dan keluarnya warga dari jeratan kemiskinan di daerah asal mereka. Hasil wawancara kami dengan narasumber membuktikan jika satu warung bisa menghasilkan Rp 4 juta per bulan, jumlah total pendapatan 1.000 warung dalam setahun mencapai Rp 48 miliar. Jumlah ini hampir setara pendapatan asli Kabupaten Kuningan.

Dalam konteks Warjo Elina, pada awalnya komunitas tersebut diinisiasi oleh Ibu Een, seorang perantau dari Kab. Kuningan yang mencoba mengadu nasib di tanah orang untuk mendapatkan penghidupan. Di awal perantauannya Bu Een mencoba untuk mendermakan tenaga kepada pemilik warjo "Kabita" di Daerah Pogung Dalangan. Setelah selama 10 tahun, Ibu Een membantu usaha warung burjo saudara sepupunya sebagai karyawan, akhirnya pada Tahun 2003, Ibu Een memutuskan untuk membuka usaha warjo sendiri yang di beri nama "Elina". Nama "Elina" diambil dari nama anak pertamanya, yang harapannya anak ini adalah kunci yang akan membawa banyak rizki bagi kehidupan mereka.

Kian hari warjo Elina kian berkembang. Melihat perkembangan usaha yang semakin maju, Ibu Een berkeinginan untuk memperbesar usaha warjonya. Pada Tahun 2004, keinginan itu di wujudkan dengan membuka cabang Elina 2 yang letaknya tidak jauh dari warjo Elina yang pertama kali di rintisnya. Dalam pendirian cabang Elina 2, Ibu Een berkerja sama dengan kakaknya yakni Aa Safri. Bentuk kerjasamanya, Ibu Een memberikan modal kepada Aa Safri, kemudian dialah yang mengelola modal melalui warjo Elina 2.

Pada fase pendirian Elina 2 kami menemukan realitas menarik tentang adanya perjanjian antara pemilik warjo Elina 2 dengan pemilik tanah yang di sewanya. Perjanjian itu mengatur mengenai ketika pemilik tanah sedang menjajakan dagangannya berupa nasi kuncing, maka warjo Elina 2 tidak boleh menjual nasi telor. Warjo Elina 2 hanya boleh menjual nasi telor ketika pemilik tanah tidak sedang berjualan angkringan. Hal ini dikarenakan pemilik tanah membuka usaha angkringan yang menu andalannya adalah nasi kucing dan nasi teri. Perjanjian ini menjadi sebuah *strategi marketing* dari pemilik tanah agar pangsa pasarnya tidak berpaling ke warjo. Tindakan antisipatif yang di ambil pemilik tanah merupakan sebuah sikap untuk mengatasi kekhawatirannya terhadap hadirnya warjo yang berpotensi menjadi rival bisnisnya.

Kondisi ini menggambarkan strategi warjo Elina dalam memperoleh lokasi jualan menggunakan strategi membangun kedekatan dengan elit lokal. Kesediaan warjo Elina untuk mematuhi perjanjian dengan pemilik tanah dapat di baca sebagai upaya untuk membangun kepercayaan dengan elit lokal. Meskipun perjanjian itu cukup membatasi pengembangan usaha warjo, namun perjanjian tersebut sekaligus menjelaskan bahwa dalam proses inisiasi lokasi usaha, warjo Elina melakukan lobi-lobi kultural dengan penguasa lokal yang ada di sana. Hal itu menjadi salah satu langkah awal warjo Elina 2 untuk memperoleh legitimasi dari penguasa lokal, untuk mengambil potensi pasar di wilayah tersebut.

Tidak lama setelah berdirinya warjo Elina 2, Bu Rosyiah pemilik warjo “Sarirasa” meminta bantuan kepada Pak Arif (Suami Ibu Een) untuk meminjami spanduk Elina karena spanduk “Sarisara” sudah rusak . Permintaan itu pun dikabulkan oleh Pak Arif dan sekaligus menandai perubahan nama warjo Ibu Rosyiah yang awalnya bernama “Sarirasa” berubah menjadi warjo “Elina”. Perubahan nama tersebut tercium oleh pihak PIR (Pedagang Indomie Rebus) akibatnya, warjo milik Ibu Rosyiah pun segera didata dan diberi bantuan spanduk. Pasca-pendataan dan pemberian spanduk oleh PIR warjo itupun di beri label oleh PIR sebagai warjo Elina 3. Akibat pekerjaan dari PIR tersebut, kini warjo milik Ibu Rosyiah dikenal dengan warjo Elina 3.

Sedangkan lahirnya warjo Elina 4 justru jauh sebelum Elina itu ada. Pada awalnya, Pak Arif, pemilik Elina 4 mengawali karirnya dalam dunia bisnis warjo sebagai karyawan warjo "Sarirasa" milik Ibu Rosyiah pada tahun 1990-an. Setelah merasa cukup memiliki modal dan kemampuan, Pak Arif mencoba untuk memberanikan diri membuka usaha warjo sendiri. Di awal pendirian warjo, Pak Arif meminjam nama warjo ibu Rosyiah, yakni warjo "Sarirasa". Namun, semenjak Pak Arif menikah dengan Ibu Een (pemilik warjo Elina 1) dan mempunyai anak bernama Elina, Pak Arif mengubah nama warjonya dengan nama warjo Elina 4.

Dari uraian kronologis tersebut dapat di pahami bahwa embrio lahirnya warjo Elina dapat di kategorikan ke dalam dalam dua bentuk, yakni *by desain* dan *by accident*. By desain terlihat dari kesengajaan Ibu Een untuk mendirikan cabang warjo Elina 2, sekaligus untuk menguatkan basis pasarnya di kawasan pagung. Sedangkan untuk kasus Elina 4, juga masuk dalam klasifikasi *by desain*. Argumen itu berakar dari fakta pengubahan nama Sarirasa milik Pak Arif dengan nama Elina 4. Disisi yang lain, embrio lahirnya warjo Elina 3 dapat di kategorisasikan ke dalam bentuk *by accident* karena kelahirannnya berawal dari sebuah ketidaksengajaan

Basis kekerabatan komunitas Warjo Elina

Basis kekerabatan yang dimiliki oleh warung burjo Elina dapat diidentifikasi melalui kepemilikan dari masing-masing warung burjo yang ada. Hal sangat jelas terlihat dari keinginan Bu Een untuk mengajak saudaranya membuka usaha warung burjo Elina 2. Dengan demikian, selain mendapatkan tambahan pendapatan dari perkembangan usahanya tersebut, Bu Een juga bisa membantu kerabatnya untuk tidak menjadi pengangggguran. Realitas ini merupakan bentuk jejaring kerabatan yang di lakukan oleh komunitas warjo Elina. Tindakan yang di lakukan Ibu Een untuk membuka cabang Elina 2 merupakan salah satu upaya untuk menyediakan lapangan kerja baru bagi sepupunya, yakni Yanto yang kala itu masih menganggur.

Dalam hal pengelolaan, tidak semua warjo Elina mempunyai pegawai. Karena memang beberapa cabang warjo Elina pelanggannya masih sedikit sehingga dengan tenaga sendiri masih dapat terlayani. Seperti Elina 3, yang dimotori oleh Bu Rosyiah, Beliau mengelola warjonya hanya dengan putranya. Kemudian untuk Elina 4, Pak Arif merekrut adik kandungnya untuk membantu mengelola warung burjonya. Sebagaimana hasil wawancara kami dengan Pak Arid (pemilik Warjo Elina 4):

> *"Dari pada mengajak orang lain yang susah dipercaya, mending saya mengajak adik, sekaligus untuk mencari uang bersama-sama,"* katanya (Arif, pemilik Warjo Elina 4 2010, wawancara, 28 Desember)

Banyak pengalaman tidak mengenakkan ketika merekrut pegawai dari luar kerabat meskipun sesama orang Kuningan. Bu Een, pemilik Elina 1 sekaligus istri Pak Arif pernah memiliki karyawan yang merupakan tetangga dari Kuningan, namun selama menjadi karyawan terkadang ada hal-hal tidak baik yang dilakukan karyawan tersebut. Selain itu, jika memperkerjakan orang luar kerabat, mereka harus bertanggung jawab kepada keluarga. Merujuk dari realitas ini dapat di pahami bahwa adanya upaya dari warjo Elina untuk menguatkan eksistensinya dengan merekrut saudara sebagai karyawannya. Hal itu dapat menjadi sebuah strategi untuk menguatkan posisi Elina dalam bisnir warjo.

Logika yang di bangun cukup sederhana, ketika merekrut karyawan dari pihak luar akan menimbulkan resiko yang besar. Salah satunya terbuka kran bisnis keluarga untuk pihak luar. Ketika itu terjadi, artinya komunitas warjo Elina telah membiarkan komunitasnya untuk di masuki oleh pihak lain. Akibatnya, bangunan kekerabatan warjo Elina akan rampuh. Mengingat, fondasi utama penyokong jaringan kekerabatan komunitas Elina adalah solidaritas kepada saudaranya. Salah satu bentuk solidaritasnya dengan memberdayakan saudara dekat dalam bisnis keluarga (warjo Elina). Dalam kerangka sistem kekerabatan solidaritas telah menjadi ruh yang vital bagi kelanggengan sebuah komunitas

Dalam memperkuat argumen kami, berikut data-data yang menunjukan adanya jejaring kekerabatan berbasiskan kekeluargaan dan etnis kedaerahan dalam Komunitas Warjo Elina:

a. Bu Een sebagai *the founding "mother"* kekuatan bisnis Warjo Elina pun pada awalnya mulai merintis karirnya sebagai karyawan pada warjo sepupunya yang berasal dari Kab. Kuningan juga. Bu Een dahulu diajak oleh sepupunya itu pada tahun 1993 untuk mengais rezeki di Warjo Kabita. Dapat ditarik kesimpulan bahwa relasi yang digunakan menggunakan ikatan kekeluargaan dan kedaerahan.

b. Pada tahun 2004 Ibu Een memutuskan untuk melebarkan usaha warung burjonya dengan mendirikan warung burjo satu lagi didaerah Pogung Dalangan (Elina 2). Dia bekerja sama dengan kakak kandungnya yakni Aa' Safri. Begitupun dalam melakukan rekrutmen pegawai yang bekerja di warjo Elina, Ibu Een mengeunakan rekrutmen berbasis ikatan kekeluargAan dan kedaerahan.

c. Bu Een (Elina 1) dan pengelola Elina 4 (Pak Arief) merupakan suami istri namun sebelum mereka menikah, mereka telah memiliki warung burjo sendiri-sendiri. Maka setelah mereka menikah, kepemilikannya memang terpisah, namun secara pengelolaan, tidak menutup kemungkinan adanya koordinasi antara Elina 1 dan Elina 4. Pak Arief pun tercatat sebagai orang Kab. Kuningan.

d. Pengelola Elina 3, Bu Rosiah notabene adalah kakak kandung dari Pak Arif (Elina 4) yang terlebih dahulu memiliki warung Burjo, meskipun dia mengelola warung burjo secara mandiri dan terpisah dari Warung burjo Elina 1,2, dan 4. Ibu Rosiah pun tercatat sebagai orang Kab. Kuningan.

Pemetaan Aktor-aktor yang Terlibat

Dalam Komunitas Warjo Elina dapat dipetakan jejaring kekerabatannya sebagai berikut:

Diagram 8.1 Pemetaan Aktor Kekerabatan Komunitas Warjo Elina
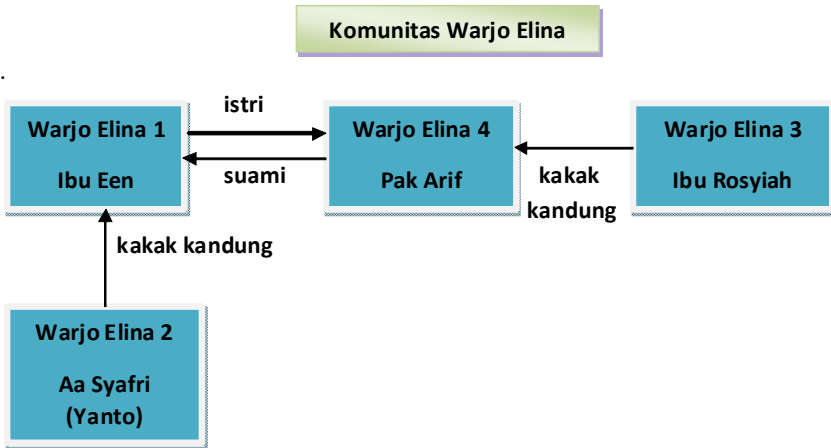
Pengelolaan jaringan Komunitas Burjo Elina

Meaning Sebagai Langkah Awal Berjejaring

Meaning merupakan sesuatu yang paling mendasar karena menyentuh dasar aktor dalam memaknai sesuatu. Meaning juga dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan mengakumulasikan infoermasi dan pengetahuan yang di dapat. Setelah memaknai informasi dan pengetahuan tersebut, kemudian meaning ditujukan untuk menghasilan pesan, nilai atau persepsi tetentu. Pesan, nilai atau persepsi tersebut untuk diadopsikan kepada pihak lain, sehingga informasi ini menjadi *legitimate*.

Berjejaring menjadi sebuah instrumen penting dalam upaya untuk mempertahankan kekuasAan seseorang atau kelompok komunitas. Demikian juga dengan komunitas warjo Elina yang mencoba melakukan proses berjejaring untuk dapat memperkuat posisinya dalam kanca perburjoan. Strategi yang digunakan komunitas warjo Elina dalam adalah *meaning*. *Meaning* di yakini mampu untuk mengobarkan *collective goal* dalam komunitas Elina. Setidaknya ada tiga fase yang di lakukan dalam proses meaning, yakni akumulasi, pemaknaan, dan persepsi.

Ketiga fase tersebut di lancarkan oleh komunitas secara internal dan eksternal. Mengingat, proses jejaring di lakukan komunitas warjo Elina, baik secara internal maupun eksternal. Di ranah internal sasarannya adalah sanak keluarga Elina, sedangkan ranah eksternal yang di maksud meliputi, konsumen warjo, pemilik tanah, dan masyarakat sekitar warjo. Dalam melakukan proses *meaning* komunitas warjo memberikan treatment bagi masing-masing sasarannya.

Meaning di Ranah Internal

Urgensi di lakukannya proses *meaning* secara internal adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi keluarga besar Elina bahwa usaha warjo merupakan solusi terbaik untuk mencari kepingan rupiah. Keyakinan bahwa warjo mampu menjadi lapangan pekerjaan baru yang prospektif terus di gelorakan dalam komunitas Elina. Hal inilah yang menjadi spirit perjuangan bagi mereka untuk terus menekui profesinya sebagai pengusaha warjo. Wacana mengenai kesuksesan seorang pengusaha warjo di sebar luasnya ke sanak keluarga yang masih berada di Kuningan. Dengan begitu keluarganya yang berada di kuningan dapat tertarik ikut berhijrah ke Sleman untuk ikut berkecimpung di kanca perburjoaan.

Motif yang di usung untuk dalam pewacanaan tersebut adalah motif ekonomi, namun jika di tilik lebih mendalam kita dapat memahami bahwa di samping motif ekonomi, adalah motif lain yang menjadi motivasi, yakni motif *premordialisme*. Motif ini merupakan motif untuk

membuat komunitas sesuai dengan kedekatan kekerabatan dan etnis kewilayahan. Upaya untuk berkomunitas tersebut di harapkan mampu untuk mempertahankan dan memperkuat posisi komunitas Elina di kanca *perburjoan*. Mengingat, persaingan para pengusaha burjo di daerah Pogung, Sleman semakin kompetitif.

Sehingga konsolidasi internal Elina menjadi sebuah pilihan untuk mengakumulasikan kekuatan internal. Isu yang di usung untuk dapat menarik massa di keluarga Elina adalah isu kesuksesan seorang pengusaha burjo dan semangat untuk berlomba-lomba menolong saudaranya agar dapat mengikuti jejak kesuksesan saudaranya yang telah lebih dahulu sukses. Isu tersebut di gelorakan secara *person by person* menggunakan pendekatan kultural. Dalam prosesnya, pendekatan itu di imbangi dengan menyisipkan muatan motivasi untuk dapat mempunyai usaha warjo. Ketika mereka mampu untuk memiliki warjo, maka mereka telah berinvestasi lapangan kerja baru bagi saudara di kampung.

***Meaning* di Ranah Eksternal**

Untuk dapat memperoleh territori bisnis warjo, komunitas Elina berusaha untuk membangunb kedekatan kultural dengan masyarakat lokal. Semangat yang di wacanakan untuk dapat mendapatkan kepercayAan dari masyarakat lokal adalah semangat untuk dapat mengembangkan ekonomi lokal masyarakat sekitar warjo. Komunitas warjo Elina mewacanakan kepada masyarakat lokal bahwa hadirnya warjo Elina bukan untuk merebut pangsa pasar dari masyarakat lokal. Namun, justru berusaha untuk mengembangkan potensi ekonomi di sekitar warjo Elina.

Strategi ini dapat terlihat di warjo Elina 2 dan Elina 4. Pada kasus Elina 2, di awal proses pendiriannya ada kesulitan dari pihak Elina untuk mendapatlan territori bisnis karena pemilik tanah yang akan di sewa sebagai lahan usaha warjo Elina 2 juga beprofesi sebagai pemilik angkringan, yang mempunyai kemiripan dengan menu warjo Elina. Namun, kesulitan tersebut berhasil di selesaikan dengan melakukan traktat kepada pemilik tanah, bahwa warjo Elina 2 tidak akan menjual menu

yang sama dengan angkringan, di saat angkringan sedang menjajakan dagangannya. Pihak Elina 2 berjanji hanya tidak akan menjual nasi telor ketika angkringan masih berjualan.

Dasar yang di jadikan patokan adalah waktu. Diwaktu pagi sampai sore pihak Elina 2 boleh menjual nasi telor, namun setelah sore sampai malam giliran angkringan yang akan menjual nasi. Warjo Elina 2 tidak boleh menjual nasi telor. Ketika ada konsumen yang akan membeli nasi, maka pemilik Elina akan merekomendasikan konsumen tersebut untuk membeli di angkringan. Hal itu bedampak positif bagi pemilik angkringan, yang awalnya angkringan tidak banyak di ketahui oleh konsumen warjo, semenjak adanya Elina 2, keberadaan angkringan dapat di tersosialisasikan dengan baik oleh pihak Elina 2.

Hubungan Antara Elina 1 dengan Elina 2

Istilah yang tepat untuk memaknai hubungan yang di bangun dalam mengelola warjo Elina 1 dan Elina 2 adalah hubungan hirarkhis. Artinya, ada seorang aktor tunggal yang mempunyai power untuk mengatur berjalannya bisnis warjo Elina 1 dan Elina 2. Aktor tersebut adalah Ibu Een. Dalam komunitas warjo Elina posisi Ibu Een berada di *top level management*. Secara struktural Ibu Een membawahi warjo Elina 2 yang di gawangi oleh Aa Syafri dan Mas Yanto. Konsekwensi dari hubungan struktural tersebut, Ibu Een mempunyai hak prerogatif untuk mengatur kebijakan di Elina 1 dan Elina 2. Seluruh pemasukan Elina 1 dan 2 secara penuh di kelola oleh Ibu Een, sedangkan Aa Syafri dan Mas Yanto hanya menerima jatah keuangan dari Ibu Een.

Ketika kita pahami secara mendalam, fakta ini terlihat sangat menarik. Fakta di atas mewasiatkan bahwa dalam sebuah komunitas kekerabatan relasi kuasa yang *bersifat top down* masih berlaku. Terbentuknya relasi tersebut di berakar dari ketergantungan Aa Sayafri dan Mas Yanto terhadap Ibu Een. Tali ketergantungan tersebut yang mendasari hubungan antara warjo Elina 1 dan Elina 2. Dari awal pendiriannya sampai sekarang peran Ibu Een di Elina 2 masih sangat

dominan. Aa Syafri merasa keberhasilan warjo Elina 2 berkat jasa dari Ibu Een. Tanpa bantuannya mungkin Elina 2 tidak akan berdiri dan Dia tidak akan mempunyai lapangan kerja.

Atas dasar hutang budi, pihak Elina 2 membiarkan Ibu Een untuk banyak ikut campur dalam pengelolaan Elina 2. Meskipun sebenarnya Ibu Een bukannya pemilik tunggal dari Elina 2 karena Aa Syafri dan Mas Yanto juga mempunyai investasi di Elina 2. Sehingga, tidak berlebihan ketika *sharing profit* menjadi sistem yang di gunakan untuk membagikan hak dari Ibu Een, Aa Syafri, dan Mas Yanto. Dalam sistem tersebut Ibu Een yang berada di top level managemen mendapatkan porsi tersebesar, yakni 50% dari omset Elina 1 dan Elina 2, sedangkan sisanya menjadi hak Aa Syafri dan Mas Yanto, masing-masing 50%.

Hubungan Elina 1 dengan Elina 3 dan 4

Berbeda dengan hubungan antara Elina 1 dan Elina 2, dalam kasus Elina 3, dan 4 pola hubungannya bersifat koordinatif. Artinya, hubungan yang di jalin hanya sebatas kedekatan emosional sebagai saudara. Masing-masing warjo mempunyai, baik Elina 3 maupun Elina 4 manajemen sendiri-sendiri, keduanya tidak saling mengintervensi. Ketika warjo Elina 3 mambutuhkan bantuan maka dengan senang hati warjo Elina 1 dan Elina akan membantunya tanpa ada pamrih apapun. Mereka berkeyakinan, kalau antar anggota keluarga harus saling membantu.

Hubungan keseluruhan Komunitas Burjo Elina

Ketika kita memotret hubungan komunitas warjo Elina secara keseluruhan, dapat di tarik kesimpulan bahwa pola kerjasama antar aktor dalam Komunitas Elina tidaklah terstruktur rapi. Hal tersebut didasarkan pada interpretasi data di lapangan yang menunjukan bahwa manajemen dan pengaturan yang ada pada masing-masing warjo berjalan secara terpisah dan berbeda-beda. Koordinasi yang hirarkis hanya terlihat pada kasus Elina 1 dan Elina 2 saja, selebihnya hanya sebatas hubungan yang bersifat koordinatif. Bentuk kerjasama antara Elina 1 dan Elina 2 jelas

terlihatdari proses *supply* bahan logistik, intervensi kebijakan, dan rolling karyawan yang di lakukan Elina 1 dengan Elina 2. Hal tersebut sangat di pengaruhi oleh besarnya jasa Ibu Een terhadap Elina 2. Berbeda dengan Elina 3 dan 4 yang telah berdiri sendiri-sendiri tanpa campur tangan Ibu Een.

Untuk menguatkan argumentasi yang kami bangun, kami mencoba untuk menyuguhkan tabel sebagai berikut:

Tabel 8.1. Pemetaan karakteristik Warjo Elina

Pembanding	Elina 1	Elina 2	Elina 3	Elina 4
Pemilik/pengelola	Bu Een	Syafri&Mas Yanto	Bu Rosiah	Pak Arif
Sasaran Pasar	Mahasiswa dan Masyarakat Sekitar	Mahasiswa dan Masyarakat Sekitar	Pekerja, Pelajar dan Masyarakat Sekitar, *Comuter*	Masyarakat Sekitar
Strategi Bisnis	Memaksimalkan warung pribadi dalam memenuhi kebutuhan bahan baku	Mensuplay bahan baku dari Elina 1, sehingga uang belanjanya akan masuk ke warung pribadi milik Elina 1	Tidak ada	Menghidupkan ekonomi lokal
Partnership	Mengkoordinir Elina 2 dan terkoneksi dengan Elina 4	Dikoordinir oleh Elina 1	Tidak ada koneksi antara Elina 1, 2, dan 4	Terkoneksi dengan Elina 1

Dari tabel diatas dapat dideskripsikan sebagai berikut: Bila dilihat dari basis kepemilikan atau Pengelolaan di warung Burjo Elina ini sangat kentara dengan nuansa kekeluargAannya. Bu Een (Elina 1) dan Pak Arif (Elina 4) merupakan suami istri namun sebelum mereka menikah, mereka telah memiliki warung burjo sendiri-sendiri. Maka setelah mereka menikah, kepemilikannya memang terpisah, namun secara pengelolaan, tidak menutup kemungkinan adanya koordinasi antara Elina 1 dan Elina 4. Nama Elina sendiri diambil dari nama anak mereka. Kemudian Bu Een menanam modal di Elina 2. Pengelola Elina 2 yaitu Mas Yanto merupakan sepupu dari Bu Een. Dari pengelolaan keuangan dan produksi, Bu Een juga turut membantu pengeloalannya. Sedangkan yang terjadi Elina 3, Bu Rosiah yang notabene adalah kakak kandung dari Pak Arif (Elina 4) yang terlebih dahulu memiliki warung Burjo, mengelola warung burjo secara mandiri dan terpisah dari Warung burjo Elina 1,2, dan 4.

Dari segi sasaran pasar, perbedaan ini dapat diidentifikasi dari letak warung burjo tersebut. Elina 1 dan 2 yang letaknya yang strategis yaitu di Pogung Dalangan yang dekat dengan kampus dan kost-kostan mahasiswa sehingga sasaran pasannya lebih banyak mahasiswa. Sedangkan di Elina 3 letaknya juga strategis yaitu ditengah kota Yogyakarta dan dipinggir jalan sehingga yang menjadi pangsa pasarnya adalah para pekerja dan pejalan, juga sebagian kecil pelajar. Warung Elina 4 yang letaknya agak kedalam gang atau ditengah perkampungan (Cokrodiningratan), maka sasaran pasarnya adalah warga sekitar.

Dari sasaran pasar yang berbeda-beda ini, maka akan sangat berpengaruh pada strategi bisnisnya. Dari segi partnership, sangat terlihat bahwa antara Elina 1 dan 2 terjalin koordinasi. Hal ini dikarenakan Bu Een bertindak sebagai pendiri yang sekaligus *supplier* barang-barang dagangan seperti indomie dan bahan untuk membuat bubur kacang hijau ke Elina 2. Untuk Elina 4, juga disuplay oleh Bu Een juga , namun hanya sebatas nitip produk, yakni nasi bungkus dan gorengan. Sedangkan Elina 3 bisa dikatakan tidak ada koneksi dikarenakan memang pengelolaannya secara terpisah dari Elina 1,2, juga 4.

Bu Een adalah aktor sentral dalam komunitas burjo Elina. Bu Een mempunyai kewenangan dalam hal *supply* logistik, penggajian, dan keuangan.. Adapun bentuk-bentuk peran-peran yang dijalankan oleh ibu Een dalam warung burjo Elina 2 ini adalah : mengatur pemasukan dan pengeluaran barang-barang yang akan dijual di warung burjo Elina 2, bentuk konkretnya adalah barang-barang yang dijual di warung Elina 2 disuplay oleh warung burjo ibunya Een (Elina 1). Menentukan harga jual barang dagangan dan mengatur penggajian karyawan serta mengatur sistem rolling karyawan antar warung Burjo Elina 1 dan 2. Berkat kerja keras dari ibu Een dan keluarga warung burjo Elina 1 dan 2 menjadi warung burjo yang cukup diminati oleh para konsumen yang kebanyakan adalah para mahasiswa.

Dari segi Kontribusi dalam Elina, Bu Rosiah merupakan aktor yang pertama kali memiliki warung Burjo dan mempekerjakan Pak arif yang merupakan adik kandungnya untuk menggali pengalaman sebagai penjual burjo. Setelah mandiri secara modal, barulah Pak Arif mendirikan warung Burjo sendiri yaitu Elina 4. Dari sini, dapat diketahui bahwa bu Rosiah telah menanamkan nilai etos kerja pada adiknya. Dengan begitu, secara tidak langsung, bu Rosiah berkontribusi dalam menanamkan nilai etos kerja tersebut. Kemudian Pak Arif dan Bu Een yang telah memiliki warung Burjo sendiri-sendiri juga melakukan koordinasi dalam pengelolaannya. Dalam hal ini terlihat dari suplay barang-barang dagangan dari bu Een yang disalurkan ke Elina 2 dan Elina 4.

Sedangkan dalam proses pengadaan logistik dan barang dagangan yang di jajakan di warjo Elina, untuk Elina 2 dan 4 masih tergantung dengan Elina 1. Menurut Pak Edi karyawan Warjo Elina 4:

"*Ya, kalau Pak Arif pas ke sini (*pen. Elina 4*) biasanya bawa logistik, seperti mie, gula, dan telor dari Elina 1*" (Edi, karyawan Warjo Elina 4 2010, wawancara, 21 Desember)

Ketergantungan warjo Elina terhadap Elina 1 karena Bu Een (pemilik Elina 1) mempunyai warung sembako yang menyediakan

kebutuhan logistik bagi operasionalisasi sebuah warjo. Hal ini merupakan sebuah usaha untuk memaksimalkan keuntungan bagi komunitas warjo Elina dan Ibu Een pada khususnya. Semakin minim ketergantungan cabang Elina dengan pihak luar dalam hal penyediaan logistik, maka semakin erat hubungan kekerabatan Elina.

Mengingat, hal tersebut mencerminkan upaya untuk semakin menguatkan bisnis Ibu Een yang berbentuk warung sembako, di mana keberadaannya cukup mendukung kegiatan operasional bisnis warjo yang notabene juga merupakan bisnis keluarga. Argumentasinya sederhana, ketika tidak belanja logistik tidak di warung sembako Ibu Een, maka sudah pasti uang akan mengalir ke pihak luar. Namun, jika cabang warjo Elina mengabail logistik di warjo Elina, maka uang akan kembali masuk ke kantong komunitas Elina. Hal ini merupakan salah strategi bisnis untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dalam bisnis keluarga untuk melanggengkan komunitasnya.

Penutup: Kesimpulan

Dari temuan kami di lapangan tersebut, telah menjawab *research question* kami secara komperhensif dan mendalam. Dapat dijabarkan secara umum bagaimana teori pemerintahan komunitas dalam konteks dunia bisnis Warjo Elina tersebut memiliki korelasi yang cukup relevan dan signifikan dengan wawancara dan observasi kami di lapangan. Terdapat beberapa poin penting yang kami pikir penting untuk kemudian disimpulkan dalam laporan ini, yaitu:

Pertama, Komunitas Warjo Elina kami pikir relevan jika dikaitkan dengan teori komunitas sebagaimana yang telah di ulas di kerangka konseptual. Hasil temuan kami di lapangan menunjukan adanya keserasian dan penguatan atas teori komunitas yang mengatakan bahwa sebuah komunitas setidaknya memiliki ruang hidup bersama, *social relationships*, dan *community sentiment* (kesadaran seseorang bahwa dia mempunyai peran dalam sebuah kelompok dan ada saling ketergantungan antar aktor dalam satu kelompok), adanya *collective goods*, memenuhi

kepentingan hidup bersama yang utama. Warjo Elina yang lahir karena adanya dorongan ekonomi, sehingga melakukan "ekspansi" ke Kab. Sleman memang mengandalkan identitas komunitasnya yang berbasiskan ikatan kekeluargAan dan territori dalam perkembangannya. Komunitas yang telah memiliki identitas unik dan khusus ini akhirnya dapat eksis dalam dunia perbisnisan makanan di daerah lain.

Kedua, relasi kuasa yang terbentuk dalam Komunitas Warjo Elina merupakan relasi kekerabatan yang berbasiskan pada ikatan kekeluargaan dan etnis kewilayahan.

Ketiga, tidak terdapat pola kerjasama antar aktor yang signifikan yang terjadi dalam Komunitas Elina. Hal tersebut dari terpisahnya manajemen dan pengaturan yang ada pada masing-masing warung. Namun, yang cukup signifikan terlihat adalah pada Elina 1 dengan Elina 2 dengan Elina 1 yang me-*supply* bahan baku dan mengintervensi kebijakan Elina 2. Kerjasama itu pun termasuk dengan adanya *rolling* karyawan yang bekerja di Elina 1 dengan Elina 2 dalam jangka waktu tertentu. Hal tersebut lebih dikarenakan lahirnya Elina 1 memang dibentuk oleh Bu Een selaku pemilik Elina 2. Berbeda dengan Elina 3 dan 4 yang telah berdiri sendiri-sendiri.

Referensi

Anderson, Benedict 2001, *Imagined communities,* INSIST, Yogyakarta.

Claessen 1974, *Antropologi politik: Suatu orientasi,* Saptodadi, Yogyakarta.

Koentjaraningrat 1985, *Antropologi sosial,* Dian Rakyat, Jakarta.

Patto, Michael Quinn 1991, *Metode evaluasi kualitatif,* Pustaka Pelajar, Jakarta.

Scribd 2010, *Penelitian studi kasus dan teori grounded*, diakses 09 Januari, <http://www.scribd.com/doc/24668989/Penelitian-Strudi-Kasus-Dan-Teori-Grounded>

Siregar, Syafaruddin 2010, *Bab XI Pendekatan Penelitian Pendidkan,* diakses *07* Januari,<*http://file.upi.edu/Direktori/E%20-%20FPTK/JUR.%20PEND.%20TEKNIK%20MESIN/195008161979031%20-%20SYAFARUDDIN%20SIREGAR/buku%201/B%20A%20B%20XI.pdf*>

Yin, Robert K 2002, *Studi Kasus Desain dan Metode,* Raja Grafindo, Jakarta.

Wawancara

Wawancara dengan Pak Arif, pemilik Warjo Elina 4, 28 Desember 2010

Wawancara dengan Pak Edi, karyawan Warjo Elina 4, 21 Desember 2010

Wawancara dengan Ibu Rosyiah, pemilik Warjo Elina 3, 21 Desember 2010

Wawancara dengan AA Syafri, pemilik Warjo Elina 2 , 21 Desember 2010

Wawancara dengan Mas Yanto, pemilik Warjo Elina 2, 14 Desember 2010

Wawancara dengan Ibu Een, pemilik Warjo Elina 1, 12 Desember 2010

Lampiran

Interview guide dasar yang kami gunakan adalah sebagai berikut:

1.) Hal menarik dari Warjo Elina→Teritori, apakah 1-4itu merupakan 1 keluarga

2.) Apakah berdiri secara independen atau merupakan inisiasi dari Elina sebelumnya? Kalau berdiri sendiri kenapa boleh pakai nama Elina?

3.) Apakah ada pertemuan rutin antar pengelola Warjo Elina?

4.) Apakah ada rolling karyawan?

5.) Siapa yang nitip makanan di warjo izin?bagaimana mekanisme izinnya

6.) Apakah SOP?siapa konseptornya

7.) Bagaimana pola rekruitmen pegawai?

8.) Bagaimana pengelolaan keuangan?

9.) Kalau ada masalah sebuah Warjo Elina, bagaimana mekanisme menyelesaikannya?

9

Sosialisasi Budaya Sunda dan Politik Identitas di Warung Burjo

Ariefator Sudarna, Banne Matutu, Dimas Ramadhani, Irma Safni, Isep Parid Yahya,Kurniawan Dinihari, Umar Hajrodion

Pendahuluan: Latar Belakang

Bagi sebagian orang, khususnya pelajar dan mahasiswa yang menempuh pendidikan di Provinsi D.I. Yogyakarta, istilah "Warung Burjo" tentunya bukanlah hal yang asing lagi. Jika kita cermati Warung Burjo (bubur kacang hijau), tempat dimana biasanya menjual makanan khusus berupa bubur kacang hijau, indomie, nasi telur, dan berbagai jenis makanan lainnya, dalam banyak hal tidak hanya sekedar sebuah warung jajanan, tetapi telah merangkap pula sebagai tempat "tongkrongan" yang cukup dinikmati oleh sebagian kalangan, terutama mahasiswa. Terlebih apabila Warung Burjo tersebut berada dilokasi starategis yang dekat dengan tempat kost, harganya murah, terus buka selama 24 jam non-stop, tempat mahasiswa untuk begadang jika ada pertandingan bola tengah malam,

serta menjadi tempat memperpanjang hidup para mahasiswa jika uang kiriman telah menipis.

Warung Burjo menjamur di berbagai sudut kota Yogyakarta dan daerah sekitarnya, sehingga bisnis ini telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Kepopuleran Warung Burjo lambat laun tidak hanya bisa dipahami sebagai fenomena bisnis tapi juga dapat dilihat dari perspektif yang berbeda seperti dari sudut pandang pola perilaku dan kebudayaan. Fenomena merebaknya Warung Burjo di Yogyakarta yang tentunya tidak dapat lagi dihitung dengan menggunakan hitungan jari, mampu menjadi suatu fenomena penting yang dapat dianalisis dari berbagai unsur. Suatu hal yang perlu untuk kita cermati disini adalah ketika Warung Burjo yang telah merebak dimana-mana, sekiranya kemudian menjadi penting untuk kita lihat terkait dengan ciri khas yang menjadi pembeda dengan Warung Burjo lain.

Bila dilihat dari sudut pandang kebudayaan, keberadaan Warung Burjo tidak semata-mata sebagai entitas bisnis yang bebas nilai dan berada diruang hampa. Warung Burjo dikenal mempunyai kekentalan dengan kebudayaan tertentu; yaitu budaya Sunda, yang tentunya akan memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan warung-warung makan lain. Sehingga ciri khas pembeda tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti; aspek bahasa, warna warung, tampilan, menu penyajian, dan lain sebagainya. Bila kita mendatangi Warung Burjo yang pedagangnya adalah orang Sunda, umumnya dari sisi bahasa yang digunakan ketika ia berkomunikasi dengan pembelinya, maka ia akan memanggil dengan sebutan “Aa” (untuk laki-laki) atau “Teteh” (untuk perempuan).

Tidak hanya itu, dari warna warung pun, umumnya yang biasa ditemukan adalah dengan memberi cat warna kuning dan biru. Sedangkan dari menu penyajian biasanya terdiri dari aneka minuman, gorengan, bubur ayam dan bubur kacang hijau khas Sunda, nasi telur, nasi sarden, indomie rebus telur (disebut intel), baik intel rebus, maupun intel goreng. Pada dasarnya Warung Burjo mungkin terlihat sederhana. Akan tetapi jika kita amati, Warung Burjo yang tersebar di penjuru Yogyakarta dalam

jumlah yang tidak sedikit, semuanya memiliki spanduk "Indomie" yang kebanyakan sama dan semuanya juga menjual tipe makanan yang sama.

Kekhasan lain untuk kita cermati adalah dengan melihat spanduk nama Burjo dengan *font* dan keterangan yang sama (jenis makanan yang dijual). Kesamaan bentuk spanduk, desain interior warung dan rasa mie karena menggunakan merek mie instan yang sama yakni Indomie menunjukkan adanya aspek daya prediksi yang diaplikasikan para pedagang Burjo. Orang-orang yang datang ke Warung Burjo pun, sudah tahu menu apa yang dihadirkan dan seperti apa rasa makanan yang akan dihidangkan disana. Sehingga, dari sini poinnya kemudian adalah sekiranya pada kondisi ini menjadi penting untuk kita cermati, bahwa adanya kesamaan nilai-nilai budaya Sunda melalui Warung Burjo dalam bentuk tiru meniru yang tidak ada kesepakatan khusus inilah, bisa jadi disebabkan karena pengusaha Burjo yang kebanyakan telah saling kenal dan penjual Burjo yang memang kebanyakan berasal dari budaya yang sama yakni Sunda.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dijelaskan dibagian sebelumnya yaitu bagaimana nilai-nilai kebudayaan Sunda yang dikemas dalam Warung Burjo dijadikan sebagai media sosialisasi politik identitas, yang secara konseptual menimbulkan dua alur pemikiran penting. *Pertama*, bagaimana nilai-nilai budaya Sunda dikemas melalui Warung Burjo. Dan *kedua*, bagaimana Warung Burjo –dengan segala nilai-nilai budaya yang dibawanya –dijadikan sebagai media konstruksi politik identitas. Sehingga kedua alur pemikiran tersebut terumuskan ulang kedalam satu pertanyaan penelitian yang berbunyi, "Bagaimana politik identitas dikemas dalam Warung Burjo melalui sosialisasi nilai-nilai budaya Sunda?". Alur pemikiran kami sebagai tim peneliti berawal dari identifikasi subjektif terhadap keberadaan Warung Burjo yang tersebar di berbagai penjuru Kota Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Hal terpenting dari *common sense* awal peneliti terhadap Warung Burjo adalah tentang

keunikannya yang terlihat secara kasat mata yang identik dengan kebudayaan Sunda.

Kerangka Konseptual

Budaya (*Sunda*)

Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan barasal dari bahasa Sansekerta "*Budhayyah*" yang berarti budi atau akal, dengan demikian kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal (Koentjaraningrat, 1990 dalam Madiasworo 2001: 4). Terdapat tujuh (7) unsur kebudayaan, antara lain: bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian (Koentjaraningrat, 1990, dalam Madiasworo 2001: .4). Budaya sangat lekat kaitannya dengan kehidupan sosial manusia. Sunda merupakan kebudayaan masyarakat yang tinggal di wilayah barat pulau Jawa. Berdasarkan terminologinya, Sunda berasal dari kata su yang artinya bagus atau baik (Kurnia 2007). Sehingga kata Sunda dikaitkan sebagai segala sesuatu yang mengandung unsur kebaikan. Adapun beberapa watak khas orang Sunda, yang disebut dengan KaSundaan, antara lain: *cageur* (sehat jasmani dan rohani), *bageur* (baik hati), *bener* (benar), *singer* (mawas diri), dan *pinter* (pandai ilmu dunia dan akhirat) (Kurnia 2007). Karakter keSundaan tersebut kemudian terinternalisasi dalam diri masyarakatnya sehingga membentuk perilaku-perilaku yang kemudian secara tidak langsung membangun pikiran orang lain (*Stereotype*) dalam memandang masyarakat Sunda. *Stereotype* yang terbangun dapat diidentifikasi menjadi beberapa hal, seperti: perilaku, kebiasaan, cara berinteraksi dan lain sebagainya.

Kebudayaan Sunda yang nampak melekat diberbagai Warung Burjo dapat dikerangkai melalui beberapa dimensi kebudayaan seperti aspek etika, estetika dan semiotika. Etika berbicara tentang cara orang berperilaku dan berbudi pekerti, sedangkan estetika merujuk pada unsur-unsur seni dan keindahan yang ditampilkan secara fisik, dan semiotika berkaitan dengan labeling atau simbolisasi nilai-nilai kebudayaan. Ketiga

aspek tersebut secara umum melekat pada Warung Burjo yang beridentitaskan kebudayaan Sunda. Ketiga aspek kebudayaan tersebut bukan menjadi pegangan teoritik dalam penelitian ini, itu hanyalah alat bantu dalam menjelaskan asumsi-asumsi dasar dari logika awal peneliti terhadap keberadaan Warung Burjo.

Bila ditinjau dari aspek etika, yang memfokuskan pada bagaimana orang berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain. Kebudayaan Sunda dapat terlihat dari sikap dan perilaku pedagang Warung Burjo yang mempunyai ciri tersendiri. Pada kasus Warung Burjo tersebut, kebudayaan Sunda dapat ditampilkan melalui gaya orang berperilaku seperti perilaku/bersikap ketika melayani pelanggan, fashion/gaya berpakaian, gaya rambut, gaya bicara, menggunakan aksen/logat bahasa, durasi penyajian dan dominasi kaum laki-laki sebagai pelayan Burjo bersikap. Sikap tersebut termasuk didalamnya cara berinteraksi antar penjual dan antara penjual dan pembeli yang tergambarkan dalam perilaku penjamuan konsumen. Selain itu, gaya bicara yang digunakan merupakan hal penting yang menjadi keunikan Warung Burjo. Singkatnya, pada sisi etika penelitian terhadap Warung Burjo difokuskan pada keseluruhan perilaku yang ditampilkan oleh penjual Warung Burjo.

Dari asumsi peneliti yang dipaparkan diatas, melahirkan beberapa pertanyaan seperti bagaimana penjual Warung Burjo mengemas kebudayaan Sunda melalui keseluruhan aspek perilakunya, dan nilai-nilai budaya Sunda mana yang mereka tampilkan. Kemudian, penggalian terhadap motifasi dibalik pengemasan budaya Sunda itu merupakan hal penting dalam penelitian ini. Bagaimana individu berperilaku dan bersikap selalu mempunyai tujuan dan maksud yang tidak nampak secara kasat mata.

Sedangkan dari aspek estetika, kebudayaan bisa dilihat dari bagaimana unsur-unsur seni dan keindahan ditampilkan melalui benda-benda tak hidup. Hal itu bisa terlihat bukan dari perilaku seseorang tapi terlihat dari tampilan-tampilan yang bisa dilihat secara kasar. Terkait Warung Burjo, kebudayaan Sunda dapat ditampilkan melalui tata letak

lokasi penjualan yang khas, menu makanan yang disajikan dan tata letak penyajiannya serta berbagai atribut yang digunakan seperti spanduk, kalender, hiasan dinding, dan aksesoris tempelan lainnya. Keunikan budaya dari segi estetika memerlukan kepekaan terhadap tampilan-tampilan benda-benda estetik yang bisa diinterpretasikan.

Dalam Warung Burjo, nilai-nilai estetik tergambar dari keseragaman penampilan seperti, tata letak dalam ruangan, hiasan dinding dan berbagai atribut yang terpampang. Hal-hal tersebut tidak berdiri secara independen dan incidental, mungkin saja keseragaman tata latak ruangan dan berbagai atribut mempunyai arti penting bagi kebudayaan Sunda. Pencarian makna dari semua itu merupakan aspek penting yang harus didapatkan melalui penelitian mendalam. Dengan demikian, aspek-aspek estetik yang ditampilkan oleh Warung Burjo menimbulkan pertanyaan bagaimana kebudayaan Sunda dikemas melalui tampilan-tampilan tata letak, menu, atribut, serta asesoris yang melekat di Warung Burjo.

Dimensi terakhir dari kebudayaan adalah aspek semiotik. Aspek semiotika memfokuskan diri simbol-simbol dan tanda yang menjadi ciri khas kebudayaan tertentu. Simbol tersebut dapat berupa pemakaian kata-kata dan bahasa, pilihan warna tektur dan label tertentu yang merujuk pada suatu identitas atau kebudayaan. Untuk meneliti Warung Burjo, dimensi semiotik akan tergambarkan melalui penggunaan bahasa yang terpampang melalui spanduk, tulisan dan bahasa yang digunakan pedagang baik ketika berbicara maupun ketika memberikan penamaan Warung. Selain itu, semiotik juga berbicara tanda-tanda lain seperti perpaduan warna yang digunakan secara terus menerus. Seperti disemua Warung Burjo, dominasi warna kuning dan biru selalu menjadi latar warna tembok ruangan. Hal demikian mungkin ada maknanya yang bagi kebudayaan Sunda, makna tersebut akan didapatkan setelah dilakukan penelitian yang bersifat *interpretative* ini.

Politik Identitas

Alur pemikiran selanjutnya dari rencara penelitian ini adalah bagaimana nilai-nilai kebudayaan yang disajikan melalui Warung Burjo itu dijadikan sebagai media untuk mengkonstruksi politik identitas. Politik identitas dapat kita maknai sebagai suatu pencitraan identitas tertentu ditengah-tengah keberagaman dari identitas itu sendiri. Sebagai contoh, Warung Burjo merupakan identitasnya dari orang Sunda, hal itu karena Warung Burjo berada di daerah yang mempunyai kebudayaan non-Sunda. Ketika membayangkan Warung Burjo yang identik Sunda berada di daerah Jawa Barat, maka persepsi terhadap politik identitas menjadi tidak relevan. Namun sebaliknya, ketika membayangkan Warung Burjo dengan kekentalan budaya Sundanya berada di daerah berbudaya Jawa seperti Yogyakata dan sekitarnya, maka identitas menjadi sangatlah penting.

Berkaitan dengan kebudayaan yang dikemas melalui Burjo, kami memahami politik identitas sebagai upaya-upaya untuk menunjukkan eksistensi suatu identitas di lingkungan yang plural. Gagasan identitas bisa merujuk pada dua aspek yaitu aspek individu dan aspek keterikatan antar individu. Aspek individu menunjukkan hal-hal yang melekat pada individu itu sendiri (*who am i*) berdasarkan ras, suku, budaya, agama, ideologi, golongan dan kepercayaan. Dalam hal ini, identitas pedagang Burjo kita anggap menonjolkan unsur-unsur kebudayaan Sunda. Sedangkan aspek keterikatan atau interrelasi membicarakan dengan siapa seorang individu mempunyai keterikatan (*who do i belong with*) (Lot of Essays.com 2010).Hal itu menunjuk pada identitas Burjo secara umum yang mempunyai keterkaitan dengan induk kebudayaan Sunda yang berpusat di Jawa Barat. Keadaan itu kami anggap sebagai realitas sosial yang dapat dikerangkai melalui konsep politik identitas. Sehingga prasyarat dari politik identitas sendiri mengandung didalamnya yakni, bagaimana kemudian identitas tersebut dibangun dari kemampuannya untuk melanggengkan narasi tentang identitas mereka sehingga terbangun keberlangsungan eksistensi budaya Sunda ditengah-tengah keberagaman

dari identitas itu sendiri ketika berada di daerah yang mempunyai kebudayaan non-Sunda seperti di Yogyakata.

Maka dari itu, alur konseptual dari penelitian ini berakhir di pertanyaan bagaimana kebudayaan Sunda yang tercermin melalui Warung Burjo dijadikan media untuk memperkuat identitas Sunda sebagai sebuah entitas kebudayaan di tengah-tengah kebudayaan lain yaitu Jawa. Dimensi politik disini tidak dipahami sebagai pertarungan memperebutkan kekuasaan atas suara masyarakat tapi lebih dimaknai sebagai upaya untuk mengkonstruksikan diri sebagai sebuah entitas penting yang mempunyai sumber-sumber kekuasaan. Dengan alur konseptual seperti itu, rumusan masalah yang dijelaskan diatas dapat dijawab melalui alur pemikiran yang dibangun oleh peneliti secara sistematis dan terorganisir, sehingga penelitian ini berjalan sesuai jalur yang ditentukan.

Tabel 9.1. Sistematika Kerangka Konseptual

No.	Konsep	Definisi Operasional	Indikator	Parameter	Posisi dalam Analisa
1.	Budaya	Keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan miliki diri manusia dengan cara belajar (Organisasi.org 2007).	Suatu sistem yang menjadi ciri khas dari suatu masyarakat dan berasal dari cipta, rasa dan karsa masyarakat.	Dapat diidentifikasi berdasar pada tiga aspek yaitu etika, estetika dan semiotika. Etika fokus pada bagaimana orang berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain. Estetika dimana kebudayaan bisa dilihat dari unsur-unsur seni dan keindahan yang ditampilkan melalui benda-benda tak hidup. Sedangkan Semiotika fokus pada simbol-simbol dan tanda yang menjadi ciri khas kebudayaan	Untuk melihat sosialisasi budaya yang dilakukan.
2.	Politik Identitas	Suatu pencitraan identitas tertentu ditengah-tengah keberagaman identitas.	Politik identitas sebagai upaya-upaya untuk menunjukkan eksistensi suatu identitas di lingkungan yang plural.	Gagasan identitas bisa merujuk pada dua aspek yaitu aspek individu dan aspek keterikatan antar individu. Aspek individu menunjukkan hal-hal yang melekat pada individu itu sendiri (*who am i*) berdasarkan ras, suku, budaya, agama, ideologi, golongan dan kepercayaan. Dalam hal ini, identitas pedagang Burjo kita anggap menonjolkan unsur-unsur kebudayaan Sunda. Sedangkan aspek keterikatan atau interrelasi membicarakan dengan siapa seorang individu mempunyai keterikatan (*who do i belong with*). Hal itu menunjuk pada identitas Burjo secara umum yang mempunyai keterkaitan dengan induk kebudayaan Sunda yang berpusat di Jawa Barat.	Dimensi politik tidak dipahami sebagai pertarungan memperebutkan kekuasaan atas suara masyarakat, tapi dimaknai sebagai upaya untuk mengkonstruksikan diri sebagai sebuah entitas penting yang mempunyai sumber-sumber kekuasaan.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, tema yang peneliti pilih adalah mengenai budaya dan politik identitas. Fokus kajian dari penelitian ini yaitu tentang metode pengemasan nilai-nilai budaya Sunda yang kemudian dijadikan sebagai media sosialisasi politik identitas. Terkait dengan hal tersebut, peneliti memilih Warung bubur kacang hijau (Burjo) yang ada di Yogyakarta sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memilih Warung Burjo sebagai obyek penelitian dengan melihat beberapa kasus yang terjadi di Yogyakarta, dimana eksistensi masyarakat Sunda sangat lekat dengan keberadaan Warung Burjo tersebut. Identifikasi awal terkait dengan pernyataan tersebut berasal dari salah satu temuan fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa sebagian besar pemilik Warung Burjo di Yogyakarta merupakan orang yang berasal dari daerah Jawa Barat (orang Sunda). Walaupun memang pada kenyataannya tidak semua Warung Burjo yang ada di Yogyakarta pasti milik "orang Sunda". Akan tetapi, bila diperhatikan lebih dalam lagi, faktor dominasi kepemilikan Warung Burjo oleh orang-orang Sunda telah melekat pada Warung Burjo yang ada di Yogyakarta. Kemudian, hal tersebut berimplikasi pada pencitraan bahwa Warung Burjo lekat dengan budaya Sunda. Asumsi lekatnya budaya Sunda pada Warung Burjo yang ada diperkuat dengan pengemasan dari nilai budaya Sunda itu sendiri.

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka perlu perlu digunakan suatu metode penelitian yang memadai. Metode penelitian akan menjelaskan bagaimana rumusan masalah itu dijawab. Metode penelitian tidak hanya mencakup perspektif dalam memandang masalah tapi juga meliputi berbagai metode dalam pengumpulan data primer/ sekunder, dan metode analisa data.

Jenis penelitian: Studi kasus

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, baik dalam proses pengumpulan maupun analisis data. Studi kasus dipahami sebagai sebuah pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan suatu hal yang dianggap unik atau menarik (Nergon 2003). Menurut Berg (2001: 225), studi kasus adalah metode sistematis yang digunakan untuk menggali informasi tentang seseorang, setting social, peristiwa atau kelompok yang memungkinkan peneliti untuk mengerti bagaimana proses tersebut berlangsung dan berfungsi. Yin (1984: 23) memaknai studi kasus sebagai sebuah penyelidikan empiris yang bertujuan menginvestigasi fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata; dimana batasan antara fenomena dan konteks tidak secara jelas terlihat; dan dimana bukti dari banyak sumber digunakan. Pemaknaan terhadap pengertian akan kata kasus sendiri, masing-masing ahli memiliki pandangan yang berbeda. Yin (1989: 22) memaknai kasus sebagai sebuah peristiwa, sebuah entitas atau individu maupun sebuah unit analisis. Penggunaan metode studi kasus dalam penelitian ini baik dari segi pengumpulan data maupun analisis data lebih didasarkan pada hal-hal yang terkandung dalam metode ini. Adapun beberapa kekhasan dari metode studi kasus bila dibandingkan dengan metode penelitian lainnya, antara lain: mempelajari satu unit atau kasus tertentu (Sarantakos 1993: 263), konteks yang digunakan sesuai dengan kehidupan nyata yang terjadi, menggunakan berbagai sumber pembuktian, berdasar pada data empiris, serta menggunakan data yang relatif berjumlah kecil. Bila dilihat berdasarkan unit data yang akan dianalisis dapat ditelusuri bahwa fokus dari penelitian ini bersifat kasuistik dan spesifik, yaitu mengetahui tentang pengemasan nilai budaya, dalam hal ini budaya Sunda, kaitannya dengan politik identitas yang berbasis pada eksistensi masyarakat. Topik yang diangkat pun berbasis pada konteks kehidupan nyata yang terjadi di Yogyakarta.

Metode Pengumpulan Data

Berikut ini adalah daftar pertanyaan wawancara yang bersifat *open ended questions*, sebagai referensi data primer yang dirumuskan berdasarkan variabel kerangka konseptual.

Pertama, dilakukan wawancara dengan narasumber pemilik burjo untuk mengetahui aspek estetika, etika, dan semiotika dari sosialisasi budaya Sunda pada warung burjo. Untuk keperluan tersebut, penelitian akan dilakukan dengan melakukan *in-depth interview* dengan pemilik salah satu burjo di Yogyakarta yang sudah memiliki banyak cabang; Warung Burjo Palm Kuning.

Kedua, dilakukan wawancara dengan narasumber Sunda dan non-Sunda untuk mengetahui aspek politik identitas dari sosialisasi budaya Sunda pada warung burjo. Untuk keperluan tersebut, penelitian akan dilakukan dengan melakukan *in-depth interview* dengan berbagai nasarumber yang berlatar belakang suku Sunda dan non-Sunda.

Metode Analisa Data

Dalam melakukan analisis, metode analisa data akan dibagi menjadi dua fase yaitu fase pertama dan kedua. *Fase pertama*, terdiri atas pengelolaan input data primer yang diperoleh dari sumber data kategori pertama digunakan sebagai teks identitas budaya yang menjadi simbolisasi dari Warung Burjo. Sedangkan *fase kedua*, menjadikan input data primer yang diperoleh dari sumber data kategori kedua dan ketiga digunakan sebagai penerang konteks identitas politik atas teks dalam fase pertama.

Adapun teknik analisa data dari penelitian ini akan diperoleh dari data primer. Input data primer dikelola dengan mengkategorisasi sumber pengumpulan data. Basis kategori dibagi atas pelaku-pelaku yang terlibat dalam aktifitas Warung Burjo (bubur kacang ijo). Pengkategorian tersebut menghasilkan tiga kelompok besar sumber data primer: (1) pemilik pelayan, dan penyaji di Warung Burjo, (2) konsumen Sunda, (3) konsumen

non-Sunda. Keseluruhan pembagian tersebut dengan tujuan agar alokasi-alokasi subjektifitas dan intersubjektifitas sumber data dapat terkelompokan.

Kategori pertama, segala gelar aktifitas di Warung Burjo tentunya memiliki lingkup pemaknaan dari segala kegiatannya. Setiap aktifitas memiliki cara dan keunikan dari metoda pelaksanaannya. Tentunya metoda pelaksanaan ini dilakukan atas dasar pilihan-pilihan kultural dan wacana yang tersedia. Pilihan-pilihan tersebut dibangun berdasarkan persepsi, preferensi, dan kebiasaan yang ditentukan secara mandiri oleh yang melakukan. Bila memang konteksnya adalah pengelolaan tempat makan, maka menjadi sangat nyata melihat kuasa penentuan pilihan preferensi terletak pada pemilik Warung Burjo. Pengelola dan penyaji Warung berposisi sebagai subordinasi dari pemilik, dan kelompok ini patuh dan menyesuaikan diri terhadap ketentuan yang berlaku. Namun secara keseluruhan, terdapat pilihan-pilihan dan preferensi yang dipilih. Sangat penting untuk melihat apa yang menjadi dasar pertimbangan dari penentuan-penentuan pilihan tersebut. Bila penentuan tersebut berdasarkan kesengajaan, maka penting melihat alasan kesengajaannya. Dan bila penentuan didasarkan atas ketidak-sengajaan, maka menjadi peting untuk melihat bagaimana habituasi dari prilaku yang menghasilkan jendela realita pada pelayanan di Warung Burjo dilakukan. Penelurusan ini akan merujuk kepada originalitas basis-basis perbuatan yang terjadi.

Pasca identifikasi maksud (adanya kesengajaan atau ketidaksengajaan), kontekstualisasi budaya adalah rujukan penting selanjutnya. Adanya rujukan prilaku aktifitas pelayanan di Warung Burjo yang dibasiskan berdasarkan preferensi dan habituasi kultural adalah aktifitas eksplanasi selanjutnya. Budaya Sunda secara empirical observasi menjadi awal atau titik untuk menjelaskan fenomena identitas prilaku di Warung Burjo. Sejauh apa hubungan antara para pemilik dan pengelola dengan budaya Sunda secara langsung atau tidak langsung harus dapat terkesplanasikan. (1) Hubungan langsung antara prilaku pelayanan dengan budaya dapat teridentifikasikan melalui asal-muasal pelaku, rujukan perkembangan budaya hidup pelaku, dan sebagainya. (2) Hubungan tidak

langsung antara prilaku pelayanan dengan budaya dapat teridentifikasikan melalui sejauh mana adanya proses pengenalan dan pembiasaan untuk melakukan aktifitas dalam budaya Sunda oleh para pelaku pelayanan di Warung Burjo. Metoda wawancara dapat menyuguhkan bukti-bukti verbal yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sehingga pada akhir ekplorasi wawancara yang dilakukan, dapat diukur parameter kedekatan antara preferensi budaya dengan prilaku pelayanan yang dilakukan secara riil.

Dalam segala aktifitas, prilaku manusia selalu bersarat akan simbol-simbol yang dikonstruksikan. Hal tersebut adalah jembatan yang menghubungkan komunikasi antara encoder dan decoder dalam aktifitas komunikasi. Simbol-simbol tersebut mengejawantahkan apa yang menjadi maksud dan identitas dari para pelaku. Akibatnya, terpaparkan peta budaya secara virtual atas reaksi dan respon. Ketersambungan komunikasi yang dilakukan dalam ruang simbol budaya khusus menentukan seberapa kental pemahaman dan distribusi simbol budaya tersebut dilakukan. Reaksi yang positif serta adanya proses konfirmasi atau pemahaman atas maksud menjelaskan bahwa memang identitas budaya sudah dikenali dengan pemahaman yang homogen (dalam konteks decoder yang sejenis dengan encoder simbol). Reaksi yang positif dapat pula terjadi dalam konteks decoder yang tidak satu rumpun budaya dengan encoder, hal tersebut dapat terjadi ketika decoder memiliki kemampuan untuk mendecoding simbol-simbol budaya dan memberikan respon balik yang sepadan dalam kesatuan simbol budaya. Sedangkan, reaksi yang negatif yang diberikan oleh decoder yang bukan dalam rumpun budaya yang sama akan menjelaskan kebsahan penggunaan budaya yang memang berbasiskan simbol-simbol budaya identitik dari encoder. Visualisasi simbol budaya tidak akan berhenti eksplorasinya pada titik aktitfitas oral, namun juga akan menjamah pemetaan aktifitas-aktifitas non oral; misalnya preferensi warna, letak, dudukan, gaya, dan seterusnya. Pengumpulan data-data primer yang berjenis demikian dapat dikapitalkan melalui metode observasi.

Kategori kedua, konsumen Warung Burjo yang memiliki latar belakang budaya Sunda tentunya diletakkan dalam posisi decoder yang memiliki kesamaan habituasi budaya dengan encoder simbol dan prilaku. Kelompok konsumen ini tentunya memiliki cerita verivikasinya masing-masing. Cerita-cerita tersebut terpetakan melalui penelurusan virtual dalam aktifitas yang dilakukan selama berada di Warung Burjo. Proses konfirmasi dan verifikasi penggunaan identitas budaya yang khusus selama aktifitas pelayanan dengan konsumen berlangsung akan tampil melalui respon-respon positif yang wujud ketika simbol-simbol serta prilaku budaya terdistribusikan. Perilaku postif ini memungkinkan untuk membuka jendela-jendela komunikasi eksploratif yang mendalam antara pihak Warung Burjo dengan konsumen Sunda. Tentunya hal tersebut dilakukan dalam aktifitas atau prilaku yang berbasiskan simbol dan preferensi budaya pilihan (Sunda). Input data yang demikian dapat diperoleh melalui aktifitas observasi yang dilakukan peneliti melihat proses dialog yang berlangsung antara pihak Warung Burjo dengan konsumen Sunda. Pasca observasi di Warung Burjo, menjadi penting untuk melihat bagaimana tanggapan konsumen Sunda menanggapi kejadian yang terjadi di Warung Burjo. Narasi yang dilakukan oleh konsumen Sunda akan menceritakan secara menyeluruh tingkat-tingkat kenyamanan dalam konektifitas komunikasi dan interaksi budaya yang terbangun. Verifikasi secara tersurat akan ditemukan melelui proses wawancara yang mencoba menarik kesimpulan atas proses homogentitas budaya yang berlangsung. Sehingga parameter ekploitasi identitas budaya dalam ruang pelaku homogen dapat diceritakan.

Kategori ketiga, konsumen Warung Burjo yang memiliki latar belakang budaya non-Sunda tentunya diletakkan dalam posisi decoder yang memiliki perbedaan habituasi budaya dengan encoder simbol dan prilaku. Kelompok ini memiliki pola verifikasi yang bersifat negasi dibandingkan dengan konsumen Sunda. Sama dengan konsumen Sunda, proses verifikasi terpetakan melalui penelurusan virtual dalam aktifitas yang dilakukan selama berada di Warung Burjo. Proses konfirmasi dan verifikasi penggunaan identitas budaya yang khusus selama aktifitas pelayanan dengan konsumen berlangsung akan tampil melalui respon-respon

(kecendurangan) negatif yang wujud ketika simbol-simbol serta prilaku budaya terdistribusikan. Perilaku (kecenderungan) negatif ini kemungkinan menghalangi untuk terbukanya jendela-jendela komunikasi eksploratif yang mendalam antara pihak Warung Burjo dengan konsumen non-Sunda. Tentunya hal tersebut dilakukan dalam aktifitas atau prilaku yang berbasiskan simbol dan preferensi budaya pilihan (Sunda). Input data yang demikian dapat diperoleh melalui aktifitas observasi yang dilakukan peneliti melihat proses dialog yang berlangsung antara pihak Warung Burjo dengan konsumen non-Sunda. Pasca observasi di Warung Burjo, menjadi penting untuk melihat bagaimana tanggapan konsumen non-Sunda menanggapi kejadian yang terjadi di Warung Burjo. Narasi yang dilakukan oleh konsumen non-Sunda akan menceritakan secara menyeluruh tingkat-tingkat (kecenderungan) ketidak-nyamanan dalam konektifitas komunikasi dan interaksi budaya yang terbangun. Verifikasi secara tersurat akan ditemukan melelui proses wawancara yang mencoba menarik kesimpulan atas proses heterogenitas budaya yang berlangsung. Sehingga parameter parsialisasi identitas budaya dalam ruang pelaku heterogen dapat diceritakan.

Sosialisasi Budaya dalam Semiotika

Di dalam melihat apa yang ada di dalam burjo untuk memunculkan kebudayaannya, kita bisa melihat dari aktivitas maupun bentuk dari burjo sendiri, dimana di dalamnya terdapat banyak hal hal yang bisa kita lihat, dan semua itu tercemin dalam kehidupan sehari hari dalam memunculkan identitasnya di lokasi yang bukan daerah asalnya. Dalam hal ini, kami melihat sosialisasi budaya Sunda yang dilakukan warung burjo Palm Kuning di Yogyakarta. Sekilas, sosialisasi budaya bisa dilakukan dan dirasakan secara secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berarti secara panca indera hal tersebut bisa dirasakan dari penggunaan bahasa, pilihan nama, logat/gaya bicara, rasa masakan, maupun penggunaan aksesoris ataupun penataan tempat yang jelas-jelas mengadopsi kekhasan dari daerah asal burjo, yaitu Kuningan, Jawa Barat. Adapun secara tidak langsung, ini bisa didapatkan dengan mengamati secara seksama kesamaan antara warung burjo satu (dalam

hal ini Palm Kuning) dengan warung-warung burjo yang lain, misalnya dalam hal warna latar dominan, corak spanduk/atribut, maupun variasi menu masakan yang cenderung serupa. Keduanya, baik langsung maupun tidak langsung merupakan hal yang disengaja sebagai bentuk sosialisasi budaya Sunda.

Esensi dari sosialisasi budaya Sunda adalah aspek semiotika atau simbolisasi, yang menekankan pada simbol-simbol atau tanda yang menjadi ciri khas kebudayaan tertentu. Simbol tersebut dapat berupa pemakaian kata-kata dan bahasa, pilihan warna tekstur dan label tertentu yang merujuk pada suatu identitas atau kebudayaan. Dalam hal warung burjo yang notabene berasal dari Kuningan, Jawa Barat, diasumsikan setiap penataan warung burjo mulai dari penyajian menu, setting tempat, maupun cara penyajian termasuk pola interaksi antara penjual dengan pembeli sedikit banyak akan dipengaruhi oleh norma budaya daerah Kuningan, yaitu budaya Sunda. Untuk memudahkan dalam menemukan hal tersebut, maka dalam studi kami di warung burjo Palm Kuning ini kami mencoba melihat dari beberapa sudut pandang, yaitu dari sisi penjual burjo, pengelolaan Palm Kuning yang kami anggap sebagai simbolisasi perilaku, serta dari bentuk fisik dari warung burjo tersebut yang kami anggap sebagai simbolisasi fisik.

Simbolisasi perilaku mulai sisi penjual, kami dapati bahwa warung burjo (Palm Kuning) sangat menjaga identitas Sundanya dalam berinteraksi, baik antara penjual dengan pemilik, sesama penjual, maupun antara penjual dengan konsumen. Sebagai contoh kita bisa melihat sebuah kegiatan yang di lakukan seorang penjual dalam melayani seorang pembeli dalam proses jual beli. Dimana si penjual yang berada di warung Palm kuning tersebut dengan sengaja menyajikan air putih dengan gratis kepada para pelanggan yang membeli makan di warung tersebut. Perilaku yang di lakukan oleh penjual kepada pembeli di warung burjo palem kuning tidak banyak di lakukan oleh warung warung lainnya, sehingga ini perilaku ini yang nampak jelas di warung tersebut. Hal lain yang terlihat jelas adalah penggunaan bahasa Sunda. Dengan berinteraksi menggunakan bahasa asal daerah mereka sangat membantu mereka untuk lebih cepat

akrab sebagai sesama pekerja maupun sedikit banyak mengurangi kerinduan mereka terhadap kampung halaman

Dari sisi pengelolaan warung burjo Palm Kuning, hal yang paling kasat mata dan menarik perhatian tentu saja penggunaan nama Palm Kuning itu sendiri. Nama yang digunakan untuk menamakan warung burjo sangatlah jelas mengidentifikasikan kebudayaan burjo yang ada, seperti halnya warung burjo Palm Kuning. Dari nama tersebut sudah terlihat bahwa warung tersebut berasal dari kuningan jadi pemilik burjo menggunakan nama tersebut untuk menandakan bahwa kebudayaan burjo berasal dari Kuningan Jawa Barat. Lebih lengkapnya, Bapak Doni selaku pemilik menuturkan, pemilihan nama warung burjonya didasarkan pada dua identitas kedaerahan: Palembang dan Kuningan. Kemudian agar lebih menarik perhatian diringkas menjadi Palm Kuning. Palembang adalah asal daerah ibu beliau, sementara Kuningan tentu saja tempat dimana beliau dibesarkan. Penggunaan dua identitas secara bersamaan dalam penamaan warung burjo tersebut menunjukkan dua hal: penghargaan terhadap orangtua pemilik (Palembang) dan kecintaan terhadap daerah asal dari pemilik sekaligus asal muasala dari burjo itu sendiri yaitu Kuningan (Doni, pemilik Burjo Palm Kuning Yogyakarta 2010, wawancara, 5 Desember).

Hal lain yang bisa dirasakan berkaitan dengan pengelolaan warung burjo Palm Kuning adalah corak menu dan rasa masakan. Menu yang disajikan di burjo Palm Kuning beberapa diantaranya sangat khas Sunda, seperti menu mie dokdok, mie tektek, dan sebagainya. Bila dicermati secara lebih seksama, rasa masakan pun terkesan agak berbeda dari biasanya. Ternyata, hal tersebut disebabkan kebijakan pemilik burjo Palm Kuning untuk mempertahankan cita rasa khas daerah asalnya, yaitu Kuningan. Cita rasa yang dimaksud di sini terutama dalam hal takaran bumbu yang digunakan disesuaikan dengan selera atau kebiasaan dari pemilik Palm Kuning, yaitu Bapak Doni yang memang berasal dari Kuningan. Dari makanan yang dihidangkan jelas terlihat, bahwa burjo tersebut berasal dari kuningan dan memang hampir semua pedagang

burjo berasal dari kuningan. Maka dari situ kita bisa melihat makanan yang di jual di burjo menandakan kekhasan kebudayaan Sunda.

Simbolisasi perilaku juga bisa nampak dari penggunaan bahasa lisan dan bangunan burjo. Secara bahasa, penjual burjo akan menawarkan kepada pembeli dengan bahasa Indonesia tetapi berlogat sangat Kuningan (Sunda), salah satu cirinya adalah dengan sering menggunakan kata "a" untuk menyapa pembeli. Efek dari hal tersebut adalah, secara tidak sadar pembeli secara tidak sadar akan membalas dengan kata "a" pula dalam memesan, seperti contoh seorang pembeli yang berkata, "pesan burjonya satu a" atau "jadinya habis berapa a?". Sehingga, dari situ kebudayaan Sunda telah masuk dan diserap oleh pembeli.

Berkaitan dengan simbolisasi fisik dari warung burjo Palm Kuning, secara kasat mata kami dapati tata letak ruang burjo dibuat senyaman mungkin untuk makan serta untuk nongkrong konsumen, mengingat yang membeli ke warung burjo berasal dari berbagai kalangan. Hal lain yang lebih mencolok adalah interior ruangan yang didominasi cat warna kuning. Dan berdasarkan pengamatan kami, tidak hanya warung burjo Palm Kuning saja yang menggunakan warna dominan kuning. Ternyata kesamaan warna kuning antara Palm Kuning dengan warung-warung burjo lainnya terjadi secara disengaja dibawah komando dari Pedagang Indomie Rebus (PIR). Dan setelah kami konfirmasikan hal tersebut kepada Bapak Madi selaku wakil coordinator PIR wilayah Yogyakarta, memang benar bahwa PIR lah yang menetapkan kuning sebagai warna dominan untuk setiap warung burjo. Alasannya, untuk menunjukkan identitas burjo yang memang berasal dari daerah Kuningan, Jawa Barat. Selain itu, kuning dalam tradisi Sunda berarti kesejahteraan, kemakmuran, dan makna yang sejenis (Madi, wakil koordinator Pedagang Indomie Rebus Yogyakarta 2010, wawancara, 16 Desember).

Dengan itu, maka sangat relevan jika kuning dijadikan warna pokok bagi warung burjo. Selain cat ruangan, corak spanduk juga didominasi warna kuning dengan tulisan merek indomie serta logo PIR selain nama burjo tentunya.

Selain itu, simbolisasi bangunan burjo dapat dilihat dari ukurannya yang relative kecil dan seting tempat yang boleh dibilang biasa saja. Akan tetapi menu yang disajikan di Palm Kuning cukup variatif, tidak hanya menjual bubur kacang hijau atau variasi masakan dari berbahan mie instan (merek Indomie), tetapi juga aneka nasi lauk, nasi goring, gorengan, dan beberapa lainnya serta aneka minuman. Ini menunjukkan adanya simbolisasi berupa kesederhanaan dalam papan. Ringkasnya, warung burjo Palm Kuning berusaha menunjukkan kesan sederhana bagi para konsumennya.

Jadi dari banyak hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kebudayaan Sunda yang muncul di Yogyakarta salah satunya diimplementasikan dalam wujud warung-warung burjo. Warung burjo, dan Palm Kuning adalah salah satu diantaranya, merupakan sebuah fakta yang muncul, yang di dalamnya banyak terdapat unsur kebudayaan yang dibawa dari daerah mereka berasal. Itu semua bisa diidentifikasi dari pengelolaan warungnya, menu makanannya, maupun dari pedagang warung burjo itu sendiri.

Dimensi Politik Identitas

Dimensi politik identitas digali melalui perasaan orang/ pelanggan yang berinteraksi dengan pedagang warung burjo. Perasaan politik identitas bisa ditimbulkan dari dua sisi yaitu konsumen dan pihak penjual burjo, di sisi konsumen pengekangan terhadap poltik identitias adalah konsumen ikut menggunakan kata “A” terhadap para penjual burjo. Ketika konsumen menggunakan bahasa lain selain Sunda konsumen merasa segan sehingga mereka terpakasa menggunakan kata-kata dari bahasa Sunda yang sesuai dengan apa yang digunakan para penjual burjo.

Beberapa informan yang sekaligus sebagai pelanggan burjo secara umum mengatakan tidak ada masalah ketika datang ke burjo dan menadapati adanya sosialisasi budaya. Salah satu informan bernama Yophie asal Medan (nonSunda) burjo mengatakan bahwa burjo memang memiliki keunikan yaitu melalui percakapan para penjualnya yaitu bahasa

Sunda, bahasa tersebut sering digunakan baik itu terhadap para konsumen, maupun diantara para penjual, sehingga keunikan tersebut mempengaruhi dirinya yaitu ikut menggunakan kata-kata Sunda seperti penggunaan kata "A" terhadap para penjual burjo, akan tetapi informan ini berreaksi untuk mengabaikan identitas Sunda tersebut karena menanggap bahwasanya hal tersebut adalah suatu hal yang wajar karena hal tersebut sudah menjadi percakapan para penjual yang merupakan orang Sunda (Yophie, mahasiswa Jurusan Teknik Industri UGM 2010, wawancara, 13 Desember).

Demikian halnya dengan penuturan informan lain bernama Aldila Armitalia asal Bekasi (nonSunda) burjo memiliki keunikan di makanannya terutama di hal rasa dimanana rasanya yang cenderung gurih dan kurang asin. Informan ini juga menanggap orang Sunda sangat menghindari gula berbeda dengan orang jawa yang sangat menyukai gula, keunikan tersebut mempengaruhi sebatas adanya identitas Sunda yang berbeda dengan indentitas pribadinya, dengan keunikan tersebut informan ini bereaksi dengan cara mengabaikan keunikan tersebut karena hal tersebut merupakan hal-hal yang biasa saja Aldila Armitalia, Jurusan mahasiswa Hubungan Internasional UGM 2010, wawancara, 13 Desember). Informan lain seperti seperti Ratna Murty asal Jakarta (nonSunda) juga merasakan adanya keunikan di burjo (Ratna Murty, mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional UGM 2010, wawancara, 11 Desember). Kemudian juga informan lain bernama Alim asal tanggerang (nonSunda), dia merasakan adanya keunikan diburjo yaitu borjo sangat indentik sekali dengan Sunda, keunikan tersebut mempengaruhi terhadap ingatnya informan terhadap Sunda (karena informan bertempat tinggal di daerah jawa barat) karena menunya yang identik dengan menu-menu khas Sunda seperti nasi telor, nasi sarden, indomie, gorengan dan lain sebagainya yang membuat informan merasa berada di daerah Sunda, dan dengan keunikan tersebut infoman ini berinisiatif untuk mengobrol dengan para penjual burjo tersebut untuk mengetahui lebih dalam tentang Sunda, dan keunikan tersebut terutama nasi telur telah membuat informan ini ketagihan untuk menyantap telur, dan informan ini beraksi untuk memahami keunikan tersebut karena menganggap hal tersebut merupakan

sebuah hal yang sangat unik (M. Nadzir Alimuddin, mahasiswa Jurusan Sosiologi UGM 2010, wawancara, 13 Desember).

Berdasarkan penjelasan dari para infoman tersebut kelompok kami melihat bahwasanya ada sosialisasi budaya Sunda yang cukup kuat dibawa oleh para penjual burjo baik itu dari cara berbicara, menu masakan dan lain sebagainya. Dengan kata lain terjadi transfer budaya Sunda dari para penjual burjo terhadap para konsumen, dan konsumenpun berupaya untuk meresponsya dengan cara penggunaan kata-kata Sunda terhadap para penjual burjo maupun dengan berinisiatif untuk mengobrol dengan para penjual burjo untuk menayakan keSundaan mereka. Dimensi poltik identitas muncul dari konsumen ketika mereka merasa segan dan tetarik untuk mengikuti kebudayaan Sunda yang disosialisasikan tersebut. Salah satunya dengan penggunaan bahasa Sunda dimana konsumen digiring untuk menggunakan bahasa Sunda dengan para penjual burjo.

Dimensi politik identitas yang dialami oleh konsumen tidak hanya bersifat sukarela seperti contoh penggunaan bahasa diatas. Sisi politik identitas dari konsumen juga bisa dimunculkan oleh faktor-faktor lain yang kami sebut sebagai faktor struktural.Faktor-faktor struktural ini merupakan faktor lain yang mendorong orang untuk selalu berinteraksi dengan budaya Sunda dan dipaksa menerima adanya dimensi politik identitas, faktor dapat disebut sebagai belenggu atas orang yang mengikat mereka untuk selalu menerima sosialisasi budaya dan identitas Sunda melalui burjo. Faktor struktural dari temuan penelitian ini bisa berupa faktor sosial dan faktor ekonomi. kedua faktor tersebut menjadi lingkaran yang memaksa orang untuk selalu menerima identitas dan budaya Sunda.

Penggalian faktor struktural dapat diperoleh juga melalui informan yang biasa pergi ke burjo dan berinteraksi secara langsung dengan budaya Sunda yang disosialisasikan. Faktor-faktor struktural diturunkan menjadi beberapa pertanyaan penting seperti: seberapa sering Anda pergi ke burjo?apa motivasi Anda ke burjo?apa saja yang Anda lakukan ketika di burjo?apa faktor yang mendorong Anda pergi ke burjo, terbawa teman (alasan sosial)? Atau karena alasan ekonomi (harga murah)?Bagaimana

faktor tersebut mempengaruhi Anda? Bagaimana reaksi anda terhadap pengaruh tersebut (sosial/ekonomi)?Apakah Anda merasakan keunikan di burjo? Apa keunikannya?Bagaimana Anda respons Anda terhadap keunikan tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengarahkan kita akan timbulnya dua faktor tadi yaitu faktor ekonomi dan sosial. Faktor ekonomi berkaitan dengan masalah harga yang ditawarkan melalui burjo. Faktor ini menganggap bahwa orang selalu dipaksa datang ke burjo dengan dorongan bahwa harga murah dan bisa menghemat keuangan pembeli. Hal itu secara tidak langsung memaksa orang untuk selalu datang dan berinteraksi dengan budaya Sunda dan terpaksa menyerapnya. Dari tiga informan yang dimintai keterangan seeprti Sharasto Nur Utomo mahasiswa JPP UGM mengatakan bahwa alasan harga juga menjadi pertimbangannya untuk selalu datang ke burjo. Selain itu, dia selalu datang ke burjo karena alasan dekat dengan rumah kos sehingga tidak perlu biaya transportasi tambahan ataupun karena ingin mendapatkan informasi dari koran yang tersedia secara gratis. Semakin seringnya dia pergi ke burjo, maka budaya Sunda lambat laun terserap setidaknya melalui bahasa yang digunakan ketika berinteraksi dengan penjual (Sharasto Nur Utomo, mahasiswa Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM 2010, wawancara, 3 Desember).

Selain itu dari aspek sosial, orang selalu dipaksa datang ke burjo dan berinteraksi dengan sosialisasi budaya dan politik identitas yang ditampilkan karena faktor hubungan sosial. faktor sosial bisa berarti adanya ajakan teman untuk selalu pergi ke burjo. Motivasi itulah yang selalu mendorong informan lain seperti Nandy Rinaldy NS dan M Dwiki Prastianto (keduanya mahasiswa JPP UGM) untuk selalu datang ke burjo. Frekuensi Nandy untuk datang ke burjo bahkan mencapai 3 kali sehari dengan lama kira-kira 30 menit sampai satu jam. Faktor sosial yang mendorong Nandy untuk selalu datang ke burjo adalah ajakan teman orang Sunda yang kadangkala bersifat memaksa. Dengan demikian, informan ini semakin juga terpaksa menyerap budaya Sunda setidaknya melalui bahasa pergaulan sederhana. Sedangkan informan lain, M Dwiki P atau

akrab di sapa Diko mengaku bahwa pergi ke burjo dengan intensitas yang kondisional tergantung dari ajakan teman. Meskipun datang seringakali dengan ajakan teman, dia selalu enjoy ketika datang ke burjo karena suasananya yang lekat dengan budaya Sunda sesuai dengan seleranya (Nandy Rinaldy N.S., mahasiswa Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM, wawancara, 3 Desember).

Dari 3 orang informan dapat disimpulkan bahwa kedatangan mereka ke burjo tidak didorong oleh semata-mata ingin mengetahui sosialisasi budaya dan keberadaan politik identitas yang disajikan di burjo tapi didorong oleh faktor pemaksa yang berasal dari luar. Namun demikian, faktor pemaksa tersebut selalu membelenggu mereka untuk tetap datang ke burjo dan berupaya menyerap sosialisasi budaya yang ditampilkan baik melalui aspek etika, estetika dan semiotika. Maka dari itu, faktor-faktor eksternal atau struktural berupa faktor sosial dan ekonomi ternyata dapat memenjarakan orang untuk selalu datang ke burjo dan secara terpaksa atau sukarela menikmati dan memahami budaya Sunda yang dirampilkan. Dalam hal ini, perilaku mereka terkait politik identitas muncul ketika penerimaan terhadap budaya dan identitas Sunda dilakukan bukan bersifat sukarela tetapi dipaksa oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi tadi.

Dimensi poliitk identitas dari sisi penjual juga dapat dilihat dari para penjual burjo yang melakukan aksi diskriminatif terhadap kebudayaan nonSunda. Hal tersebut dapat dilihat dari dua hal, pertama dari penunjukan karyawan yang selalu menunjuk orang Sunda sebagai karyawan. Obyek penelitian kami yaitu Palm Kuning yang mempunyai sebelas cabang dan puluhan pekerja di seluruh Yogyakarta. Hal yang ditonjolkan sebagai politik identitas itu adalah mereka selalu menunjuk orang Sunda yaitu dari kabupaten Kuningan sebagai karyawan mereka. Palm Kuning dan burjo-burjo lain tidak pernah menunjuk orang dari etnis lain sebagai karyawan mereka. Hal itu dikarenakan karena mereka menanggap dengan menunjuk orang Sunda sebagai karyawan ada rasa kesusuaian dan kenyamanan dalam hal berinterkasi dan berkerja sama dikarenakan sama-sama orang Sunda. Selain itu, menurut pengakuan Bapak Madi, tercatat pernah ada warung dan toko di Yogyakarta yang

berjualan dengan menu sejenis dengan Burjo. Namun warung dan toko tersebut tidak menggunakan warna biru sebagai latarnya. Setelah diselidiki oleh Bapak Madi, ternyata baik toko dan warung tersebut dimiliki oleh orang Jawa. Respons yang dilakukan oleh Bapak Madi selaku koordinator PIR adalah meminta warung dan toko tersebut untuk bergabung kedalam komunitas PIR. Hal ini dilakukan agar lahan bisnis warung burjo dan segala atributnya yang sudah identik dimiliki orang Sunda Kuningan, tidak sembarangan bisa direbut oleh orang non Kuningan.

Dan hal yang kedua adalah penyajian khas makanan yang selalu menyajikan makanan khas Sunda walaupun berada di daerah Yogyakarta. Hal tersebut dapat dilihat dari kesamaan rasa dan jenis makanan yang dijual. Semua jenis makanan yang dijual di burjo semua merupakan makanan khas Sunda seperti gorengan, burjo, telur ½ matang dan lain-lain. Meskipun berada di Yogyakarta yang merupakan mayoritas Jawa mereka tidak maupun merubah rasa maupun jenis makanan dengan alasan apapun. Mereka tetap mempertahankan masakan khas Sunda di daerah jawa. Itulah dimensi politik identitas yang ditonjolkan melalui makanan yang mereka jual.

Penutup: Kesimpulan

Kesimpulan ini bertujuan untuk menampilkan secara garis besar temuan penelititan dilapangan. Secara praksis, burjo memang dijadikan sebagai media untuk melakukan sosialisasi budaya Sunda dengan kerangka 3 dimensi yaitu etika, estetika dan semiotika seperti yang telah dijelaskan diatas. Etika yang termasuk didalamnya segalam macam perilaku penjual burjo yang menggambarkan karakter Sunda, keberadaannya didukung oleh aspek-aspek estetika yan menggambarkan ada sosialisasi budaya melalui keindahan estetik yang ditampilkan disekitar burjo. Selain itu, aspek semiotik juga ditampilkan melalui penggunaan symbol-simbol penafsiran seperti penggunaan bahasa secara tulisan di spanduk burjo dan pemaknaan atas benda-benda estetik lainnya.

Pada tahap akhir, upaya untuk melakukan interpretasi tentang adanya konstruksi politik identitas melalui sosialisasi budaya di burjo dapat dilihat melalui dua pihak yaitu pihak pembeli dan pihak penjual. Dari sisi pembeli, dimensi politik identitas dirasakan ketika mereka didorong untuk selalu menyerap budaya Sunda ketika berinteraksi dengan penjual burjo. Salah satunya adalah penggunaan bahasa Sunda, pembeli dari berbagai latar belakang etnis manapun selalu segan untuk menggunakan bahasa lain selain Sunda ketika berhubungan dengan penjual burjo. Sedangkan disisi penjual, dimensi politik identitas dapat dilihat dari bagaimana mereka melakukan tindakan diskriminatif dalam dua hal yaitu penunjukkan karyawan burjo dan jenis makanan yang dijual. Dalam menunjuk karyawan, penjual burjo selalu menunjuk orang Sunda sebagai karyawan dan belum pernah mengambil karyawan dari etnis lain hal itu. Hal itu dilakukan oleh mereka karena merasa ada kecocokkan dan kenyamanan ketika bekerja dan berinteraksi dengan karyawan dari etnis yang sama yaitu Sunda. Di lain hal penjual burjo juga tetap menyajikan makanan yang merupakan ciri khas Sunda di daerah yang didominasi oleh orang Jawa. Hal itu mengindikasikan bahwa mereka tetap mempromosikan budaya Sunda termasuk menetapkan makanan khas Sunda di burjo tanpa mau merubahnya dengan alasan lain seperti alasan bisnis.

Maka dari itu, sosialisasi budaya yang dilakukan melalui burjo mendorong adanya konstruksi politik identitas baik melalui yang dirasakan pembeli maupun aktivitas yang dilakukan penjual. Meskipun demikian, pengakuan adanya politik identitas dari pembeli seringkali tidak bersifat sukarela melainkan dapat juga dipaksa oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya. Bagaimanapun juga, dimensi politik identitas dapat terbentuk dari sosialisasi budaya yang dilakukan di burjo.

Referensi

Berg, B. L. 2001, *Qualitative research methods for the social sciences*, Allyn and Bacon, Boston, diakses 3 January 2010, <*http://books.google.co.id/books?id=9SRHAAAAMAAJ&dq=Qualitative+Research+Methods+for+the+Social+Sciences&q=225#search_anchor*>

Kurnia, Iwan 2007, *Watak Budaya Sunda*, diakses 19 December 2010 <*http://www.kaSundaan.org/id/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=82*)>

Lot of Essays.com 2010, *Politic identity*, diakses 23 November 2010, <*http://www.lotsofessays.com/viewpaper/1688523.html*>

Madiasworo , Taufan 2001, *Pengaruh kebudayaan Banjar terhadap bentuk rumah panggung masyarakat Banjar di Kampung Melayu Semarang,* tesis M.Art., Universitas Diponegoro, diakses 2 January, 2011, <*http://docs.google.com/gview?url=http://eprints.undip.ac.id/11889/1/2001MTA883.pdf*>

Negron, Jorge 2003, How to write a good case, diakses 4 November 2010, <*http://www.gttp.org/docs/HowToWriteAGoodCase.pdf*>

Organisasi.org 2007, Arti definisi/pengertian budaya kerja dan tujuan/manfaat penerapannya pada lingkungan sekitar, diakses 19 Desember 2010, <*http://organisasi.org/arti-definisi-pengertian-budaya-kerja-dan-tujuan-manfaat-penerapannya-pada-lingkungan-sekitar*>

Sarantakos, S. 1993, *Social research,* Macmillan Education Australia PTY LTD, South Melbourne.

Yin, Robert K. 1984, *Case study research*: *Design and methods*, Sage Publication, California, diakses 4 November 2010, <*http://www.tlu.fbe.unimelb.edu.au/pdfs/crals/Lecture%205-Case%20Study%20Method.pdf*>

__________________ 1989, *Case study research*: *Design and methods*, Sage Publication, California, diakses 4 November 2010, <http://www.scipub.org/fulltext/ajas/ajas5111602-1604.pdf>

Wawancara

Wawancara dengan Doni, pemilik Burjo Palm Kuning Yogyakarta, 5 Desember 2010.

Wawancara dengan Madi, wakil koordinator Pedagang Indomie Rebus Yogyakarta, 16 Desember 2010

Wawancara dengan Yophie, mahasiswa Jurusan Teknik Industri UGM, 13 Desember 2010

Wawancara dengan Aldila Armitalia, mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional UGM, 13 Desember 2010.

Wawancara dengan Ratna Murty, mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional UGM, 11 Desember 2010

Wawancara dengan M Nadzir Alimuddin, mahasiswa Jurusan Sosiologi UGM, 13 Desember 2010

Wawancara dengan Sharasto Nur Utomo, mahasiswa Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM), 3 Desember 2010.

Wawancara dengan Nandy Rinaldy NS, mahasiswa Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM, 3 Desember 2010.

Wawancara dengan M Dwiki Prastianto, mahasiswa Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM, 3 Desember 2010.

Lampiran

Tabel 9.1.. Daftar Pertanyaan untuk Palm Kuning

No.	Pertanyaan	Hubungannya dengan Kerangka Konseptual
1.	Bagaimana proses pendirian burjo Palm Kuning?	Historis: Pengantar
2.	Mengapa mengambil nama Palm Kuning dan apa maknanya?	Semiotika: Simbol Kebudayaan
3.	Bagaimana pihak manajemen mengemas aspek-aspek etika/ perilaku karyawan?	Etika: Pengemasan Perilaku
4.	Bagaimana proses perekrutan karyawan?	Etika: Tata Perilaku
5.	Nilai-nilai apa yang ditanamkan pada karyawan?	Etika: Tata Perilaku
6.	Dari estetika, bagaimana Palm Kuning menggunakan latar warna kuning dan biru dan apa maknanya?	Estetika: Keindahan
7.	Dalam hal menu, bagaimana Palm Kuning mengatur jenis-jenis menu dan mengolah cita rasanya?	Estetika:Kemasan Sajian
8.	Apa motivasi karyawan Palm Kuning menggunakan bahasa Sunda ketika melayani pembeli?	Etika: Tata Bahasa
9.	Mengapa karyawan Palm Kuning didatangkan langsung dari daerah Kuningan (orang Sunda)?	Etika: Tata Adat
10.	Bagaimana Palm Kuning mengatur strategi letak pendirian cabang?	Estetika: Tata Letak

Tabel 9.2.

Daftar Pertanyaan untuk Konsumen dalam Mengidentifikasi Politik Identitas

No.	Pertanyaan	Hubungannya dengan Kerangka Konseptual
1.	Apa daya tarik burjo?	Keterkaitan Antar Manusia: *Who do I belong with*
2.	Apa motivasi Anda pergi ke burjo?	Keterkaitan Antar Manusia: *Who do I belong with*
3.	Apakah Anda merasakan keunikan/ dikotomi burjo dengan warung yang lain?	Keterkaitan Antar Manusia: *Who do I belong with*
4.	Bagaimana Anda memaknai keunikan tersebut?	Aspek Individu: *Who am i*
5.	Bagaimana daya tarik/ keunikan tersebut mempengaruhi Anda?	Aspek Individu: *Who am i* Keterkaitan Antar Manusia: *Who do I belong with*
6. . . .	Bagaimana reaksi Anda terhadap keunikan tersebut? Berupaya menolak? (mengapa) Berupaya memahami dan menyerap? (mengapa) Membiarkannya berlalu? (mengapa)	Aspek Individu: *Who am i* Keterkaitan Antar Manusia: *Who do I belong with*

Referensi

Abimanyu, Anggito 1995, *Pembangunan ekonomi & pemberdayaan rakyat,* BPFE-PAU UGM, Yogyakarta.

Adian , Donny Gahral 2005, *Percik pemikiran kontemporer,* Jalasutra, Yogyakarta.

Afriani, Iyan 2009, *Metode penelitian kualitatif* ,diakses 11 November, 2010, <http://penalaran-unm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/116-metode-penelitian-kualitatif.html>

Anderson, Benedict 2001, *Imagined communities,* INSIST, Yogyakarta.

Azin 2010, *BIS on demand*, diakses 7 Januari, 2011, <http://bosspulsa.com/internet-blcakberry-indosat>

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional 2005, 'Memahami prinsip prinsip tata pemerintahan yang baik', *Modul pelatihan badan perenanaan dan pembangunan nasional*, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Jakarta.

Bakery Magazine 2009, *Demam blackBerry*, diakses 18 December, 2010, <http://www.bakeryindonesiamag.com/2009/11/07/demam-blackberry/>

Berg, B. L. 2001, *Qualitative research methods for the social sciences*, **4th edn,** Allyn and Bacon, Boston diakses 3 Januari, 2011, <*http://books.google.co.id/books?id=9SRHAAAAMAAJ&dq=Qualitative+Research+Methods+for+the+Social+Sciences&q=225#search_anchor*>

Bimantara, Rudi Tresna 2010, *Theorizing new media (digital theory)*, diakses 07 Januari, 2011,<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/09/digital-theory-theorizing-new-media/>

Bola.net 2010, *Suporter PSIM berharap tak ada pembatasan penonton*, diakses 12 Januari, 2010, <http://www.bola.net/indonesia/suporter-psim-berharap-tak-ada-pembatasan-penonton.html>

Bungin, Burhan 2007, *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial,* Kencana Prenama Media Group, Jakarta.

___________2008, *Analisis data penelitian kualitatif,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Calhoun, Craig 1992, *Habermas and the public sphere* , The MIT Press, Cambridge.

Christensen, C.M & M.E. Raynor 2003, *The innovator's solution: Creating sustaining successful growth*, Harvard Business School Press, Boston.

Claessen 1974, *Antropologi politik: Suatu orientasi,* Saptodadi, Yogyakarta.

Creswell , John W. 1998, *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five tradition,* SAGE Publications, London.

Daeng 2010, *Jumlah penduduk yogyakarta turun*, diakses 20 August, 2010, <http://regional.kompas.com/read/2010/08/20/20283111/Jumlah.Penduduk.Yogyakarta.Turun>

Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. (eds.) 2009, *The handbook of qualitative research*, Pustaka Pelajar ,Yogyakarta.

DetikInet 2010, *Bantahan dari Menkominfo tentang penghentian layanan Blackberry di Indonesia*, diakses 28 December, 2010, <http://www.indobb.com/bantahan-dari-menkominfo-tentang-penghentian-layanan-blackberry-di-indonesia/>

Dewi, Erni Sisca 2006, *Metode penelitian*, diakses 9 Januari, 2011, <http://www.damandiri.or.id/file/ernisiscadewiipbab4.pdf>

Dyah, Helga (et.al.) 2006, *Penertiban pedagang kaki lima di sekitar kawasan UGM*, diakses 20 December, 2010, <http://elisa1.ugm.ac.id/files/PSantoso_Isipol/YoK3G4xS/Penertiban%20PKL.doc,>

Effendy, Tadjuddin & Manning, Chris 1996, *Urbanisasi, pengangguran, & sektor informal di kota,* Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Eko, Sutoro 2003, *Transisi demokrasi di Indonesia: Runtuhnya rezim Orde Baru,* APMD Press, Yogyakarta.

Featherstone, Mike 1991, *Consumer culture and postmodernism*, Sage Publications, California.

Firha 2010, *Target pemkot, masalah sampah segera selesai*, diakses 28 February, 2010, <http://www.krjogja.com/news/detail/22104/www.krjgogja.com>

Folgarait, Leonard. 1998, *Mural painting and social revolution in Mexico, 1920-1940: Art of the New Order*, Cambridge University Press, Cambridge.

Fukuyama , Francis 2005, *Memperkuat negara,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Giddens, Anthony 2002, *Sociology,* Blackwell Publisher Ltd, Oxford.

Handphone2000.com 2009, *Apa Yang membuat handphone Blackberry lebih unggul daripada handphone biasa ?*, diakses 07 Januari, 2011 <http://www.handphone2000.com/tips-a-trick/93-apa-yang-membuat-handphone-blackberry-lebih-unggul-daripada-handphone-biasa-.html>

__________2009, *10 ponsel terlaris di dunia*, diakses 07 Januari 2011 <http://www.handphone2000.com/berita/273-nokia-ponsel-terlaris-di-dunia-.html>

Hapsarin, Cin Pratipta 2010, *Politik identitas: Geliat sosial antara aku dan yang lain,* diakses 23 November 2010, <*http://www.scribd.com/doc/29223314/Politik-Identitas-Geliat-Sosial-Antara-Aku-dan-Yang-Lain*>

Harian Joglosemar 2010, *PKL harus masuk paguyuban*, diakses 18 December, 2010, <http://harianjoglosemar.com/berita/pkl-harus-masuk-paguyuban-21304.html?page=72>

Hauser, Gerard 1999, *Vernacular voices: The rhetoric of publics and public spheres,* University of South Carolina, Columbia.

Herlinawati, Ferry 2010, *Skripsi fenomena gaya hidup pengguna BlackBerry Smartphone di kalangan mahasiswa Kota Bandung*, Digital library Perpustakaan Pusat Unikom, Bandung, diakses 11 November, 2010, < http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-ferryherli-22548>

Hidayat 1978. 'Peranan sektor informal dalam perekonomian Indonesia', *Ekonomi Keuangan Indonesia*, vol XXVI, no 4, pp. 415-443.

Hidayat, Syarif (ed) 2006, *Bisnis dan politik di tingkat lokal:Pengusaha, penguasa, dan penyelenggara pemerintah daerah pasca pilkada,* LIPI, Jakarta.

Hobbs, F.D 1979, *Traffic planning and engineering second edition edisi Indonesia.,* diterjemahan oleh Suprapto T.M. dan Waldiyono 1995. *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas Edisi Kedua,* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Ika, Benedicta E, Harlia, Bunga Sapadyna & Seputro, Jati 2010, P*rogram kreativitas mahasiswa gagasan Tertulis: Seni mural sebagai media aspirasi rakyat,* Universitas Brawijaya, Malang, diakses 24 December, 2010 , <http://jatiseputro.blogspot.com/2010/03/seni-mural-sebagai-media-aspirasi.html>

Internet World Stats 2010, *Internet usage in Asia: Internet users and population statistics for 35 countries and regions in Asia*, diakses 07 Januari, 2011, <http://www.internetworldstats.com/stats3.htm>

Joko & Sri 2007, *Pengolahan Lindian (Leachate) TPA Piyungan sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Opak Yogyakarta*, *Jurnal Saint dan Teknologi BPPT*, diakses 28 February, 2011, <http://www.iptek.net.id/ind/?mnu=8&ch=jsti&id=204>

Kadir, Abdul, *Teori post modernisme*, diakses 19 November, 2010, <http://www.scribd.com/doc/ 27492923/5-TEORI-POSTMODERNISME>

Karim , Abdul 2010, *Politik kartel dan politik bossism dalam pilkada*, diakses 14 May, 2010, <http://scriptintermedia.com/view.php?id=4845&jenis=Umum>

Kartamantul 2006, *Kerjasama sarana dan prasarana perkotaan, sejaran dan tujuan, Kartamantul*, diakses 28 November, 2010, <http://www.kartamantul.pemda-diy.go.id/index.php?option=content&task=view&id=32&Itemid=51>

Kedaulatan Rakyat Jogja 2010, *Target pendapatan parkir Dishub Yogyakarta 2010 Menurun*, diakses 11 Januari, 2011, <http://www.krjogja.com/krjogja/news/detail/22921/Target.Pendapatan.Parkir.Dishub.Yogyakarta.2010>

Kellner, Douglas 1995, 'Intellectuals and new technologies', *media, culture, and society*, Vol. 17, Hal. 201-217.

Kementrian Pekerjaan Umum 1994, *Sistem informasi manajemen standar bahan rekonstruksidan rekayasa sipil, tata cara pemilihan lokasi tempat pembuangan akhir sampah,* Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta.

Kirdar, Uner & Silk, Leonard (ed.) 2005, *People: From impoverishment to empowerment,* New York University Press, New York.

Kompas 2010, *Parkir di London Rp 625.000, Jakarta Termurah,* diakses 11 Januari, 2011, <http://nasional.kompas.com/read/2008/07/24/10392125/parkir.di.london.rp.625.000.jakarta.termurah>

Koentjaraningrat 1985, *Antropologi sosial,* Dian Rakyat, Jakarta.

KPUD Provinsi DIY 2009, *Daftar terpilih anggota DPRD Pemilu 2009,* KPUD Provinsi DIY Yogyakarta, diakses 11 November, 2010, <http://pilpres2009.kpud-diyprov.go.id/calonterpilih.php?ktg=kab&dapel=Kota%20Yogyakarta>

Kurnia, Iwan 2007, *Watak budaya Sunda*, diakses 19 December, 2010, <*http://www.kaSundaan.org/id/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=82*)>

Levitsky, S & G, Helmke 2004, 'Informal institutions and comparative politics', *A Research Agenda.* Perspectives on Politics, vol 2, no. 4, Hal.725-740, diakses 28 November, 2010,<http://www.oecd.org/dataoecd/52/23/37791245.pdf>

Lot of Essays.com 2010, *Politic identity*, diakses 23 November, 2010, <*http://www.lotsofessays.com/viewpaper/1688523.html*>

Lukmantoro, Triyono 2008, *Politik identitas dan demokrasi*, diakses 23 November, 2010, <http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2'1833&Itemid=62>

Lyotard, Jean Francois 1984, *The postmodern condition: A report on knowledge*, vol 10, University of Minnesota Press, Minneapolis.

Mack, Natasha (et al.) 2005, *Qualitative research methods: A data Collector's field guide*, diakses 09 Januari 2010, < http://www.fhi.org/NR/rdonlyres/emgox4xpcoyrysqspsgy5ww6mq7v4e44etd6toiejyxalhbmk5sdnef7fqlr3q6hlwa2ttj5524xbn/datacollectorguideenrh.pdf>

Madiasworo , Taufan 2001, *Pengaruh kebudayaan Banjar terhadap bentuk rumah panggung masyarakat Banjar di Kampung Melayu Semarang,* tesis M.Ars, Universitas Diponegoro, Semarang, diakses 2 Januari 2011, <*http://docs.google.com/gview?url=http://eprints.undip.ac.id/11889/1/2001MTA883.pdf*>

Majelis Umum 1948, *Deklarasi universal hak asasi manusia* , Majelis Umum, Jakarta, diakses 31 Oktober 2010, <http://pusham.uii.ac.id/files.php?type=data&id=33&lang=id>

Mantra, Ida Bagoes 2004, *Filsafat penelitian dan metode penelitian sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Media Indonesia 2010, *Melihat sejarah Irlandia Utara lewat mural,* diakses 31 Oktober, 2010, <http://www.mediaindonesia.com/mediatravelista/index.php/read/2010/05/03/662/2/Melihat-Sejarah-Irlandia-Utara-lewat-Mural>

Migdal, Joel S 1988, *Strong societies and weak states,* Princeton Unversity Press, Princeton, NJ.

Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael 1992, *Analisis data kualitatif*, UI Press, Jakarta.

Mintorahardjo, Sukowaluyo, *Runtuhnya modal sosial*, diakses 11 Januari, 2011, < http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=7892&coid=4&caid=4&gid=2>

Mulayadi 2010, *Pembangunan masyarakat*, diakses 18 December, 2010, <http://www.harianbatampos.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=10150>

Negron, Jorge 2003, *How to write a good case*, diakses 4 November, 2010, <*http://www.gttp.org/docs/HowToWriteAGoodCase.pdf*>

Nurcahyo, Andik 2008, *Metode studi kasus (case study) dalam Penelitian*, diakses 26 February, 2009, <http://islamkuno.com/2008/01/27/metode-studi-kasus-case-study-dalam-penelitian/ >

Nyambungteru.com 2009, *Blackberry paket layanan*, diakses 07 Januari, 2011, < http://www.nyambungterus.com/paket-layanan/blackberry>

Organisasi.org 2007, *Arti definisi/pengertian budaya kerja dan tujuan/manfaat penerapannya pada lingkungan sekitar*, diakses 19 Desember, 2010, <*http://organisasi.org/arti-definisi-pengertian-budaya-kerja-dan-tujuan-manfaat-penerapannya-pada-lingkungan-sekitar*>

Patto, Michael Quinn 1991, *Metode evaluasi kualitatif,* Pustaka Pelajar, Jakarta.

Pawito 2007, *Penelitian komunikasi kualitatif*, Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS), Yogyakarta, diakses 11 November, 2010, <http://books.google.com/books?id=UfM33NzcHJsC&pg=PA35&lpg=PA35&dq=Pawito,+penelitian+komunikasi+kualitatif,2007+Lembaga+Kajian+Islam+dan+Sosial+(LKIS):+Yogyakarta&source=bl&ots=_xKAbH

71Gz&sig=uOdGMpgz3Jj9FqpFKfP7nchuyuA&hl=en&ei=s19lTdzHJoWnrAeG6PIBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false>

Pemerintah Kota Yogyakarta 2009, *Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran*, Pemerintah Kota Yogyakarta, Yogyakarta.

Pemerintah Kota Yogyakarta 2009, *Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran*, Pemerintah Kota Yogyakarta, Yogyakarta.

Perwita & Yudi, Khrisna 2006, *Peran paguyuban pedagang kaki lima sebagai pemadu kepentigan pedagang kaki lima: studi deskriptif peran dan fungsi paguyuban pedagang kaki lima di Surabaya*, Airlangga University Library, Surabaya, diakses 20 Desember, 2010, < http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-s1-2006-perwitakhr-1395&node=378&start=6&PHPSESSID=8133311a73963884396f864c26b0636e,>

Pratikno (ed.) 2001, *Merajut modal sosial untuk perdamaian dan integrasi sosial,* Fisipol UGM, Yogyakarta.

Prawoto , Eko (et.al. 2008), *Kampung sebelah art project,* Jogja Mural Forum, Yogyakarta.

Puspitasari, Chandra 2007, *Relasi tiga aktor dalam pengelolaan parkir di Malioboro: Studi tentang relasi kepentingan antara pemerintah swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan parkir di Malioboro,* tesis S.IP, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Quijano, A.1974. 'The marginal pole of the economy and the marginalized labour force', *Economy and the society,* Vol.3, Hal. 393-428.

Quinn, Paton Michael 2009, *Metode evaluasi kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Rachman, Taufik 2010, *Pengelola parkir diminta gandeng asuransi,* diakses 11 Januari 2011, <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/10/08/01/127788-pengelola-parkir-diminta-gandeng-asuransi>

Rinaldi, Nandy (et.al.) 2010, 'Laporan penelitian gerakan poltik "studi kasus pemenangan calon Sukadarma dalam Pilkada Bantul', *Tugas mata kuliah gerakan politik*, Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta.

Rutz, Werner 1987, *Cities and towns in Indonesia: Their development, current positions, and functions with regard to administration and regional economy*, G. Borntraeger, Berlin.

Salim, Agus 2006, *Teori dan paradigma penelitian sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta.

Sanctyeka 2009, *Panduan pembentukan organisasi kerjasama antar daerah*, diakses 09 Januari 2011, <http://www.docstoc.com/docs/15960466/Panduan-Kerja-Sama-Antar-Daerah>

Sarantakos, S. 1993, *Social research,* Macmillan Education Australia PTY LTD, South Melbourne.

Scribd 2010, *Elit dan sirkulasi elit: Perbandingan Indonesia dan Venezuela* , diakses 18 Desember, 2010, <http://www.scribd.com/doc/22992480/Elit-Dan-Sirkulasi-Elit-Studi-perbandingan-politik>

____________, *Penelitian studi kasus dan teori grounded*, diakses 09 Januari, 2010, <http://www.scribd.com/doc/24668989/Penelitian-Strudi-Kasus-Dan-Teori-Grounded>

Siregar, Syafaruddin 2010, *Pendekatan penelitian pendidikan, diakses 07 Januari, 2010,*

<*http://file.upi.edu/Direktori/E%20-%20FPTK/JUR.%20PEND.%20TEKNIK%20MESIN/195008161979031%20-%20SYAFARUDDIN%20SIREGAR/buku%201/B%20A%20B%20XI.pdf>*

Soehardjo, A.J 2005, *Pendidikam seni dari konsep sampai program,* Fakultas Sastra UNM, Malang.

Soetomo , Greg 2003, *Krisis seni krisis kesadaran,* Kanisius, Yogyakarta.

Strauss , Anselm & Corbin, Juliet 2003, *Dasar-dasar penelitian kualitatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta.

Sugiharto, Bambang 1996, *Postmodernisme: Tantangan bagi filsafat*, Kanisius, Yogyakarta.

Suporter Indonesia.com *2010, Waspada.! Supporter bisa di jadikan ajang politik* , diakses 11 Januari, 2011, <*http://www.supporter-indonesia.com/waspada-supporter-bisa-di-jadikan-ajang-politik.html*>

Surabaya Pos 2010, *Dishub Surabaya siapkan sistem portal di parkir pinggir jalan*, diakses 11 Januari, 2011, <http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=a312469341e1cc12840401298ca22f9d&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c>

Terra 2005, 'Racangan pengembangan TPA Piyungan Yogyakarta', *Kumpulan abstrak tugas akhir mahasiswa tahap sarjana FTSP ITB Tahun 2005*, ITB Central LibraryÃ,Â's Collection, Bandung, diakses 28 February, 2011,<http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptitbpp-gdl-terraprima-24078>

Ulfelder, Jay 2005, 'Contentious collective action and the breakdown of authoritarian regimes', *International Political Science Review,* Vol 26, No. 3, Hal. 311–334.

UPI, 'Media Grafis Mural', *Slide Mural Presentation*, UPI, Jakarta, diakses 31 Oktober, 2010,<http://file.upi.edu/Direktori/A%20%20FIP/JUR.%20KURIKULUM%20DAN%20TEK.%20PENDIDIKAN/197706132001122%20%20LAKSMI%20DEWI/MEDIA%20GRAFIS/MEDIA%20GRAFIS-HSL%20MHSISSWA/Mural/Presentation1.pdf>

Varma, S.P 1982, *Teori politik modern*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Visula Magazine 2009, *Mural merambah kota ,* diakses 31 Oktober2010, < http://www.visualartsmagazine.info/index.php/en/reflection/103-mural-merambah-kota>

Wahono, Didik 2005, *Metode penelitian*, diakses 9 Januari 2011, <http://www.damandiri.or.id/file/didikwahonounairbab4.pdf>

Wicandra , Obed Bima 2009, *Berkomunikasi secara visual melalui mural di Jogjakarta*, diakses 27 Desember, 2010, < http://dgi-indonesia.com/berkomunikasi-secara-visual-melalui-mural-di-jogjakarta/>

Widyadana 2010, *Fenomenologi: Metode penelitian kualitatif*, diakses 11 November, 2010, < http://id.shvoong.com/books/dictionary/1967914-fenomenologi-metode-penelitian-kualitatif/ >

Wirth, Arthur G. 1983, *Productive work—in industry and schools: Becoming persons again*, University Press of America, Lanham, MD.

Wora, Emanuel 1996, *Perenialisme: Kritik atas modernisme dan postmodernisme*, Kanisius, Yogyakarta.

Yin, Robert K. 1984, *Case study research*: *Design and methods*, Sage Publication, California, diakses 4 November 2010, <*http://www.tlu.fbe.unimelb.edu.au/pdfs/crals/Lecture%205-Case%20Study%20Method.pdf*>

___________1989, *Case study research*: *Design and methods*, Sage Publication, California, diakses 4 November 2010, <*http://www.scipub.org/fulltext/ajas/ajas5111602-1604.pdf*>

___________1996, *Studi kasus, desain dan metode,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

___________1997, *Studi kasus : desain dan metode*, 1th edn., PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

___________2002, *Studi kasus desain dan metode,* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

___________2003, *Case study research: Design and method,* Vol 5, Sage Publication London.

___________2006, *Studi kasus desain dan metode*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

PRAKTEK PENELITIAN KUALITATIF:

Pengalaman dari UGM

Buku yang ada di hadapan anda ini adalah kumpulan tugas mahasiswa Jurusan Politik dan Pemerintahan (JPP) Fisipol UGM pada pada semester lima proses kuliah mereka. Tugas-tugas tersebut dipakai sebagai salah satu penilaian akhir dalam matakuliah Metode Analisa Kualitatif yang diampu oleh Bayu Dardias Kurniadi, MA, M.Pub.Pol bersama Arie Ruhyanto, M.Sc. Dalam matakuliah yang ditempuh dalam 4 bulan ini, mahasiswa dituntut untuk mampu melakukan dua hal, pertama memahami prinsip dan konsep dasar metode penelitian kualitatif dan kedua mampu mengaplikasikan konsep-konsep tersebut ke dalam penelitian yang sebenarnya.

Salah satu hal penting yang harus dicatat dalam pembacaan terhadap buku ini adalah kesadaran bahwa metode penelitian kualitatif tidak hanya dilihat dari bagian di bagian awal tentang metodologi penelitian, tetapi dapat dilacak dari pembacaan terhadap seluruh hasil penelitian. Artinya bagaimana peneliti bertanya, menganalisis dan menuliskan hasil penelitiannya merupakan wujud penelitian kualitatif yang sebenarnya. Hasil pembelajaran penelitian kualitatif itu nampak dalam cara mengorganisasi dan penyusunan bagian-bagian dalam laporan penelitian.

Pada akhirnya, metode penelitian memang tidak dimaksudkan untuk menciptakan sebuah pola yang seragam, tetapi justru memberikan ruang bagi setiap penelitian yang berbeda-beda karakternya.